



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua meluasnya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Kota Semarang. Perkembangan dan dinamika kondisi sosial ekonomi yang ditimbulkan serta adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah menyebabkan perencanaan pembangunan juga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan perlunya penyesuaian terhadap permasalahan dan isu strategis terkini. Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan RKPD Tahun 2021 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas, maka pada tahun 2021 perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2021 sebagai akibat dari belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang memberikan ketidakpastian kondisi sosial dan ekonomi secara nasional maupun regional, yang menyebabkan perlunya penyesuaian pendapatan dan belanja daerah di tahun 2021. Implikasi

yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian pagu indikatif. Selain itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2021 juga perlu dilakukan. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 juga memperhatikan Perda tersebut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

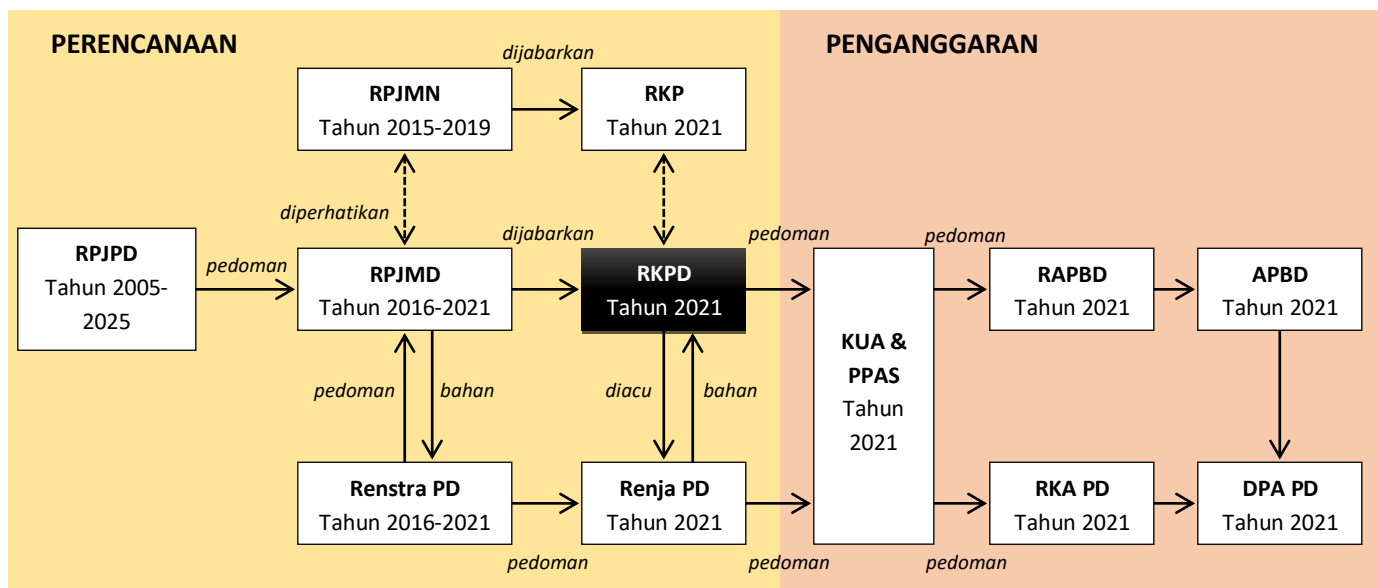
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya;
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 dan juga penyesuaian perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2021

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai upaya memastikan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2021, serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021 yaitu untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian arah kebijakan berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan Triwulan II untuk menjadi pedoman kepada seluruh *stakeholder* pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah di sisa Tahun 2021. Selain itu, penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD-Perubahan Tahun 2021 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang di Tahun 2021;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2021;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kota Semarang 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang terdiri dari: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021**
Memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat penjelasan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 (yoy), antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Semarang yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI PENUTUP**

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Semarang berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

sebelah barat	:	Kabupaten Kendal
sebelah timur	:	Kabupaten Demak
sebelah selatan	:	Kabupaten Semarang
sebelah utara	:	Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Semarang

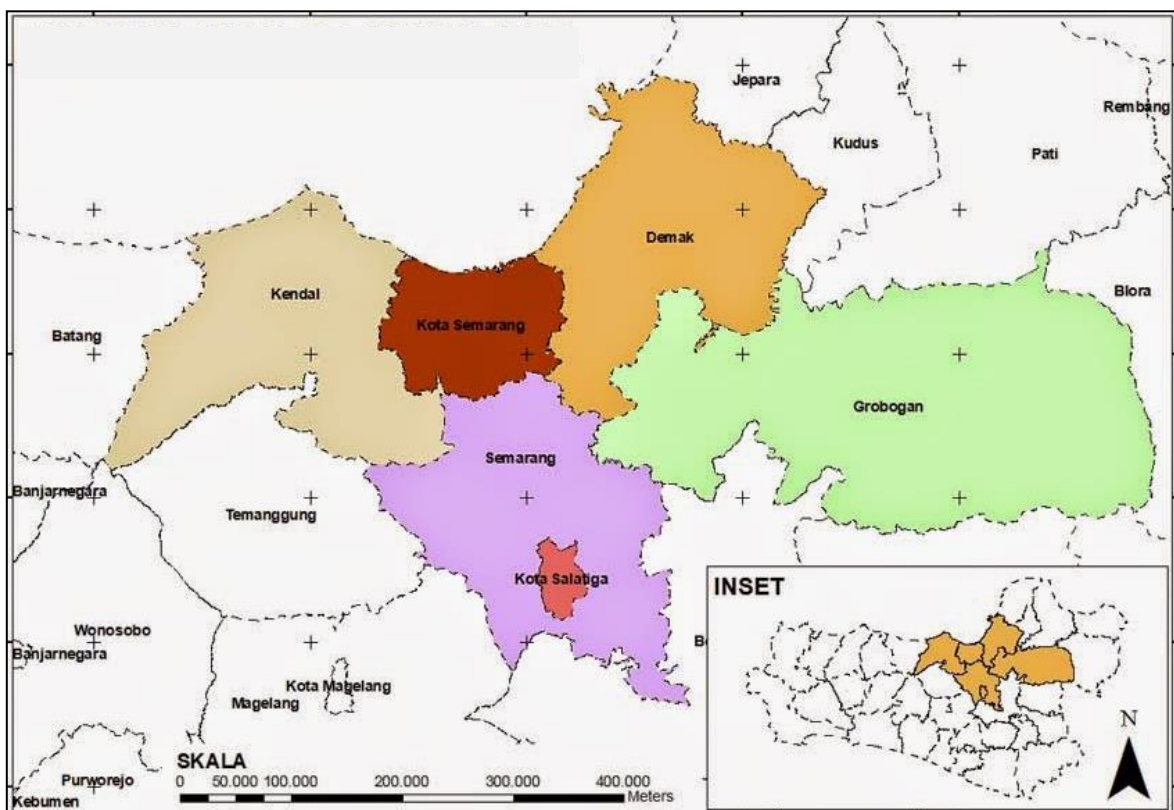
No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km ²)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2019

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1
Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal-Kab. Demak-Kab. Semarang-Kota Semarang-Kota Salatiga-Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan,

dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

c. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 - 348,00 mdpl.

d. Geologi

Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kali Garang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.

Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

e. Hidrologi

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase yaitu:

1. *Sistem Drainase Mangkang* sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. *Sistem Drainase Semarang Barat* terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. *Sistem Drainase Semarang Tengah* terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.
4. *Sistem Drainase Semarang Timur* terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

f. Klimatologi

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan

muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

2.1.1.2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang

Didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

a. Kawasan Lindung

Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup:

- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - o Kawasan Rawan Bencana Rob, disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (*land subsidence*) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.
 - o Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi
 - o Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal
 - o Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah
 - o Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan. Terletak di wilayah yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang

b. Kawasan Budidaya

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup:

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya
- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori

2.1.1.3. Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada pertengahan tahun tahun 2021 berjumlah 1.681.058 jiwa, terdiri dari 832.069 jiwa (49,49%) penduduk laki-laki dan sebanyak 848.989 jiwa (50,51%) penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 yang sebesar 1.685.909 jiwa, sehingga terdapat penurunan sejumlah 4.851 jiwa atau turun sebesar 0,28% yang salah satunya disebabkan kematian akibat pandemi. Dan penurunan jumlah penduduk ini berpengaruh juga pada sex rasio, dimana pada tahun 2021 sebesar 98,01 % menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 98,16%.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 12.220 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.074 jiwa/km². Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan sex rasio per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Pertengahan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km ²)
		LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)			
1	Semarang Tengah	29.264	31.679	60.943	3,63	92,38	9.926
2	Semarang Barat	77.631	79.968	157.599	9,37	97,08	7.249
3	Semarang Utara	61.802	63.550	125.352	7,46	97,25	11.427
4	Semarang Timur	35.314	37.354	72.668	4,32	94,54	9.437
5	Gayamsari	36.579	37.096	73.675	4,38	98,61	11.922
6	Gajah Mungkur	29.138	30.068	59.206	3,52	96,91	6.528
7	Genuk	59.204	58.897	118.101	7,03	100,52	4.312
8	Pedurungan	96.416	97.890	194.306	11,56	98,49	9.378
9	Candisari	39.334	40.583	79.917	4,75	96,92	12.220
10	Banyumanik	69.894	71.435	141.329	8,41	97,84	5.501
11	Gunungpati	47.964	47.922	95.886	5,7	100,09	1.772
12	Tembalang	91.207	91.906	183.113	10,89	99,24	4.143
13	Tugu	17.121	17.012	34.133	2,03	100,64	1.074
14	Ngaliyan	69.979	70.586	140.565	8,36	99,14	3.700
15	Mijen	37.906	37.947	75.853	4,51	99,89	1.318
16	Semarang Selatan	33.316	35.096	68.412	4,07	94,93	11.537
TAHUN 2021 (sms 1)		832.069	848.989	1.681.058	-	98,01	4.498
TAHUN 2020		835.138	850.771	1.685.909	-	98,16	4.511
TAHUN 2019		828.848	845.510	1.674.358	-	98,03	4.480
TAHUN 2018		825.992	841.139	1.667.131	-	98,20	4.461
TAHUN 2017		823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	4.438
TAHUN 2016		818.744	830.218	1.648.962	-	98,62	4.413

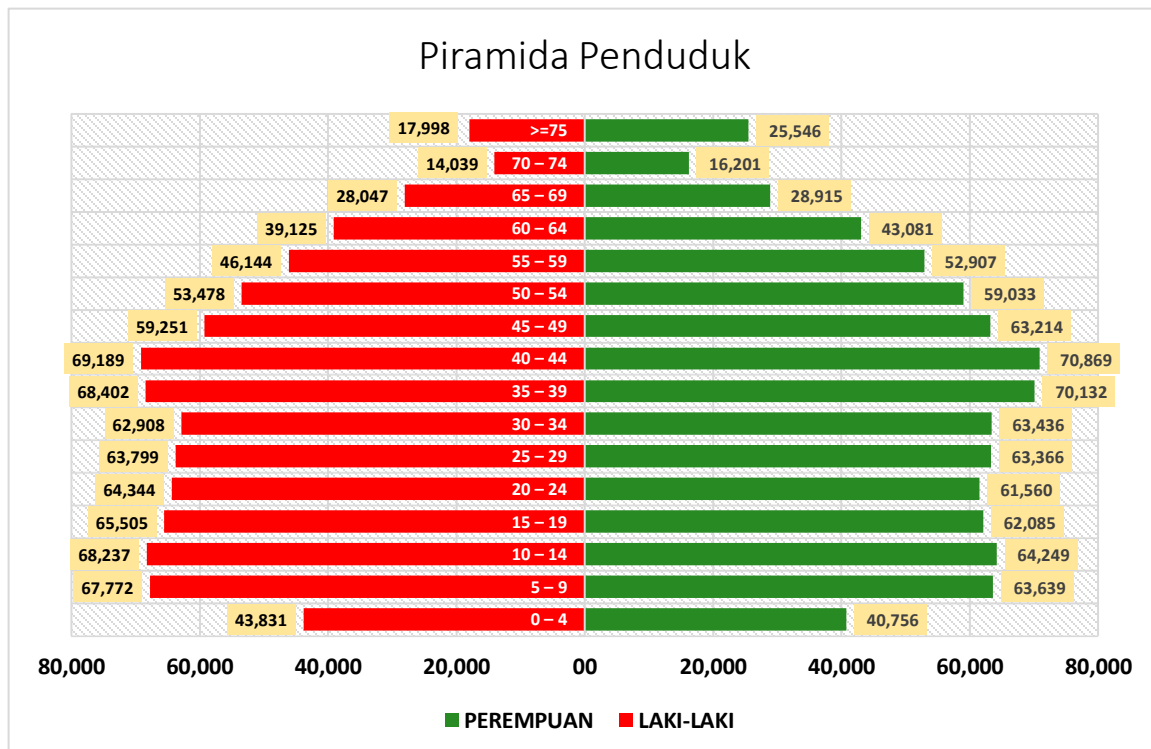
Sumber: Dispendukcapil diolah, 2021

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2021 sejumlah 1.119.622 jiwa (66,60%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 561.436 jiwa (33,40%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependency ratio). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada pertengahan tahun 2021 sebesar 2020 adalah sebesar 50,14 %. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 5.014 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada pertengahan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Pertengahan Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	(%)
0 – 4	43.831	40.756	84.587	5,03%
5 – 9	67.772	63.639	131.411	7,82%
10 – 14	68.237	64.249	132.486	7,88%
15 – 19	65.505	62.085	127.590	7,59%
20 – 24	64.344	61.560	125.904	7,49%
25 – 29	63.799	63.366	127.165	7,56%
30 – 34	62.908	63.436	126.344	7,52%
35 – 39	68.402	70.132	138.534	8,24%
40 – 44	69.189	70.869	140.058	8,33%
45 – 49	59.251	63.214	122.465	7,28%
50 – 54	53.478	59.033	112.511	6,69%
55 – 59	46.144	52.907	99.051	5,89%
60 – 64	39.125	43.081	82.206	4,89%
65 – 69	28.047	28.915	56.962	3,39%
70 – 74	14.039	16.201	30.240	1,80%
>=75	17.998	25.546	43.544	2,59%
Jumlah	832.069	848.989	1.681.058	100 %

Sumber: Dispendukcapil, 2021



Gambar 2.2
Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Pertengahan Tahun 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 26,88%, disusul dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 25,86 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 13,25%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,32%, Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,08 %, Diploma IV/Strata I sebesar 8,75 %, Strata II sebesar 0,88 % dan S3 sebesar 0,05%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan pada Pertengahan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak / belum sekolah	434.649	25,86%
2	Belum tamat SD /sederajat	261.953	15,58%
3	Tamat SD/MI sederajat	101.312	6,03%
4	SLTP/MTs / sederajat	211.290	12,57%
5	SLTA/MA/ sederajat	451.861	26,88%
6	Diploma I / II	5.409	0,32%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	51.693	3,08%
8	Diploma IV/Strata I	147.147	8,75%
9	Strata II	14.865	0,88%
10	Strata III	879	0,05%
J U M L A H		1.681.058	100,00%

Sumber: SIPD, Dispendukcapil (data diolah) 2021

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (29,27%), mengurus rumah tangga (12,78%), wiraswasta (4,77%) dan PNS/TNI/POLRI (2,85%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 27,79% dan pelajar/mahasiswa sebesar 14,63%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pertengahan Tahun 2021

JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
Karyawan Swasta	492.110	29,27%	Mekanik	284	0,12%
Mengurus RumahTangga	214.917	12,78%	Apoteker	289	0,12%
Wiraswasta	80.120	4,77%	Industri	201	0,01%
PNS/TNI/POLRI	47.903	2,85%	Wartawan	183	0,01%
Buruh Tani/Perkebunan	34.705	2,06%	Pengacara	169	0,01%
Buruh Harian Lepas	15.434	0,92%	Konstruksi	136	0,01%
Pensiunan	15.979	0,95%	Konsultan	140	0,01%
Guru	14.144	0,84%	Transportasi	125	0,01%
Pedagang	10.924	0,65%	Arsitek	102	0,01%
Petani/Pekebun/Peternak	9.600	0,57%	Notaris	120	0,01%

JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
Karyawan BUMN	5.788	0,34%	Seniman	111	0,01%
Dosen	3.749	0,22%	Buruh Nelayan/Perikanan	61	0,00%
Dokter	2.821	0,17%	Akuntan	40	0,00%
Perawat	2.642	0,16%	Psikiater/Psikolog	37	0,00%
Nelayan/Perikanan	1.681	0,10%	Pilot	17	0,00%
Perdagangan	1.131	0,07%	Buruh Peternakan	16	0,00%
Karyawan Honorer	1328	0,08%	Peneliti	10	0,00%
Karyawan BUMD	710	0,04%	Lainnya	9.140	0,54%
Bidan	617	0,04%	Belum/Tidak Bekerja	467.120	27,79%
Pelaut	480	0,03%	Pelajar/Mahasiswa	245.974	14,63%

Sumber: *Dispendukcapil, diolah 2021*

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016–2020) mengalami peningkatan dari Rp. 147.049.320 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 189.256.242 Juta pada tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 115.542.560,57 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 137.951.302,07 juta pada tahun 2020. Kontribusi terbesar disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 27,75%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,6%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,69%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut – turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang
Tahun 2016 – 2020

NO	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2016 – 2020 (dalam Juta Rupiah)				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.377.735,96	1.404.226,61	1.492.496,11	1.554.988,92	1.618.514,83
		Kontribusi kategori (%)	0,94	0,88	0,85	0,81	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Juta Rupiah)	269.747,80	280.760,74	292.189,96	342.417,72	359.638,42
		Kontribusi kategori (%)	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	40.899.947,17	44.267.345,24	47.723.226,29	52.553.750,15	54.201.774,02
		Kontribusi kategori (%)	27,81	27,62	27,24	27,46	28,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	158.926,84	183.645,15	199.425,14	211.545,11	214.511,11
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	118.748,19	123.562,33	129.671,52	137.527,90	147.616,51
		Kontribusi kategori (%)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	39.217.005,89	42.604.159,26	47.073.905,67	51.435.483,55	49.338.620,39
		Kontribusi kategori (%)	26,67	26,58	26,87	26,88	26,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	20.458.859,32	22.136.696,98	24.075.888,76	26.068.402,17	25.369.744,42
		Kontribusi	13,91	13,81	13,74	13,62	13,40
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5.703.459,60	6.044.420,04	6.726.749,58	7.557.855,89	4.425.259,11
		Kontribusi kategori (%)	3,88	3,77	3,84	3,95	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5.048.456,00	5.480.082,35	6.032.076,65	6.386.727,80	5.399.816,43
		Kontribusi kategori (%)	3,43	3,42	3,44	3,34	2,85
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	10.318.994,63	11.850.881,04	13.291.170,23	15.015.401,77	18.085.774,14
		Kontribusi kategori (%)	7,02	7,39	7,59	7,85	9,56
			6.594.557,23	7.156.233,30	7.657.051,28	8.038.379,59	8.160.140,91

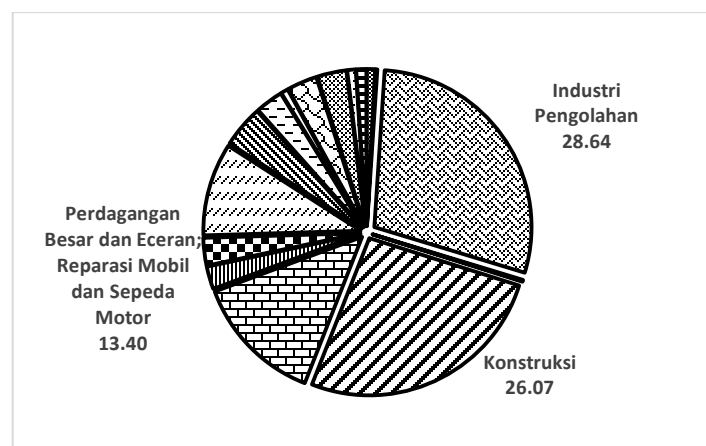
NO	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2016 – 2020 (dalam Juta Rupiah)				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4,48	4,46	4,37	4,20	4,31
		Kontribusi kategori (%)	4.142.867,69	4.611.569,20	5.020.024,37	5.375.785,46	5.395.036,91
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	2,82	2,88	2,86	2,81	2,85
		Kontribusi kategori (%)	944.959,91	1.073.775,25	1.246.818,43	1.407.451,29	1.372.871,10
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	0,64	0,67	0,71	0,74	0,73
		Kontribusi kategori (%)	4.836.826,27	5.268.159,62	5.525.529,45	5.824.863,87	5.841.971,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3,29	3,29	3,15	3,04	3,09
		Kontribusi kategori (%)	4.143.927,48	4.584.482,55	5.091.568,75	5.565.051,86	5.692.550,60
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	2,82	2,86	2,91	2,91	3,01
		Kontribusi kategori (%)	1.151.988,51	1.321.649,63	1.543.778,38	1.579.927,03	1.662.645,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	0,78	0,82	0,88	0,83	0,88
		Kontribusi kategori (%)	1.662.311,27	1.900.382,74	2.101.630,69	2.309.317,03	1.969.756,09
R,S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1,13	1,19	1,20	1,21	1,04
		Kontribusi kategori (%)	1.377.735,96	1.404.226,61	1.492.496,11	1.554.988,92	1.618.514,83
		Jumlah (dalam Juta Rupiah)	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77
	TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2021

*) Data sementara

** Data Sangat Sementara

Grafik. 1. Tiga Sektor PDRB ADHB Terbesar di Kota Semarang Tahun 2020



Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010), perkembangan dari tahun 2016-2020 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.7.
 Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang
 Tahun 2016-2020

NO	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2016 - 2020				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.043.687,42	1.037.036,63	1.068.074,36	1.089.568,62	1.112.416,42
		Kontribusi kategori (%)	0,90	0,84	0,81	0,78	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Juta Rupiah)	172.256,37	159.732,52	146.381,38	169.460,22	173.672,37
		Kontribusi kategori (%)	0,15	0,13	0,11	0,12	0,13
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	29.989.940,02	31.740.254,40	33.198.261,47	35.950.864,49	36.143.142,48
		Kontribusi kategori (%)	25,96	25,75	25,29	25,64	26,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	144.287,72	153.250,03	161.535,48	171.164,61	174.545,29
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	106.996,06	110.513,45	114.494,74	120.682,92	123.384,53
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	30.194.987,34	32.118.682,33	34.109.910,59	35.908.409,94	34.183.828,86
		Kontribusi kategori (%)	26,13	26,05	25,99	25,61	24,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Juta Rupiah)	17.291.740,51	18.264.412,76	19.393.066,60	20.520.786,24	19.669.323,68
		Kontribusi kategori (%)	14,97	14,82	14,77	14,64	14,26
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.191.313,58	4.490.252,35	4.847.426,76	5.338.390,25	3.233.549,39
		Kontribusi kategori (%)	3,63	3,64	3,69	3,81	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.744.878,27	4.025.898,01	4.320.765,67	4.547.720,42	3.876.805,98
		Kontribusi kategori (%)	3,24	3,27	3,29	3,24	2,81
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	11.229.271,09	12.400.830,53	13.921.172,35	15.505.401,77	18.654.022,04
		Kontribusi kategori (%)	9,72	10,06	10,61	11,06	13,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.729.220,91	5.041.604,30	5.204.954,11	5.364.004,67	5.454.457,99
		Kontribusi kategori (%)	4,09	4,09	3,97	3,83	3,95
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.561.449,44	3.866.352,72	4.102.158,48	4.338.390,91	4.325.012,95
		Kontribusi kategori (%)	3,08	3,14	3,13	3,09	3,14
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	706.231,85	775.945,07	859.075,36	940.653,53	897.882,16
		Kontribusi kategori (%)	0,61	0,63	0,65	0,67	0,65
	Administrasi Pemerintahan,	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.597.407,63	3.793.826,09	3.933.818,27	4.087.630,57	4.033.269,74

NO	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2016 - 2020				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
O	Pertahanan dan Jaminan	Kontribusi kategori (%)	3,11	3,08	3,00	2,92	2,92
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	2.704.344,41	2.940.944,59	3.257.655,02	3.368.213,94	3.354.187,94
		Kontribusi kategori (%)	2,34	2,39	2,48	2,40	2,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	818.390,90	922.443,85	1.052.235,24	1.068.683,44	1.094.104,03
		Kontribusi kategori (%)	0,71	0,75	0,80	0,76	0,79
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.316.157,05	1.437.912,28	1.575.376,69	1.719.366,12	1.447.696,22
		Kontribusi kategori (%)	1,14	1,17	1,20	1,23	1,05
TOTAL PDRB ADHK		Juta Rupiah	115.542.560,57	123.279.891,91	131.266.362,57	140.209.392,66	137.951.302,07
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2021 (Data Diolah)

*) Data sementara

** Data Sangat Sementara

Jika dilihat dari kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB, perekonomian Kota Semarang di tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Covid-19. PDRB ADHB masih didominasi oleh sektor-sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar Rp. 124.187.397,24 juta, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berada di urutan ke-dua dengan nilai PDRB sebesar Rp. 79.246.924,95 juta. Kemudian disusul pengeluaran konsumsi pemerintah dengan nilai sebesar Rp. 23.103.383,48 juta.

Tabel 2.8.
PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.451.375,23	69.968.827,06	76.093.195,45	82.992.502,58	79.246.924,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.015.535,87	1.117.470,89	1.254.510,64	1.451.051,92	1.437.726,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.727.198,21	21.913.263,19	23.098.390,42	24.408.317,99	23.103.383,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	105.545.266,65	115.948.771,79	124.034.864,20	134.265.590,40	124.187.397,24
5. Perubahan Inventori	692.008,03	800.114,07	1.277.201,37	1.200.245,61	942.294,74
6. Ekspor Barang dan Jasa	89.233.726,39	95.141.656,47	86.502.034,17	93.457.594,34	87.791.333,41
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	133.615.790,62	144.598.071,44	137.036.994,99	146.410.425,73	127.452.819,00
Produk Domestik Regional Bruto	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77

Sumber : BPS Kota Semarang Data diolah, 2021

Tabel 2.9.

PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.451.375,23	69.968.827,06	76.093.195,45	82.992.502,58	79.246.924,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.015.535,87	1.117.470,89	1.254.510,64	1.451.051,92	1.437.726,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.727.198,21	21.913.263,19	23.098.390,42	24.408.317,99	23.103.383,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	105.545.266,65	115.948.771,79	124.034.864,20	134.265.590,40	124.187.397,24
5. Perubahan Inventori	692.008,03	800.114,07	1.277.201,37	1.200.245,61	942.294,74
6. Ekspor Barang dan Jasa	89.233.726,39	95.141.656,47	86.502.034,17	93.457.594,34	87.791.333,41
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	133.615.790,62	144.598.071,44	137.036.994,99	146.410.425,73	127.452.819,00
Produk Domestik Regional Bruto	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77

Sumber : BPS Kota Semarang Data diolah, 2021

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2020 Impor Barang dan jasa memiliki porsi kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 67,34% atau sebesar Rp 127.452.819.000.000,-

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Tabel 2.10.

Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2016-2020

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	-0,64	2,99	2,01	2,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,31	-7,27	-8,36	15,77	2,49
C	Industri Pengolahan	4,36	5,84	4,59	8,29	0,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,19	6,21	5,41	5,96	1,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,73	3,29	3,60	5,40	2,24

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
F	Konstruksi	6,09	6,37	6,20	5,27	-4,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,62	5,63	6,18	5,82	-4,15
H	Transportasi dan Pergudangan	6,21	7,13	7,95	10,13	-39,43
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,43	7,50	7,32	5,25	-14,75
J	Informasi dan Komunikasi	8,59	10,43	12,26	11,38	20,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,31	6,61	3,24	3,06	1,69
L	Real Estate	7,93	8,56	6,10	5,76	-0,31
M,N	Jasa Perusahaan	8,85	9,87	10,71	9,50	-4,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,46	3,69	3,91	-1,33
P	Jasa Pendidikan	7,71	8,75	10,77	3,39	-0,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,89	12,71	14,07	1,56	2,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,09	9,25	9,56	9,14	-15,80
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		5,89	6,70	6,48	6,81	-1,61

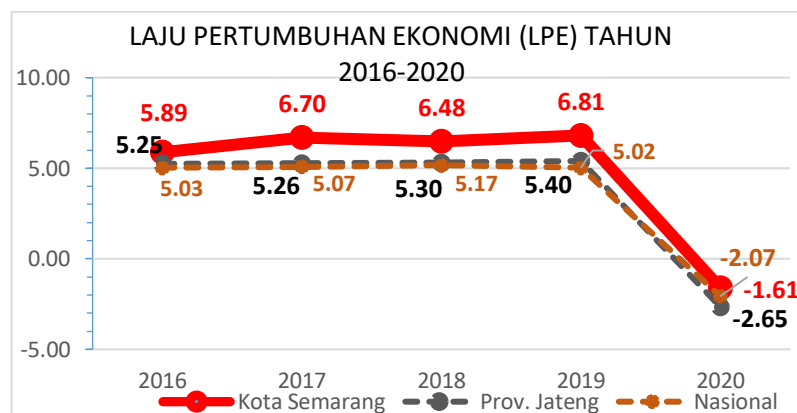
Sumber : BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

*) Data sementara

** Data Sangat Sementara

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Perusahaan. Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 20,31%, disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,49% serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,38%

Kondisi ekonomi makro selama enam tahun terakhir (tahun 2016–2020) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,61 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain, bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2016-2020 :

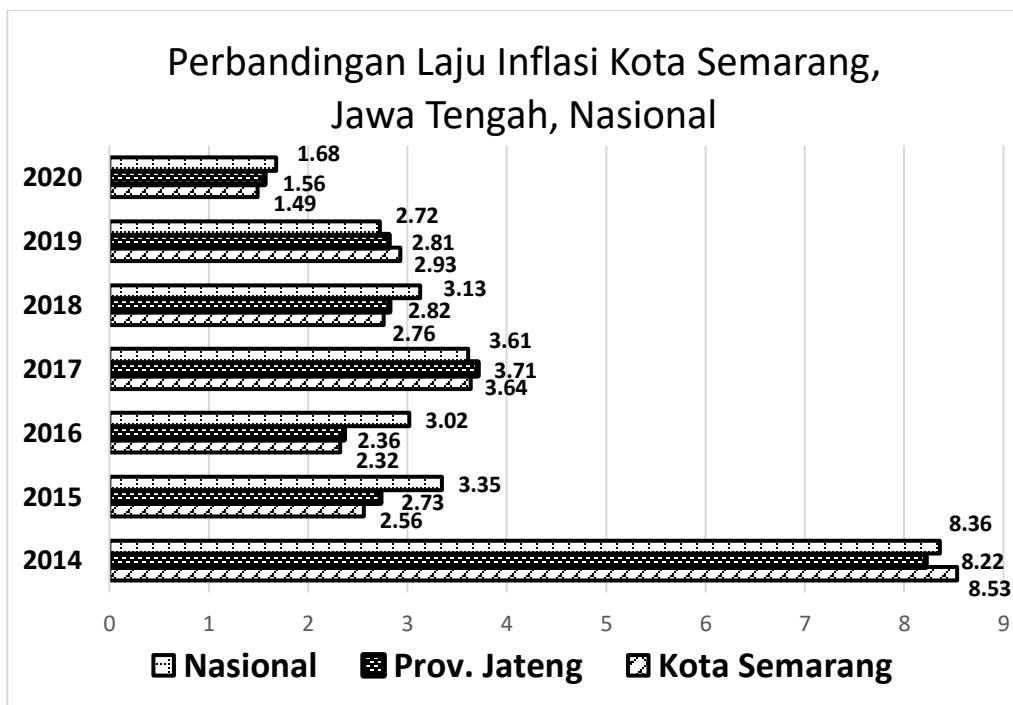


Sumber : BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng & Nasional Tahun 2016 – 2020

2. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebuhnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2014-2020 sangat fluktuatif, khususnya pada Tahun 2014 sebagai inflasi tertinggi sebesar 8,53% menurun drastis di tahun selanjutnya dan terakhir inflasi Kota Semarang menjadi sebesar 1,49% di tahun 2020. Selama enam tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).



Sumber : BPS Prov. Jateng, BPS 2021

Gambar 2.4

Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2020

3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

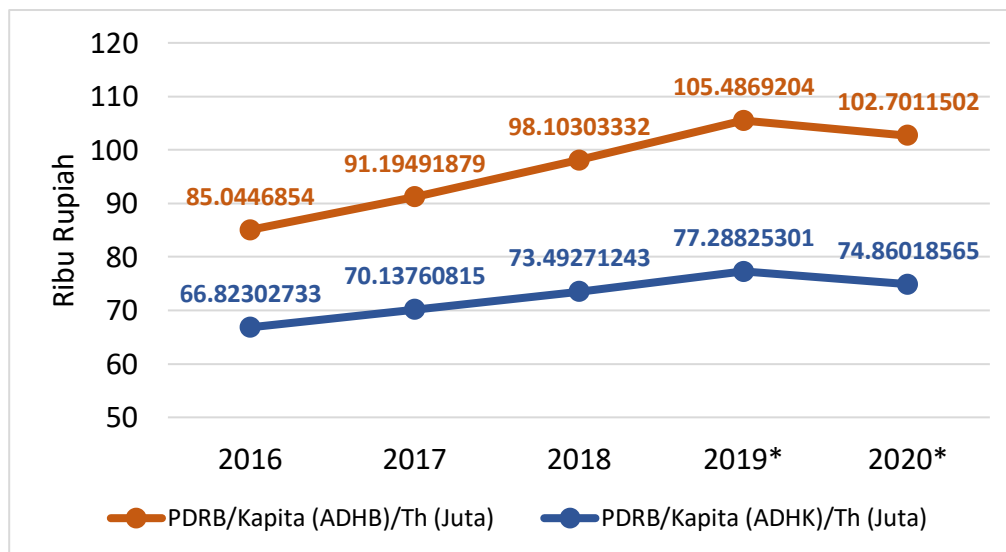
Tabel 2.11.

Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2016 - 2020

Uraian	Rp (000.000)				
	2016	2017	2018	2019*	2020*
PDRB ADHB (Juta)	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77
PDRB ADHK (Juta)	115.542.560,57	123.279.891,91	131.266.362,57	140.209.392,66	137.951.302,07
Proyeksi Penduduk Tengah Tahun (Jiwa-BPS)	1.729.083,00	1.757.686,00	1.786.114,00	1.814.110,00	1.842.786,00
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	85,0446854	91,19491879	98,10303332	105,4869204	102,7011502
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	66,82302733	70,13760815	73,49271243	77,28825301	74,86018565

Sumber : Data diolah dari BPS Kota Semarang ,2021

Dari data diatas, diperoleh pendapatan perkapita nominal (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2020 sebesar Rp 102.701.150,- per jiwa/tahun. Trend PDRB Perkapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahunnya dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Namun pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 cukup memukul



Sumber : BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Gambar 2.5

Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2016-2020

4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan

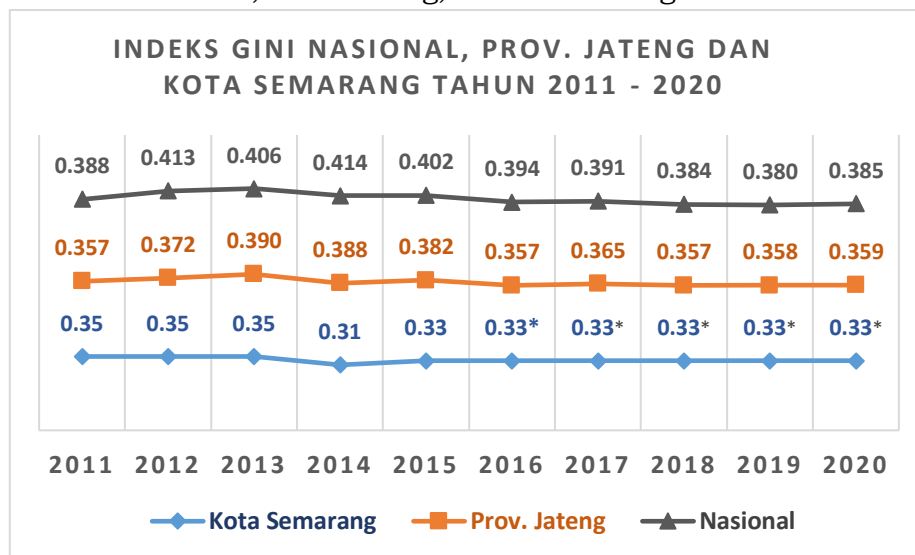
distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ($0 < \text{Koefisien Gini} < 1$).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50 \rightarrow$ pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35 sempat menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,31 dan selanjutnya kembali naik sehingga data sementara sebesar 0,33. Besaran indeks Gini sebesar 0,33 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat Kota Semarang termasuk kategori tinggi. Dan keadaan ini jauh dibawah rata-rata gini ratio Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kota Semarang sebesar 0,334, sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing- masing sebesar 0,369 dan 0,396.

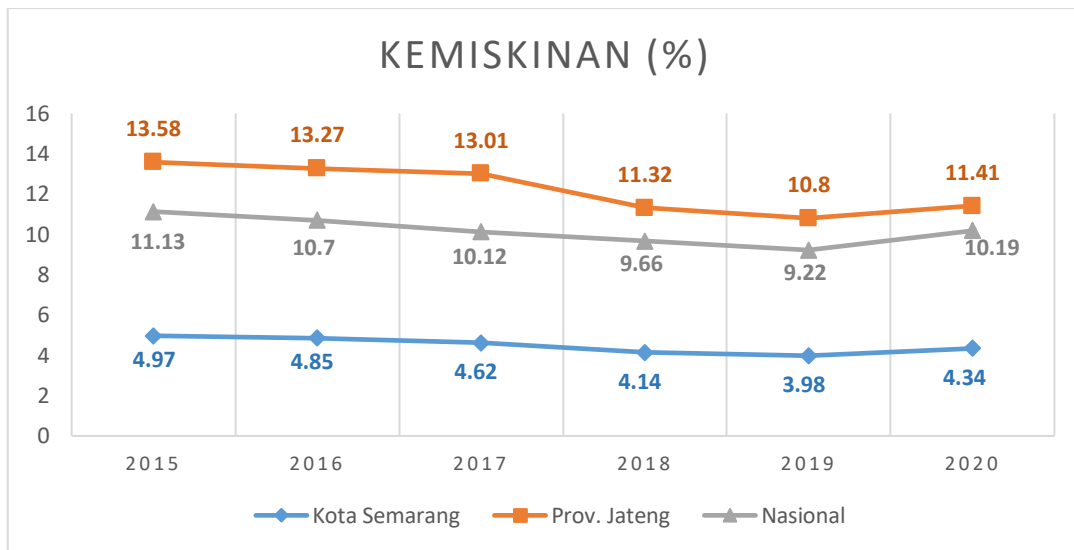
Gambar 2.6
Gini Ratio Nasional, Prov Jateng, Kota Semarang Tahun 2011 – 2020



Sumber : BPS, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya selalu menurun sejak tahun 2015 – 2019, namun dikarenakan adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,34%, meski angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kab/kota lain di Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak , juga refokusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan covid pada bidang Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode enam tahun terakhir (2015-2020), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.7

Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2015 – 2020

Namun dalam perkembangannya, mendasarkan pada UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Tabel 2.12.

Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Smg/ BDT Kemensos							
Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	2016	NA	NA	83,59 ribu	4,85	4.493,75 ribu	13,19	27 764,32	10,70
2	2017	303.715	18,3	80,86 ribu	4,62	4.197,49 ribu	12,23	26 582,99	10,12
3	2018	280.211	16,8	73,65 ribu	4,14	3.867,42 ribu	11,19	25 674,58	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97 ribu	3,98	3.679,40 ribu	10,58	24 785,87	9,22
4	2020	271.396	16,2	79,58 ribu	4,34	3 980,90 ribu	11,41	27 549,69	10,19

Sumber :

- Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, jatseng.bps.go.id ; bps.go.id
- Dinas Sosial, 2020

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update Januari 2021 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2020 hanya menyentuh angka 4,34 % atau sebesar 79,58 ribu jiwa dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 3.980,90 ribu jiwa (11,41%).

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

6. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 5 tahun dari tahun 2016 – 2020, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13.

Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan Di Kota Semarang Tahun 2016 – 2020

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Pencurian dgn pemberatan	7	4	1	1	0
b. Pencurian ranmor	152	121	83	19	33
c. Pencurian dgn kekerasan	17	10	10	2	4
d. Penganiayaan berat	47	10	13	30	19
e. Pembunuhan	0	1	5	1	3
f. Perkosaan	0	1	1	2	0
g. Uang palsu	3	0	3	0	0
h.Narkotika	0	1	4	NA	NA
i. Perjudian	0	0	0	0	0
j. Pemasaran / Ancaman	9	1	1	4	3
k. Lainnya	1850	1479	1.322	1.092	1.268
Jumlah	2.085	1.628	1.443	1.151	1.330

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2021 (Data Diolah)

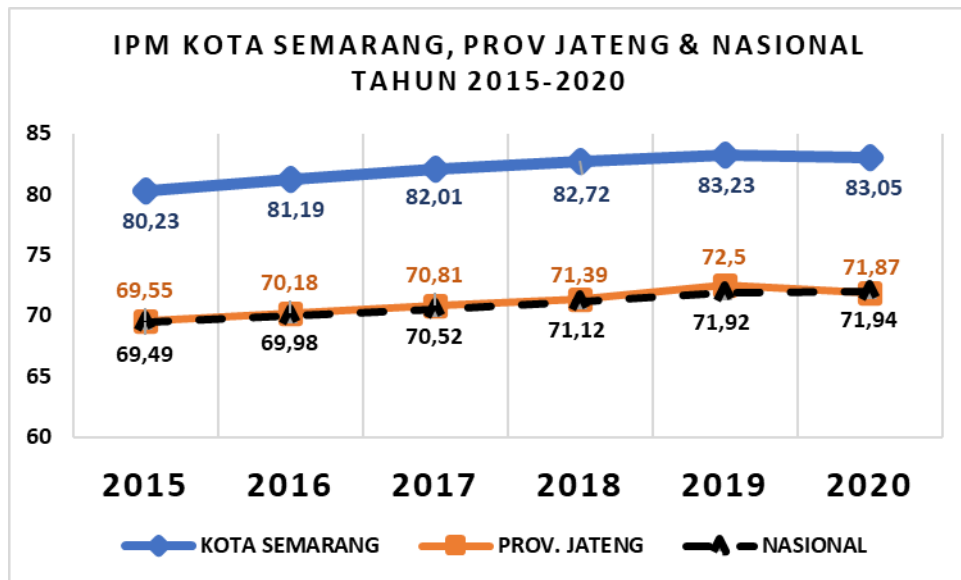
Dalam kurun tahun 2016-2020 jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mempunyai kecenderungan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 hingga mencapai sebanyak 1.330 kejadian. Jika pada tahun 2019 kasus paling tinggi terjadi pada penganiayaan berat sebanyak 30 kasus, di tahun 2020 justru terjadi pada tindakan pencurian motor yang mencapai 33 kasus, selain itu juga terjadinya peningkatan pada kecelakaan lalu lintas yang menjadi salah satu komponen pada jenis tindak pidana lainnya.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 dari semula 83,23 menjadi 83,05. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020 namun angka IPM Kota Semarang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 71,87 ditahun 2020.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.8

Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2015 – 2020

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Tabel 2.14.

Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2015-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2015	77,20	14,33	10,20	13.589,-
2016	77,21	14,70	10,49	13.909,-
2017	77,21	15,20	10,50	14.334,-
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-

Sumber : BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir masuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80 . Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, penurunan IPM pada tahun 2020 ini disumbangkan oleh menurunnya paritas daya beli yang secara umum disebabkan karena kontraksi ekonomi selama terjadi pandemi covid -19. Sehingga issue pemulihan ekonomi daerah masih menjadi hal yang perlu disikapi dalam kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang, antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat termasuk diantaranya wajib penggunaan masker apabila ditempat umum, menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi penularan virus, pemberian vaksin sesuai ketentuan pemerintah, karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang. Disisi lain dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sector ini banyak mengalami kelesuan, disamping sector hiburan, wisata, serta sector ekonomi lainnya.

b. Kesempatan kerja

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indicator , yakni:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, yaitu mulai dari tidak bekerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton.

Untuk melindungi dan mengambalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja paska pandemic.

Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari

sebelumnya yang hanya sebesar 4,54% . Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 6,48% dan juga nasional yang sebesar 7,07%. Selain dampak pandemic covid, penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis Mengurus Rumah Tangga dan Pelajar/Mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang Angkatan Kerja. Hal inilah yang menjadikan TPT Kota Semarang rendah dalam lima tahun terakhir.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran diatas 65%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga.

Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2015 hingga 2020 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Semarang Tahun 2015-2020

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2015	4,99	5,77	67,86	66,96
2016	4,63	5,48	67,15	67,8
2017	4,57	6,61	69,11	69,87
2018	4,51	5,29	68,56	65,56
2019	4,49	4,54	68,62	66,42
2020	6,48	9,57	69,43	69,89

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021

Tabel 2.16.
Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2015-2020

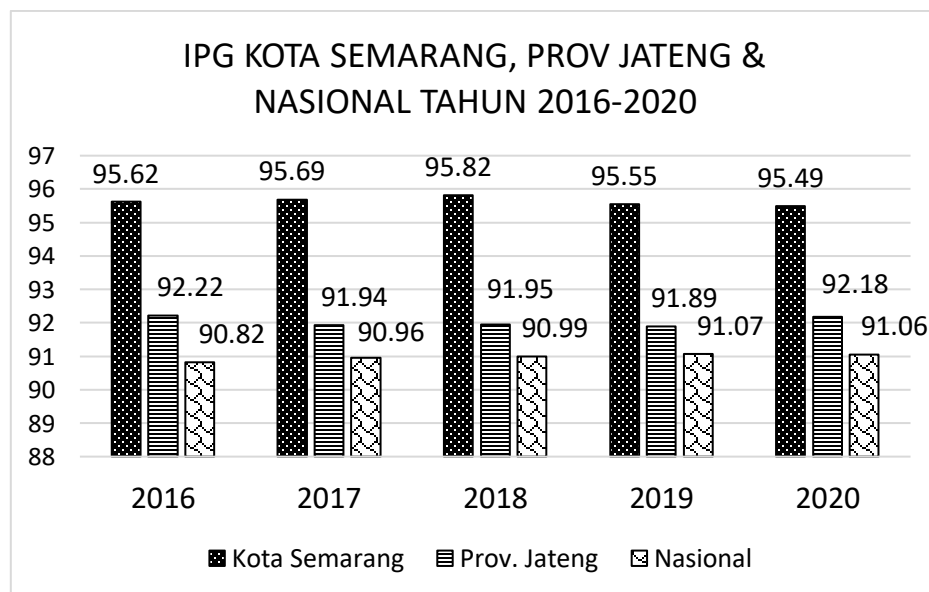
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja:						
Bekerja	836.837	836.837	899.796	872.827	907.937	925.963
Pengangguran Terbuka	51.229	51.229	63.700	48.724	43.198	98.001
Total Angkatan Kerja	888.066	888.066	963.496	921.551	951.135	1.023.964

Sumber: BPS Prov. Jateng, LKPJ Dinas Tenaga Kerja 2021

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

c. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang positif. Namun mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu-satunya variable IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2016 nilai IPG Kota Semarang mencapai 95,62% terus meningkat hingga kemudian menjadi 95,55% pada tahun 2019 dan turun menjadi 95,49% di tahun 2020. Meskipun demikian pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jateng dan IPG Nasional. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan manusia di Kota Semarang.

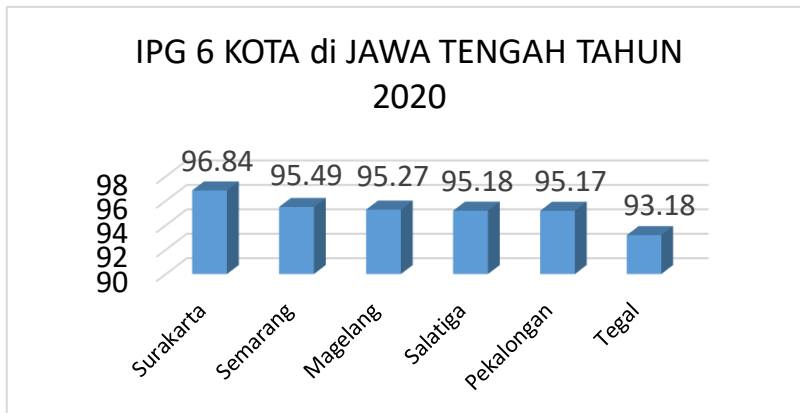


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.9

Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2021

Meskipun IPG Kota Semarang pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 95,49 % , namun lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18% dan Nasional sebesar 91,06% . Dibandingkan 5 Kota Lainnya di Jawa Tengah Kota Semarang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Surakarta yang mencapai angka 96,84% seperti terlihat pada gambar berikut:



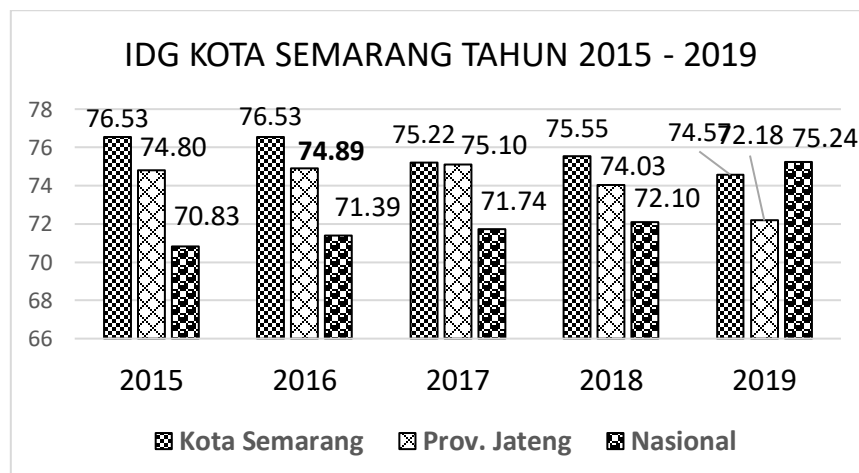
Sumber : BPS Prov Jateng, 2021

Gambar 2.10.

Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota sekitar di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 76,53 pada tahun 2015 dan 2016 turun menjadi 75,22 di tahun 2017 dan kemudian naik kembali menjadi 75,55 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 capaian IDG Kota Semarang kembali turun menjadi 74,57, sedangkan IDG Nasional justru meningkat tajam menjadi sebesar 75,24 sebagai pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2015-2019. Progres IDG dari tahun 2015-2019 terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi 2019

Gambar 2.11.

Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota ; 2) Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota dan penyajiannya baru sampai dengan tahun 2020, karena sebagian besar data capaian 2021 baru bisa disajikan pada akhir periode 2021 bahkan beberapa diantaranya baru bisa diukur pada saat LKPD.

Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan 2019 :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2014 sampai tahun 2017 cenderung meningkat, meski kembali menurun pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun. Sehingga orang tua cenderung menunda pendidikan PAUD, dan ketika melanjutkan ke jenjang SD dapat memenuhi kriteria batas usia memasuki Pendidikan dasar pada usia 7 tahun. Namun demikian APK PAUD usia 4-6 tahun pada tahun 2020 sebesar 83,01 % relative tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Hal ini memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDG's yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 88,44% pada tahun 2020, cenderung tetap dibandingkan dengan keadaan tahun 2019. Demikian pula sebanyak 208 lembaga PAUD telah berakreditasi B

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar Sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan.

APK dan APM SD/MI meningkat pada tahun 2020 menjadi 111,59% dan 97,66% dari tahun 2019 sebesar 110,59 % dan 96,10 % dengan Angka putus sekolah sebesar 0,01 % dan angka kelulusan sebesar 99,98 %. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 96,43% pada tahun 2020, meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2019 sebesar 90,60% .

Sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 115,59% ,sedangkan APM SMP/MTs nya turun menjadi sebesar 83,80%. Angka Putus Sekolah meningkat menjadi 0,04% dari tahun sebelumnya sebesar 0,02%, angka kelulusan pada tahun 2020 sebesar 99,95 % dengan angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sebesar 103,47%.

Persentase Pendidik jenjang SD/MI dan SMP/MTS berkualifikasi S1/D4 meningkat pada tahun 2020, masing-masing sebesar 96,43% dan 96,95%. Sedangkan untuk jenjang PAUD justru terjadi penurunan dari semula 80,44% menjadi 72,87%.

Pelayanan urusan Pendidikan dibidang sarana Gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2020, baik kondisi bangunan sekolah SD/MI maupun SMP/MTS yang kondisinya baik semuanya menurun. Hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan bangunan dilakukan refocusing untuk penanganan Covid, sehingga untuk selanjutnya perlu untuk menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

c. Pendidikan Non Formal Pendidikan,

Pendidikan Non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang sekolah dasar sebanyak 43 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 24 sekolah, jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B (18 lembaga), jumlah LKP rujukan (4 lembaga) dan jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi (15 orang) telah memenuhi target yang ditetapkan. Sementara jumlah kelurahan vokasi terealisasi 17 kelurahan dari target 23 kelurahan vokasi yang ada. Secara lengkap perkembangan capaian indikator dibidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17.
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Pendidikan dasar:						
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	38.53	42,1	42,10*	37,89	34,19	34,19
b.	Rasio guru/ murid	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
c.	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32
1.2	Pendidikan Menengah						
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	27.8	31,24	31,2	31,2	31,2	31,2
b.	Rasio guru terhadap murid	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
d.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) (Tujuan 4.6)	99.96	99.96	99,96	99,96	99,96	99,96
1.3	PAUD						
a.	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA	44.571	47.039	47.039*	46.492	47.595	NA
1.4	Angka Putus Sekolah						
a.	SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,07	0,04	0,04	0,03	0,02	0,04
1.5	Angka Kelulusan						
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,82	99,95	99,98	99,95	99,94	99,95
b.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	104,65	102,38	102,38	106,1	103,14	103,47
c.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)						
	- Jenjang PAUD	87	87	67	71,63	80,44	72,87
	- Jenjang SD / MI	77,5	84,79	90,26	88,21	90,6	96,43
	- Jenjang SMP/MTs	92,41	92,29	86,54	85.15	86,98	96,95
Indikator SDG's							
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	92,08	96,63	91,8	92,08	96,1	97,66
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	-	86,03	83,76	83,57	84,88	84,88*
3	SD/MI terkreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	90	89,65	37,14	36,52	34,46	34,46*
4	SD/MI terkreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	NA	NA	54,86	56,31	61,39	61,39*
5	SMP/MTs terkreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	85,04	81,76	30,41	32,72	27,87	27,87*

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	SMP/MTs terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	NA	NA	53	57,14	61,75	61,75*
7	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	107,54	113,1	113,23	112,76	110,59	111,67
8	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	110,07	118,01	116,35	116,21	114,41	115,59
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,42	10,49	10,49	10,51	10,52	10,53
10	APK PAUD 3 – 6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	60,36	76,78	84,72	84,72	83,01	83,01
11	Rasio APM P/L SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 5)	-	100	92,98	92,96	93,4	93
12	Rasio APM P/L SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 5)	-	100	93,11	93,17	93,22	93
13	Persentase Guru TK Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	95	97	97	97	97
14	Persentase Guru SD Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	95	98	98	98	98
15	Persentase Guru SMP Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	95	97	97	97	97

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2021

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020

No	Penghitungan Capaian Indikator SPM Tahun 2020	Realisasi Thn 2018	Realisasi Thn 2019	Realisasi Thn 2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD : Jml Peserta Didik Usia 5-6 Tahun ----- x 100 % Jml Penduduk Usia 5-6 Tahun 44.233 =----- x 100% 51.135	87,82 % 46.492 52.940	60,79% 31.429 51.705	86,50% 44.233 51.135
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) : Jml Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- x 100 % Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th 185.604 =----- x 100% 238.093	80,88 % 190.684 235.771	79,48% 187.578 236.011	77,95% 185.604 238.093

3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan :	0,38 %	7,13 %	6 %
	Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 tahun ----- X 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang blm menyelesaikan Pend Dasar dan atau Menengah 1.650 = ----- x100% 27.501	$\frac{1.154}{303.281}$	$\frac{3.225}{45.235}$	$\frac{1.650}{27.501}$

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Pendidikan, Bappeda, 2021

Dari data diatas , untuk ketiga indikator SPM Bidang pendidikan kewenangan Kab/Kota, terlihat bahwa masih terdapat anak siswa pendidikan dasar , Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang belum terlayani. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini masih dilakukan sinkronisasi dan validasi data siswa sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik) dan Kementerian Agama (EMIS), data Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) serta Data Kementerian Sosial (BDT). Sehingga saat ini data yang diperhitungkan kota Semarang masih bersifat sementara, karena kesulitan dalam pendataan jumlah usia sekolah yang tidak bersekolah dijenjang SMA/MA juga Paket C.

b. Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada , Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya :

Sebagai Kota Sehat Swasti Sabha Wistara sebagai penghargaan tertinggi pada level Penilaian Kota Sehat. Kota dengan Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan. Selain itu sebagai Kota dengan aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak Terbaik dengan tajuk “SANGPISANG” SayaNG dan DAMPINGI Kesehatan Ibu dan Anak Kota SemarANG), Universal Health Coverage (UHC).

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2015-2019, diantaranya :

Tabel 2.19.

Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,23	0,23	0,23	0,2	0,21	0,21
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,47	1,53	1,53	1,6	1,6	2
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	1,53	1,67	1,6	1,65	2,03	2,16
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,12	1,97	2,34	2,59	2,78	2,96
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	97,53	97,58	99,98	99,98	100	100
Indikator SDGs							
7	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
9	Angka keberhasilan pengobatan TB + (3.3.1(b))	83	84	90,05	83,5	83,31	69
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,03	98,1	98,43	100	100	85,93
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	231,25	231,25	231,25	231,25
13	Cakupan pembantu puskesmas	19,45	19,45	20,33	20,9	21,46	25,70
14	Prevalensi balita gizi buruk (1.3.1.(a))	0,4	0,9	0,38	0,37	0,33	0,35
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	95	97,58	98	99,98	100	100
17	rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.4.1.(c))	75,79	76,88	78,61	78,1	77,47	76,94
18	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (2.1.1.(a))	0,94	3,56	2,47	2,81	2,66	2,51*
19	% kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (2.2.1*)	4,19	3,66	2,63	2,5	2,57	3,13
20	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2.2.1.(a))	3,97	3,58	2,51	2,73	2,48	2,48*
21	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi krang dan obesitas) (2.2.1.(a))	0,036	0,032	0,021	0,021	0,033	0,033*
22	Pavelensi Ibu hamil anemia (2.2.2.(a))	18,34	19,3	16,58	16,58*	15,05	15,51
23	bayi usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif (2.2.2.(b))	64,69	67,16	85,01	85,01	69,39	71.31
24	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3.1.1*)	NA	75	100	100	95,8	100

No	Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3.1.2*)	32	32	23	19	18	17
26	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3.1.2.(a))	95	97,58	99,98	99,98*	100	100
27	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)(3.2.1*)	95	97,58	99,98	99,98*	100	100
28	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.(3.2.1*)	10,35	8,81	8,56	7,46	7,29	7,01
29	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir(3.2.2*)	94,56	94,66	95,03	95,99	100	99,00
30	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.(3.2.2(a))	6,33	5,73	5,76	6,38	6,15	6,09
31	Kelurahan UCI (3.2.2.(b))	100	100	100	100	100	100
32	Prevalensi HIV (3.3.1(a))	0,0086	0,0088	0,0112	0,0112	0,017	NA
33	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (3.3.1(b))	76	76	104,5	104,5*	106	34,17
34	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk(3.3.1(b))	193	211	338	338*	415	NA
35	Prevalensi penduduk malarian per 1000 penduduk (3.3.3*)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
36	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100	100
37	Jumlah Kasus Hepatitis B (3.3.4.(a))	48	134	177	177	424	NA
38	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	27	35	33	33*	13	NA
39	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3.4.1.(b))	NA	NA	46,75	95,41	97,51	100
40	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3.4.2(a))	NA	NA	100	100	119,7	100
41	cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	76,3	77,36	76,34	78,1	77,47	76,94

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: = <u>Jml bumil yang dilayani sesuai standar</u> x 100 % Jml sasaran ibu hamil = <u>23.885</u> x 100 % 23.885	100% <u>26.131</u> 26.131	100% <u>25.655</u> 25.655	100% <u>23.885</u> 23.885
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = <u>Jml ibu bersalin yg dilayani sesuai standar</u> x 100 % Jml sasaran ibu hamil = 23.885 ----- X 100% 23.885	100% <u>25.035</u> 26.131	100% <u>23.796</u> 23.796	100 % <u>23.885</u> 23.885
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = <u>Jml BBL yg dilayani sesuai standar (KN1)</u> x 100% Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup) 23.829 = ----- X 100% 23.825 = 100,02%	99,99% <u>25.073</u> 25.074	100 % <u>25.073</u> 25.073	100,02% <u>23.829</u> 23.825
4	Pelayanan Kesehatan Balita = <u>jml balita yg dilayani sesuai standar</u> x 100% Jml balita di wilayah kerja = <u>65.137</u> x 100 % 73.369	100,03% <u>132.634</u> 132.600	100 % <u>100.292</u> 100.292	88,78 % <u>65.137</u> 73.369
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar <u>jml anak usia Dikdas yg dilayani sesuai stdr</u> x100 jml semua anak usia dikdas = <u>215.016</u> x 100 % 219.821	<u>100%</u> (kelas VII) <u>49.873</u> 49.873	100% <u>218.841</u> 218.841	97,81% <u>215.016</u> 219.821
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = <u>usia pengunjung 15-59 tahun</u> x 100 % Jumlah warga negara usia 15-59 tahun = <u>1.014.944</u> x 100 % 1.014.944	100,95% <u>584.705</u> 578.607	103,25% <u>1.157.214</u> 1.194.808	100% <u>1.014.944</u> 1.014.944
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = <u>usia pengunjung > 60 tahun</u> x 100 % Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas = <u>154.847</u> x 100 % 180.096	99,83%	100,49% <u>179.859</u> 178.972	85,98% <u>154.847</u> 180.096
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = <u>jml penderita hipertensi > 15 th</u> x 100 % % Jumlah estimasi penderita hipertensi usia > 15th = <u>255.727</u> x 100 % 288.619	95,41%	97,51% <u>232.180</u> 238.120	88,60% <u>255.727</u> 288.619

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = $\frac{\text{jml penderita DM} > 15 \text{ th}}{\text{Jumlah estimasi penderita DM usia} > 15 \text{ th}} \times 100\%$ = $\frac{40.303}{40.303} \times 100\%$ 40.303	164,23%	97,49% $\frac{38.899}{39.902}$	100% $\frac{40.303}{40.303}$
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) = $\frac{\text{jml ODGI berat di wil kerja kab/kota}}{100} \times 100\%$ % Jml ODGI Berat berdsr proyeksi wil kerja kota = $\frac{4.172}{4.172} \times 100\%$ 4.172	100%	119,70% $\frac{2.497}{2.086}$	100 % $\frac{4.172}{4.172}$
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = $\frac{\text{jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa}}{\text{Jml orang yang terduga TBC kurun waktu 1 th}} \times 100\%$ = $\frac{7.770}{22.487} \times 100\%$ 22.487	104,52%	106% $\frac{14.7351}{13.901}$	34,55 % $\frac{7.770}{22.487}$
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = $\frac{\text{jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan sesuai stndar}}{\text{Jml orang dgn resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota}} \times 100\%$ = $\frac{37.681}{38.136} \times 100\%$ 38.136	102,97%	103,77 % $\frac{42.253}{40.716}$	98,81 % $\frac{37.681}{38.136}$

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Kesehatan, Bappeda, 2021

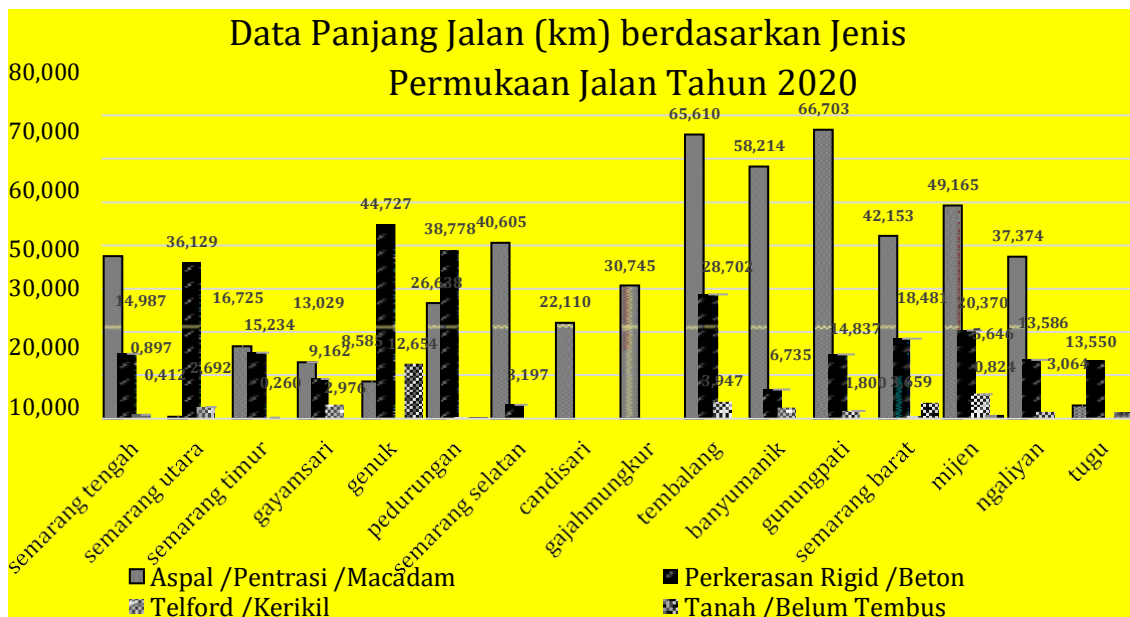
Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, hal tersebut disebabkan masih kurangnya jadwal kunjungan pasien / sasaran kegiatan di semua faskes yang menurun karena pandemic covid. Perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan. Jangan kemudian bila tidak merasakan indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin tertunda oleh kegiatan lainnya. Disamping hal tersebut, secara umum karena terjadi perubahan definisi operasional serta terjadi peningkatan target sasaran berdasarkan riskesdas , dan atau mengikuti angka prevalensi dari provinsi Jawa Tengah.

Capaian terendah SPM berada pada jenis pelayanan kesehatan terduga TB. Tindak lanjut yang harus diambil adalah : screening TBC dapat dilakukan secara online, petugas hanya perlu menginstruksikan masyarakat untuk mengisi link tersebut kemudian memantau hasil skrening dengan jemput bola pengambilan pot dahak kepada masyarakat yang berkenan diperiksa dahaknya.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2015 ditetapkan Keputusan Walikota Semarang yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang

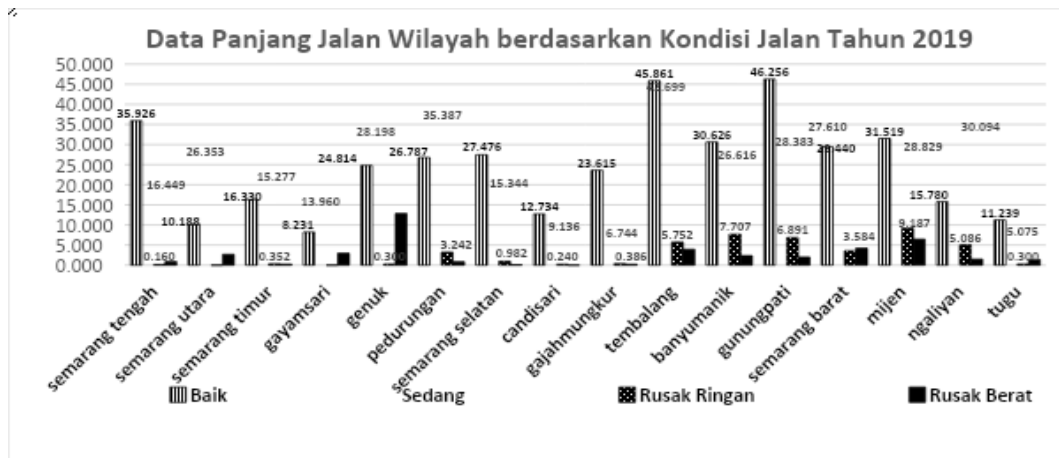
merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Terakhir adalah Keputusan Walikota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspalhot mix dengan proporsi mencapai 62,38% ; disusul dengan perkerasan jenis beton blok/ rigid sebesar 34,40% ; kerikil sebesar 0,6 % dan Tanah sebesar 2,62%. Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 6 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk (Babon Inspeksi Barat dan Timur),Semarang Barat (menuju maron),Kecamatan Tugu(Jl. Irigasi Utara (Mangkang Kulon)), Kecamatan Mijen (jl internal Pemkot Semarang), Kecamatan Pedurungan (Jl. Kudan) , dan Kecamatan Gunungpati (Jl Tinjomoyo). Secara lengkap Kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2021-Kep.Walikota 621/490 Tahun 2019

Gambar 2.12
Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2020

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 839.902,35 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai 731.013 meter (87,04%), kondisi sedang sepanjang 47.108 meter (5,61%), (atau jalan kondisi mantap sepanjang 778.121 meter atau sebesar 92,64%), sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 37.855 meter (4,51%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.925 meter (2,85%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk (30,06% dari total panjang jalan dengan kondisi rusak berat),Tembalang (9,27%),dan Mijen (15,13%) dan Semarang Barat (9,89%) untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2019-Kep.Walikota No. 621/490 Tahun 2019

Gambar 2.13

Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2020 per Wilayah Kecamatan

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob.

Tabel 2.21.

Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2015	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kawasan banjir dan rob	%	9,35	9,03	4,00	4,00	4,00	1,30
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	60	50	40	40	NA
3	Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan)	Hektar	37.301	37.301	37.301	37.301	37.301*	NA
5	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	77.405	77.405	77.405	77.405	77.405*	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang ditempuh Kota Semarang terkait penataan sungai besar, pemerintah Kota Semarang lebih giat dalam melakukan normalisasi saluran drainase, juga optimalisasi dalam pembagian wilayah kerja UPTD Pengelola Pompa Banjir sehingga lebih focus dan cepat didalam penanganan banjir, rob maupun genangan di wilayah kerjanya. Hal ini cukup berdampak pada penurunan kawasan banjir dan rob secara keseluruhan, utamanya di wilayah Timur . Hasil positif yang dirasakan saat ini adalah menurunnya persentase kawasan banjir dan rob menjadi 1,3 % atau seluas 485,94 Ha di tahun 2020 dari semula 4 % atau seluas 1.603 Ha di tahun 2019. Dan masih menyisakan Kali Beringin yang pengerjaannya dilakukan pada tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021.

Tabel 2.22.
Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah titik LPJU baru yang terpasang	Titik	1.698	1.814	1.681	1.545	1.414	0
2	Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan	Titik	69.838	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
3	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	9 100 %
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	Lampu	69.838	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	Lampu	69.838	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
4	Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman	Kegiatan	65	43	63	61	85	0

Sumber: Dinas Perkim dan Kawasan Permukiman, 2021

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2020

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari <u>Jml yang dilayani sesuai standar x 100 %</u> Jml sasaran	92,15%	96,63%	96,60% <u>1.623.225</u> 1.680.417
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik <u>Jml yang dilayani sesuai standar x 100 %</u> ml sasaran	95,33%	86,46%	86,58% <u>1.995.485.302</u> 2.168.863.123 (441.814 SRT)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2021

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan , diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi .

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan stakeholder sampah lainnya. Pada tahun 2020 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.200 ton, dimana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 85 % per hari dengan komposisi material organik sebesar \pm 62% dan sisanya material anorganik. Namun selama pandemi (juli 2021) timbunan sampah ini berkurang 100 ton perharinya. Pada saat hari normal timbunan sampah di Kota Semarang bisa mencapai 800-900 ton perhari. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestic, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah / bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dengan bekerjasama dengan stakeholder sampah sudah banyak sampah di TPA jatibarang yang diproses menjadi pupuk organik, bio gas dan pembangunan PLT Gas Metana (merupakan Hibah dari Pemerintah Denmark) yang akan dijual kepada PT.PLN dan dapat didistribusikan untuk 800 - 1.000 warga sekitar pada radius hingga 1,5 km.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang masih perlu diperhatikan yaitu penerangan wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan, utamanya di wilayah pinggiran. Kinerja di bidang Penerangan Jalan Umum diukur dari pemasangan LPJU baru dan pemeliharaan PJU yang ada sehingga berfungsi dengan baik (100%). Untuk itu diperlukan informasi dari masyarakat bila terdapat keluhan terkait dengan pelayanan penerangan jalan pada nomor gangguan layanan 082227007512 (Telp, SMS,WA).

Dilihat dari kebutuhan penerangan jalan umum sampai dengan tahun 2020, di Kota Semarang masih diperlukan PJU sebanyak 79.580 titik . Perhitungan ini diperoleh panjang jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 2.785,28 km dibagi 35 m (Kebutuhan ideal penerangan jalan). Dari eksisting tahun 2019 terdapat 76.292 PJU sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 3.288 titik yang akan diselesaikan pada tahun 2020. Namun karena refokussing anggaran sehingga jumlah titik PJU masih tetap sejumlah 76.292 atau sebesar 95,87% dari kebutuhan.

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan (IMB). Dari data sementara yang diperoleh, jumlah bangunan ber-IMB per seluruh jumlah bangunan seluruhnya di tahun 2020 sebesar 54,94 % meningkat dari angka tahun 2019 yang mencapai 54,49 % dari jumlah bangunan yang ada. Meskipun terdapat peningkatan, namun pemerintah harus lebih serius dalam penataan ruang ini, selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan/ presisi bangunan dengan IMB yang dikeluarkan, terkait perijinan tersebut yang harus dilakukan pemerintah yaitu menjadikan proses perijinan menjadi murah, mudah dan tepat. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku.

Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pekerjaan Umum :						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	87,8	88,07	91,11	89,54	89,65	92,64
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	75	75,5	76	77	78	79
3	Penyediaan air baku	68%	87,50%	87,50%	87,5*%	87,5*%	87,5*%
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,45	2,5	2,51	2,78	2,88	2,88
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	620,26	636,25	658,18	752,05	752,97	778,12
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44,2	44,1	44	32	32	32,00
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	79	80,5	82	80	80	95,85
8	Luas irigasi dalam kondisi baik	2106	3062	NA	NA	78	79,00
9	Persentase penanganan sampah	87	87,58	87,5	88,5	89	89,5
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (%)	0,245	0,25	2,51	2,78	2,88	2,88
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	87	89	89	95,33	96,63	96,28
12	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	85,78	85,87	98,33	86,22	86,46	86,51
Indikator SDGs							
13	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	88	87	88,5	92,15	96,63	95,43
14	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	88	87	88,5	92,15	92,15*	96,28
15	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0	0	95	95	95	91
16	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	NA	1	1	1	1	1
17	Indeks kualitas air	NA	NA	45,25	31,01	48,75	50,44
b.	Penataan Ruang						

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%)	43,26	43,76	44,26	44,12	44,17	44,21
19	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	53,25	53,35	53,63	53,98	54,49	54,94
20	Persentase kesesuaian Tata Ruang	79	79	79	81,76	95	98,73

Sumber : BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2021

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2020 sebesar 44,21% atau seluas (16.522,18 Ha) meningkat sebesar 0,04% dari tahun 2019, disumbangkan oleh penambahan 1 taman baru, Signature Park yang berlokasi di jalan Piere Tendean seluas 767 m².

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 98,73 %, sehingga masih terdapat sekitar 1,27% wilayah yang belum sesuai dengan peruntukan tata ruang. Selain itu kinerja pembangunan sarpras dasar perkotaan tahun 2020 juga tidak dapat memenuhi target, dimana hanya 21 gedung dari 48 gedung pemerintahan yang bisa diwujudkan, karena anggaran di fokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pengelolaan reklame sepanjang tahun 2010-2019 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. Dan kondisi reklame berijin pada tahun 2020 sebesar 75,83%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 66,61%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2020 terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	100
2	Luas Lingkungan permukiman kumuh (%)	0,99	0,79	0,74	0,29	0,23	0,21
3	Rasio permukiman layak huni	99,45	99,21	97,12	97,44	97,90	98,16
4	Rasio tempat pemukiman umum per 1.000 penduduk	34,35	37,85	43,25	42,29	47,70	45,65

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang terdapat sebesar 415,83 ha atau 4,16 km² atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Dan penanganan Lingkungan Kumuh yang dilaksanakan diseluruh kecamatan Kota Semarang menyisakan luas 79,60 Ha pada tahun 2020 yang realisasinya mencapai 0,21% dari luas wilayah Kota Semarang. Luas permukiman kumuh di Kota Semarang pada tahun 2020 yang telah mencapai hingga 0% terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan.

Total luas lahan pemakaman Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 4.244.152 m², dengan rincian lahan TPU di tahun 2020 sebesar 536.066m², sedangkan lahan TPBU memiliki luas sebesar 3.708.086 m². Ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2020 sebanyak 76.705 lubang TPU dan 618.380 lubang TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum) yang tersebar di seluruh TPU Kota Semarang, sedangkan pada tahun sebelumnya ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2019 sebanyak 78.843 lubang TPU dan 618.380 lubang TPBU. Maka dengan itu, ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang masih dalam tahap memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan melakukan pembebasan lahan tahap lanjut untuk keperluan pemenuhan ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2020 persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik sebesar 90,82%, meningkat 2,11% dari tahun sebelumnya. Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26.

Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2020

No	Indikator SPM	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %	100% <u>2 unit</u> 2 unit
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100% <u>97 KK</u> 97 KK

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2021

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27.

Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,32	1,41	0,84	1,04	0,93	0,93
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	31,66	31,71	31,71	31,81	31,90	31,90
3	Rasio Penegakan PERDA	96	100	100	100	100	100
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3.600	4.320	3.861	7.200	8.640	NA
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0,0011	35	35	34,78	34,78	34,78
6	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	65,9	-	-	-	82,33	68,62
7	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	92,13	88,89	91,86	98,78	50,26	77,04
Indikator SDGs							
8	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (indicator 1.5.1*).	2	15	13	13	NA	NA
9	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	23	23	35	40	50	58
10	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	NA	85.71	85.71	100	95,14	95,14*
11	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	NA	84.5	86.75	90	90*	90*
12	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	6	6	6	11	16	16
13	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.(1.5.1.(e))	184	184	172.96	130.60	130.60	113,83
14	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.(1.5.2.(a))	2,3 M	3,1 M	1,8 M	1,8 M*	NA	NA
15	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah..(1.5.3*)	NA	NA	1	1	1	1

No	Uraian	Tahun					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
16	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk.(11.5.1.(b))	24	24	35	40	40	40
17	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	2.122	2.085	2.053	1.443	1.151	1.330

Sumber : Satpol PP, D. Kebakaran, 2021

Dari data diatas Tingkat waktu tanggap (response time rate/15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 77,04%. Masih terdapat gap sebesar 22,96 % pelayanan yang belum memenuhi SOP. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau , dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai respon time 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Kinerja Indikator Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak tahun 2020 sebesar 68,62%, lebih kecil dari pelaksanaan Pilpres/Pileg tahun 2019 yang sebesar 82,33%. Meskipun demikian angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 yang hanya sebesar 65,9%. Hal ini disebabkan anemo pemilih yang menurun akibat adanya pandemi covid.

Meningkatnya angka kriminalitas sebesar 15 % dari tahun sebelumnya disumbangkan oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena pembelajaran daring menjadikan kebosanan bagi murid, sehingga kemudian kesempatan berkendara tanpa pengawasan orang tua lebih besar yang menjadikan kecelakaan.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018- 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28.
Pencapaian Indikator SPM pada Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100 %	100% <u>0 orang</u> 0 orang
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100 %	100% <u>60</u> 60
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85,36%	86,3% <u>790</u> 890

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	95,14%	100% <u>59</u> 59
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100 % <u>1.680.417</u> 1.680.417

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Bappeda, 2021

Diantara SPM layanan di bidang Trantibum, realisasi yang paling rendah pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu sebesar 86,3%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, selain itu masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana, selain itu juga memodifikasi metode sosialisasi sehingga dapat dipahami dan di terapkan.

f. Sosial

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2020, pandemic covid menyebabkan angka kemiskinan Kota Semarang meningkat menjadi sebesar 4,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,98% . Meskipun demikian angka kemiskinan Kota Semarang tetaplah terendah di Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan juga jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, ini artinya capaian indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan PMKS dari tahun 2015-2020 secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 PMKS yang ditangani hanya 77% meningkat menjadi 99,82% pada tahun 2018.

Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2013–2018 fluktuatif namun cenderung meningkat, rendahnya PMKS yang menerima bansos pada tahun 2013-2014 disebabkan masih dalam tahap sosialisasi dan pemenuhan administrasi sebagai penerima hibah/bansos sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan terbitnya Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang sosialisasinya baru dilaksanakan pada tahun 2019.

Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Sosial, yaitu: Jumlah PMKS, penanganan PMKS, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi dan indicator SDGs terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.29.
Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS	367.842	367.842	303.715	280.211	229.564	518.358
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	306.198	312.670	377.357	290.602	231.148	516.759
3	PMKS yang memperoleh bantuan social	14.910	14.910	54.880	52.137	158.257	513.287
4	Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	102	102	102	105	105	119
Indikator SDGs							
5	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%)(indicator 1.2.1*)	20.82	20.82	19.95	16,81	13,80	16,15
6	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indicator 1.3.1.(c))	NA	3.42	3.88	100	100	100
7	Persentase Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH (%) (indicator 1.3.1.(d))	NA	4,1	5,68	5,68	4,8	7,9
8	Angka kemiskinan BPS (%)(indicator 10.1.1.(a))	4,97	4,85	4,82	4,14	3,98	4,34
9	Rasio belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap total APBD (1.a.2*)	NA	29.02	21.42 (Pilkada dan tahun infrastruktur)	28,96	NA	NA
10	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakejaan (BPJS)(10.4.1.(b))	NA	288.115	237.015	237.015*	255.991	255.991*

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30.

Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (274/274) orang	100 % (176/176) orang
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar di luar panti	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (11/11) orang	100% (29/29) orang
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (117/117) Orang	100% (148 / 148) orang
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100% (114/114) orang	100% (292/292) orang
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100% (792/792) orang	100% (510.650/510.650) orang

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2021

Meskipun capaian pelayanan SPM bidang sosial telah menunjukkan kinerja yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya : Belum mencukupinya SDM pekerja sosial profesional yang ada dibanding dengan PMKS terlantar penerima layanan rehabilitasi sosial, Sarana dan Prasarana Rumah Tampung Among Jiwo yang over load (over kapasitas) dalam menampung warga terlantar, serta belum memiliki Posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan Alam maupun Sosial.

2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Pada tahun 2020, sasaran pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka . Beberapa indicator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.31.

Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2020

No.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	66,96%	67,80%	69,87%	65,56%	66,42%	69,89 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS)	5,77%	5,48%	6,61%	5,29%	4,54%	9,57%
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,23%	94,52%	93,39%	94,71%	95,46%	90,43%
4	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.309.539	1.324.305	1.185.436	1.405.604	1.431.894	1.191.265
5	Angkatan Kerja						
	Jumlah Bekerja	836.837	836.837	899.796	872.827	907.937	925.963
	Jumlah Pengangguran Terbuka	51.229	51.229	63.700	48.724	43.198	98.001
	Total Angkatan Kerja	888.066	888.066	963.496	921.551	951.135	1.023.964
6	Bukan Angkatan Kerja	483.864	610.471	415.442	484.053	480.859	441.157
	Sekolah	167.698	283.252	138.537	166.175	174.979	151.538
	Mengurus Rumah Tangga	257.533	306.753	229.010	268.388	245.101	232.208
	Lainnya	58.633	20.466	47.895	49.490	60.779	57.411
Indikator SDGs							
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	5,77	5,77	6,61	5,29	4,54	9,57
8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (8.6.1*)	16,06	16,06	18,90	15,73	NA	NA
9	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakejaan (BPJS)(10.4.1.(b))	NA	288.115	237.015	250.246	255.991	NA

Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 69,89% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,42% meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 65,56%. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Meningkatnya TPAK Kota Semarang tahun 2020 menunjukkan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada.

Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja local menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Terlihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang terus menurun dari tahun 2017 sebesar 6,61% turun menjadi sebesar 4,54 % pada tahun 2019 dan melonjak drastis menjadi sebesar 9,57 % pada tahun 2020 akibat pandemic covid.

Perlu upaya keras lintas sektor karena angka ini lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah 6,48 % dan sedikit lebih baik dibandingkan TPT nasional sebesar 7,07 % pada tahun 2020. Permasalahan klasik yang muncul adalah Lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan minat pencari kerja. Selain itu teknologi yang

memungkinkan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak harus bekerja dikantor, sehingga terdapat pengurangan jam kerja, bekerja dari rumah, namun banyak juga perusahaan yang terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga memutuskan untuk tidak beroperasi untuk sementara.

Selaras dengan kondusifitas Kota Semarang, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015-2020 berturut-turut sebesar 13,29%; 11,31% ; 8,71% , 8,16% dan terakhir kenaikannya sebesar 8,66%. Hal inilah yang membuat daya tarik urban untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius akan menimbulkan permasalahan social yang lebih kompleks.

Tabel 2.32.
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2015-2020

UMK DAN KHL	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Upah Minimum Kota Semarang	1.685.000	1.909.000	2.125.000	2.310.087	2.498.588	2.715.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/ Persetujuan Bersama sebesar: 84 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama.

Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.
Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang ditangani :		175	208	157	124	150	159
Penyelesaian :							
1	Dalam bentuk PB	72	28	32	62	83	84
2	Tahap anjuran mediator	56	13	-	76	53	NA
3	Secara bipartite usai mediasi	26	4	-	4	21	NA
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.	21	163	125	42	14	NA

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2020 sebesar 0,029 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,038. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Pemberdayaan organisasi perempuan dalam wadah PKK (177 lembaga tingkat kelurahan, 1.578 lembaga tingkat RW dan 10.068 lembaga tingkat RT) dengan

kader PKK sebagai ujung tombaknya, GOW, Dharma wanita, GOP TKI juga telah menunjukkan kinerjanya, terlihat dari beberapa penghargaan baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum-forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang, juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang meningkat dari Kategori Madya menjadi Kategori Nindya. Prestasi lainnya adalah Penghargaan Pakarti Utama I pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tingkat Nasional (Kelurahan Gisikdrono, Kec Semarang Barat), dan beberapa kejuaraan lomba sebagai pelaksana terbaik I ditingkat Provinsi Jawa Tengah terkait Lomba Posyandu, PHBS, Pemanfaatan Toga dan lainnya.

Tabel 2.34.

Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,62	96,62	95,69	95,82	95,55	95,49
2	Jumlah Forum Anak Kota Semarang yang terbentuk	17	17	17	38	102	102*
3	Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak	74	74	74	12	26	26*
4	Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA	9	1	1	1	1	1
5	Rasio KDRT	0,056	0,037	0,053	0,055	0,038	0,02
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,1	2,79	7,04	7	7,6	7,13
8	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	93,9	97,21	97,21	97,21	96,4	96,4*
9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,09	56,09	56,09	56,09	56,34	56,34*
10	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD • Jumlah anggota DPRD • Jumlah anggota DPRD perempuan	48 11	48 12	50 9	50 12	50 10	50 10
11	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah • Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang • Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang • Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang	8 50 734	8 47 711	8 56 744	7 54 756	7 64 736	6 51 624
Indikator SDGs							
12	Cakupan program pengarusutamaan gender (5.1.1*)	63	64	68	96	97	97*

NO	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan (5.2.2*) .	0.02	0.02	0.02	0,10	0,02	0,02*
14	Pemberdayaan terhadap korban KDRT (5.2.2.(a))	100	100	100	100	100	100
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (5.5.1*)	76.53	76.53	75.22	75.55	75.55*	75,55
16	Persentase perempuan di lembaga legislative	24	24	24	24	22	20
17	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan(5.5.2*)	53.71	54.89	55.76	56,44	57,85	56,21
18	Jumlah Anak Korban Kekerasan	93	49	68	83	50	50*
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,02	0,01	0,02	0,27	0,23	0,23*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2021

c. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program ATM Beras sebanyak 5 titik Masjid di Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Selatan dan Kecamatan Tugu. Pada awalnya Mesin ATM Beras ini untuk menyalurkan bantuan beras bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar pada BDT namun belum menerima Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) maupun PKH. Namun dalam perkembangannya memunculkan donator –donatur tetap untuk membantu warga kurang mampu yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu. Dan program ini berkesinambungan pada tahun 2020 dengan dana APBD maupun Tambahan DID, untuk meringankan dampak pandemi covid untuk meningkatkan daya beli masyarakat .

Selain itu juga Peningkatan Pemahaman Pentingnya Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan Gizi Keluarga, disamping pemantauan ketersediaan dan keamanan pangan. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.35.
Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90,9	91	87,2	87,7	94,00	88,90
2	Cakupan Daerah Rentan Pangan	Kelurahan	-	45	13	0	0	0
3	Ketersediaan Pangan Penduduk	Kkl/Kapita/hari	-	3.050	3.051	3.052	3.053,00	3.054,00
4	Tingkat Keamanan Pangan	%	-	80	80	83,56	76,01	91.26

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

d. Pertanian

Kegiatan Survey Data Pertanian bertujuan untuk memberikan attribute/informasi bidang tanah yang terpetakan dengan data pendukung seperti KTP, NOP, PBB sebagai bahan dasar dalam rangka perijinan dan pendapatan, untuk tahun

2020 ini dilaksanakan Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat dengan total hasil survey bidang tanah sebanyak 500 bidang.

Namun demikian pengadaan lahan kawasan perkotaan yang dianggarkan pada tahun 2019 direncanakan untuk pemindahan beberapa kantor/balai kelurahan meliputi Kantor Kelurahan Tanjungmas, Kantor Kelurahan Barusari dan Kantor Kelurahan Krapyak, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran belanja di tahun 2019. Demikian pula untuk tahun 2020 yang terfokus untuk penanganan pandemi covid-19.

Persentase tertib administrasi pertanahan sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,27% , meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 57% . Hal ini menjadi penting karena akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah, meskipun terdapat kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap NJOP dibawah 200 juta rupiah sebagai relaksasi akibat pandemic.

Pada tahun 2020 Dinas Penataan Ruang melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi data berdasarkan pada Jumlah SPPT PBB tahun 2020 sebanyak 750.360 lembar SPPT, diperoleh data tervalidasi sebanyak 662.344 data. Dari kegiatan Verifikasi dan Validasi data tahun 2020 ada penambahan jumlah SPPT PBB sebesar 219.748 dari data SPPT PBB tahun 2019 sebesar 530.612

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data pertanahan yang valid dan uptodate dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)	26,27	30	34,72	37	57,00	88,27
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% /20 kasus	100% /20 kasus	100%/ 15 kasus	100%/ 15 kasus	100% 7 kasus	100% 15 kasus

Sumber : BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2021

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu kinerja yang terlihat adalah dari tahun 2012 sampai dengan 2017 secara berturut-turut Kota Semarang berhasil memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota metropolitan terbersih. Namun untuk tahun 2018, Kota Semarang belum berhasil mempertahankannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Semarang kedepannya, untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green city). Salah satu bentuk konkretnya adalah dengan Penanaman pohon serentak, CarFree Day, Program langit Biru, Penerapan Perwal Kota Semarang No. 27 tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik dan lainnya, namun beberapa kegiatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan prokes.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan sampah, Kota Semarang juga telah menghadirkan aplikasi pelaporan sampah berbasis digital yaitu SILAMPAH (Sistem

Lapor Sampah). Aplikasi SILAMPAH adalah sebuah inovasi untuk penanganan sampah, untuk mengatasi timbulan sampah yang belum terangkut. Masyarakat dapat melaporkan titik sampah yang belum terangkut tersebut secara online dengan mengisi data pada aplikasi ini. Dukungan lainnya adalah membentuk bank sampah di lingkungan RT/RW, Pengolahan sampah di TPA menjadi sampah organik, bio metana, PLT Gas Metana , Deklarasi “Semarang Wegah Nyampah” , semua itu dukungan dalam mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota Bersih dan Hijau (Clean and Green City). Selain itu kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang komposisinya terdiri dari IKA, IKU, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dimasadeban. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015-2020, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.37.

Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencemaran status mutu air	60	60	60	60	60	60
2	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	36,5	41	46	51	56	60
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan yang diawasi)	13,98	22	44	44	60	180
4	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100
5	Indeks kualitas lingkungan hidup (%)	44,84	44,84	50,93	51,94	62,88	66,05
6	Indeks Tutupan Vegetasi	30	31,88	50,9	56,51	56,51	55,9
7	Indeks kualitas air (IKA)	45,25	45,25	39	31,01	48,75	50,44
8	Indeks kualitas udara (IKU)	61,72	61,72	62,9	74,27	85,50	95,20
9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan dministrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	12	12	44	78	110,52	172,34
10	Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomass (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator SDGs							
11	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	87	87.5	88	88.5	89,00	89,5
12	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	10	27	32	25	34	47
13	Persentase ruang terbuka hijau (11.7.1.(a))	-	43.76	44.06	44,06	44,15	44,21
14	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	32	57	39	39*	38	38
16	Volume sampah yang ditangani/ diolah (M3)	4.349	4.445	4.544	4.544	4.747	4.747
17	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.(15.3.1.(a))	1 ha	1ha	1ha	1ha	56,25 ha	60 ha

Sumber : Bappeda, DLH Kota Semarang, 2021

*) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, adalah : Belum optimalnya penanganan pemulihan kerusakan LH dan Konservasi SDA; Lokasi topografi Kota Semarang yang berada di pesisir pantai yang sungainya merupakan tempat pembuangan limbah yang berdampak di beberapa sungai, status mutu air dalam kondisi tercemar berat; Optimalisasi IPAL yang dibangun oleh industri belum bisa sepenuhnya mengurangi beban cemaran, limbah cair yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi BMLC yang ditetapkan; serta belum sepenuhnya masyarakat mendukung dan peduli terhadap pengurangan sampah plastik.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Dalam masa pandemi, untuk menjaga pelayanan adminduk dengan tetap menjaga protokol Kesehatan, upaya yang telah ditempuh diantaranya : penambahan jumlah hari pelayanan perekaman KTP elektronik pada hari sabtu dan minggu di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan dari bulan Agustus sampai Desember 2020, membangun aplikasi online untuk permohonan cetak dan perekaman KTP el melalui website <http://eservices.dispendukcapil.semarangkota.go.id> dan aplikasi berbasis android Si D'Nok, Penyediaan Blanko E-KTP el melalui mekanisme Hibah kepada pemerintah pusat, serta pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak bisa menerima layanan ditempat perekaman data.

Tabel 2.38.

Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2020

No	Uraian Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Validasi Database Kependudukan	96%	97%	97%	97%	97%	97%
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	83%	94,43%	91,46%	94,94%	97,14%	98,07%
3	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	90,82 %	89,29%	92,78%	95,46%	97,15%	98,81%
5	Rasio pasangan berakta nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rasiopenduduk ber NIK (Nomor Induk Kependudukan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	0%	2%	12,94%	37,16%	60,57%
Indikator SDGs							
8	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	NA	95%	95%	96,02 %	97,15 %	97,15%
9	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	74%	79,3%	77,14%	78,82 %	79,34 %	80,11%

No	Uraian Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Berdasarkan data diatas kinerja kepemilikan KIA masih memerlukan perhatian. Untuk deviasi sebesar 3% pada validasi database, disebabkan data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah 1,89 % penduduk yang belum berKTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.

Permasalahan penyelenggaraan Urusan Adminduk, utamanya dalam pelaksanaan pelayanan daring antara lain, kurang optimalnya sarana pendukung server, belum adanya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), kurangnya minat masyarakat pada pelayanan online dan kendala penerapan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online Terpusat.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk didalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat kembali ditunjukkan pada saat penanganan pandemi covid, yang menempatkan Kota Semarang menjadi persebaran kasus Corona tertinggi di Jateng. Kebijakan yang dipilih saat itu adalah penerapan pembatasan wilayah non Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dengan model Jogo Tonggo. Jogo Tonggo ini merupakan gerakan gotong royong diseluruh elemen masyarakat dengan kontrol dari pemerintah untuk melakukan karantina wilayah disertai sistem lumbung pangan. Dan konsep ini menjadi salah satu inovasi dalam penanganan covid di Jawa Tengah.

Capaian dari penyelenggaraan Urusan pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 diantaranya melalui Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dimana Kota Semarang mendapat Juara I di tingkat Provinsi (Kelurahan Pudak Payung) , serta Kegiatan Jogo Tonggo yang juga mendapat peringkat I Kategori Kelurahan tingkat Provinsi (Kelurahan Bulustalan).

Tabel 2.39.

Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM	15	18	18	18	18	18
2	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100,00	100

No	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah kelompok binaan PKK	32	32	32	32	32	32
4	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Posyandu Mandiri	590	590	588	588	808	808
6	Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi	16	16	16	16	16	16
7	Jumlah UPPKS dan UED-SP	UPPKS :190 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177

Sumber: D.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2021

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat / pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga nantinya.

Pengendalian penduduk tidak lepas dari peran aktif petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang terus memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya KB. Oleh karena itu disamping peningkatan layanan KB , juga dilakukan penyuluhan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) di beberapa kecamatan guna meningkatkan kualitas kader yang tergabung dalam KKBPK.

Tabel 2.40.

Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015- 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengendalian angka kelahiran (TFR)	2,02	2,1	2,01	2	2	1,99
2	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	35,46	36,05	36,79	36,79*	44,01	47,1
3	Jumlah peserta KB aktif	200.235	202.207	218.185	205.201	199.001	194.631
4	Rasio Akseptor KB per 1000 PUS	75,79	76,88	78,61	78,1	77,47	76,94
5	Jumlah PIK Remaja per jumlah kelahiran	74	78	75	70	70	73
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	60	65	73,06	62,62	65,07	47,5

NO	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	BKB: 279	BKB: 264	BKB: 270	BKB: 270	BKB: 254	BKB: 274
		BKR:139	BKR:131	BKR:130	BKR:129	BKR:12 1	BKR:124
		BKL:246	BKL:217	BKL:288	BKL:235	BKL:23 4	BKL:212
Indikator SDGs							
8	Cakupan peserta KB aktif	76,3	77,36	76,34	78,1	77,47	76,94
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	24,18	24,95	28,14	28,14	25,79	25,19
10	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	11,97	10,44	10,44	8,94	9,63	10,46

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2021

Permasalahan pada Urusan Penegnadalian Penduduk dan KB adalah masih tingginya angka unmetneed (PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin menunda kehamilan tetapi tidak dilindungi oleh alat kontrasepsi) , hal ini \ disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang . Selain itu juga terjadi peningkatan pada jumlah pernikahan dini, yaitu usia istri yang kurang dari 20 tahun.

Untuk itu perlu dicarikan metode yang berbeda dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan kesehatan reproduksi remaja, baik jalur masyarakat maupun jalur sekolah melalui kegiatan PIK Remaja dan Sekolah Siaga Kependudukan, sehingga lebih tepat sasaran. Hal yang sama juga perlu dilaukan koordinasi lintas sector dalam pembinaan & penyuluhan kepada Kader PUS unmetneed tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi .

i. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Layanan transportasi massal sampai pada pengumpan, kemacetan dan keberadaan Light Rail Transit (LRT) masih menjadi issue yang menjadi perhatian. Dan selama pandemi, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang membuat operasional Trans Semarang dibatasi hingga 16.10 WIB disamping pembatasan kapasitas penumpang maksimal 50% serta penerapan protokol Kesehatan, dan berimplikasi pada penurunan jumlah penumpang.

Penghargaan sebagai bentuk pencapaian kinerja di bidang Perhubungan tahun 2020 adalah : Juara I lomba Terminal Sehat tipe C Tingkat Nasional dan Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) ke-4 tahun 2020 kategori Smart Living untuk aplikasi Trans Semarang.

Tabel 2.41.
Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2015-2020

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan Transportasi Massal							
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	4	6	6	7	8
2	Headway Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	menit	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12

URAIAN		SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Ketersediaan terminal dan sub terminal							
	- Jumlah Terminal	unit	5	5	5	4	3	3
	- Jumlah Sub Terminal	unit	-	-	-	-	-	-
4	Presentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk	org	NA	20.875 .550	23.28 1.311	19.29 6.425	23.18 0.418	10.935.3 06
	- Jumml penumpang moda transportasi massal / BRT / KA / Pesawat							
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal	unit	232	239	271	283	376	376
	- Jumlah halte BRT							
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	55*	60*	65*	65,79	70	70
7	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	8.023. 869	7.725. 490	9.125 .793	10.21 0.296	10.23 3.291	6.835. 778
8	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pada tahun 2020 kinerja yang berhasil direalisasikan atas pelayanan BRT adalah pengoperasian 8 koridor BRT dan 3 feeder, terjadi peningkatan untuk feeder jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebanyak 2 feeder.

Untuk trayek angkutan umum yang optimal hanya tercapai 86,04% dikarenakan beberapa trayek angkutan umum tidak aktif (tidak mampu melakukan peremajaan armada) dan beberapa trayek telah dilayani BRT /Feeder BRT. Dengan adanya pelayanan BRT / Feeder BRT walau beberapa trayek tidak aktif namun pelayanan angkutan umum massal meningkat karena jangkauan BRT / Feeder BRT lebih luas sehingga masyarakat lebih terlayani.

Pelayan BRT pada tahun 2020 meliputi :

- Koridor I : Mangkang – Penggaron (25 armada bus besar)
- Koridor II : Terboyo – Ungaran (26 armada bus sedang)
- Koridor III : Tanjung Mas – Akpol (18 armada bus sedang)
- Koridor IV : Stasiun Tawang – Cangkiran (26 armada bus sedang)
- Koridor V : Meteseh – PRPP (16 armada bus sedang)
- Koridor VI : Undip – Unnes (16 armada bus sedang)
- Koridor VII : Terboyo – Bangetayu – Pemuda (15 armada bus sedang)
- Koridor VIII : Terminal Cangkiran – Gunungpati – Simpang Lima (18 armada bus sedang)
- Feeder I : Ngaliyan – PRPP (24 armada mikro bus)
- Feeder II : Bangetayu – Kaligawe (24 armada mikro bus)
- Feeder IV : Ungaran – BSB (27 armada mikro bus)
- Dan pada tahun 2021 direncanakan beroperasi Feeder III (Penggaron – Sumur Jurang).

Sedangkan realisasi system angkutan rel, sampai dengan tahun 2020 belum terwujud, dan progress pada tahun 2019 sampai pada penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC). Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir on street yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani.

Tabel 2.42.
Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2015-2020

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	70,5	71,84	75,74	78,47	81,32	83,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021

Secara data statistik sementara, jumlah titik parkir *on street* di Kota Semarang masih tinggi (981 titik), perhatian dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan jumlah titik parkir ini terutama yang berada di bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kota.

Tabel 2.43.
Kondisi Lalu Lintas Tahun 2015-2020

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Lalu Lintas								
1	Ketersediaan sarpras lalu lintas							
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	NA	55	59	60,87	61,73	63,13
	- Jumlah rambu lalu lintas terpasang	bh	351 dari 3.347 bh	191 dari 3.538 bh	138 dari 3.676 bh	121 dari 3.797bh	400 dari 4197 buah	100 dari 4297 buah
	- Panjang marka jalan	m	2.956 dari 34.896 m2	2.663 dari 37.559 m2	2.663 dari 40.222 m2*	2.000 dari 42.222 m2	0 dari 42.222 m2	800 dari 43.022 m2
	- ATCS	simpang	22	25	30	32	38	46
2	Rata-rata lama waktu tempuh kendaraan angkutan umum pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk	Menit per 5 Km						
	Daerah pusat kota		15 mnt/ 10 mnt	15 mnt/ 10 mnt	15 mnt/ 10 mnt	20 mnt/ 10 mnt	19 mnt/13 mnt	16 mnt/13 mnt
	- Daerah pinggiran		12 mnt/ 8,5 mnt	12 mnt/ 8,5 mnt	12 mnt/ 8,5 mnt	15 mnt/ 10 mnt	16 mnt/11 mnt	16 mnt/11 mnt
	Jumlah titik / ruas rawan macet	Titik / ruas	8	7	6	5	4	3

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan kota meningkat dari 55% pada tahun 2016 menjadi 63,13% pada tahun 2020 dengan target pada tahun 2021 sebesar 64,93%. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas.

Titik / ruas jalan rawan kemacetan terus menurun dari 8 titik / ruas kemacetan pada tahun 2015 menjadi 3 titik / ruas kemacetan pada tahun 2020. Hal ini didukung dengan pembangunan jalan, fly over, underpass, pelebaran jalan, penambahan fasilitas lalu lintas, operasi penertiban serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Titik / ruas rawan macet yang masih harus diurai antara lain : Jl. Majapahit / Jl. Bigjend.Sudiarto, Jl. Sukun Banyumanik (Jl. Setiabudi), dan Jl. Siliwangi.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan/ pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) yang terhubungkan disemua titik lokasi lampu lalu lintas, optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai terminal penumpang. Kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa ruas jalan walaupun berkurang. Berkurangnya ruas jalan rawan kemacetan di dukung oleh dibangunnya APILL baru, ATCS dan juga didukung oleh pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS mencapai 112,44 %

dimana target yang ditetapkan sebanyak 41 simpang tercapai 46 simpang. Keberadaan ATCS sangat penting dalam memngendalikan arus lalu lintas di persimpangan, dimana target sampai dengan tahun 2021 sebanyak 50 simpang.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Pusat Informasi Publik (PIP) yang memberikan layanan Data dan Informasi, Layanan Pengaduan dan Layanan fasilitas untuk umum dan gratis; Terbangunnya fasilitas publik baru Co Working Space di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; Free Wifi pada tempat public; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang ; dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik ; penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi Smart City Kota Semarang .

Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.

Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id	40	106	141	479	226	156
2	Jumlah wifi di area publik	NA	90	112	259	320	175

3	Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-gov dlm rangka smart city	11	20	106	479	479*	479*
4	Jumlah jaringan komunikasi	40 lokasi	67 lokasi	178 lokasi	426 lokasi	448 lokasi	327 lokasi
5	Jumlah surat kabar nasional / lokal	11	11	10	10	8	10
6	Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan lokal	36	36	53	76	78	210
7	Presentase Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase tertanganinya pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2021

Berkaitan dengan Total laporan yang terkelola dan diproses secara keseluruhan dalam periode Tahun 2020 berjumlah 5183 laporan, yang seluruhnya merupakan pengaduan. Dan OPD dengan kategori paling sering mendapatkan pengaduan adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Dan semua itu belum termasuk dengan layanan Call Center 112 yang sebanyak 404 panggilan dengan OPD yang paling sering mendapatkan laporan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, dan PDAM Tirta Moedal.

Permasalahan dalam pelayanan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya kondisi beberapa peralatan TIK umur teknologinya adalah sekitar 3-4 tahun, sehingga kurang mengikuti perkembangan teknologi yang ada, selain itu juga perlunya penambahan server karena peningkatan kebutuhan, serta koneksi internet yang memerlukan peningkatan kapasitas.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase akses Pemasaran dari yang ditargetkan 21 % tercapai 71,45 % atau berhasil mencapai target sejumlah 340,24 %. Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target tersebut adalah pemasaran produk-produk UMKM secara online melalui GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) yang pada tahun 2020 jumlah produk yang terfasilitasi melalui Sistem GULO ASEM kurang lebih sebanyak 600 produk Kuliner dan Kriya.

Selain itu, fasilitasi akses pemasaran juga dilaksanakan dengan menyelenggarakan temu usaha dan Fasilitasi galeri di Kawasan Kota Lama, Gedung Balaikota, Pasar Bulu dan Pasar Srandol serta melaksanakan Gelar Karya Produk Unggulan UMKM Gerai Kopimi di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Utara, Genuk, Tugu, Banyumanik, Gunungpati, Semarang Timur, Gajahmungkur, Pedurungan, dan gayamsari yang bekerjasama dengan BRI, Sukasari, Restomart nayati dan Bogasari guna membantu/menfasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid 19.

Tabel 2.45.

Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	51	53,87	56,07	59,68	30,12
2	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	1.500 Org	3.115 Org	2.1400 rg	2.857 Org (berijin)	2.822
3	Jumlah koperasi aktif	unit	686	707	618	634	637
4	Jumlah seluruh koperasi	unit	778	801	699	715	718
5	Persentase koperasi aktif	%	88,17	88,26	88,41	86,67	88,70
Indikator SDGs							
6	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.(8.3.1.(c))	%	NA	563/ 11.054 x100% = 5,09 % (Kredit Wibawa)	1075/ 14.893 x100% = 7,22 % (Kredit Wibawa)	80,14% (Kredit Wibawa)	79,67% (Kredit Wibawa)

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2021

Menurunnya pembinaan peningkatan kualitas Usaha Mikro pada tahun 2020 sebesar 30,12% dibandingkan tahun 2019 disebabkan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19. Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM diantaranya kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS sebagaimana diamanatkan dalam PP No 24 Tahun 2018. Selain itu juga keterbatasan permodalan para pelaku Usaha Mikro pada masa dan pasca pandemi. Dan permasalahan klasik terkait jangkauan pemasaran produk usaha mikro (pemasaran secara online) serta masih minimnya kepemilikan Sertifikasi perlindungan produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

1. Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.46.

Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (dln juta rupiah)	9.570.413	10.500.000	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472
2	Laju pertumbuhan investasi	63%	10%	96,14%	33,77%	32,61%	-39,99%
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	138	152	205	317	312	344
4	Jumlah daya serap tenaga kerja	27.853 Orang	32.025 Orang	29.223 Orang	41.430 orang	35.345 orang	64.981 orang

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun	9.570.413	10.500.000	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472
	- Penanaman Modal Asing (PMA) (dlm juta rupiah)	4.138.413	2.950.000	1.246.416	3.800.234	2.876.099	3.632.700
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dml juta rupiah)	5.432.000	7.550.000	19.348.520	23.749.045	33.658.609	18.209.772
6	Prosentase ijin terbit sesuai SP	99,80%	97,00%	97,00%	97,50%	98,20%	98,70%
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	72,19 nilai	78 (nilai)	83,9 (nilai)	86,37 (nilai)	91,76 (nilai)	92,13 (nilai)

Sumber: DPM PTSP, 2021

Peningkatan nilai PMA dipengaruhi kondisi perekonomian dunia yang tidak kondusif karena COVID -19, sehingga banyak para investor asing yang pindah berinvestasi ke Indonesia, diantaranya di Kota Semarang yang dinilai mampu untuk menciptakan kebijakan yang kondusif bagi para investor. Sedangkan untuk penurunan nilai PMDN karena di era pandemi banyak perusahaan dalam negeri yang mencari keamanan dengan tidak berinvestasi terlebih dahulu, dan melihat perkembangan keadaan. Guna menjaga kestabilan perekonomian di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Kota Semarang berinovasi dengan memunculkan konsep “New Normal Tetap Optimal” yaitu pelayanan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan perubahan bentuk pelayanan menjadi secara daring/Online, sehingga para Investor tetap merasa nyaman saat mengurus perizinan tanpa harus bertemu tatap muka.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya belum terealisasinya penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang RTRW yang tentunya berpengaruh terhadap kebijakan investor untuk merealisasikan investasinya, karena merupakan salah satu dokumen pendukung legalitas investasinya di Kota Semarang.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dikarenakan banyak tempat-tempat olahraga di awal pandemi ini banyak yang ditutup, dikarenakan masa pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup significant, karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemic. Demikian pula halnya yang terjadi pada Program keolahragaan.

Berikut Kinerja Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.47.
Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi kepemudaan	60	60	94	75	90	74
2	Jumlah organisasi olahraga	46	42	46	45	61	63
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	15	10	9	9	6	2
4	Jumlah kegiatan olahraga	24	24	46	62	62	24
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	3	4	5	5	5	5
6	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	8 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	2 keg
7	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	460 org	240 org	200 org	200 org	200 org	100 org

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2021

n. Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020, penyelenggaraan urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 98,78%. Melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 2 jenis data, yaitu : Kota Semarang dalam Angka Tahun 2020; dan Analisis Ekonomi Makro Kota Semarang Tahun 2019.

Selain itu juga dilakukan Fasilitasi Forum Data Kota Semarang di seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, pengembangan terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data (semarsatata.semarangkota.go.id) yang bisa mengakomodir pengiriman data / entry data kinerja OPD, serta Koordinasi Forum Data Statistik Daerah.

Tabel 2.48.
Realisasi Kinerja Urusan Statistik tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kota/Kabupaten Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1
2	Buku "PDRB Kota/Kabupaten"	1	1	1	1	1	1
3	Banyaknya Publikasi Data (jenis)	13	13	8	5	4	2
4	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah yang terintegrasi	80	80	78	79	81	98,78

Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2021

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik diantaranya belum semua OPD melakukan pengelolaan data sektoral secara sistematis dan mengikuti kaidah statistic, selain itu juga ketersediaan data makro pada level Kab/Kota publikasi oleh BPS belum sesuai dengan jadwal penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, bahkan 6 indikator makro yang menjadi indicator wajib dalam LPPD Kab/Kota tidak semuanya dilakukan perhitungan /publikasi oleh BPS.

o. Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi, serta software yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan external , juga penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada beberapa aplikasi yang digunakan OPD, sehingga data dan informasi yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlindung .

Tabel 2.49.

Realisasi Kinerja Urusan Persandian tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pelayanan Persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya SDM dan Sarpras Persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2021

p. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang menampilkan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya Festival Seni dan Budaya Rakyat, melalui kegiatan atraksi budaya oleh kelompok drama tradisional di Semawis pada tanggal 19 Januari 2020, kesenian tradisional keroncong di TBRS pada tanggal 15 Januari 2020 dan 19 Februari 2020 dan wayang kulit virtual di Karanggeneng pada tanggal 7 November 2020.

Selain itu juga diberikan bimbingan teknis program dan penerapan CHSE untuk pelaku ekonomi kreatif sub sektor videografi, fotografi, seni pertunjukkan, fashion, aplikasi, DKV, musik, film, animasi, kriya, denok kenang, komunitas pegiat wisata, PKL kota lama dan lainnya. Berikut adalah profil seni dan budaya di Kota Semarang :

Tabel 2.50.

Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	415 sanggar	428 group	488 group	781 group	813 group	876 group
2	Jumlah organisasi budaya	19	19	19	19	19	19

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah grup kesenian	415 group	481 group	488 group	781 group	813 group	876 group
4	Jumlah gedung kesenian	14 gedung	14 gedung	14 gedung	14 gedung	14 gedung	14 gedung
5	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	173 kegiatan	228 kegiatan	225 kegiatan	194 kegiatan	199 kegiatan	199 kegiatan
6	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	3 buah	3 buah	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah
7	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	315 buah	101 buah	153 buah	220 buah	256 buah	447 buah

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2021

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. Selain itu juga masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya outentisitas nilai.

q. Perpustakaan

Selama pandemi jumlah kunjungan offline pada perpustakaan Kota Semarang, berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemic yang menerapkan social distancing. Pada tahap awal, SiBooky (perpustakaan digital Kota Semarang) berisi koleksi ebook baik ebook komersial dengan sistem DRM (Digital Right Management) dan ebook open source atau non komersial tanpa sistem DRM. Untuk ebook dengan sistem DRM, setiap judul baru tersedia satu buku, sehingga jika ebook ini sedang dibaca pengunjung lain, maka pembaca berikutnya harus menunggu lebih dahulu. Sedangkan untuk buku opensource atau non komersial, tidak menggunakan sistem DRM sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dalam waktu bersamaan.

Untuk manajemen peminjaman online juga akan dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui smartphone. Koleksi ebook perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi bluetooth dengan aplikasi tertentu. Pengembangan teknologi digital di Perpustakaan Kota Semarang akan terus dilakukan untuk meningkatkan layanan masyarakat di bidang literasi dengan harapan mampu meningkatkan budaya baca menjadi sebesar 89%.

Tabel 2.51.
Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	186	188	190	191	192	192
2	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	806.521	814.586	410.345	418.793	428.960	10.471* (Tidak termasuk Rumpin dan si booky)
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	110.085	116.652	125.876	132.171	140.046	140.046 blm termasuk e book)

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021

r. Kearsipan

Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Prestasi yang dicapai pada penyelenggaraan Urusan Kearsipan pada tahun 2020 adalah Juara I dan Juara Favorit Stand Terbaik Pameran Kearsipan Virtual Jawa Tengah Tahun 2020.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.52.
Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020

INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik	14.500 arsip	18.453 arsip	22.032 arsip	22.582 arsip	25.141 arsip	28.055 arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	5,80%	6%	7%	8%	8%	10%
3	Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	57%	56%	65%	66%	67%	68%
4	Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	95%	96%	96%	100%	100%	99%
5	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	35	45	60	60	60	60
6	Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara	5.500 arsip	11.000 arsip	16000 arsip	26.000 arsip	25.000 arsip	37.000 arsip
7	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	18.900 dok	22.650 dok	23.650 Dokumen	60.000 Dokumen	74.382 dokumen	83.491 dokumen
8	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	3 kali	5 kali	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021

2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2015 sebesar 30,26 kg/kapita/orang menjadi 40,16 kg/kapita/orang pada tahun 2020.

Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melelangkan ikan di TPI.

Tabel 2.53.

Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2015-2020

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	370	388	388	388*	388	388
2 Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	2.705,19	3.200,57	3.595,61	3.419,24	3.725,78	3.738 1
3 Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	2.136,29	2.392,56	2.429,12	3.079,54	3.153,45	2.801,12
4 Produksi ikan olahan	Ton	15.650,89	16.427,90	16.841,05	17.397,86	17.919	17.485
5 Meningkatkan konsumsi ikan	Kg/kapita	30.26	30,94	33,07	33,14	38,56	40,16

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2021

b. Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan pada tahun 2020 secara umum mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, dimana dalam rangka social distancing beberapa obyek wisata dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung bahkan sampai dengan penutupan operasionalisasinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan yang penurunannya bahkan sampai hampir sebesar 60% dari tahun 2019 yang sebesar 7.223.529 orang. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2020 sebanyak 3.266.931 orang ,yang terdiri dari wisata mancanegara sebanyak 6.628 orang dan wisatawan domestik sebanyak 3.260.303 orang. Demikian pula dengan kunjungan wisata MICE yang pada tahun 2019 sebesar 8.619 orang menurun menjadi sebesar 5.109 orang pada tahun 2020 , karena pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19) antara lain pembatasan kegiatan sosial budaya (event).

Di Kota Semarang terdapat 71 obyek wisata yang terdiri dari 12 wisata alam, 25 wisata budaya dan 34 wisata buatan, di Kota Semarang. Dari 71 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa Semarang dan Kampoeng Wisata Taman Lele yang mempunyai potensi untuk kembali memulihkan perekonomian di Kota Semarang pasca pandemic.

Tabel 2.54.
Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	200,2	6,5	7,8	8,6	26,62%	-59,77
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	51.880	29.283	55.252	66.105	82.030	6.628
	· Domestik	Orang	4.324.479	4.605.570	4.964.804	5.703.282	7.223.529	3.260.303
3	pendapatan sektor pariwisata	Rp. juta	149.719,4	160.856	205.866,3	256.362,7	312.195,5	190.758,3
4	Jumlah Destinasi Wisata	obyek	63	64	64	71	71	71
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	NA	7.354	8.003	8.549	8.619	5.109
	Lama menginap MICE	hari	NA	1,35 hari	1,43 hari	1,47 hari	1,51 hari	1,4 hari

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2021

Meski dalam pandemi, penyelenggaraan urusan pariwisata dapat beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya : Penghargaan ASEAN Clean Tourist City Standard 2020-2022, Juara I Lomba Inovasi Daerah "New Normal" Sektor Wisata (Badan Litbang Kemendagri), Juara III Lomba Inovasi Daerah "New Normal" Sektor Hotel (Badan Litbang Kemendagri), Penyaji Terbaik I pada kegiatan Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota (Kawasan) dan Wilayah KSPN Melalui Event Bersama “Kedungsepur”.

c. Pertanian

Hal yang menggembirakan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah, meningkatnya luas lahan tanaman pangan organik yang pada tahun 2019 seluas 10 Ha, pada tahun 2020 meningkat 40 % menjadi seluas 14 Ha. Hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk konsumsi tanaman organik meningkat, meskipun secara harga jual lebih tinggi. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih dapat dipertahankan seluas 2.251,41 Ha.

Dibidang peternakan kasus penyakit hewan menular terus dapat ditekan, dimana pada tahun 2019 sebesar 27 kasus, namun pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 14 kasus. Hal ini ditunjang pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta penanggulangan penyakit hewan menular melalui biosecurity, vaksinasi, dan surveillance.

Tabel 2.55.
Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2020

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	9.754	9.010	9.603	9.679	9.492	10.265
2	Jumlah tenaga penyuluh pertanian (orang)	27	27	27	25	29	27
3	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	13	13	14 (gapoktan)	18 (gapoktan)	19 (gapoktan)	24 (gapoktan)

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	4	5	21	37	66	91
5	Jumlah Produksi Peternakan(Ton)	28.745,65	30.818,14	33.325,60	33.702	37.347	35.045
6	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	54.678	54.978	55.494	51.009	51.698	51.379
7	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)	-	5	7	9	14	19

Sumber: D. Pertanian, 2021

Disisi lain kinerja produksi pertanian yang semula sebesar 51.698 ton pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi sebesar 51.379 ton pada tahun 2020. Hal ini diantaranya disebabkan perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kekeringan pada lahan sawah yang menyebabkan jadwal tanam mundur. Selain itu juga alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan alih komoditas.

Demikian pula untuk produksi hasil peternakan, yang menurun produksinya sebesar 6,16% dibandingkan dengan produksi tahun 2019. Penurunan ini secara umum disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Sehingga jumlah pematangan hewan kurban, permintaan hotel, restaurant, warung, catering juga menurun.

d. Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun 2017, dan angka ini kembali turun pada tahun 2019 sebesar US\$1.101.478.422, barulah pada tahun 2020 kembali naik menjadi sebesar US\$ 3.084.439.326,82.

Penurunan tersebut dikarenakan adanya persaingan dagang antara China dan Amerika, dimana Amerika Serikat mengurangi impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai ekspor Kota Semarang yang mana komoditas Tekstil dan Produk Tekstil cukup memiliki andil besar dalam nilai ekspor Kota Semarang.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Semarang, dilakukan pengawasan terhadap Prosentase alat UTTP bertera sesuai standar, dimana pada tahun 2020 alat UTTP bertera mencapai 90% meningkat dibandingkan dengan keadaan 2017 yang sebesar 70%.

Masih dibidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanan dilakukan peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya supermarket/swalayan/toko modern. Pemerintah Kota Semarang sangat memperhatikan perkembangan sarpras perdagangan terutama untuk pasar rakyat. Pada tahun 2020 jumlah sarana perdagangan yang representative masih sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak

17 unit dimana selama pandemi rata-rata penurunan omset mencapai 40 %, dan sempat pasar tradisional menjadi klaster penyebaran covid.

Beberapa penghargaan menambah capaian kinerja pada Urusan Perdagangan, diantaranya Juara I Pameran Produk Unggulan Khas Daerah dan Investasi (12 – 15 Maret 2020) bertempat di Cihampelas Walk Kota Bandung Jawa Barat, Juara II Lomba Inovasi Daerah Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Pasar Tradisional, Juara III Lomba Inovasi Daerah Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Pasar Modern, Penghargaan aplikasi e-retribusi pasar tradisional (Si Pariem) mewakili Kota Semarang, sebagai Kota Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2020, ketiga penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.56.
Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5%	1.155.342.967,83 US\$	1.218.036.901 US\$	1.826.171.393 US\$	1.163.718.499 US\$	1.101.478.622 US\$	3.084.439.326,82 US\$
2	Jumlah Pengawasan Barang yang beredar	260 kali	241 kali	238 kali	252 kali	260 kali	260 kali*
3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	-	11	13	15	17	17
4	Prosentase alat UTPP bertera	-	60%	70%	80%	85%	90%

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

e. Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variable yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

Tabel 2.57.
Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	27,48	27,81	27,65	27,88	27,44	28,64
2	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga konstan)	26,34	25,96	25,67	25,27	25,64	26,20
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3.644	3.495	3.523	3.542	3.570	3.587
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	448	530	530	530	530	530
5	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	2751	2758	2767	2782	2790	2.805
6	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10	10

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Produksi dan transaksi penjualan IKM	71,74 %	81,06 %	81,06 %	81,06%	81,06%	NA
8	Peningkatan penataan struktur IKM	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	NA
9	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	16 sentra	20 sentra	20 sentra	20 sentra	20 sentra	20 sentra
Indikator SDGs							
10	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	27,48	27,81	27,61	27,22	27,43	NA
11	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur.	8,87	9,8	7,6	7,3	9,2	NA
12	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	36	37,5	65,5	16,2	28,6	NA

Sumber: Dinas Perindustrian, 2021

2.1.3.4. Fokus Fungsi Penunjang

a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2020 Kota Semarang termasuk Pemda yang menyelenggarakan Pilkada serentak, sehingga tahun 2020 merupakan tahun persiapan bagi daerah untuk menyusun dokumen pendukung bagi dokumen RPJMD Kepala Daerah terpilih, diantaranya Naskah Akademis RPJMD, Laporan Hasil Pengendalian RKPD, Evaluasi Hasil RKPD, Evaluasi RPJMD, Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD, Draft Ranwal RPJMD, serta penyusunan Kajian Evaluasi Keterkaitan Program Kegiatan untuk Prioritas Pembangunan.

Kinerja tertinggi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2020, juga dapat terlihat dengan diperolehnya Predikat Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, tanggal 30 April 2020). Selain itu juga menjadi Kota Terbaik I Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana Piagam Penghargaan Gubernur Jateng Nomor 002.5/0008602 tanggal 7 Juni 2020, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/14 tanggal 27 April 2020 tentang Penerimaan PPD Tahun 2020. Sebagai Kota Sangat Inovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Menteri Dalam Negeri, Peringkat II Kategori Pemerintah Daerah Inovatif (Kota Inovatif) Anugerah Inovasi Indonesia pada Lomba Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan lainnya.

Pada tahun 2020 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diwujudkan dalam : penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dan RKPD tahun 2021, Naskah Akademis RPJMD, Laporan Hasil Pengendalian RKPD, Evaluasi Hasil RKPD, Evaluasi RPJMD, Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD, Draft Ranwal RPJMD, Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangwil, serta penyusunan Kajian Evaluasi Keterkaitan Program Kegiatan untuk Prioritas Pembangunan.

Tabel 2.58.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen RKPd yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu	2	2	3	3	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPd (%)	89,69	99,63	100	98,91	98,90	94,16
3	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan	4	5	5	9	9	8
4	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd	91,13	68,72	70,42	74,23	75,14	87

Sumber : Bappeda, 2021

Pandemi juga berdampak pada konsistensi antar dokumen perencanaan, serta capaian kinerjanya. Kesesuaian program RPJMD dengan RKPd hanya sebesar 94,16 %, namun kesesuaian program APBD terhadap program RKPd sebesar 100,00 %. Ketidaktercapaian dari indikator kesesuaian program RKPd Tahun 2020 terhadap program RPJMD tahun berkenaan lebih dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang refocusing anggaran terkait pandemi, sehingga terdapat beberapa program yang ditunda pelaksanaannya.

Terkait dengan implementasi Permen 70 tahun 2019, karena masih dalam pengembangan baik system maupun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam permendagri 90 tahun 2019 , sehingga proses penyusunan APBD 2021 agak tersendat, karena beberapa pemetaan dana transfer terbit pedomannya setelah APBD ditetapkan. Dan pada tahap penata usahaan juga masih terkendala, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021, untuk sementara Kota Semarang secara bersama menggunakan SIMDA BPKP dalam keperluan penatausahaan keuangan untuk bisa dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2021 dengan tetap beriringan dengan SIPD.

b. Keuangan

Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah karena pandemic covid, namun tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) masih bisa melampaui target tahun 2020 dan realisasi tahun lalu. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 46,02% dari target 43,61% dan melampaui realisasi tahun 2019 yang sebesar 45,26%.

Beberapa kebijakan yang diambil, untuk mencari alternative pendapatan sekaligus pemberian insentif pengurangan pajak diantaranya : penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB 5%-15% (Mei s.d Juni 2020), pengurangan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 15 % dari bulan Mei-Juni 2020 dan Penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan pajak daerah untuk pembayaran (1-31 Juli 2020)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2020 adalah dampak pandemi dan dinamika regulasi yang cepat dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Refocusing anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi dan alokasi dana transfer pada akhir periode menjadikan

penyusunan perkada penjabaran bahkan setelah Perda Perubahan APBD ditetapkan untuk mengakomodir DID Tambahan dan Hibah Pariwisata .

Tabel 2.59.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2015-2020

No	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	26,10 %	35,98 %	45,19 %	43,96 %	45,29 %	46,02 %

Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2021

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja penyelenggaraan administrasi dalam fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Diklat ditandai dengan diperolehnya predikat Terbaik dalam layanan mutasi kepegawaian tahun 2020 wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta dari kantor Regional I BKN Yogyakarta. Selain itu juga penghargaan BPSDM Award Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Tengah .

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang dalam bidang kepegawaian dan diklat diantaranya adalah masih kurangnya pemenuhan kebutuhan pegawai, dimana pada tahun 2020 jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sebanyak 21.858 orang, namun baru terpenuhi sebanyak 9.766 pegawai atau sebesar 44,67%. Dan karena pada tahun 2020 terdapat kebijakan tidak terdapat penerimaan CPNS, sehingga untuk membantu pelaksanaan tugas kegiatan , OPD melakukan seleksi Non ASN sehingga pada tahun 2020 jumlah Non ASN sebanyak 8.254 orang dan 34 Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL).

Untuk pengembangan kompetensi aparatur, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional terkendala dengan adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga dilakukan penundaan.

Tabel 2.60.

Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020

NO	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya	94 Orang	126 Orang	127 Orang	127 Orang	67 Orang	74 Orang
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	1055 Orang	956 Orang	550 Orang	550 Orang	372 Orang	397 Orang

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2021

d. Pengawasan

Capaian dalam Fungsi Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK ,

Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kota Semarang tahun 2020 sebesar 92,43% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 89,57%. Selain itu juga tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencapai level 3 (terdefinisi).

Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggung jawab APIP menjadi lebih berat, yaitu sebagai auditor, reviewer, evaluator, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang penugasan yang ada. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Fungsi Pengawasan adalah belum efektifnya penerapan SPIP pada OPD dan masih banyaknya temuanberulang dari hasil pemeriksaan.

Tabel 2.61.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*

Sumber : Inspektorat, 2021

e. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kinerja dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 selain terlihat dari capaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat capaiannya, juga terlihat dari beberapa prestasi yang diraih, diantaranya Walikota Semarang sebagai People of the year 2020 oleh Metro TV, Top Leader of the year 2020 oleh Seven Media Asia, Best in City Transformation SINDO pada Indonesia Visionary Leader serta Platinum Award (peraih medali terbanyak untuk 7 kategori) PR-Indonesia Award 2020.

Beberapa capaian kinerja terkait dengan pelayanan pengadaan barang dan jasa (ULP) pada tahun 2020 telah terealisasi 103 paket pekerjaan, dan ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 266 paket. Hal ini karena refocusing anggaran, akibat pandemic. Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 130 dokumen kerjasama dan ini melampaui yang ditargetkan sebesar 99 dokumen.

Meskipun demikian dalam evaluasi ini dapat disampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas unsur pendukung antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah, terlihat dari 16 Raperda yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda terealisasi hanya 5 raperda yang disetujui (31,25 %). Hal ini terkendala oleh kevakuman kegiatan rapat DPRD selama 4 bulan karena pandemi. Demikian pula halnya untuk kegiatan konsultasi ke pemerintah pusat.

Tabel 2.62.

Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	12	4	13(dari target 16 Raperda atau 82,60)	6(dari target 19 Raperda atau 31,57%)	8(dari target 15 Raperda atau 53,33%)	5 (dari target 16 Raperda atau 31,25%)
2	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.	%	44,42	85	82,6	85	85	85
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)	Predikat	CC	B	B	B	B	B
4	Jumlah Produk Hukum : • Peraturan Daerah • Peraturan Walikota • Keputusan Walikota	Perda Perwal SK Walikota	9 37 575	18	13 79 328	11 94 405	8 73 420	5 94 426
5	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	9	9	15	18	35	28
6	Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya	Dokumen	8 Dok	100 Dok	9 Dok	58 Dok	85 Dok	130 Dok
7	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	83,25	100	100	100	100
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	78	78,88	83,25	83,81	86,68

Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 2021

f. Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kecamatan di Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100 %; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (gerbang hebat); Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan; serta Ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan, untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat diseluruh kelurahan, terdapat penyesuaian pada aturan pelaksanaannya didaerah, diantaranya Penetapan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, penyiapan/penataan perangkat kelurahan serta perubahan perwal lampiran APBD dalam menyesuaikan nomenklatur kegiatan baru. Hal-hal yang dilaksanakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam fungsi kewilayahan diantaranya:

Tabel 2.63.
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah	%	72	77	76	77	80	83,30
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan	Kegiatan	177	92,66	177	177	177	177
3	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	NA	86,26	85,43	92,66	97,77	97,64
4	Persentase RT yang usul dalam musrenbang	%	NA	75,00	83,56	86,26	95,68	90,91
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	NA	76,57	70,23	75,00	53,05	53,28

Sumber : 16 Kecamatan, 2021 (Data diolah)

Beberapa kendala dalam penyelenggaraan urusan penunjang kewilayahan diantaranya : belum semua wilayah Kelurahan bisa difasilitasi pembangunan melalui musrenbang karena belum ada serah terima fasum dari pengembang ke pemerintah mengakibatkan partisipasi masyarakat didaerah itu rendah dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;

2.1.4 Aspek daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan

sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Walikota sepanjang 839.901 km, dengan kondisi baik sepanjang 731.013 km (87,04%), dengan kondisi sedang sepanjang 47.108 km (5,61%) , kondisi rusak ringan sepanjang 37.855 km (4,51%) dan kondisi rusak berat sepanjang 23.925 km (2,85%)
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Untuk tahun 2020 di Bandara Achmad Yani dilakukan sebanyak 17.681 kali penerbangan kedatangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.948.569 orang dan 17.673 kali penerbangan pemberangkatan. dengan jumlah penumpang sebanyak 1.919.405 orang, serta penumpang transit sebanyak 21.144 orang.
- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang , ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional.
- 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu (kewenangan provinsi), terminal penumpang B dikelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, dikelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

b. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut : kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata /rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2019 sebanyak 174.584 pelanggan, meningkat menjadi 192.969 pelanggan pada tahun 2020. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air pada tahun 2020 masing-masing sebesar 67.153.212 m³ dan Rp.339.414.000.000,-.

Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelanggan	160.427	163.584	169.938	172.334	174.584	192.969
2.	Pemakaian Air (Ribu M ³)	45.996,71	45.841, 78	53.391, 90	53.301,67	53.739,007	67.153,212
3.	Penjualan Air (Juta Rp)	170.330,48	169.667,39	199.803,56	206.117, 91	257.636,22	339.414,00

Sumber : PDAM Kota Semarang 2021

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2019 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015 sebanyak 345 buah menjadi 1.177 buah di tahun 2019, Selain itu jumlah hotel sesuai dengan juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 131 buah di tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 137 hotel di tahun 2019 dengan rincian hotel berbintang sebanyak 77 buah dan hotel non bintang 149 buah, Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di KotaSemarang.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparaturnya Pemerintah, Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2019 angka kriminalitas sebesar 1151 kejadian , menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2018 yang sebesar 1143 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun

sebelumnya. Keadaan ini diperkuat dengan menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 44,17%. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasikan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 5.630 unit ditahun 2018, meningkat dibanding tahun 2017 yang sebanyak 5,613 unit. Dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan terkecil (RT) dilakukan pemasangan CCTV.

b. Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2020 , Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah : berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modalasing.

Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

Kemudahan investasi dapat diukur diantaranya melalui indikator Prosedur ijin terbit perijinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020 telah mencapai 98,70 % meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,20%. Selain itu juga Survey Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan, dimana capaian pada tahun 2020 sebesar 92,13% keadaan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 91,76%. Diharapkan adanya Kondisi iklim usaha Kota Semarang yang kondusif akan berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.




2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2010 hingga 2020 ,persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 maupun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66% Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat

dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50 %. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2021 (s.d trw 2) dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2021 (s.d trw 2) ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut :

- a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2021 (s.d trw 2) sampai (*) memiliki status :
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 45% ($X > 45\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 37,5 % sampai dengan 45% ($45\% \geq X > 37,5\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 32,5% sampai dengan 37,5% ($37,5\% \geq X > 32,5\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 25% sampai dengan 32,5% ($32,5\% \geq X > 25\%$); dan
 - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 25% ($X \leq 25\%$)
- b. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target akhir RPJMD (**) memiliki status :
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$); dan
 - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($X \leq 50\%$)
- c. Untuk Identifikasi Capaian pada periode akhir terhadap target akhir RPJMD (***) , dengan pemredikatan mandiri memilikiki status :
 -  Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) lebih besar atau sama dengan 100 % ($100\% \geq X$);
 -  Akan Tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) diantara 80% atau kurang dari 100% ($100\% > X \geq 80\%$);
 -  Perlu Upaya keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) kurang dari 80% ($X < 80\%$);

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2021 (sd trw 2) dan terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 .

1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pendidikan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan wajib Pendidikan tahun 2021 Triwulan II sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Meskipun demikian untuk meningkatkan pelayanan bidang pendidikan dengan kebiasaan baru, perlu terus menjadi perhatian terkait dengan sarpras belajar dengan metode daring (digitalisasi bidang pendidikan), disamping kesiapan fisik siswa dan tenaga pendidik untuk pembelajaran tatap muka yang direncanakan pada bulan Agustus.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan Triwulan II tahun 2021 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), maka sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sudah baik. Dari sebanyak 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori tercapai, dan sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, termasuk 3 diantaranya program penunjang yang memang secara penjadwalan masih berjalan sampai dengan triwulan IV nanti, prosentase PAUD dan PNF berijin dan penerapan Muatan Lokal untuk PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Tertib pelaporan capaian kinerja dan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
an Daerah Kab/Kota	keuangan											
	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan
	Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,67	111,67	100,00%	ST	111,67	111,67	100,00%	ST	●	Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs	%	115,59	115,59	100,00%	ST	115,59	115,59	100,00%	ST	●	Dinas Pendidikan
	APK PAUD 3-6 tahun	%	85,73	83,01	96,83%	ST	85,73	83,01	96,83%	ST	▶	Dinas Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	%	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST	●	Dinas Pendidikan
Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualitas S1/D-IV	%	88,88	88,75	99,85%	ST	88,88	88,75	99,85%	ST	▶	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pendidikan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▶ : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) ▼ : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Pencapaian kinerja urusan wajib Kesehatan pada tahun 2021 sampai dengan Triwulan II sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Kondisi pandemi menuntut kerja keras tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan covid di bidang kesehatan, disamping pelayanan kesehatan lainnya, termasuk 12 jenis layanan SPM di bidang kesehatan. Dari pengalaman sebelumnya, beberapa capaian kinerja bidang kesehatan terkendala dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga jadwal kunjungan sasaran layanan

kurang memenuhi standar pelayanan, utamanya jika kelompok penerima layanan adalah mereka yang rawan tertular Covid -19 seperti halnya kelompok lansia, bayi, balita, Penderita DM, Hipertensi dan TB. Untuk itu perlu disiapkan strategi /layanan untuk mengantisipasi berulangnya permasalahan yang sama.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (Tahun 2021) sampai dengan Triwulan II yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 5 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam kategori sedang. Indikator yang masuk dalam kategori sedang yaitu : Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang dan Nilai Kinerja RS BLUD Sehat sebesar 71,85 % (A) dari target A+ (95%).

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), maka sampai dengan Triwulan II tahun 2021 perlu mendapat perhatian. Dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori tercapai, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 2 indikator termasuk kategori perlu upaya keras (capaian status kurang dari 80%). Indikator perlu upaya keras yaitu Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang dan Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 Triwulan II pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perang kat Daerah
			Target RKPd 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapain ya Swasti Saba Wistara	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehat an
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan peningkat an kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Kesehat an
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Proporsi Pelayanan kefarmasi an di puskesmas sesuai Standar	%	90,00	50,00	55,56%	ST	90,00	90,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehat an

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPd 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	100,00	90,00	90,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kesehatan, RSUD KRMT Wongsonegoro
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++)	%	100,00	71,85	71,85%	ST	100,00	71,85	71,85%	S		RSUD KRMT Wongsonegoro
	Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD	%	100,00	74,00	74,00%	ST	100,00	74,00	74,00%	S		RSUD KRMT Wongsonegoro

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian kinerja indikator program tahun 2021 urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 sd triwulan II dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan triwulan II yaitu sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat

tinggi, 6 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi dan 1 indikator dalam status sedang.










Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), maka sampai dengan tahun 2021 cukup baik. Dari sebanyak 16 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, dan 11 indikator dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator dalam status perlu upaya keras, yaitu penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian yang baru terlaksana 6 dari 8 bangunan lingkungan hunian yang ditargetkan. Dan akan terpenuhi dengan sisa waktu yang ada meski hanya bersifat pemeliharaan. Pada tahun 2021 karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi, beberapa kegiatan yang direncanakan pada urusan pekerjaan umum dilakukan penundaan, seperti pembebasan tanah di beberapa ruas atau wilayah untuk persiapan proyek pembangunan. Namun Normalisasi Kali beringin tetap terlaksana sebagai komitmen pemda terhadap proyek strategis nasional. SPM dibidang PUPR, terkait indikator Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum, terdapat perubahan formulasi dimana dengan capaian 96,28 % Rumah Tangga di Kota Semarang telah tersedia akses air minum dengan asumsi 1 SRT bisa melayani 9 orang jiwa, namun berdasarkan pada desk SPM dengan Kemendagri, berdasarkan Permendagri Nomor 29 tahun 2018 terjadi perubahan formulasi menjadi 1 SRT melayani 5 orang jiwa. Dengan perubahan ini tentunya terjadi penurunan hasil perhitungan menjadi hamper separuhnya.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 sampai dengan triwulan II pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	%	97,30	40,00	41,11 %	T	97,30	88,00	90,44 %	ST	▼	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan banjir dan rob	%	3,40	3,73	91,15 %	ST	3,40	3,73	91,15 %	ST	▶	Dinas Pekerjaan Umum

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	73,95	92,38	124,92%	ST	73,95	92,38	124,92%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pekerjaan Umum
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang ber-IMB	%	55,00	54,94	99,89%	ST	55,00	54,94	99,89%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	74,00	75,83	102,47%	ST	74,00	75,83	102,47%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Teknis yang sesuai kriteria	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan supply air baku	%	100,00	87,50	87,50%	ST	100,00	87,50	112,50%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum	%	100,00	96,28	96,28 %	ST	100,00	96,28	96,28 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	100,00	86,51	86,51 %	ST	100,00	86,51	86,51 %	T		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh	%	100,00	99,79	99,79 %	ST	100,00	99,79	99,79 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Kondisi Baik	%	75,32	75,82	100,66 %	ST	75,32	75,82	100,66 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan Tata Ruang	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian	Lokasi	8,00	4,00	50,00 %	ST	8,00	6,00	75,00 %	S		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

1.04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja pada urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, semuanya dalam kategori sangat tinggi.

Demikian pula hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan yaitu sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi. Meskipun demikian target Nasional Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) perumahan kumuh sebesar 0% pada tahun 2019 belum tercapai dikota Semarang. Sampai dengan 2021 trw 2 perumahan kumuh masih menyisakan 1,83% . Untuk itu perlu sinergitas program untuk menuntaskan pencapaian target tersebut.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 triwulan II pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	%	100,00	90,82	90,82 %	ST	100,00	90,82	90,82 %	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	98,00	98,17	100,17 %	ST	98,00	98,17	100,17 %	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penerangan jalan umum	%	100,00	95,87	95,87 %	SR	100,00	95,87	95,87 %	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00 %	ST	100,00	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	50,00	50,00 %	ST	100,00	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	50,00	50,00 %	T	100,00	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

1.05 Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, menjaga ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terlihat dari 8 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semua indikator memiliki capaian kinerja sangat tinggi.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, dari 8 indikator terdapat 2 indikator kategori capaian sangat tinggi, dan 6 sisanya dengan capaian dalam kategori tinggi. Namun demikian terdapat SPM layanan di bidang Trantibum, realisasi yang paling rendah pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu sebesar 86,3%. Hal ini disebabkan kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, selain itu masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 Triwulan II pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		SatPol PP, BPBD dan Damkar
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		SatPol PP, BPBD dan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah	
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	aparatur												Damkar
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T			SatPol PP, BPBD dan Damkar
	Tingkat disiplin Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T			SatPol PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan	Perda	31,00	31,00	100,00 %	ST	31,00	31,00	100,00 %	ST			SatPol PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran	%	88,00	77,05	87,56%	ST	88,00	77,05	87,56%	T			DAMKAR
	Persentase Cakupan Pelayanan Kebakaran	%	25,22	69,56	275,81 %	ST	25,22	69,56	275,81 %	ST			DAMKAR
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T			BPBD

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

1.06 Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi pada urusan sosial sampai dengan Triwulan II tahun 2021 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kondisi 8 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semua indikatornya dengan kategori sangat tinggi. Demikian pula bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka indikator dengan status capaian sangat tinggi sebanyak 7 indikator, dan status capaian rendah sebanyak 1 indikator. Indikator yang termasuk kategori rendah adalah Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dimana sampai dengan triwulan kedua baru terealisasi fasilitasi terhadap 7 dari 12 PSKS yang akan dilanjutkan pada sisa waktu yang ada.

Kinerja tertinggi dalam urusan sosial adalah penurunan angka kemiskinan. Namun pandemi menjadikan angka kemiskinan baik perhitungan BPS maupun DTKS mengalami peningkatan. Menurut data BPS persentase penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98% meningkat menjadi sebesar 4,34 %. Demikian pula % penduduk miskin yang ditunjukkan oleh DTKS, pada tahun 2019 sebesar 13,8% meningkat menjadi sebesar 16,15% pada Oktober 2020. Salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan ini diantaranya tingginya Tingkat Pengangguran pada periode yang bersamaan. Sehingga meskipun ragam kegiatan yang bersifat Bantuan, Jaminan dan Perlindungan Sosial disalurkan hanya bantuan yang bersifat sementara

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan sosial ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.68.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Sosial

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD 2021	Real s.d Trw II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	60,42	60,42%	ST	100,00	92,08	92,08%	ST		Dinas Sosial
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	58,33	58,33%	ST	100,00	91,67	91,67%	ST		Dinas Sosial
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	55,00	55,00%	ST	100,00	91,00	91,00%	ST		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	92,00	58	63,04%	ST	92,00	58	63,04%	ST		Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Jumlah	50,00	0,00	100,00%	ST	50,00	0,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penanganan PMKS	%	98,00	99,10	101,12%	ST	98,00	99,10	101,12%	ST		Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Angka Kemiskinan	%	16,00	16,15	99,07%	ST	16,00	16,15	99,07%	ST		Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	4,00	59,20	1480,00%	ST	4,00	59,20	1480,00%	ST		Dinas Sosial

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.07 Urusan Tenaga kerja

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II pada urusan tenaga kerja menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, memiliki 5 indikator dengan kategori sangat tinggi, 1 indikator dengan kategori tinggi dan 1 indikator dengan kategori sedang.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari 7 indikator yang di targetkan, 3 indikator berstatus tinggi dan 1 indikator berstatus sedang dan 3 indikator yang masih berstatus sangat rendah yaitu Persentase Peluang Kerja Mandiri, Persentase penempatan tenaga kerja dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini sangat dipengaruhi kondisi perekonomian akibat pandemi yang tekanannya masih dirasakan dunia usaha, selain juga masih diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼). Terdapat 3 indikator yang memiliki kategori akan tercapai dan 4 indikator yang memiliki kategori perlu upaya keras. Indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Persentase tenaga kerja terampil, Persentase Peluang Kerja Mandiri, Persentase penempatan tenaga kerja AKAD, AKL, AKAN, dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Untuk itu perlu penyediaan kesempatan kerja dan berusaha yang dilakukan lintas sector sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang terkena PHK yang jumlahnya cukup tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Tenaga Kerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target a RKPD 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	%	60,00	40,00	66,67%	ST	60,00	40,00	66,67%	S	▼	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peluang Kerja Mandiri	%	80,00	35,00	43,75%	T	80,00	35,00	43,75%	SR	▼	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase penempatan tenaga kerja AKAD, AKL, AKAN	%	90,00	32,50	36,11%	S	90,00	32,50	36,11%	SR	▼	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	80,00	40,00	50,00%	ST	80,00	40,00	50,00%	SR	▼	Dinas Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target a RKPd 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Thd Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi S.D Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Tenaga Kerja
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Tenaga Kerja
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Tenaga Kerja

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.08 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Hasil evaluasi pencapaian RKPd tahun 2021 Triwulan II pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator yang dievaluasi semuanya memiliki kategori sangat tinggi.

Sementara itu jika disandingkan dengan target RPJMD, terdapat sebanyak 7 indikator kinerja termasuk kategori sangat tinggi dan sebanyak 3 indikator kinerja termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Semarang tetap terkawal meski situasi pandemic yang mestinya berdampak pada kelompok rentan.

Pencapaian indikator RPJMD pada Triwulan II jika di dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , terdapat 5 indikator yang memiliki kategori telah tercapai, 5 indikator yang memiliki kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Thd Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangu	Org anisasi	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST		DPPA

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Thd Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II	Capaian Thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	nan											
Program Perlindungan Perempuan	Jumlah petugas perlindungan di Kecamatan	Orang	16,00	16,00	100,00%	ST	16,00	16,00	100,00%	ST		DPPA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan program pengarusutamaan gender	%	80,00	80,00	100,00%	ST	80,00	80,00	100,00%	ST		DPPA
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	7,00	6,80	97,14%	ST	7,00	6,80	97,14%	ST		DPPA
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	%	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST		DPPA
Program Pemenuhan Hak Anak (PHAA)	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	7,00	6,80	97,14%	ST	7,00	6,80	97,14%	ST		DPPA
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DPPA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		DPPA
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		DPPA
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		DPPA

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.09 Urusan Pangan

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Pangan menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk kategori sangat tinggi.

Demikian pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, hasilnya menunjukkan 3 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 4 indikator dengan kategori tinggi.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan urusan pangan diantaranya Peningkatan Pemahaman Pentingnya Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan Gizi Keluarga . disamping menjamin ketersediaan pangan terpenuhi dengan harga terjangkau, untuk meringankan tekanan ekonomi pada masyarakat yang terdampak pandemi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Pangan disajikan sebagai berikut:




Tabel 2.71.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pangan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan distribusi pangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan harapan	skor	88,00	89,10	101,25%	ST	88,00	89,10	101,25%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Penanganan Daerah rentan pangan	Kelurahan	133,00	132,00	99,25%	ST	133,00	132,00	99,25%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan	%	80,00	90,29	112,86%	ST	80,00	90,29	112,86%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (ketapang)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (ketapang)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (ketapang)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : e.Monev Perencanaan




*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.10 Urusan Pertanahan



Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 Triwulan II pada urusan Pertanahan menunjukkan kinerja baik, hal ini ditunjukkan dari indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan semuanya memiliki status pencapaian sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , semua indikator termasuk dalam kategori telah tercapai (90% dan 88,27%) dari yang telah ditargetkan (75% dan 66%) .

Meski pencapaiannya telah melampaui target yang ditetapkan, terkait dengan tertib administrasi pertanahan, dalam rangka memberikan dukungan program kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) untuk menargetkan seluruh tanah sudah bersertifikat di tahun 2025, kota Semarang masih perlu meningkatkan kinerjanya. Dukungan ini berupa pendataan data pertanahan melalui Monitoring dan evaluasi administrasi data pertanahan di kelurahan, Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan tata ruang dan bangunan, juga Survey primer data pertanahan. Disisi lain Pemerintah Kota Semarang juga berkepentingan untuk peningkatan potensi pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Pertanahan disajikan pada tabel berikut ini.




Tabel 2.72.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pertanahan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian a Thd Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian thd Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tertib administrasi pertanahan	%	75,00	37,50	50,00%	ST	75,00	90,00	120,00 %	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tertib administrasi	%	66,00	88,27	133,74 %	ST	66,00	88,27	133,74 %	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 Triwulan II pada urusan Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 15 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, sebanyak 14 indikator memiliki kinerja sangat tinggi dan 1 indikator memiliki kategori Tinggi

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 6 indikator dengan status sangat tinggi, 6 indikator dengan status tinggi, 8 indikator dengan status capaian tinggi dan 1 indikator dengan status rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3. Meningkatnya pengelolaan sampah B3 diantaranya juga dikarenakan pandemi, dimana sampah medis jauh terjadi lonjakan, dan tidak sebanding pengolahan limbah B3 sesuai standar.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), terdapat 4 indikator yang termasuk kategori telah tercapai, 9 indikator termasuk kategori akan tercapai dan 2 indikator kategori perlu upaya keras. Indikator yang masuk kategori perlu upaya keras yaitu : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3, serta Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH kinerjanya belum maksimal karena sampai dengan Juni masih diberlakukan PPKM, sehingga kegiatan sosialisasi dan pembinaan belum efektif.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	46,26	45,09	97,47%	ST	46,26	45,09	97,47%	ST	▶	Disperkim
	Persentase ketersediaan lubang pemakaman	%	55,00	47,70	86,73%	ST	55,00	47,70	86,73%	T	▶	Disperkim
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	5,00	4,00	80,00%	ST	5,00	4,00	80,00%	T	▶	Dinas Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)	indeks	55,00	66,05	120,09%	ST	55,00	66,05	120,09%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air	hektar	65,00	65,00	100,00%	ST	65,00	65,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang terbangun	unit	5,00	5,00	100,00%	ST	5,00	5,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	50,00	31,25	62,5%	ST	50,00	31,25	62,5%	R		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	65,00	52,99	81,25%	ST	65,00	52,99	81,52%	T		Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	45,00	20,00	44,44%	T	45,00	20,00	44,44%	SR		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan sekolah Adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	10,00	10,00	100,00%	ST	10,00	10,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan	Persentase jumlah pengaduan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Lingkungan Hidup	masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti											
Program Pengelolaan Persampahan	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	90,00	89,70	99,67%	ST	90,00	89,70	99,67%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Lingkungan Hidup)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Lingkungan Hidup)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (Lingkungan Hidup)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 Triwulan II pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, semua indikator yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), maka terdapat 2 indikator dengan kategori pencapaian sangat tinggi, 5 indikator dengan kategori pencapaian tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , 7 indikator masuk pada kategori akan tercapai.


Dalam masa pandemi, untuk menjaga pelayanan adminduk dengan tetap menjaga protokol kesehatan, upaya yang telah ditempuh diantaranya: penambahan jumlah hari pelayanan perekaman KTP elektronik pada hari sabtu dan minggu di Disdukcapil dan 16 TPDK Kecamatan dari bulan Agustus 2020

sampai dengan saat ini, membangun aplikasi online untuk permohonan cetak dan perekaman KTP elektronik melalui website <http://eservices.dispendukcapil.semarangkota.go.id> dan aplikasi berbasis android Si D'Nok, Penyediaan Blanko E-KTP elektronik melalui mekanisme hibah kepada pemerintah pusat, serta pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak bisa menerima layanan ditempat perekaman data

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Trw II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan dokumen Kependudukan (405.825 lembar)	%	98,11	44,65	45,51%	ST	98,11	85,25	86,89%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (48.919 lembar)	%	405825,00	35.160,00	8,66%	SR	93,42	86,06	92,12%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Informasi Data Kependudukan	elemen data	42,00	37,00	88,10%	ST	42,00	37,00	88,10%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan	lembar	262,00	252,00	96,18%	ST	262,00	252,00	96,18%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	elemen data	42,00	37,00	88,10%	ST	42,00	37,00	88,10%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Trw II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.13 Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Hasil evaluasi pencapaian RKPd tahun 2021 Triwulan II pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dievaluasi pada Triwulan II, semuanya menunjukkan kinerja Sangat Tinggi.


Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), terdapat 4 indikator dengan status capaian sangat tinggi, 3 indikator dengan status capaian tinggi, 1 indikator dengan status capaian Sedang dan Rendah. Indikator yang memiliki status capaian rendah yaitu Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO). Namun demikian capaian indikator cakupan PUS unmet need selama ini belum pernah memenuhi target yang ada, sehingga juga perlu mendapat perhatian.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 2 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , sebanyak 2 indikator kategori tercapai, 5 indikator masuk dalam kategori akan tercapai dan 2 indikator masuk dalam kategori perlu upaya keras. Indikator yang masuk dalam kategori perlu upaya keras (capaian dibawah 80%) yaitu: Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) dengan realisasi sebesar 12,70% dari target sebesar 7%, dan cakupan PUS unmet need dengan realisasi sebesar 15,66% dari target sebesar 11,20%. Pelayanan dan pembinaan kepada kelompok sasaran yang menerapkan prokes harus selalu dilaksanakan meski terdapat PPKM .

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.75.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,49	102,04%	ST	0,50	0,49	98,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS unmet need	%	7,00	12,70	55,12%	ST	7,00	12,70	55,12%	R		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	%	11,20	15,66	71,52%	ST	11,20	15,66	71,52%	S		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	TFR	Rasio	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Peserta KB Aktif	%	77,04	72,71	94,38%	ST	77,04	72,71	94,38%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,49	102,04%	ST	0,50	0,49	102,04%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.14 Urusan Perhubungan

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 Triwulan II pada urusan Perhubungan menunjukkan masih terdapat capaian kinerja cukup baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 12 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, dengan semua indikator nya memiliki kategori capaian sangat tinggi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), dari 12 indikator pada urusan perhubungan masih terdapat 8 indikator dengan kategori sangat tinggi dan 4 indikator dengan kategori tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 2 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , indikator yang telah mencapai target

sebanyak 2 indikator, dan sebanyak 10 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Perhubungan disajikan pada table berikut ini:

Tabel 2.76.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan ANgkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail)	%	65,00	65,04	100,06%	ST	65,00	65,04	100,06%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase simpang yang dilengkapi ATCS	%	100,00	92,00	92,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	100,00	92,85	92,85%	ST	100,00	92,85	92,85%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	90,00	83,42	92,69%	ST	90,00	83,42	92,69%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan lulus uji laik jalan	%	55,00	53,16	96,65%	ST	55,00	53,16	96,65%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis	%	90,00	83,42	92,69%	ST	90,00	83,42	92,69%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase trayek angkutan umum yang optimal	dok	59,00	57,65	97,71%	ST	59,00	57,65	97,71%	ST		Dinas Perhubungan
	Jumlah koridor BRT	kori dor	8,00	8,00	100,00%	ST	8,00	8,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat disiplin Aparatur	org	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	
cakupan pelayanan administrasi perkantoran		%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	trayek	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perhubungan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	trayek	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perhubungan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.15 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2021 Triwulan II sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang dimiliki, dengan semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2021 penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi diantaranya : . I-SSP (Integrated-Smart System Platform), SSO (Single Single On), Pengembangan data center, Aplikasi Laport Pak Wali, Call Center 112, Co Working Space Tri Lomba Juang, Aplikasi absensi si Abdul, Aplikasi PPID untuk gender dan difabel, dan Saka milenial sahabat Semarang

Demikian pula capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan Triwulan II tahun 2021. Dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 6 indikator masuk dalam kategori tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , maka 2 indikator yang masuk dalam kategori telah tercapai, dan 7 indikator yang masuk kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.77.

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Komunikasi dan Informasi

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPDP Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	pengaduan masyarakat											
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bandwidth domestik dan internasional	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	CCTV di ruang publik	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Domain dan sub domain semarangkota.go.id	domain	190,00	920,00	484,21%	ST	190,00	920,00	484,21%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city)	%	100,00	95,00	95,00%	ST	100,00	95,00	95,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Wi-fi di area publik	lokasi	150,00	150,00	100,00%	ST	150,00	150,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.16 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja RKPDP pada urusan Koperasi dan UKM tahun 2021 Triwulan II sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi

ukuran, sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator pada kategori tinggi, dan 1 indikator pada kategori sangat rendah. Indikator yang mempunyai capaian sangat rendah adalah Prosentase peningkatan omset koperasi, dimana pasca pandemi peningkatan Omzet / pendapatan Koperasi dan Usaha Mikro melambat bahkan beberapa diantaranya yang terpaksa harus menghentikan sementara kegiatan usahanya. Disisi lain peningkatan omset yang diharapkan terjadi akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meskipun demikian hasil pendataan menunjukkan sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Kota Semarang sebesar 637 koperasi dari jumlah keseluruhan 718 atau sebesar 88,72%. Untuk itu perlu berbagai upaya untuk kembali menghidupkan kembali kegiatan usaha, setidaknya dari segi permodalan dan segi manajerial kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia)

Sementara itu capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan Triwulan II tahun 2021 menunjukkan kondisi kurang baik. Dari sebanyak 12 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 4 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 6 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 2 indikator kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah, diantaranya Prosentase omset koperasi dan Prosentase meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), sebanyak 4 indikator kategori telah tercapai, 6 indikator kategori akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan persentase capaian masih dibawah 80%.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Koperasi dan UM disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi aktif	%	88,60	77,96	87,99%	ST	100,00	77,96	77,96%	T	▼	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pengendalian dan manajemen pengawasan koperasi	%	62,67	52,23	83,34 %	ST	62,67	52,23	83,34 %	T	▶	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	30,00	25,00	83,33%	ST	30,00	25,00	83,33 %	T	▶	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi aktif	%	88,60	77,96	87,99%	ST	88,60	77,96	87,99%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Prosentase Omset Koperasi	%	0,80	-22,65	0%	SR	0,80	-22,65	0	SR		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	60,00	24,82	41,37%	T	60,00	24,82	41,37%	SR		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	%	15,00	15,91	106,07%	ST	15,00	15,91	106,07%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Akses Pembiayaan	%	40,00	77,47	193,68%	ST	40,00	77,47	193,68%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	%	50,00	153,16	306,32%	ST	50,00	153,16	306,32%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Akses Pemasaran	%	23,00	40,50	176,09%	ST	23,00	40,50	176,09%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.17 Urusan Penanaman Modal

Terdapat 9 indikator dalam urusan Penanaman Modal yang menjadi ukuran keberhasilan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dan pelaksanaan RKPD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, dari 9 indikator tersebut, ada 7 indikator termasuk pada kategori sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi dan 1 indikator dalam kategori sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) yang pastinya juga akan berdampak pada Nilai investasi .

Untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi, disamping kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. Hal ini perlu dilakukan kota Semarang untuk bisa keluar dari penurunan investasi secara global akibat pandemi. Penyelenggaraan urusan penanaman modal diantaranya dilakukannya Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik, Survey Kepuasan untuk peningkatan pelayanan, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal serta kajian potensi investasi.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), terdapat 4 indikator dengan capaian kategori sangat tinggi, 3 indikator dengan capaian kategori tinggi dan 2 indikator dengan kategori sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan Nilai PMA dan Nilai PMDN (dalam juta).

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), sebanyak 3 indikator yang masuk dalam kategori telah tercapai, 4 indikator masuk dalam kategori akan tercapai dan 2 indikator dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan Nilai PMA dan Nilai PMDN (dalam juta).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		status ***)
Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Pranata	Buah	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST	▶	Dinas PM dan PTSP
Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	408,00	67,00	16,42%	SR	408,00	67,00	16,42%	SR	▼	Dinas PM dan PTSP

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		status ***)
Program pelayanan penanaman modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	%	99,00	99,00	100,00%	ST	99,00	99,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai PMA dan Nilai PMDN (dalam juta)	Juta	2192400,00	8.632.598,00	39,38%	T	21924000,00	8.632.598,00	39,38%	SR		Dinas PM dan PTSP
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Jumlah	87,00	88,36	101,56%	ST	87,00	88,36	101,56%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas PM dan PTSP
	Tingkat disiplin aparaturnya (DPMPTSP)	%	100,00	60,00	60,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas PM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas PM dan PTSP

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2021 Triwulan II cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk kategori sangat tinggi. Meski demikian penyelenggaraan urusan kepemudaan diarahkan untuk mendorong peningkatan peran serta kepemudaan dengan menyiapkan sumber daya yang profesional yang dapat berkontribusi pada kegiatan pembangunan daerah baik

kegiatan yang berbasis ekonomi maupun non ekonomi. Meski Pandemi Covid-19 sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, pengetahuan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olahraga terbuka tidak bisa dihindari. Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 dan 2021 cukup menurun karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan Triwulan II tahun 2021, terdapat sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 6 indikator termasuk kategori tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), terdapat 2 indikator yang telah tercapai, dan 7 indikator masuk dalam kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Kepemudaan Dan Olahraga disajikan pada table berikut ini..

Tabel 2.80.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	62,00	62,00	100,00%	ST	62,00	62,00	100,00%	ST	▶	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase wirausaha muda mendapat bantuan	%	85,00	85,00	100,00%	ST	85,00	85,00	100,00%	ST	▶	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Prosen organisasi pemuda aktif	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan kota	%	100	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	●	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	jumlah	39,00	39,00	100,00%	ST	39,00	39,00	100,00%	ST	●	Dinas Pemuda dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.19 Urusan Statistik

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2021 sampai dengan Triwulan II cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah mempunyai kategori capaian sedang. Pada tahun 2021 dilakukan Fasilitasi Forum Data Kota Semarang di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pengembangan terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data (semarsatata.semarangkota.go.id) yang bisa mengakomodir pengumpulan data kinerja seluruh Perangkat Daerah, serta Koordinasi Forum Data Statistik Daerah dan Satu Data Satu Peta. Dengan demikian, diharapkan terdapat keseragaman berbagai pemenuhan kebutuhan data baik statistik maupun sektoral lebih bisa terjamin.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai dengan Triwulan II tahun 2021, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori capaian tinggi dan diharapkan akan tercapai diakhir tahun ini .

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan statistik disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Statistik

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	100,00	100,00	35,00	35,00%	S	100,00	87,00	87,00%	T		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.20 Urusan Persandian

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2021 Triwulan II kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran, 1 indikator memiliki kategori capaian rendah dan 1 indikator memiliki kategori capaian sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori capaian sangat rendah yaitu tersedianya alat persandian. Masih rendahnya capaian ini lebih disebabkan karena penyesuaian jadwal kegiatan karena pandemi. Salah satu penyelenggaraan urusan persandian tahun 2021 diantaranya adalah fasilitasi TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan lisensi keamanan informasi system pemerintahan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2021, semua indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼), 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya masuk dalam kategori akan tercapai .

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan persandian disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.82.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Persandian

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan SDM Persandian	%	100,00	30,00	30,00%	R	100,00	86,00	86,00%	T	▶	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Tersedianya alat persandian	paket	1,00	0,00	0,00%	SR	1,00	0,80	80,00%	T	▶	

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▶ : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) ▼ : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.21 Urusan Kebudayaan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator masuk dalam kategori rendah dan 1 indikator kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal. Masih rendahnya capaian kinerja pada indikator terkait dengan penyelenggaraan event selama pandemi disebabkan karena pemberlakuan PPKM dimasa pandemic. Beberapa event yang dilakukan sangatlah selektif dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat dan pembatasan kehadiran, sehingga untuk publikasinya dilakukan secara live streaming . Event yang direncanakan selama tahun 2021

diantaranya atraksi budaya, pelarasan gamelan, pagelaran wayang kulit, wayang orang dan ketoprak.

Adapun hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) sampai dengan Triwulan II tahun 2021 capaiannya kurang baik. Dari 10 indikator, baru 1 indikator yang capaiannya sangat tinggi, sebanyak 4 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah, yaitu: Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya, Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal, dan Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼). Dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 1 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, 4 indikator masuk dalam kategori akan tercapai dan 3 indikator masuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya, Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal, dan Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Kebudayaan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program pengembangan kebudayaan	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya	%	80,00	71,67	89,59%	ST	80,00	71,67	89,59%	T	▶	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	%	80,00	20,72	25,90%	R	80,00	20,72	25,90%	SR	▼	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	%	90,00	22,14	24,60%	SR	90,00	22,14	24,60%	SR	▼	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	%	80,00	20,72	25,90%	R	80,00	20,72	25,90%	SR	▼	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	111,42	111,42%	ST	100,00	111,42	111,42%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPDP Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)






2.22 Urusan Perpustakaan

Pencapaian kinerja RKPDP urusan wajib Perpustakaan pada Triwulan II tahun 2021 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 5 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan terhadap hasil akhir RPJMD (tahun 2021), terdapat 5 indikator yang capaiannya sangat tinggi. Beberapa penyelenggaraan pada urusan perpustakaan terlihat dari penyelenggaraan pameran buku dengan event penukaran buku untuk meningkatkan minat baca tanpa membebani pembelian buku, perpustakaan keliling, penambahan koleksi bahan bacaan baik secara hard maupun e book, rehab rumah pintar dan kegiatan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, pengunjung perpustakaan diperkirakan akan semakin berkurang di mana orang cenderung lebih banyak membaca melalui platform online. Fakta tersebut tentu menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat ke depannya

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 2 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, dan 3 indikator masuk dalam kategori akan tercapai .

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan perpustakaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan
Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Perpustakaan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pembinaan perpustakaan	Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	judul	500,00	500,00	100,00%	ST	500,00	500,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Jumlah Rumah Pintar	unit	193,00	193,00	100,00%	ST	193,00	193,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	60,00	60,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	60,00	60,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	60,00	60,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T: $45\% \geq X > 37,5\%$; S: $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R: $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




**) ST : $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

2.23 Urusan Kearsipan



Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kearsipan pada Triwulan II tahun 2021 sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikatornya termasuk pada kategori capaian sangat tinggi. Penyelenggaraan pada urusan Kearsipan ditunjukkan dengan Arsip keliling, pengelolaan arsip statis, pameran arsip, serta digitalisasi arsip.

Jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) sampai dengan Triwulan II tahun 2021 yaitu sebanyak 2 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator masuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , dari 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 1 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, dan 1 indikator pada kategori perlu upaya keras.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut ini.




Tabel 2.85.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan
Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Kearsipan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program pengelolaan arsip	Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan	dokumen	19000,00	10.000,00	52,63%	ST	19000,00	10.000,00	52,63%	R		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Aksesibilitas/ ketersediaan layanan informasi kearsipan	%	95,00	95,00	100,00%	ST	95,00	95,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

3.25 Urusan Kelautan dan Perikanan










Pencapaian kinerja RKPd urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II tahun 2021 termasuk sangat baik, kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya sebanyak 9 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), sebanyak 2 indikator termasuk kategori sangat tinggi, sebanyak 4 indikator menunjukkan kategori tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori rendah, dan 2 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya. Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya, pada tahun 2021 telah dilakukan diantaranya: Pelatihan aklimatisasi bandeng dan udang vanamei di tambak, aquaponik, temu usaha perikanan, kampanye gemar ikan, cooking class dan lomba masak ikan, pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, pembelian bibit ikan, serta pembinaan nelayan dan bakul TPI.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 2 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, 4 indikator masuk dalam kategori akan tercapai dan 3 indikator masuk dalam kategori perlu upaya keras. Indikator yang masuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya, dan Produk olahan hasil perikanan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini.




Tabel 2.86.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan
Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	2862,81	1.297,310	45,32%	ST	2862,81	1.297,310	45,32%	SR		Dinas Perikanan
Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3625,17	1.775,70	48,98%	ST	3625,17	1.775,70	48,98%	SR		Dinas Perikanan
	Sentra perikanan terpadu	kawasan	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Peningkatan konsumsi ikan perkapita	kg/kapita/	33,06	33,06	100,00%	ST	33,06	33,06	100,00%	ST		Dinas Perikanan
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produk olahan hasil perikanan	ton	17113,32	8.931,68	52,19%	ST	17113,32	8.931,68	52,19%	R		Dinas Perikanan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinas perikanan)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perikanan
	Peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional (dinas perikanan)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perikanan
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (dinas perikanan)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perikanan
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (dinas perikanan)	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perikanan

Sumber : e.Monev Perencanaan




*) ST : $X > 45\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)



3.26 Urusan Pariwisata



Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2021 termasuk cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, semua indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Meskipun demikian kondisi pandemi selama setahun lebih belakangan ini belum menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi dari sector kepariwisataan. Untuk itu diperlukan upaya dan inovasi untuk bisa mengembalikan tekanan dibidang kepariwisataan, melalui promosi paket wisata, perbaikan sarpras destinasi wisata, pelaku usaha kepariwisataan, kerjasama pariwisata dengan daerah sekitar.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () . Dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 3 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, dan 1 indikator masuk dalam kategori akan tercapai. Indikator yang masuk dalam kategori akan tercapai adalah Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Hal ini sedikit banyak sebagai dampak pandemi dimana beberapa obyek dan event wisata tidak dapat dibuka untuk umum dan berdampak pada turunnya jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Dan implikasi dari semua itu adalah lama menginap yang juga tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pariwisata




Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	Hari	1,60	1,30	81,25%	ST	1,60	1,30	81,25%	T		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	Orang	8633,00	270.405,00	3132,23%	ST	8633,00	270.405,00	3132,23%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program pemasaran pariwisata	Persentase Kualitas Promosi Wisata	%	1,35	2,05	151,85%	ST	1,35	2,05	151,85%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 45\%$; T: $45\% \geq X > 37,5\%$; S: $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R: $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




**) ST : $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

3.27 Urusan Pertanian

Pencapaian kinerja RKPD urusan pertanian pada tahun 2021 termasuk menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya dengan kategori capaiannya sangat tinggi.

Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2021 menunjukkan sebanyak 3 indikator dengan kategori sangat tinggi, 3 indikator kategori tinggi, 1 indikator kategori sedang dan sebanyak 1 indikator kategori rendah dan sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam capaian rendah dan sangat rendah adalah Jumlah produksi pertanian dan Jumlah produksi hasil peternakan. Penyelenggaraan dalam Urusan Pertanian ditunjukkan diantaranya Kajian pengembangan pertanian perkotaan, Rehab Jaringan Irigasi Tersier, pembangunan kandang sapi Cangkiran, pengembangan agro pertanian, Bintek Pengendalian OPT TP, P2HP, Reviu Perda Keswan & Kesmave, serta pembuatan demplot sesuai spesifik lokasi (Jagung dan opadi organic, Mina Padi)

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai (); akan tercapai (); perlu upaya keras () maka sampai dengan tahun 2021 menunjukkan dari sebanyak 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori tercapai, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan perlu upaya keras.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2020 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan
Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Program	Indikator	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Terhadap Target RKPD	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	50,00	50,00 %	ST	100	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Pertanian
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	50,00	50,00 %	ST	100	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Pertanian
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	50,00	50,00 %	ST	100	90,00	90,00 %	T	▶	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian	Ton	56657,00	26.371,40	46,55 %	ST	56657,00	26.371,40	46,55 %	SR	▼	Dinas Pertanian
	Jumlah produksi hasil peternakan	Ton	34874,00	18.887,00	54,16 %	ST	34874,00	18.887,00	54,16 %	R	▼	Dinas Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Sentra produk unggulan pertanian	Kawasan	4,00	3,00	75,00%	ST	4,00	3,00	75,00%	S	▼	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular	Kasus	26,00	1,00	2600,00%	ST	26,00	1,00	2600,00%	ST	●	Dinas Pertanian
	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	Sertifikat	9,00	9,00	100,00%	ST	9,00	9,00	100,00%	ST	●	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi	Kelompok	24,00	24,00	100,00%	ST	24,00	24,00	100,00%	ST	●	Dinas Pertanian

Urusan Pertanian

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD ● Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$) ▶ Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) ▼ Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

3.30 Urusan Perdagangan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, terdapat 6 indikator

dengan kategori sangat tinggi, 2 indikator dengan kategori rendah dan 1 indikator dengan kategori sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Kegiatan pasar untuk memantau Stabilisasi Harga dan Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas. Rendahnya kinerja ini karena penerapan PPKM, sehingga survey harga pasar komoditas tertentu pada lokasi pasar yang telah ditentukan sebagai sampel pelaksanaannya tidak selalu dilakukan secara tatap muka. Meskipun demikian Stabilisasi Harga dan Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas di Kota Semarang tergolong stabil / baik.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari 9 indikator kinerja yang ada, sebanyak 1 indikator capaiannya kategori sangat tinggi, 6 indikator termasuk kategori tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori sedang dan 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas, karena masih dalam triwulan II dan belum pulih sepenuhnya kegiatan perekonomian.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼). Dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 1 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, 5 indikator masuk dalam kategori akan tercapai dan 3 indikator masuk dalam kategori perlu upaya keras. Indikator yang masuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Stabilisasi Harga, Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas dan Persentase alat UTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar. Secara umum kedua indikator tersebut terkendala karena pembatasan Kegiatan Masyarakat selama pandemi dan pelaksanaannya masih pada tengah tahun berjalan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPd dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Perdagangan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPd Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Perdagangan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	21,00	25,00	119,05%	ST	21,00	25,00	119,05%	ST	●	Dinas Perdagangan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Stabilisasi Harga	keg	111,00	20,00	18,02%	SR	111,00	84,00	75,68%	T		Dinas Perdagangan
Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas	milyar dollar	1,50	0,43	28,67%	R	1,50	0,43	28,67%	SR		Dinas Perdagangan
Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTPP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar	%	100,00	75,00	75,00%	ST	100,00	75,00	75,00%	S		Dinas Perdagangan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan	%	15,00	4,00	26,67%	R	15,00	12,80	85,33%	T		Dinas Perdagangan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perdagangan
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perdagangan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Dinas Perdagangan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

3.31 Urusan Perindustrian

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2021 termasuk cukup baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan urusan perindustrian, 6 indikator termasuk pada kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan Non APBD (DAK dan DBHCHT) yang harus dilakukan realokasi untuk menyesuaikan dengan SE Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda tanggal 9 februari 2021. Permasalahan muncul ketika pada nomenklatur lama (sebelum terbit SE dimaksud) sudah dilakukan penyerapan anggaran. Sehingga Sub kegiatan

dimaksud memungkinkan berada pada 2 rekening yang berbeda, hal ini secara administratif menjadi kurang akuntabel. Beberapa hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian s.d triwulan II ini diantaranya berbagai pelatihan (kerajinan kayu, olahan minuman, promosi bagi produk online) , talkshow dan fashion show, Pembuatan Film Promosi Produk IKM dan film tentang cukai, video tentang profil IKM, FGD Sentra Industri dan lainnya. Diharapkan semua itu akan bermuara pada peningkatan perekonomian daerah pasca pandemic.


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dilihat dari capaian sebanyak 5 indikator berkategori sangat tinggi, dan 2 indikator kategori tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai (●), akan tercapai (▶), perlu upaya keras (▼). Dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 1 indikator masuk dalam kategori telah tercapai dan 6 indikator masuk dalam kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut

Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Perindustrian




Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri kecil	IK	2.805,00	3.587,00	127,88%	ST	2805,00	2.805,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah	IKM	3.635,00	3.587,00	98,68%	ST	3635,00	3.587,00	98,68%	ST	▶	Dinas Perindustrian
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Penguatan Sentra Industri	%	100,00	60,00	60,00%	ST	100,00	92,00	92,00%	ST	▶	Dinas Perindustrian
	Bertambahnya Industri Kreatif	Industri Kreatif	658,00	618,00	93,92%	ST	658,00	618,00	93,92%	ST	▶	Dinas Perindustrian
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T	▶	Dinas Perindustrian
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	42,00	42,00%	T	100,00	88,40	88,40%	T	▶	Dinas Perindustrian

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	66,00	66,00%	ST	100,00	93,20	93,20%	ST		Dinas Perindustrian

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)




4. Unsur Pendukung Urusan

4.1 Unsur Pendukung (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD)

Pencapaian kinerja unsur pendukung pada tahun 2021 tergolong capaian yang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 21 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya mempunyai capaian sangat tinggi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD menunjukkan hasil yang cukup baik, terdapat 5 indikator dengan kategori sangat tinggi, sebanyak 15 indikator kategori tinggi dan sebanyak 1 indikator dengan kategori sangat rendah.

Kinerja dalam penyelenggaraan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 (penilaian tahun 2020) selain terlihat dari capaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (terbaik di Prov Jateng) dan Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat capaiannya. Kota Semarang telah menyusun Perwal No 66 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () , dari 21 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator masuk dalam kategori telah tercapai dan 16 indikator masuk dalam kategori akan tercapai., dan 1 indikator yang dalam kategori perlu upaya keras adalah Jumlah raperda yang disetujui DPRD. Rendahnya capaian ini karena merupakan akumulasi dari capaian sebelumnya, dimana setelah pemilihan Legislatif tahun 2019 kegiatan pembahasan harus menunggu kelengkapan Badan DPRD terbentuk, yang kemudian disusul terjadinya pandemi sehingga triwulan 2 tahun 2021 pun belum hilang, sehingga pada saat itu diberlakukan pembatasan kegiatan persidangan secara offline dan konsultasi ke Pemerintah Pusat.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada unsur pendukung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan
Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Unsur Pendukung

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ** *)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bag Adpemb, Humprot, TU, Bag RT
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Sekretariat DPRD / Bag Perlengkapan
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bag Organisasi, Bag Perlengkapan
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Sekretariat DPRD/ Bag TU
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	raperda	96	60,00	62,50%	R	121	60,00	49,59%	SR		Sekretariat DPRD
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang	SPM	6,00	6,00	100,00%	ST	6,00	6,00	100,00%	ST		Bag Otonomi Daerah
	Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu	%	95,00	80,00	84,21%	ST	95,00	80,00	84,21%	T		Bag Otonomi Daerah
	Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM	%	100,00	80,00	80,00%	ST	100,00	85,00	85,00%	ST		Bag Otonomi Daerah

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ** *)	
	Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar kota antar negara	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	ST		Bag Otonomi Daerah
	Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka otonomi daerah	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	ST		Bag Otonomi Daerah
	Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	perda	427,00	443,00	103,75%	ST	427,00	443,00	103,75%	T		Bag Hukum
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	kegiatan	3,00	25,20	840,00%	ST	3,00	25,20	96,20%	ST		Bag Kesra
	Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	ST		Bag Tapem
	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	ST		Bag Tapem
	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	layanan	477.561,00	250.000,00	52,35%	ST	477561,00	382.548,00	80,10%	T		Bag Tapem
	Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bag Tapem

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	di kecamatan dan Kelurahan											
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	87,50%	T		Bag Perlengkapan
	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BLPBJ
	Peningkatan Kinerja BUMD	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bag Perekonomian
	Koordinasi peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bag Perekonomian

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

5.01 Unsur Penunjang Perencanaan






Pencapaian kinerja unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 12 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang Perencanaan seluruh indikatornya pada kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil 7 indikator masuk dalam kategori telah tercapai, dan 5 indikator masuk dalam kategori akan tercapai.

Pencapaian tertinggi Kota Semarang pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan pada tahun 2021 ini adalah diraihnya Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Jawa Tengah dan Nasional kategori Perencanaan dan Pencapaian terbaik selama tiga tahun berturut turut, yaitu pada tahun 2019,2020 dan 2021.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Penunjang Perencanaan




Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				status ***)	Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	174,00	232,00%	ST	75,00	174,00	232,00%	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00	194,16	194,16%	ST	100,00	194,16	194,16%	ST		Bappeda
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan	%	92,00	100,73	109,49%	ST	92,00	100,73	109,49%	ST		Bappeda
	Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	%	92,00	108,07	117,47%	ST	92,00	108,07	117,47%	ST		Bappeda
	Capaian indikator sasaran Misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	%	92,00	90,81	98,71%	ST	92,00	90,81	98,71%	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	%	100,00	185,96	185,96%	ST	100,00	185,96	185,96%	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya)	%	100,00	189,78	189,78%	ST	100,00	189,78	189,78%	ST		Bappeda

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPDP Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		status ***)
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian)	%	100,00	191,94	191,94%	ST	100,00	191,94	191,94%	ST		Bappeda
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bappeda
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80,00	50,00	62,50%	ST	80,00	74,00	92,50%	ST		Bappeda
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bappeda
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Bappeda

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

5.02 Unsur Penunjang Keuangan

Pencapaian kinerja urusan keuangan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang keuangan, 7 indikator dengan capaian kategori sangat tinggi dan 1 indikator dalam kategori tinggi dan 1 indikator kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2021) menunjukkan hasil yang baik, hal ini ditunjukkan dari capaian sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori tinggi dan sebanyak 1 indikator termasuk kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) dan Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur. Terkait tingkat kemandirian keuangan daerah, realisasi s.d trw 2 sebesar 16,23 % dari target sebesar 47%. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan dari

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan II jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai () , akan tercapai () , perlu upaya keras () . Dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 7 indikator dengan kinerja akan mencapai target dan 2 indikator perlu upaya keras. Indikator yang mempunyai kriteria perlu upaya keras yaitu Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) dan Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Unsur Penunjang Keuangan




Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD	%	100,00	38,25	38,25%	T	100,00	87,65	87,65%	T		BPKAD,
	Prosentase kualitas pengelolaan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD,
	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BAPENDA
Program pengelolaan barang milik daerah	Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD, BAPENDA
Program pengelolaan pendapatan daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	47,00	16,23	34,53%	ST	47,00	16,23	34,53%	SR		BAPENDA
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD, BAPENDA
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD, BAPENDA
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD, BAPENDA
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		BPKAD, BAPENDA

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
	aparatur											

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)



5.03. Unsur Penunjang Kepegawaian

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya mempunyai capaian sangat tinggi. Sedangkan pencapaian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator kategori tinggi, dan 4 indikator kategori sangat tinggi, dan 7 indikator optimis akan mencapai target dengan sisa waktu yang ada.

Penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2021 ini selain agenda rutin penerimaan CPNS adalah penyederhanaan birokrasi ditingkat daerah dan terdapat perubahan manajemen ASN dalam penilaian kinerja PNS mendasarkan kepada SE Menpan dan RB Nomor 3 tahun 2021 dan PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian PNS. Dengan adanya perubahan cara penilaian yang mengcascade ini diharapkan akuntabilitas PNS secara berjenjang akan terukur dan dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada unsur penunjang kepegawaian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2020 dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Unsur Penunjang Kepegawaian

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100,00	100,00%	ST	100	80,00	80,00%	T		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,00	100,00%	ST	100	80,00	80,00%	T		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100,00	100,00%	ST	100	80,00	80,00%	T		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian	%	79,00	30,00	37,97%	ST	79,00	69,20	87,59%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	84,00	82,28	97,95%	ST	84,00	82,28	97,95%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	45,00	45,45%	ST	99,00	89,00	89,90%	T		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	%	0,75	0,00	100,00%	ST	0,75	0,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Tingkat ketepatan waktu layanan dan keakuratan produk layanan	%	99,00	58,00	58,59%	ST	99,00	90,80	91,72%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

5.04. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 4 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan mempunyai capaian sangat tinggi

Sedangkan pencapaian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator kategori sangat tinggi, 1 indikator kategori rendah. Rendahnya indikator Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi, hal ini disebabkan pada bulan Juni 2021 terdapat lonjakan tajam penderita dan suspect covid-19 sehingga diberlakukan PPKM level 3, selain itu anggaran untuk penyelenggaraan diklat teknis diprioritaskan kepada penanganan pandemi.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai (●); akan tercapai (▲); perlu upaya keras (▼) maka sampai dengan tahun 2021 kondisi capaiannya cukup baik. Dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk kategori tercapai dan 1 indikator dalam kategori perlu upaya keras.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2020 dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus	%	100	100,00	100,00%	ST	100	100,00	100,00%	ST	●	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus	%	100	100,00	100,00%	ST	100	100,00	100,00%	ST	●	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (tidak terdapat penerimaan CPNS)
	Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	100	54,21	54,21%	ST	100	54,21	54,21%	R	▼	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang	status	sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi	sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi	100,00%	ST	sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi	sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi	100,00%	ST	●	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

**) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD ● Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲ : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) ▼ : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)


5.05. Unsur Penunjang Penelitian, dan Pengembangan

Pencapaian kinerja unsur penunjang Penelitian, dan Pengembangan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang Penelitian, dan Pengembangan, seluruh indikatornya pada kategori sangat tinggi baik terhadap target RKPD, maupun target akhir RPJMD.

Sampai dengan triwulan II, disamping kegiatan penelitian di berbagai bidang, juga telah diselenggarakan lomba krenova yang dilakukan penilaian tanggal 21 April 2021, dengan juara 1 dan 3 pada kategori pelajar berasal dari SMAN 3 Semarang dengan temuan E-Goclay : Eco Composite Berbasis Cangkang Telur dan kaolin sebagai material Pelapis kertas Superhidrofob serta Portable Wastewater Quality Detector. Sedangkan juara 2 Kategori Pelajar dari SMKN 7 Semarang dengan Temuan Brake Pad Sensor System. Adapun dari kategori mahasiswa, pemenang pertama dan kedua berturut-turut adalah dari Univ Nasional Karangturi Semarang dan Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul masing-masing TEKNO Inovasi Minuman Lokal (Sinergi Tempe dan Kopi) dan Usaha Pupuk Organik Cair TW Super dengan mengoptimalkan Potensi Limbah Ampas The, Limbah Sayur Pasar dan Kotoran Ternak.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Triwulan II tahun 2021 pada urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.




Tabel 2.95.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Unsur Penunjang Penelitian, dan Pengembangan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		status ***)
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	191,92	191,92%	ST	100,00	191,92	191,92%	ST		Bappeda

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T : $45\% \geq X > 37,5\%$; S : $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R : $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

6 Unsur Penunjang Pengawasan

Pencapaian kinerja unsur penunjang pengawasan pada tahun 2021 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruh capaian indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Meskipun demikian untuk menyikapi dinamika regulasi terkait pemerintahan di daerah, perlu dilakukan optimalisasi kapasitas APIP daerah serta penguatan implementasi SPIP pada level perangkat daerah.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 4 indikator yang capaiannya sangat tinggi, dan 3 indikator kategori tinggi.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3 kategori sudah tercapai (); akan tercapai (); perlu upaya keras () capaiannya tergolong baik. Dari sebanyak 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 3 indikator telah tercapai, dan 4 indikator kategori

akan tercapai dan 1 indikator dalam kategori perlu upaya keras, yaitu : Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2021, penerapan manajemen resiko baru diterapkan pada tataran OPD. Perlu diketahui bahwa ketentaun penyusunan Manajemen resiko ditingkat daerah/pemda periodenya bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Dan perda RPJMD Kota Semarang pada tahun 2021-2026 baru diundangkan tanggal 26 Agustus 2021. Sehingga pemenuhan akan indicator strategis ditingkat daerah yang akan dilakukan pengendalian resikonya, belum tersedia.




Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada unsur penunjang pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Penunjang Pengawasan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 20209				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50,00	50,00%	ST	100	90,00	90,00 %	T		Inspektorat
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	50,00	50,00%	ST	100	90,00	90,00 %	T		Inspektorat
	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	90,00	50,00	55,56%	ST	90,00	82,00	91,11 %	ST		Inspektorat
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	50,00	50,00%	ST	100	90,00	90,00 %	T		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektorat
	Tingkat Maturitas SPIP	%	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektoat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektorat
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2,00	1,57	78,50 %	ST	2,00	1,57	78,50 %	T		Inspektorat

Sumber : e.Monev Perencanaan
*) ST : $X > 450\%$; T: $45\% \geq X > 37,5\%$; S: $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R: $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$




***) ST : $X > 90\%$; T : $90\% \geq X > 75\%$; S : $75\% \geq X > 65\%$; R : $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$)  : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

7. Unsur Kewilayahan





Pencapaian kinerja pada unsur kewilayahan tahun 2021 sd triwulan II tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, 12 indikator diantaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi, 2 indikator dalam kategori tinggi, dan 2 indikator dalam kategori sedang. Selama pandemic, kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat pembatasan kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan target sebagaimana keadaan normal.

Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terlihat dari 16 indikator yang ada, 8 indikator kategori sangat tinggi, 7 indikator termasuk kategori tinggi dan 1 indikator kategori sedang.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3 kategori sudah tercapai (); akan tercapai (); perlu upaya keras () capaian kinerjanya pada unsur kewilayahan belum baik. Dari sebanyak 16 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk kategori tercapai, sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras. Indikator dengan predikat perlu upaya keras ini disebabkan karena selama pandemi, pelaksanaan kegiatan sarpras berdampak refocusing anggaran, dan untuk pelayanan masyarakat lebih jarang bertatap muka langsung karena terdapat pembatasan kegiatan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2020 pada urusan kewilayahan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Unsur Kewilayahan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	39,80	39,80%	T	100	87,96	87,96%	T		16 Kecamatan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	%	100,00	36,80	36,80%	S	100	87,36	87,36%	T		16 Kecamatan
	Tertib Pelaporan kinerja dan Keuangan	%	100,00	37,80	37,80%	T	100	87,56	87,56%	T		16 Kecamatan
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	pelayanan	477.561,00	1.031.384,00	215,97%	ST	477.561,00	1.031.384,00	215,97%	ST		16 Kecamatan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
	Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	95,00	50,00	52,63%	ST	95,00	89,58	94,29 %	ST		16 Kecamatan
	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	16,00	16,00	100,00 %	ST	16,00	16,00	100,00 %	ST		16 Kecamatan
	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00 %	T		16 Kecamatan
	Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	kelurahan	177,00	177,00	100,00 %	ST	177,00	177,00	100,00 %	ST		16 Kecamatan
	Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00 %	T		16 Kecamatan
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di Kecamatan	%	100,00	75,00	75,00%	ST	100,00	75,00	75,00 %	S		16 Kecamatan
	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100,00	37,50	37,50%	S	100,00	87,50	87,50%	T		16 Kecamatan
Program	persentasi kondisi	%	55,00	42,67	77,57%	ST	55,00	42,67	77,57	T		16 Kecamatan

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah	
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)		
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang						00		%				atan
	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	kegiatan	19.954,00	116.057,00	581,62%	ST	19954,00	116.057,00	581,62%	ST			16 Kecamatan
	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	177	177,00	100,00%	ST	177,00	177,00	100,00%	ST			16 Kecamatan
	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	95,00	100,00	105,26%	ST	95,00	100,00	105,26%	ST			
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase jumlah Siskamling di lingkungan RT	%	90,00	45,75	50,83%	ST	90,00	89,15	99,06%	ST			

Sumber : e.Monev Perencanaan

*) ST : $X > 450\%$; T: $45\% \geq X > 37,5\%$; S: $37,5\% \geq X > 32,5\%$; R: $32,5\% \geq X > 25\%$; dan SR : $X \leq 25\%$

***) ST : $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan tercapai ($100\% > X \geq 80\%$) : Perlu Upaya Keras ($X < 80\%$)

8. Urusan Pemerintahan Umum

Pencapaian kinerja urusan pemerintahan umum pada tahun 2021 sd triwulan II tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruh capaian indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi.



Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021) menunjukkan sebanyak 4 indikator yang capaiannya sangat tinggi, dan 5 indikator kategori tinggi.

Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3 kategori sudah tercapai (); akan tercapai (); perlu upaya keras () capaiannya tergolong baik. Dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 3 indikator telah tercapai, dan 6 indikator kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.98.
Capaian Indikator Program s.d Triwulan II Terhadap Target RKPD dan Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Pemerintahan Umum

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Badan Kesbangpol
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Badan Kesbangpol
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Badan Kesbangpol
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	50,00	50,00%	ST	100,00	90,00	90,00%	T		Badan Kesbangpol
Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	Kejadian	4,00	0,00	100,00%	ST	4,00	0,00	100,00%	ST		Badan Kesbangpol
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	%	3,00	3,35	111,67%	ST	3,00	3,35	111,67%	ST		Badan Kesbangpol
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara	Organisasi	100,00	85,00	85,00%	ST	100,00	85,00	85,00%	T		Badan Kesbangpol

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					Perangkat Daerah
			Target RKPD Tahun 2021	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2021	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan	Kejadian	1,00	0,00	100,00 %	ST	1,00	0,00	100,00 %	ST		Badan Kesbangpol
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudh ankam	%	80,00	79,00	98,75%	ST	80,00	79,00	98,75 %	ST		Badan Kesbangpol

Secara keseluruhan indikator keberhasilan program RKPD Tahun 2021 sejumlah 314 indikator. Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan 2 meliputi urusan konkuren baik wajib maupun pilihan berikut Unsur Penunjang , Unsur Pendukung, Unsur Pengawas dan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan terdapat sebanyak 288 indikator atau sebesar 91,72% termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 12 indikator atau sebesar 3,82% dalam kategori capaian Tinggi, 4 indikator atau sebesar 1,27% termasuk dalam kategori Sedang, 5 indikator atau sebesar 1,59% termasuk kategori Rendah, dan 5 indikator atau sebesar 1,59% termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator dengan capaian Sangat Rendah diantaranya : Peningkatan Omset Koperasi; Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN); Persentase event yang mengapresiasi budaya local; Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah); dan Pengadaan Alat Persandian (penyesuaian jadwal)

Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya adalah pandemi covid yang menyebabkan dilakukan pembatasan kegiatan dalam masyarakat, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan siswa, aparatur sipil negara dan masyarakat secara umum sebagai sasaran kegiatannya, harus dilakukan penundaan dan penjadwalan ulang. Disamping itu juga terbitnya regulasi terkait refocusing anggaran dan pemetaan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan mendasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan turunannya yang berimbas pada dilakukannya pergeseran kegiatan melalui perubahan penjabaran perkada APBD Tahun 2021 diantaranya juga untuk menyesuaikan pendapatan daerah yang berpotensi terjadi penurunan di beberapa sektor.

Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai dengan triwulan II tahun 2021, terdapat sebanyak 132 indikator atau sebesar 42,04% termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 153 indikator atau sebesar 48,73% termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 7 indikator atau sebesar 2,23% termasuk dalam kategori capaian Sedang, 6 indikator atau sebesar 1,91% termasuk

kategori Rendah dan 16 indikator atau sekitar 5,41 % dengan kategori Sangat Rendah, diantaranya terkait dengan penempatan tenaga kerja, peluang kerja mandiri, ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3; jumlah investor dan nilai investasi PMA/PMDN, event yang mengapresiasi budaya local untuk kegiatan budaya dan kepariwisataan, jumlah kunjungan wisata, serta nilai Ekspor Perdagangan Non Migas. Penyumbang terkendalanya pencapaian target yang ada pada periode akhir RPJMD ini masih terkait dengan Refocussing kegiatan dan atau program pembangunan pada penanganan Covid-19 serta pemulihan dampak psikologis dan ekonomi masyarakat.

Demikian pula evaluasi hasil terhadap target akhir RPJMD sampai dengan triwulan II tahun 2021 jika dikelompokkan sejauhmana ketercapaiannya, terdapat 85 indikator atau sebesar 27,07% yang telah tercapai ($X \geq 100\%$), 195 indikator atau sebesar 62,10% dengan status akan tercapai pada tahun 2021 ($100 > X \geq 80$) dan masih terdapat 34 indikator atau sebesar 10,83% yang perlu upaya keras di dalam pencapaiannya ($X < 80$). Indikator yang masih perlu upaya keras secara umum beririsan dengan indikator yang mempunyai kategori rendah dan sangat rendah pada persandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2016-2021, dimana pandemi sebagai bencana global semenjak 5 triwulan terakhir masih menyisakan permasalahan di berbagai sektor yang harus dicarikan upaya pemulihannya.

Secara makro, progress capaian 9 indikator tujuan dan 28 indikator sasaran pembangunan Kota Semarang sampai dengan triwulan II tahun 2021 (periode akhir), masih terdapat beberapa indikator yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang, Nilai Investasi PMA/PMDN sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi sebesar 8,6 Trilyun dari target 21,92 Trilyun Rupiah (39,38%) , Nilai Ekspor menurut pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sd Juni 2021 baru sebesar 430 juta US\$ dari target sebesar 1.522 juta US\$. Untuk mengurai titik / ruas jalan rawan macet, upaya yang dilakukan tahun ini melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jateng dengan peningkatan jalan Ngadirgo-Palir, sehingga memecah arus kendaraan masuk dari arah barat yang akan menuju Semarang Atas. Sedangkan peningkatan kunjungan wisata yang sampai dengan triwulan II baik Domestik maupun mancanegara yang menginap sebesar 1.188.611 orang dari target terjadi kenaikan 9% dari jumlah kunjungan tahun 2020 yang sebesar 3.266.931 orang . Secara lebih makro lagi angka kemiskinan , Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (data BPS tahun 2020) juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, yang pada tahun lalu semuanya mengalami penurunan kinerjanya.

Berikut capaian dari 9 indikator Tujuan dan 28 indikator Sasaran Pembangunan Kota.

Tabel 2.99.
Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2021
(s.d Triwulan II)

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKP	Target akhir RPJMD 2016-2021	Realisasi s.d trw II	Capaian thd target RKP	Capaian thd target akhir		
				2021	2021		%	%		
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS (SEMARANG SEHAT DAN CERDAS)										
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		poin	83,23	83,23	83,05	99,78%	99,78%	
		1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,07	15,07	15,52	102,99%	102,99%
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,96	10,96	10,53	96,08%	96,08%
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,26	77,26	77,34	100,10%	100,10%
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal		Persen	69,22	69,92	91,29	131,88%	131,88%	
		2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persen	69,22	69,22	91,29	131,88%	131,88%	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	4,57	4,57	9,57	-9,41%	-9,41%	
		3	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,30	70,30	69,89	99,42%	99,42%
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	90	90	74	82,22%	82,22%
		Angka Kemiskinan		Persen	4,53	4,53	4,34	104,19%	104,19%	

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKPD	Target akhir RPJMD 2016-2021	Realisasi s.d trw II	Capaian thd target RKPD	Capaian thd target akhir
					2021	2021		%	%
	4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang, realisasi kinerja : BDT)	%	16,45	16,45	16,15	101,82 %	101,82 %
			Persentase Penanganan PMKS	Persen	98,00	98	99,1	101,12 %	101,12 %
	Tingkat Partisipasi Masyarakat			%	83,17	83,17	85,76	103,11 %	103,11 %
	5	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	83,17	83,17	85,76	103,11 %	103,11 %
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	97,56	97,56	95,55	97,94%	97,94 %
	MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (SEMARANG MELAYANI)								
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	> 72	>72	69,46	96,47%	96,47 %
	6	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	87,00	87	86,68	99,63%	99,63 %
			Opini BPK	Opini / Predikament	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKPD	Target akhir RPJMD 2016-2021	Realisasi s.d trw II	Capaian thd target RKPD	Capaian thd target akhir		
				2021	2021		%	%		
3	Kualitas Pelayanan Yang Baik Dan Melayani	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/Predikat	>80/ A	>80/ A	68,52 /BB	85,65%	85,65 %		
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3 / ST	>3/ST	3,439 5	114,65 %	114,65 %		
		Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Persen	48,80	48,8	25,32	51,89%	51,89 %	
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kejadian	1.793	1,793	597	167%	167%		
		MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (SEMARANG TANGGUH)								
		Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan		Persen	91,77	91,77	89,41	97,43%	97,43 %	
		8	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	Persen	96,00	96	68	70,83%	70,83 %
				Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	85,00	85	95,89	112,81 %	112,81 %
		9	Meningkatnya kinerja pelayanan	Persentase kawasan banjir dan	Persen	3,40	3,4	3,73	90,29%	90,29 %

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKPDP	Target akhir RPJMD 2016-2021	Realisasi s.d trw II	Capaian thd target RKPDP	Capaian thd target akhir
					2021	2021		%	%
5 Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan		infrastruktur kota	rob						
			Jumlah titik/ruas rawan macet	titik / ruas rawan macet	2,00	2	3	83,33%	83,33%
	10	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai indeks	55,00	55	66,05	120,09%	120,09%
	11	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan	Persen	100	100	96,34	96,34%	96,34%
	12	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai indeks	128,80	128,8	113,83	111,62%	111,62%

MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN

MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF (SEMARANG BERDAYA SAING)

6 Meningkatnya Produktivitas ekonomi local	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	6,5	6,5	-1,61	-24,77%	-24,77%	
	13	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi	Juta Rupiah	21,924,000	21,924,000	8.832.598	39,38%	39,38%
			Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,41	31,41	28,56	90,93%	90,93%
			Nilai Ekspor	US\$	1,522,987,000	1,522,987,000	430.524.99	28,27%	28,27%

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RKP	Target akhir RPJMD 2016-2021	Realisasi s.d trw II	Capaian thd target RKP	Capaian thd target akhir
				2021	2021		%	%
						2		
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	9,00	9,00	- 63,62	0%	0%
	14	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,54	27,54	28,64	103,99 %	103,99 %
		Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	Jumlah	7,00	7,00	6	85,71%	85,71 %

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; Perlu optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); Perlu optimalisasi pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; serta Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan disamping diperlukan strategi penanganan dan pemulihan dampak pandemic Covid-19 di berbagai sektor.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2021

Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang. Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti halnya angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya, apalagi pasca pandemi menunjukkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat meskipun posisi Kota Semarang saat ini untuk beberapa indikator makro ekonomi masih diatas rata-rata Jawa Tengah bahkan tingkat Nasional.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai

dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu : belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.
- 2) Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih cukup tingginya angka pengangguran. Ditambah dengan adanya dampak Covid-19 yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia. Angka kemiskinan di Kota Semarang termasuk yang terendah. Meskipun angka kemiskinan (versi BPS : 3,98% dengan jumlah warga miskin 2019 sebanyak 72.000 jiwa dan versi BDT Kemensos : 13,8% dengan jumlah warga miskin sebanyak 229.564 jiwa atau 68.248 KK) terus menunjukkan kinerja yang positif, namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, maka jumlah penduduk miskin berpotensi akan dapat meningkat. Sehingga diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
- 3) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru. Beberapa akar permasalahan dari kondisi tersebut, antara lain: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan pendidikan karakter serta pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan; masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (Hipertensi dan Diabetes Militus); masih terdapat balita stunting; masih cukup tingginya angka konfirmasi positif Covid-19; serta belum optimalnya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal, terutama untuk mengantisipasi adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, perubahan regulasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta masih adanya potensi intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 5) Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum memadai yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan risiko bencana. Akar permasalahan yang masih muncul yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang serta dengan memerhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk :
meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh Covid-19, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional.
- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk :
 - meningkatkan kualitas pendidikan dengan lingkup pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusi dan pendidikan non formal;
 - meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat, pencegahan serta penanganan stunting.
 - menurunkan angka pengangguran dengan cara meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja dan jaringan ketenagakerjaan, melalui sertifikasi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, terutama untuk lanjutan penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan warga terdampak Covid-19.
 - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan daerah dengan lingkup cara penguatan pemberdayaan gender serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kemiskinan dan pengangguran, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan dengan lingkup cara menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; memperkuat jaring Pengaman Sosial, terutama untuk warga terdampak Covid-19; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan dan penguatan kampung tematik, e-Waroeng.

- 4) Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk :
 - meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan penguatan akuntabilitas dan penguatan kualitas dokumen perencanaan.
 - memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.
- 5) Peningkatan infrastruktur, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak pada kehidupan masyarakat di tahun 2021, termasuk di Kota Semarang. Dampak tersebut terjadi hampir di seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian, terlebih saat meningkatnya penyebaran Covid-19 yang sempat terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi penyebaran Covid-19 dan *positivity rate* yang mulai menurun pada bulan Agustus 2021 memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2021 melaju di angka 7,07% (*y-on-y*). Tren pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat di sektor transportasi, restoran dan hotel yang sudah mulai berjalan normal di beberapa wilayah, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada Triwulan III, tren pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berlanjut, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang secara positif dapat menekan laju penyebaran Covid-19, terutama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pemberian vaksinasi secara komprehensif kepada seluruh masyarakat.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2021 juga tumbuh sebesar 5,66% (*y-on-y*), setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 85,43%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor sebesar 34,43%. Sebagai kota dengan basis utama ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa, ini merupakan momentum yang tepat bagi Kota Semarang untuk dapat mencatatkan pertumbuhan perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebesar -1,61% pada tahun 2020.

Kebijakan program PEN tahun 2021 oleh pemerintah pusat akan memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Program stimulus bantuan sosial akan mendorong konsumsi masyarakat, sementara konsumsi Pemerintah dapat meningkat sejalan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, nilai investasi dan perdagangan internasional pada semester II diperkirakan tumbuh moderat seiring dengan membaiknya keyakinan investor dan permintaan global. Inflasi masih diperkirakan meningkat bertahap seiring pulihnya konsumsi rumah tangga maupun Pemerintah Daerah, dengan inflasi inti meningkat sejalan dengan mulai longgarnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.

Selain difokuskan pada penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2021 harus tetap berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di akhir tahun 2021 mencapai 5,0 – 6,0 %. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2021 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada Perwujudan Semarang Hebat! yang merupakan akronim dari Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur fisik), Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Secara ringkas beberapa capaian

dan target indikator ekonomi pada perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2021

No	Indikator	Realisasi				Target Kota Semarang	
		2017	2018	2019	2020	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
1	LPE (%)	6,55	6,52	6,86	-1,61	5,0 -6,0	5,0 -6,0
2	Inflasi (%)	3,64	2,76	2,93	1,49	2,7 + 1	2,7 + 1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	20.594.936	27.549.279	24.187.783	21.842.472	21.924.000	21.924.000
4	TPT (%)	4,62	4,14	3,98	9,57	4,7 – 5,7	4,7 – 5,7
5	Kemiskinan (%)	6,61	5,29	4,54	4,34	4,5 – 5,5	4,5 – 5,5

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pandemi Covid-19 yang belum usai masih memberikan ketidakpastian dalam perkembangan perekonomian di masyarakat, yang secara langsung juga berdampak pada pendapatan daerah. Namun demikian, secara umum Pemerintah Kota Semarang tetap optimis dan realistis terhadap target pendapatan daerah pada perubahan RKPD 2021 ini. Hal ini mengingat mulai dibukanya kembali secara ketat aktivitas ekonomi seperti Hotel, Hiburan, Restoran dan usaha lainnya. Hal ini diharapkan dapat memenuhi target pendapatan asli daerah, utamanya yang bersumber dari Pajak Daerah. Di sisi lain, Perubahan RKPD ini juga dilakukan untuk penyesuaian dengan realisasi anggaran yang sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat.

Dibandingkan dengan APBD Induk TA 2021, Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021 ditargetkan meningkat dari Rp. 4.760.117.165.040 menjadi Rp. 5.064.068.379.546 atau naik sebesar Rp. 303.951.214.506 (6,39%). Peningkatan terbesar terjadi pada Pos Pendapatan Transfer yang meningkat sebesar Rp. 298.546.347.824 (14,31%). Sedangkan untuk pendapatan dari pos Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.404.866.682 (0,21%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap sebesar Rp. 131.312.629.040.

Namun apabila dibandingkan dengan RKPD 2021, komposisi Pendapatan Daerah di Perubahan RKPD 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp. 20.414.240.564 atau sebesar 0,40%. Perubahan komposisi pendapatan daerah ini terutama berasal dari penyesuaian alokasi dana transfer atau Dana Perimbangan yang berasal Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan berturut-turut sebesar Rp. 131.509.024.000 (10,12%) dan Rp.44.325.532.423 (11,83%).

Pada pos Pendapatan Asli Daerah, target Pajak Daerah mengalami penurunan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 1.900.776.400 (98,49%), Pajak Air Tanah sebesar Rp. 9.510.239.230 (26,29%) dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 55.750.000 (99,11%). Untuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, BPHTB dan PBB diharapkan tetap dapat memenuhi target pendapatan tahun 2021 karena aktivitas perekonomian saat ini sudah kembali berjalan, walaupun dengan protokol

kesehatan yang ketat. Pemerintah Kota Semarang sendiri sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keringanan pembayaran pajak daerah, untuk menstimulasi wajib pajak agar tetap taat pajak di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, antara lain berupa penundaan pembayaran pajak daerah dalam kurun waktu tertentu, keringanan administratif pajak daerah, penghapusan denda pajak, bahkan diskon pajak daerah (PBB) apabila dibayarkan sesuai waktu.

Untuk Retribusi Daerah, penurunan target pendapatan dilakukan pada hampir seluruh Perangkat Daerah penghasil retribusi (kecuali Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebesar Rp. 41.742.841.744 (menurun 32,27%). Selanjutnya, pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat kenaikan target pendapatan pada beberapa sumber, namun yang terbesar adalah PDAM yang naik sebesar Rp. 13.000.000.000 dan Bank Jateng yang naik sebesar Rp. 14.639.089.968. Sedangkan pada pos lain-lain PAD yang sah, perubahan target terjadi karena ada usulan turunnya target pendapatan BLUD Dinas Perhubungan (BRT Trans Semarang), turunnya Iuran listrik Pedagang Pasar (Dinas Perdagangan), serta turunnya pendapatan yang dikelola oleh Bapenda dan Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang. Namun di sisi lain juga terdapat kenaikan target pendapatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10.449.355.851 dan RSUD KRMT Wongsonegoro yang naik sebesar Rp. 46.714.915.260. Hal tersebut membuat target pendapatan pada pos Lain-lain PAD yang Sah secara umum mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021, peningkatan target Pendapatan Transfer berasal dari meningkatnya dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 330.500.482.577 yang belum dialokasikan pada APBD Induk 2021. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 38.633.191.000 (3,20%), dan Dana Bagi Hasil menurun sebesar Rp. 272.933.000 (0,18%). Selain itu, pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dari provinsi meningkat sebesar Rp. 7.631.989.247 (1,21%), serta Bantuan Keuangan Provinsi menurun sebesar Rp. 680.000.000 (1,88%). Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, target pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2021 masih sama dengan APBD Induk 2021, yaitu sebesar Rp. 131.312.629.040 yang berasal dari hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara lengkap, rincian perbandingan pendapatan pada RKPD 2021, APBD TA 2021 dan Perubahan RKPD 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2021
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.528.273.982.070	2.542.288.219.000	2.547.693.085.682	19.419.103.612	5.404.866.682
Pajak Daerah	1.960.526.416.000	1.974.540.653.000	1.956.634.447.354	(3.891.968.646)	(17.906.205.646)
Retribusi Daerah	129.360.552.000	129.360.552.000	87.617.710.256	(41.742.841.744)	(41.742.841.744)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	39.345.709.070	39.345.709.000	66.895.891.301	27.550.182.231	27.550.182.301
Lain - lain PAD yang Sah	399.041.305.000	399.041.305.000	436.545.036.771	37.503.731.771	37.503.731.771

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
Pendapatan Transfer	2.424.896.009.000	2.086.516.317.000	2.385.062.664.824	(39.833.344.176)	298.546.347.824
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.793.526.009.000	1.418.958.317.000	1.710.552.675.577	(82.973.333.423)	291.594.358.577
Dana Perimbangan	1.793.526.009.000	1.354.343.975.000	1.645.938.333.577	(147.587.675.423)	291.594.358.577
Dana Bagi Hasil	119.568.000.000	148.087.814.000	147.814.881.000	28.246.881.000	(272.933.000)
Dana Alokasi Umum	1.299.131.994.000	1.206.256.161.000	1.167.622.970.000	(131.509.024.000)	(38.633.191.000)
Dana Alokasi Khusus	374.826.015.000	-	330.500.482.577	(44.325.532.423)	330.500.482.577
DAK Fisik	119.855.763.000	-	88.093.649.138	(31.762.113.862)	88.093.649.138
DAK Non Fisik	254.970.252.000	-	242.406.833.439	(12.563.418.561)	242.406.833.439
Dana Insentif Daerah		64.614.342.000	64.614.342.000	64.614.342.000	-
Dana Insentif Daerah		64.614.342.000	64.614.342.000	64.614.342.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	631.370.000.000	667.558.000.000	674.509.989.247	43.139.989.247	6.951.989.247
Pendapatan Bagi Hasil	631.370.000.000	631.370.000.000	639.001.989.247	7.631.989.247	7.631.989.247
Bantuan Keuangan		36.188.000.000	35.508.000.000	35.508.000.000	(680.000.000)
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Hibah	131.312.629.040	131.312.629.040	131.312.629.040	-	-
Dana Darurat				(131.312.629.040)	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		131.312.629.040	131.312.629.040	131.312.629.040	-
Jumlah Pendapatan Daerah	5.084.482.620.110	4.760.117.165.040	5.064.068.379.546	(20.414.240.564)	303.951.214.506

3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Komposisi belanja daerah tidak lepas dari penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19. Penyesuaian belanja daerah secara simultan diakomodir APBD TA 2021 melalui pergeseran anggaran ke-6, kemudian hasil akhir pergeseran tersebut menjadi dasar perubahan RKPD tahun 2021, dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun 2021.

Penyesuaian belanja daerah ini diupayakan masih berpedoman pada arahan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2021 adalah:

- Proyeksi Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun terakhir, namun tetap memperhatikan besaran *earmarking* dan kebutuhan yang didasarkan di tahun berjalan;
- Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatan;
- Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
- Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- Belanja di tahun 2021 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemulihan pasca pandemi Covid-19
 - b. Prioritas Kota dan OPD yang strategis yang tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
 - c. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.
 - d. Pencapaian target akhir RPJMD.

Secara umum jika dibandingkan dengan APBD TA 2021, pada Perubahan RKPD Tahun 2021 komposisi Belanja Daerah terdapat selisih sebesar Rp. 430.460.771.448 atau naik 8,87%. Dengan uraian, Belanja Operasi dialokasikan Rp. 4.067.245.878.068 atau naik 9,50%, Belanja Modal sebesar Rp. 1.166.113.650.439 atau naik 6,98%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 51.492.411.981 atau naik 2,98% dari APBD TA 2021.

Jika dibandingkan dengan APBD TA 2021, penyesuaian Belanja Operasi terdapat pada:

1. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari Rp. 1.564.260.064.131, menjadi sebesar Rp. 1.769.923.078.597 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 205.663.014.466. Peningkatan tersebut berasal dari kurang perhitungan pembayaran gaji ASN maupun Non ASN dan TPP di tahun 2021.
2. Belanja Barang dan Jasa yang pada APBD 2021 dialokasikan Rp.2.076.029.393.210 pada perubahan RKPD 2021 naik menjadi Rp 2.182.782.850.371.
3. Belanja Hibah naik dari Rp. 70.825.183.400 menjadi sebesar Rp. 107.491.869.400. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kesetaraan Paket A, Kesetaraan Paket B, dan Kesetaraan Paket C yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Belanja Bantuan Sosial meningkat dari Rp.3.282.000.000 menjadi Rp. 7.048.079.700. Kenaikan belanja Bantuan Sosial tersebut dikarenakan terdapat tambahan jenis bantuan, yaitu Bantuan Sosial Bagi Kalayan Panti dan Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Disabilitas.

Untuk Belanja Modal, jika dibandingkan dengan APBD TA 2021, terdapat peningkatan sebesar Rp. 76.119.122.140 pada perubahan RKPD 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar 18.832.037.744 (13,38%)

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp. 39.661.614.039 (20,50%);
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 33.050.474.647 (10,43%);
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.002.123.131 (3,80%);
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.822.412.711 (14,74%);
6. Belanja Modal Aset Lainnya ditargetkan naik sebesar Rp. 4.414.535.356 (74,36%).

Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, pada perubahan RKPD tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.492.411.981 (2,98%) dari APBD Induk 2021. Secara lengkap, rincian perbandingan belanja pada RKPD 2021, APBD TA 2021 dan Perubahan RKPD 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2021	INDUK	PERUBAHAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2021
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	3.969.917.435.854	3.714.396.640.741	4.067.245.878.068	97.328.442.214	352.849.237.327
Belanja Pegawai	1.589.434.034.787	1.564.260.064.131	1.769.923.078.597	180.489.043.810	205.663.014.466
Belanja Barang dan Jasa	2.176.901.401.067	2.076.029.393.210	2.182.782.850.371	5.881.449.304	106.753.457.161
Belanja Bunga	300.000.000	-	-	(300.000.000)	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	200.000.000.000	70.825.183.400	107.491.869.400	(92.508.130.600)	36.666.686.000
Belanja Bantuan Sosial	3.282.000.000	3.282.000.000	7.048.079.700	3.766.079.700	3.766.079.700
Belanja Modal	975.803.184.256	1.089.994.528.299	1.166.113.650.439	190.310.466.183	76.119.122.140
Belanja Modal Tanah	147.133.688.528	140.728.528.578	121.896.490.834	(25.237.197.694)	(18.832.037.744)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.659.971.158	193.465.267.333	233.126.881.372	59.466.910.214	39.661.614.039
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	292.119.803.432	316.858.675.443	349.909.150.090	57.789.346.658	33.050.474.647
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360.085.804.760	420.640.124.273	436.642.247.404	76.556.442.644	16.002.123.131
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.803.916.378	12.365.085.637	14.187.498.348	11.383.581.970	1.822.412.711
Belanja Modal Aset Lainnya		5.936.847.035	10.351.382.391	10.351.382.391	4.414.535.356
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	51.492.411.981	1.492.411.981	1.492.411.981
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	51.492.411.981	1.492.411.981	1.492.411.981
Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
Jumlah Belanja Daerah	4.995.720.620.110	4.854.391.169.040	5.284.851.940.488	289.131.320.378	430.460.771.448

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka secara ringkas alokasinya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2021
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.528.273.982.070	2.542.288.219.000	2.547.693.085.682	19.419.103.612	5.404.866.682
Pendapatan Transfer	2.424.896.009.000	2.086.516.317.000	2.385.062.664.824	(39.833.344.176)	298.546.347.824
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang	131.312.629.040	131.312.629.040	131.312.629.040	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	5.084.482.620.110	4.760.117.165.040	5.064.068.379.546	(20.414.240.564)	303.951.214.506
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	3.969.917.435.854	3.714.396.640.741	4.067.245.878.068	97.328.442.214	352.849.237.327
Belanja Modal	975.803.184.256	1.089.994.528.299	1.166.113.650.439	190.310.466.183	76.119.122.140
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	51.492.411.981	1.492.411.981	1.492.411.981
Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	4.995.720.620.110	4.854.391.169.040	5.284.851.940.488	289.131.320.378	430.460.771.448
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	88.762.000.000	(94.274.004.000)	(220.783.560.942)	(309.545.560.942)	(126.509.556.942)

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada perubahan RKPD 2021 diperkirakan akan terdapat defisit sebesar Rp. 220.783.560.942 karena rencana pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Untuk menutup defisit tersebut, Pemerintah Kota Semarang menggunakan instrumen pembiayaan daerah agar struktur pendapatan dan belanja daerah menjadi ideal dan seimbang.

3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Semarang pada perubahan RKPD Tahun 2021 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 288.545.560.942. Jika dibandingkan dengan RKPD induk, angka tersebut berselisih sebesar angka tersebut karena pada RKPD induk tidak terpasang SiLPA. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2021, SiLPA pada

perubahan RKPD 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 105.509.556.942. Sebaliknya, dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, pada Perubahan RKPD 2021 ini dibandingkan dengan RKPD Induk 2021 terdapat penurunan sebesar Rp. 21.000.000.000 akibat rasionalisasi penyertaan modal pada Bank Jateng dan Perusda BPR/BKK, serta tidak disalurkannya pemberian pinjaman daerah melalui mekanisme dana bergulir di tahun 2021 karena masih tersedianya dana pada bank-bank penyalur dari dana bergulir tahun-tahun sebelumnya. Secara lengkap, rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2021	INDUK	PERUBAHAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2021	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2021
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	-	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	105.509.556.942
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	105.509.556.942
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Daerah	84.762.000.000	84.762.000.000	67.762.000.000	(17.000.000.000)	(17.000.000.000)
Penyertaan Modal	-	52.412.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	-

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)			SELISIH	
PDAM					
Penyertaan Modal Perusda Percetakan					-
Penyertaan Modal Bank Pasar	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-
Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK	-	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)
Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Bank Jateng	-	16.000.000.000	-	-	(16.000.000.000)
Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Penyertaan Modal PT. Taman Satwa	-	7.850.000.000	7.850.000.000	7.850.000.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	88.762.000.000	88.762.000.000	67.762.000.000	(21.000.000.000)	(21.000.000.000)
PEMBIAYAAN NETTO	(88.762.000.000)	94.274.004.000	220.783.560.942	309.545.560.942	126.509.556.942

Berdasarkan uraian pembiayaan daerah di atas, maka Pemerintah Kota Semarang mengalami SURPLUS pembiayaan sebesar Rp. 220.783.560.942 pada perubahan RKPD Tahun 2021. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah pada perubahan RKPD 2021 sebesar Rp. 220.783.560.942, sehingga kondisi pada perubahan RKPD 2021 adalah anggaran berimbang.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang, maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 berikut perubahannya harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2016-2021 tahun kelima. Selain merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top-down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut, penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

Hebat, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang.

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi 3 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
- Misi 4 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Perubahan Kota Semarang Tahun 2016-2021, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPd 2021	PENYESUAIAN TARGET RKPd 2021	
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS				
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82 – 83,5 poin	82 – 83,5 poin	
	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	69,22%	69,22%	
	Sasaran:			
	1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	15,07 poin	15,07 poin
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,96 tahun	10,96 tahun
		Angka Harapan Hidup	77,26 tahun	77,26 tahun
	2. Meningkatkan kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	69,22%	69,22%
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,7 – 5,7 %	4,7 – 5,7 %	
	Angka Kemiskinan	4,5 - 5,5%	4,5 - 5,5%	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	83,17%	83,17%	
	Sasaran:			
	1. Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,30%	70,30%
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	90%	90%
	2. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (indikator kota)	16,45%	16,45%
		Persentase Penanganan PMKS	98%	98%
	3. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	83,17%	83,17%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,56	97,56

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2021	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2021	
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK				
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	> 72	> 72
	Sasaran :			
	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87
		Opini BPK	WTP	WTP
		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	> 80 / A	> 80 / A
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3 / ST	>3 / ST
4.	Terwujudnya kondusivitas wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	48,8%	48,8%
	Sasaran :			
	1. Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.793 kejadian	1.793 kejadian
MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				
5.	Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	91,77%	91,77%
	Sasaran :			
	1. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	96%	96%
		Persentase kesesuaian tata ruang	85%	85%
	2. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur kota	Persentase kawasan banjir dan rob	3,40%	3,40%
		Jumlah titik/ruas rawan macet	2 titik/ruas	2 titik/ruas
	3. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55 poin	55 poin
	4. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	100%	100%
	5. Meningkatkan ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	128,80 poin	128,80 poin
MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL				

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2021	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2021
DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF			
6. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 6,0%	5,0 – 6,0%
Sasaran :		Rp.21.924.000 jt	Rp.21.924.000 jt
1. Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi		
	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	31,41%	31,41%
	Nilai Ekspor	1.522.987.000 US\$	1.522.987.000 US\$
	Persentase peningkatan kunjungan wisata	9%	9%
2. Meningkatkan Produk Unggulan Daerah	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	27,54%	27,54%
	Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	7	7

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 berdasarkan pada Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tema pembangunan RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup sesuai yang tertuang dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,7 – 9,1%;
3. Gini Ratio sebesar 0,377 – 0,379;
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 23,55 – 24,05%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 – 72,95; dan
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2 – 9,7%.

Dengan mengacu pada tema dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh dalam RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh (7) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ketujuh Prioritas Nasional tersebut kemudian dijabarkan kedalam Sasaran Prioritas dan Program Prioritas untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang bersangkutan sebagai berikut:

Sasaran Prioritas PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dijabarkan menjadi 8 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Sasaran Prioritas yang diambil dalam PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia.

Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan menjadi 7 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

Sasaran Prioritas dalam PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing yaitu:

- 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing;

Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dijabarkan menjadi 7 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Sasaran Prioritas yang tertuang dalam PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu:

- 1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Sedangkan dalam penjabarannya, PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dibagi dalam 4 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

Sasaran Prioritas yang tertuang dalam PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu:

- 1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dijabarkan ke dalam 5 Program Prioritas, yaitu :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

Sasaran Prioritas PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim:

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

Prioritas Nasional 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dijabarkan menjadi 3 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

Sasaran Prioritas PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik:

- 1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2. Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3. Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Prioritas Nasional 7. Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional dijabarkan menjadi 5 Program Prioritas, yaitu:

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2021 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang berdaya saing;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah Tahun 2021 yaitu:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15%;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
3. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,94 – 11,02%;
4. Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,94 – 5,67%;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,8 – 4,8%;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$;
8. PDRB per kapita sebesar Rp. 41,15 juta;
9. Indeks Williamson sebesar 0,58;
10. Nilai Tukar Petani 104;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,52;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2021 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi Triwulan II pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan. Selain itu, prioritas program dan kegiatan tahun 2021 juga dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut.

Secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2021 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program/kegiatan.

- 2) Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021.
- 3) Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- 4) Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- 5) Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- 6) Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- 7) Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- 8) Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79/2019.

Selain harus dapat menjawab isu strategis yang muncul tersebut, Prioritas Pembangunan daerah juga harus dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Periode 2016-2021 memiliki tema atau agenda Pembangunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu “Perwujudan Semarang Hebat”. Tema tersebut difokuskan lagi pada penanganan dampak Covid-19 agar Semarang Hebat tetap dapat terwujud setelah teratasinya pandemi Covid-19.

Untuk itu prioritas pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2021 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, tema/agenda pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 serta isu-isu strategis Kota Semarang, sehingga prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
- Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;
- Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;
- Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah;
- Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko Bencana.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut dijabarkan kedalam fokus melalui upaya-upaya pencapaian dengan titik berat dan refocusing pada upaya pemulihan dampak COVID-19. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut dijabarkan dalam 30 Fokus yang masing-masing fokus dilakukan upaya-upaya pencapaiannya. Ke 67 (enam puluh tujuh) upaya tersebut diarahkan melalui kegiatan-kegiatan *dedicated* seperti terperinci di bawah ini:

- Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dijabarkan kedalam 5 fokus dan 16 upaya kegiatan.

- Fokus 1. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan, melalui upaya:
- 1) Pembangunan dan Rehab Pasar Tradisional/Pasar Rakyat.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan pasar untuk penyelenggaraan event-event untuk pelaku usaha kecil dan mikro.
- Fokus 2. Peningkatan Produktivitas Pangan, melalui upaya:
- 3) Penyediaan Tanaman Pangan bagi Masyarakat.
 - 4) Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian.
 - 5) Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan.
 - 6) Penguatan lumbung pangan kelurahan.
- Fokus 3. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi, melalui upaya:
- 7) Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS).
 - 8) Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, terutama yang menyerap banyak tenaga kerja.
- Fokus 4. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil, melalui upaya:
- 9) Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses permodalan;
 - 10) Peningkatan event untuk pemasaran produk usaha mikro dan kecil.
 - 11) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah.
 - 12) Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - 13) Sinergitas UMKM dengan Koperasi.
- Fokus 5. Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya:
- 14) Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata
 - 15) Percepatan kesiapan destinasi wisata untukantisipasi “normal baru” pasca COVID-19.
 - 16) Peningkatan event wisata.
- Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan kedalam 6 fokus dan 13 upaya pencapaian.
- Fokus 6. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas, melalui upaya:
- 17) Peningkatan efektifitas anggaran operasional sekolah.
 - 18) Pengembangan sekolah inklusi.
 - 19) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PUAD, TK, SD dan SMP.
 - 20) Perkuatan pendidikan karakter.
- Fokus 7. Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan, melalui upaya:
- 21) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi.
 - 22) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 23) Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat.
- Fokus 8. Peningkatan kualitas layanan kesehatan Tingkat Pertama dan rujukan melalui upaya:
- 24) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 25) Peningkatan sarana penunjang petugas medis, misal Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar.
- Fokus 9. Peningkatan upaya pencegahan penyakit tidak menular, melalui upaya:
- 26) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- Fokus 10. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan, melalui upaya:
- 27) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan perempuan dan anak.
 - 28) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

29) Peningkatan upaya pengendalian penduduk.

Fokus 11. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas dan lansia, melalui upaya:

30) Pemberdayaan Lansia.

31) Fasilitasi kebutuhan disabilitas.

Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran, dijabarkan melalui 4 fokus dan 7 upaya kegiatan.

Fokus 12. Percepatan penurunan kemiskinan, melalui upaya:

32) Peningkatan kesempatan akses pendidikan bagi warga miskin.

33) Fasilitasi Jamkesmaskot untuk warga miskin.

34) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

35) Penguatan sistem jaminan perlindungan sosial.

Fokus 13. Perlindungan PMKS, melalui upaya:

36) Peningkatan kualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial.

37) Peningkatan bantuan untuk PMKS.

Fokus 14. Penguatan Kampung Tematik, melalui upaya:

38) Peningkatan kualitas dan sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Kampung Tematik.

Fokus 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial, melalui upaya:

39) Penguatan sistem dan database penanganan rehabilitasi sosial.

Fokus 16. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, melalui upaya:

40) Fasilitasi tindak lanjut program untuk penerima Kartu Pra Kerja;

41) Peningkatan padat karya produktif.

Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, yang dijabarkan kedalam 4 fokus dan 6 upaya kegiatan.

Fokus 17. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, melalui upaya:

42) Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Fokus 18. Peningkatan Stabilitas Wilayah Serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui upaya:

43) Penguatan Toleransi.

Fokus 19. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, melalui upaya:

44) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

45) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD.

Fokus 20. Peningkatan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui upaya:

46) Pengembangan budaya inovasi di OPD.

47) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Kota yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko Bencana, dijabarkan kedalam 10 fokus dan 26 upaya kegiatan.

Fokus 21. Dukungan Pelaksanaan Perpres No. 79/2019, melalui upaya:

48) Normalisasi Sungai Beringin.

Fokus 22. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan, melalui upaya:

49) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar.

50) Lanjutan tahapan pembangunan PSEL.

51) Pembangunan Sewerage System.

- Fokus 23. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru, melalui upaya:
- 52) Pembangunan *Middle* dan *Inner Ring Road*.
 - 53) Peningkatan Fungsi Pedestrian.
- Fokus 24. Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik, melalui upaya:
- 54) Peningkatan Layanan Transportasi Massal Berbasis Jalan.
 - 55) Rintisan Pembangunan moda Transportasi Massal Berbasis Rel.
- Fokus 25. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh, melalui upaya:
- 56) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
 - 57) Penyediaan sarana dan prasarana air minum.
 - 58) Pembangunan sarana persampahan.
 - 59) Penanganan Kumuh Skala Kawasan.
 - 60) Kolaborasi penanganan kumuh.
- Fokus 26. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, melalui upaya:
- 61) Perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 62) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Fokus 27. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya:
- 63) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir.
- Fokus 28. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, melalui upaya:
- 64) Peningkatan sarana mitigasi bencana.
 - 65) Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat.
- Fokus 29. Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
- 66) Pengembangan kawasan Semarang Lama.
- Fokus 30. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka, melalui upaya:
- 67) Optimalisasi fungsi taman untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021, serta pencapaian Indikator Semarang Hebat yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 6,0%.
2. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,41%.
3. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,54%.
4. Nilai Investasi sebesar Rp. 21.924.000 juta.
5. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,40%.
6. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82 – 83,5 poin.
7. Indeks Pembangunan Gender sebesar 97,56 poin.
8. Angka Kemiskinan (berdasarkan indikator BPS) sebesar 4,5 – 5,5%.
9. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,7 – 5,7%.
10. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar > 72.

Sedangkan jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 ini, angka target capaian Pemerintah Kota Semarang rata-rata lebih baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov.
 Jateng dan Kota Semarang Tahun 2021

	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT	Gini ratio
Kota Semarang	5,0 -6,0	82 – 83,5	4,5 – 5,5	4,7 – 5,7	0,333
Prov. Jateng	3,8 – 4,8	72,52	11,94 – 11,02	4,94 – 5,67	0,350
Pusat	4,5 – 5,5	72,78-72,95	9,2 – 9,7	7,7 – 9,1	0,372-0,375

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2021

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021			
1.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	15,07 poin	P2. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektifitas anggaran operasional sekolah. 2. Pengembangan sekolah inklusi. 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PUAD, TK, SD dan SMP. 4. Perkuatan pendidikan karakter. Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan gizi buruk dan percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi,. 2. Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan. 3. Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan Tingkat Pertama dan rujukan melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan kesehatan rujukan. 2. Peningkatan sarana penunjang petugas medis, misal Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar. Peningkatan upaya pencegahan penyakit tidak menular, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat. 	Prioritas Nasional 3: SDM berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Prioritas Provinsi 2 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,96 tahun		
		Angka Harapan Hidup	77,26 tahun		
2.	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	69,22 %		
3.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,30 %		
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	90 %		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2021			
					<p>Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan perempuan dan anak. 2. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Peningkatan upaya pengendalian penduduk. <p>Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas, dan lansia, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lansia. 2. Fasilitasi kebutuhan disabilitas. 	
4.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (BPS)	4,5 – 5,5 %	P3.	<p>Percepatan penurunan kemiskinan, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesempatan akses pendidikan bagi warga miskin. 2. Fasilitasi Jamkesmas untuk warga miskin. 3. Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 4. Penguatan sistem jaminan perlindungan sosial. <p>Perlindungan PMKS, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial. 2. Peningkatan bantuan untuk PMKS. 	<p>Prioritas Nasional 1:</p> <p>Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p> <p>Prioritas Provinsi 1:</p> <p>Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran</p>
		Persentase Penanganan PMKS	98 %			
5.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	83,17 %			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,56			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021			
				Penguatan Kampung Tematik, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Kampung Tematik. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem dan database penanganan rehabilitasi sosial. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi tindak lanjut program untuk penerima Kartu Pra Kerja 2. Peningkatan padat karya produktif. 	
6.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat Opini BPK Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	87 WTP > 80 / A >3 / ST	P4. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak). Peningkatan Stabilitas Wilayah Serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Toleransi. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi 	Prioritas Nasional 7: Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi pelayanan public Prioritas Provinsi 4: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah
7.	Meningkatnya kualitas dan ketentraman	Angka Kriminalitas	1.793 kejadian		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2021		
	ketertiban masyarakat				<p>pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD.</p> <p>Peningkatan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui upaya:</p> <p>1. Pengembangan budaya inovasi di OPD.</p> <p>2. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.</p>
8.	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	96 %	<p>P5.</p> <p>Dukungan Pelaksanaan Perpres No. 79/2019, melalui upaya:</p> <p>1. Pembangunan Jembatan Srandol-Sekaran.</p> <p>2. Pembangunan Technopark.</p> <p>3. Pembangunan Flyover Madukoro.</p> <p>4. Normalisasi Sungai Beringin.</p> <p>5. Pembangunan Underground Simpanglima.</p> <p>6. Pembangunan BRT dedicated line.</p> <p>7. Pengembangan LRT perkotaan.</p> <p>8. Pembangunan Rusun Pekerja.</p> <p>Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan, melalui upaya:</p> <p>1. Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar.</p> <p>2. Pembangunan PSEL.</p> <p>3. Pembangunan Sewerage System.</p> <p>Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru, melalui upaya:</p>	<p>Prioritas Nasional 2:</p> <p>Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan</p> <p>Prioritas Nasional 5:</p> <p>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas Nasional 6:</p> <p>Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>Prioritas Provinsi 3:</p> <p>Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi</p>
		Persentase kesesuaian tata ruang	85 %		
9.	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Persentase kawasan banjir dan rob	3,40 %		
		Jumlah titik/ruas rawan macet	2 titik/ruas		
10.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55		
11.	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	100 %		
12.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	128,80 poin		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021			PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021		
			<p>1. Pembangunan <i>Middle dan Inner Ring Road</i>.</p> <p>2. Peningkatan Fungsi Pedestrian.</p> <p>Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik, melalui upaya:</p> <p>1. Peningkatan Layanan Transportasi Massal Berbasis Jalan.</p> <p>2. Rintisan Pembangunan moda Transportasi Massal Berbasis Rel.</p> <p>Penurunan Luasan Kawasan Kumuh, melalui upaya:</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana air minum.</p> <p>3. Pembangunan sarana persampahan.</p> <p>4. Penanganan Kumuh Skala Kawasan.</p> <p>5. Kolaborasi penanganan kumuh.</p> <p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, melalui upaya:</p> <p>1. Perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya:</p> <p>1. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir.</p>	<p>rakyat secara berkelanjutan</p>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2021			
					<p>Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana mitigasi bencana. <p>Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan Semarang Lama. <p>Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi taman untuk mendorong perekonomian masyarakat. 	
13.	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB Nilai Ekspor Persentase peningkatan kunjungan wisata	21.924.000 jt 31,41 % 1.522.987.000 US\$ 9 %	P1.	Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Rehab Pasar Tradisional/Pasar Rakyat, 2. Optimalisasi pemanfaatan pasar untuk penyelenggaraan event-event untuk pelaku usaha kecil dan mikro. Peningkatan Produktifitas Pangan, melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Tanaman Pangan bagi Masyarakat. 2. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian. 3. Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan 4. Penguatan lumbung pangan kelurahan. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi,	Prioritas Nasional: 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Prioritas Provinsi 3: Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.
14.	Meningkatnya Produk Unggulan Daerah	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	27,54 % 7			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021			PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021		
			<p>melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS). 2. Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, terutama yang menyerap banyak tenaga kerja. <p>Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses permodalan; 2. Peningkatan event untuk pemasaran produk usaha mikro dan kecil. 3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah. 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif. 5. Sinergitas UMKM dengan Koperasi. <p>Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata. 2. Percepatan kesiapan destinasi wisata untuk antisipasi “normal baru” pasca COVID-19. 3. Peningkatan event wisata. 	

Tabel 4.3.

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2021

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jateng		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Kemiskinan dan pengangguran	PN.1	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.1	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	PD.1	Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.2	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM Jateng menuju SDM Jateng berdaya saing	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
	PN.3	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Peningkatan infrastruktur	PN.4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.3	Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan	PD.3	Perkuatan infrastruktur kota yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dg memperhatikan aspek keberlanjutan dan risiko bencana
	PN.5	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.6	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan		keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana	PD.4	Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam pelayanan publik	PD.4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	PD.5	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2021 disusun dalam rangka mencapai target pembangunan Kota Semarang. Program-program pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang Tahun 2021 disusun berdasarkan Nomenklatur dan kodefisikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur penunjang, 5 (lima) unsur pendukung, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pembangunan sekolah baru Untuk Pendidikan Sekolah Dasar, penambahan ruang kelas SD/SMP dan PUAD, Peningkatan sarana dan prasarana belajar mengajar PAUD/SD/SMP, Peningkatan kualitas belajar mengajar SD/SMP/PAUD serta peningkatan kelembagaan dan manajemen sekolah SD/SMP/PAUD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan sebanyak 5 lembaga; (2) APK PAUD 5-6 tahun sebesar 82%; (3) APK SMP/MTs sebesar 100%; dan (4) APK SD/MI sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengembangan kompetensi dasar muatan lokal muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF sebesar 100%; dan (2) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sebesar 100%.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV sebesar 100%.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin sebesar 100%; dan (2) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin sebesar 100%.

5.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pemenuhan peralatan kesehatan rumah sakit RSUD.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100%; (2) Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B 75%; dan (3) Nilai Kinerja RS BLUD Sehat dengan indeks 83.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penyediaan, pengendalian dan pengawasan farmasi dan alat kesehatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar sebesar 90%.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar 85%.

5.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada operasi dan pemeliharaan pengendalian banjir, embung dan stasiun pompa banjir.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak sebesar 90%; (2) persentase cakupan supply air baku sebesar 100%.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga yang tertalayani air minum sebesar 100%.

- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, penyediaan sub sistem pengolahan limbah setempat dan operasi dan pemeliharaan SPAL.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 100%.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pembangunan kolam retensi, pengendalian banjir, normalisasi sungai dan operasi, dan pemeliharaan serta peningkatan sistem drainase perkotaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Kawasan banjir dan rob sebesar 3,40%
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi Gedung/kantor pemerintah dan pengelolaan bangunan cagar budaya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase sarpras dasar perkotaan yang terbangun sebesar 100%.
- f. Program Pengembangan Permukiman
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase capaian pengentasan luas Kawasan kumuh sebesar 100%.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengendalian dan pengawasan bangunan dan lingkungan dan pemeliharaan sarpras dan bangunan Kawasan Rusun.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase bangunan yang ber IMB sebesar 55,45%; (2) Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian di 8 lokasi; (3) Sarana dan prasarana dasar perkotaan kondisi baik sebesar 75,32%.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 86,85%.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelembagaan konstruksi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase perencanaan konstruksi sebesar 100%.

- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun 100%.

5.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada fasilitasi dan pembinaan pengelolaan kelembagaan perumahan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Fasilitasi kebutuhan perumahan 100%.
- b. Program Kawasan Permukiman
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase rumah layak huni sebesar 100%.
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase perumahan yang terfasilitasi PSU 100%.

5.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan sebesar 31 perda.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran; Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran; Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; serta Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase cakupan pelayanan kebakaran sebesar 25,22% dan Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran sebesar 88%.

c. Program Penanganan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan koordinasi penanganan bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase cakupan pemulihan pasca bencana 100%.

5.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebesar 92%.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pemenuhan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani 50 warga.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penanganan PPKS 98%.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada perlindungan jaminan sosial pada PPKS.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial 100%.

e. Program Penanganan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada perlindungan sosial dan pelayanan dukungan psikologis korban bencana alam dan sosial; pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial 4%.

5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pelatihan kerja berbasis kompetensi, pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta, dan pengendalian pengawasan Lembaga pelatihan kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase tenaga kerja terampil sebesar 60%.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pelayanan antar kerja dan pengelolaan data informasi pasar kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penempatan tenaga kerja AKAD, AKL, AKAN sebesar 90% dan persentase peluang kerja mandiri sebesar 80%.

c. Program Hubungan Industrial

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada: Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta Fasilitasi Dan Pembinaan Tripartite.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar 80%.

5.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Percepatan pelaksanaan PUG yang didukung adanya Anggaran Responsive Gender (ARG) di setiap SKPD; dan Peningkatan partisipasi perempuan di bidang sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 100%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, pendampingan layanan perlindungan perempuan dan penguatan lembaga layanan penanganan perlindungan perempuan korban kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 17,04 poin.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak ANak; dan Penguatan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi 100%.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penyediaan data dan informasi Gender dan Anak yang cepat dan akurat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak 100%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pendampingan pemenuhan hak anak dan peningkatan Lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan Pemenuhan Hak Anak 100%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani 0,01%.

5.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan; Pembentukan Cadangan Pangan; serta Penguatan Distribusi Pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Ketersediaan Energi / Kapita 3.054 Kkal/kapita/tahun; (2) Persentase cakupan distribusi pangan 100%; (3) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang 100%.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penanganan daerah-daerah yang rawan pangan dan berpotensi rawan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan 7%.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 80%.

5.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Pengelolaan tanah kosong 100%.

5.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup; pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100%; (2) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 55%; (3) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 82%; (4) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 5 Ha.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengelolaan taman dan peningkatan sarana prasarana keanekaragaman hayati.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (Kehati) di Kota Semarang 100%.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengendalian dan pengawasan sebaran limbah B3.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 sebesar 50%.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan usaha.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota 85%; (2) Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan 100%.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup 46%.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pemberian penghargaan terhadap pegiat lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan 10%.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan layanan penyelesaian pengaduan kasus lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100%.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pengangkutan sampah jalan dan pengangkutan sampah pasar serta kebersihan wilayah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA 90%.

5.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pelayanan, penataan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftara penduduk.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase perekaman KTP-Elektronik sebesar 98,11%; (2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA 60,57%
- b. Program Pencatatan Sipil
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pelayanan, penyelenggaraan dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kepemilikan akta kelahiran 93,42%.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pengelolaan data kependudukan kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 37,50%; (2) Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100%.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan layanan Data kependudukan yang cepat dan akurat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah 100%.

5.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penguatan edukasi pengendalian penduduk masyarakat baik secara formal maupun informal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun sebesar 0,5%.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE); peningkatan SDM penyuluh KB; peningkatan layanan alat dan obat kontrasepsi dan layanan KB; dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga dalam Ber-KB.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 1,99 %; (2) Peserta KB Aktif sebesar 77,04%; (3) Cakupan PUS *unmet need* sebesar 7%; (4) Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) sebesar 11,20%.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pembinaan Ketahanan Keluarga dan kesejahteraan keluarga; dan Peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif sebesar 58,89%.

5.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan perlengkapan jalan dan terminal; peningkatan pengelolaan jaringan trayek; peningkatan manajemen lalulintas angkutan umum; dan Pengelolaan Kawasan parkir *on the street*.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebesar 61,73%; (2) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk dengan rasio 6,68; (3) Jumlah trayek BRT dengan 11 trayek; (4) Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum sebesar 35%; (5) Persentase pengelolaan Parkir *On the Street* sebesar 84%.

5.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat sebesar 100%.; dan persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%.

b. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur jaringan intra; dan pengelolaan pusat data.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Terselenggaranya pengelolaan E-Government sebesar 100%; dan Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (*smart city*) sebesar 100%.

5.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan fasilitasi izin usaha simpan pinjam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sebesar 5%.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi sebesar 55%.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Koperasi sehat sebesar 30%.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan kualitas manajemen usaha perkoperasian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan sebesar 10%; (2) Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan sebesar 2%.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan penataan manajemen koperasi, serta peningkatan perlindungan usaha koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koperasi yang meningkat omsetnya sebesar 25%.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial UMKM; dan fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan sebesar 10%; (2) Persentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina sebesar 60%; (3) Persentase Akses Pembiayaan sebesar 40%; (4) Persentase Legalitas Pelaku Usaha sebesar 50%.

g. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan fasilitas pengembangan usaha bagi UMKM.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya sebesar 20%; (2) Persentase Akses Pemasaran sebesar 23%.

5.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Penataan kebijakan penanaman modal dan pemberian insentif di bidang penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah Penanam Modal yang mendapat fasilitasi investasi sebanyak 3.672 penanam modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan penyebaran informasi daya Tarik penanaman modal; dan penyelenggaraan even-even promosi penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebanyak 344 investor.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Izin Terbit Sesuai SP sebesar 98,70%.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan nilai 1 (satu).

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas data dan informasi penanaman modal yang akurat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sebesar 94%.

5.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan pengembangan organisasi kepemudaan; dan peningkatan daya saing wisausaha muda.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 25%; (2) Persentase fasilitasi kegiatan wirausaha muda sebesar 85%; (3) Jumlah organisasi pemuda aktif sebanyak 62 organisasi.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan olah raga prestasi, pembinaan cabang olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) jumlah Atlet prestasi sebanyak 550 atlet; (2) Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar sebanyak 39 buah; (3) Persentase pembinaan cabang olahraga sebesar 100%.

5.2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik Daerah; serta Koordinasi Forum Data Statistik Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 100%.

5.2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Persandian Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah sebesar 100%.

5.2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pagelaran budaya tradisional; dan pembinaan Lembaga kebudayaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya sebesar 80%; (2) Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya sebesar 80%; (3) Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebesar 90%.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan fasilitasi pelaku kesenian tradisional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional sebesar 10%.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan terhadap situs-situs cagar budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya sebesar 65,30%.

5.2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk dengan rasio 1; (2) Jumlah rumah pintar sebanyak 193 unit.

5.2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pengelolaan arsip statis daerah dan peningkatan akses dan layanan kearsipan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 100%; (2) Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara sebanyak 500 judul.

- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Penarikan/pendataan, penataan dan pengolahan arsip-arsip inaktif SKPD.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 95%; (2) persentase jumlah arsip musnah sebesar 50%.

5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.3.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan peningkatan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Produksi perikanan tangkap sebesar 2.801,12 ton.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pemberdayaan pembudidaya ikan, dan peningkatan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Produksi perikanan budidaya sebesar 3.738 ton.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pembinaan kelompok masyarakat petani ikan/nelayan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Peningkatan konsumsi ikan perkapita sebesar 33,06 kg/kapita/tahun.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan penganekaragaman olah ikan, Gerakan Gemar Ikan, pembinaan pedagang ikan dan peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil olahan ikan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Produk olahan hasil perikanan sebesar 17.113,32 ton.

5.3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan tempat-tempat wisata dan pengembangan destinasi wisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebanyak 8.633 orang dan Lama menginap *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) sebesar 1,60%.

- b. Program Pemasaran Pariwisata
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya; fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata; dan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Kualitas Promosi Wisata sebesar 1,35%.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas sebesar 100%.

5.3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas wilayah; dan penyediaan benih/bibit pakan ternak.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Produksi hasil peternakan sebesar 35.335 ton; (2) Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 50.233,44 ton.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Produktivitas pertanian per ha per tahun 6,38 ton/ha.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar minus 5; (2) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) 9 buah.
- d. Program Penyuluhan Pertanian
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian; dan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama sebesar 24 kelompok.

5.3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pelayanan perizinan tempat dasaran bagi pedagang pasar dan PKL, pusat perbelanjaan dan swalayan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebesar 5,36%; (2) Persentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani sebesar 100%.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan dan pengendalian pengelelola sarana distribusi perdagangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif sebanyak 18 pasar.
- c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; serta pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koefisien variasi harga antar waktu sebesar 4,11%.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan daerah; dan peningkatan penyelenggaraan pemeran produk unggulan potensi ekspor.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Nilai ekspor non migas sebesar US\$ 1.522.987.000,-.
- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan pengawasan tera dan tera ulang.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 66%.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; menjalin jaringan kemitraan pelaku usaha dalam rangka pemasaran produk lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan sebesar 15%.

5.3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Pengembangan Kawasan sentra-sentra industri; peningkatan sarana dan prasarana industri; dan peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Pertumbuhan industri kecil sebesar 3.635 IKM; (2) Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM sebesar 80%; (3) Jumlah Industri Kreatif sebesar 658 Industri Kreatif.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan pelayanan izin usaha industri; dan pengendalian dan pengawasan perizinan industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Pertambahan IKM sebesar 0,48%; (2) Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif sebesar 4%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan data dan informasi industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Meningkatkan ketersediaan Data Informasi Industri sebesar 0,5%.

5.4 Unsur Pendukung

5.4.01 Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan tertib administrasi tata pemerintahan; fasilitasi dan koordinasi hukum; fasilitasi kerjasama daerah; dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah sebesar 100%; (2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebesar 9 kegiatan; (3) Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah sebesar 20%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; peningkatan pelaksanaan administrasi pembangunan; dan pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%; (2) Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100%; (3) Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD sebesar 100%.

5.4.02 Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas pembahasan Raperda; peningkatan kapasitas DPRD; dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD sebanyak 14 dokumen.

5.5 Unsur Penunjang

5.5.01 Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan sebesar 75%; (2) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota sebesar 97%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 92%; (2) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 93%; (3) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 89%.

5.5.02 Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan kualitas penyusunan rencana anggaran daerah; peningkatan pengelolaan perbendaharaan daerah; dan peningkatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase SILPA Terhadap APBD sebesar 1,62%; (2) Presentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan sebesar 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pengelolaan barang milik daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Legalitas Aset sebesar 60,96%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10%; (2) Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 47%.

5.5.03 Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan tertib administrasi kepegawaian; Peningkatan dan penegakan disiplin pegawai; dan peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi pegawai.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik sebesar 80%; (2) Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 16,15%; (3) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%; (4) Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin sebesar 99%; (5) Persentase akurasi data kepegawaian sebesar 99%.

5.5.04 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia ASN; dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional SDM ASN.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya sebesar 30%.

5.5.05 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas hasil penelitian; dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

5.6 Unsur Pengawas

5.6.01 Inspektorat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan internal; dan peningkatan pemeriksaan khusus.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada levelling 3.

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pembinaan, pendampingan dan asistensi bidang pengawasan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat Maturitas SPIP pada levelling 3.

5.7 Unsur Kewilayahan

5.7.01 Kecamatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) sebesar 85%; (2) Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) di 177 kelurahan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dan/atau Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan wilayah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 95%;
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban wilayah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT sebesar 90%.

5.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Peningkatan koordinasi pelaksanaan penguatan Ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Indeks Pengamalan Pancasila dengan nilai 2.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan peran partai politik dan Lembaga dan/atau masyarakat dalam etika dan budaya politik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila sebesar 3%.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan Lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam ikut berperan aktif dalam menciptakan kondusivitas wilayah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah Ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara sebanyak 100 organisasi.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan sebanyak 1 kejadian.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada peningkatan kewaspadaan dini, fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipleksosbudhankam sebesar 80%.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; 2) Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN; 3) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; dan 4) Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD.

Tabel 5.1

Target Kinerja Indikator Program serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada RKPD, APBD, dan Perubahan RKPD Tahun 2021

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.01.0.00.0.00.01 .00	DINAS PENDIDIKAN						1,089,298,342,061	879,381,325,040	1,097,163,463,095
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	589,566,940,459	507,059,438,048	671,649,094,413
			Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	5.00 lembaga	5.00 lembaga	5.00 lembaga	497,268,371,849	369,637,314,491	424,219,535,680
			APK PAUD 3-6 tahun	82.00 persen	82.00 persen	82.00 persen			
			APK SMP/MTs	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			APK SD/MI	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,403,470,476	1,275,882,250	274,234,359
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100.00 %	100.00 %	100.00 %	328,060,800	743,691,636	500,000,000
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %	731,498,477	664,998,615	520,598,643		
	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
1.02.0.00.0.00.01 .00	DINAS KESEHATAN						438,238,501,713	391,556,130,465	589,163,495,255
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	240,918,751,063	228,448,666,952	270,454,476,811
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	195,798,660,619	161,959,227,907	277,876,400,834
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,115,472,662	741,970,720	39,748,062,982
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	90.00 %	90.00 %	90.00 %	205,681,735	224,505,219	417,757,525
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	199,935,634	181,759,667	666,797,103		

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.02.0.00.0.00.02 .00	RSUD KRMT WONGSONEGORO					226,313,145,000	324,781,388,882	389,977,563,790	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (RSUD KRMT Wongsonegoro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	56,497,961,000	51,387,077,000	52,681,121,036
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang (RSUD KRMT Wongsonegoro)	75.00 %	75.00 %	75.00 %	169,815,184,000	273,394,311,882	337,296,442,754
			Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++) (RSUD KRMT Wongsonegoro)	83.00 indek	83.00 indek	83.00 indek			
1.03.0.00.0.00.01 .00	DINAS PEKERJAAN UMUM					295,419,410,968	365,889,090,000	372,588,579,794	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	34,669,984,315	33,826,379,624	32,112,416,520
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	13,645,044,724	28,489,212,066	29,073,655,897
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan banjir dan rob	3.40 persen	3.40 persen	3.40 persen	48,553,721,066	69,932,863,729	70,259,936,169
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	86.85 persen	86.85 persen	86.85 persen	198,550,660,863	233,640,634,581	241,142,571,208
1.03.2.10.0.00.02 .00	DINAS PENATAAN RUANG					297,067,402,191	269,010,090,422	239,632,727,078	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25,289,975,334	21,939,702,372	20,983,394,747
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	207,669,993,865	188,790,903,513	171,770,988,821
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang ber-IMB	55.45 %	55.45 %	55.45 %	4,814,748,872	4,377,044,428	3,355,627,750
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Perencanaan Konstruksi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	456,194,293	414,722,085	134,940,464
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17,200,491,667	15,636,810,606	14,173,397,606
		2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tertib administrasi pertanahan	75.00 %	75.00 %	75.00 %	832,319,095	756,653,723	681,427,723
		2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Pengelolaan Tanah Kosong	100.00 %	100.00 %	100.00 %	40,803,679,065	37,094,253,695	28,532,949,967

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.04.1.03.2.11.01 .00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						122,448,876,850	256,464,182,000	240,897,099,286
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	36,595,079,600	37,858,590,000	37,627,018,204
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Disperkim)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(Disperkim)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase cakupan supply air baku	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3,009,825,000	2,389,077,000	2,589,077,000
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	250,000,000
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3,446,425,000	2,315,898,000	3,365,743,000
		1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh	100.00 %	100.00 %	100.00 %	33,498,704,250	108,210,167,000	109,170,336,400
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian	8.00 lokasi	8.00 lokasi	8.00 lokasi	9,500,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000
			Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Kondisi Baik	75.32 %	75.32 %	75.32 %			
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi kebutuhan perumahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	752,923,000	490,535,000	295,404,000
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25,450,000,000	16,279,236,000	18,839,130,875
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9,995,920,000	29,568,625,000	29,878,478,000
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan lubang pemakaman	55.00 %	55.00 %	55.00 %	200,000,000	54,152,054,000	33,681,911,807
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	46.26 %	46.26 %	46.26 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.05.0.00.0.00.01 .00	SATPOL PP					49,951,229,795	33,763,490,000	45,401,934,703	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	32,140,312,725	23,704,179,119	35,810,089,244
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tingkat disiplin Aparatur(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan	31.00 Perda	31.00 Perda	31.00 Perda	17,810,917,070	10,059,310,881	9,591,845,459
1.05.0.00.0.00.02 .00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					31,043,962,779	27,792,657,000	27,020,225,728	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	15,937,385,042	14,059,404,512	13,227,055,310
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatu	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran	88.00 %	88.00 %	88.00 %	15,106,577,737	13,733,252,488	13,793,170,418
			Persentase Cakupan Pelayanan Kebakaran	25.22 %	25.22 %	25.22 %			
1.05.0.00.0.00.03 .00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					14,824,729,490	13,681,889,000	24,181,881,669	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (BPBD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10,409,975,390	9,572,910,524	8,819,384,228
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4,414,754,100	4,108,978,476	15,362,497,441

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.06.0.00.0.00.01 .00	DINAS SOSIAL					74,197,102,268	41,296,269,000	35,104,292,665	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16,681,794,885	11,353,858,801	11,747,351,304
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	92.00 %	92.00 %	92.00 %	30,755,420,815	12,485,314,960	9,207,924,633
		1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	50.00 warga	50.00 warga	50.00 warga	35,288,000	32,080,000	40,560,000
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penanganan PPKS	98.00 %	98.00 %	98.00 %	20,656,003,845	14,971,311,114	11,506,269,060
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan jaminan social	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,301,510,723	1,577,779,065	1,314,312,508
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan sosial	4.00 %	4.00 %	4.00 %	3,767,084,000	875,925,060	1,287,875,160		
2.07.0.00.0.00.01 .00	DINAS TENAGA KERJA					18,015,407,366	16,196,576,885	15,792,121,269	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	14,710,407,509	12,682,147,179	11,843,582,990
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terampil	60.00 %	60.00 %	60.00 %	482,693,645	1,219,575,915	2,531,292,467
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peluang Kerja Mandiri	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	1,266,278,525	1,395,488,395	727,656,719
			Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen			
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	1,556,027,687	899,365,396	689,589,093		
2.08.0.00.0.00.01 .00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17,200,479,724	17,450,324,000	15,987,828,269	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11,269,346,850	10,626,270,716	9,960,579,250

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1,081,704,000	1,595,541,055	1,181,006,625
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17.04 point	17.04 point	17.04 orang	2,065,862,118	1,726,794,026	1,770,460,690
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,536,021,439	1,973,071,153	1,401,602,913
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 %	100.00 %	100.00 %	379,200,000	465,699,890	471,151,847
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	494,200,833	652,659,580	569,087,058
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01 %	0.01 %	0.01 %	374,144,484	410,287,580	633,939,886
2.09.0.00.0.00.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN						16,948,370,520	12,838,642,000	12,085,828,144
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12,385,245,503	10,386,306,023	9,307,561,199
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan distribusi pangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3,552,560,587	1,984,915,475	2,321,140,513
			Ketersediaan Energi / Kapita	3.05 Kkal/kapita/tahun	3.05 Kkal/kapita/tahun	3.05 Kkal/kapita/tahun			
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penanganan Daerah rentan rawan pangan	7.00 %	7.00 %	7.00 %	250,000,000	152,207,970	159,357,970

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	760,564,430	315,212,532	297,768,462
2.11.1.03.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						59,060,684,185	115,309,813,000	134,161,035,334
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Lingkungan Hidup)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25,211,728,249	37,446,978,905	38,507,878,705
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya (Lingkungan Hidup)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 %	100.00 %	100.00 %	375,300,000	358,742,285	358,742,285
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)	55.00 indeks	55.00 indeks	55.00 indeks	3,148,005,801	5,480,713,460	5,674,301,954
			Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air	65.00 hektar	65.00 hektar	65.00 hektar			
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang terbangun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	800,780,840	727,982,582	745,120,082
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	50.00 %	50.00 %	50.00 %	224,094,386	203,722,169	1,768,672,769
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.00 %	85.00 %	85.00 %	713,554,924	592,567,175	561,076,175
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	46.00 %	46.00 %	46.00 %	1,098,580,810	1,021,666,410	856,010,769
		2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan sekolah Adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	10.00 %	10.00 %	10.00 %	525,000,000	496,220,949	496,220,949
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00 %	290,144,173	179,160,721	107,658,746
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	90.00 %	90.00 %	90.00 %	26,673,495,002	68,802,058,344	85,085,352,900
2.12.0.00.0.00.01 .00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						27,285,259,900	23,732,059,000	24,881,524,828
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	23,503,508,993	20,294,103,630	22,386,503,668
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-elektronik	98.11 persen	98.11 persen	98.11 persen	2,480,432,548	2,254,938,680	1,376,210,880
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	60.57 %	60.57 %	60.57 %			
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	93.42 %	93.42 %	93.42 %	571,921,141	519,928,310	526,736,900
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	37.50 %	37.50 %	37.50 %	624,039,988	567,309,080	551,744,080
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi data kependudukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105,357,230	95,779,300	40,329,300
2.14.0.00.0.00.01 .00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						17,289,879,150	15,024,093,000	20,132,224,889
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10,535,803,111	8,884,023,876	8,711,740,984
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 th	0.50 %	0.50 %	0.50 %	900,229,940	818,390,854	595,203,207
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS unmet need	7.00 %	7.00 %	7.00 %	4,339,081,479	3,944,619,525	9,810,003,886
			Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.20 %			
			Cakupan Angka Kelahiran TFR	1.99 angka	1.99 angka	1.99 angka			
			Peserta KB Aktif	77.04 %	77.04 %	77.04 %			
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	58.89 %	58.89 %	58.89 %	1,514,764,620	1,377,058,745	1,015,276,812
2.15.0.00.0.00.01 .00	DINAS PERHUBUNGAN						92,558,566,219	246,564,488,000	243,315,499,788
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat disiplin Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	75,229,545,458	69,333,422,169	53,413,761,874
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	61.73 %	61.73 %	61.73 %	17,329,020,761	177,231,065,831	189,901,737,914
			lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebesar 61,73%; (2) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk dengan rasio	6.68 %	6.68 %	6.68 %			
			Jumlah trayek BRT	11.00 trayek	11.00 trayek	11.00 trayek			
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35.00 %	35.00 %	35.00 %			
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	84.00 %	84.00 %	84.00 %			
2.16.2.20.2.21.01 .00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						69,146,174,714	59,743,506,640	57,631,082,962
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16,049,712,175	11,490,332,156	12,093,517,073
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4,988,391,345	4,534,901,222	5,314,991,440
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Bandwidth domestik dan internasional	100.00 %	100.00 %	100.00 %	46,070,157,040	41,881,960,946	38,339,792,777
			Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Terselenggaranya pengelolaan E-Government	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,537,914,154	1,356,330,644	1,402,800,000
		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	500,000,000	479,981,672	479,981,672
2.17.0.00.0.00.01 .00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						26,077,387,600	23,706,716,000	21,742,870,123
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10,424,249,110	9,476,590,100	8,716,673,017
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5.00 %	5.00 %	5.00 %	215,221,050	195,655,500	189,916,820
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	55.00 %	55.00 %	55.00 %	290,776,640	264,342,400	256,267,400
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	30.00 %	30.00 %	30.00 %	584,010,900	530,919,000	508,309,000
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 %	10.00 %	10.00 %	571,542,840	519,584,400	852,277,846
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2.00 %	2.00 %	2.00 %			
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25.00 %	25.00 %	25.00 %	2,726,180,820	2,478,346,200	1,713,421,640

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60.00 %	60.00 %	60.00 %	6,166,223,360	5,605,657,600	5,605,657,600
			Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	10.00 %	10.00 %	10.00 %			
			Prosentase Akses Pembiayaan	40.00 %	40.00 %	40.00 %			
			Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50.00 %	50.00 %	50.00 %			
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Akses Pemasaran	23.00 %	23.00 %	23.00 %	5,099,182,880	4,635,620,800	3,900,346,800
			Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 %	20.00 %	20.00 %			
2.18.0.00.0.00.01,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						7,313,504,574	15,911,655,000	15,543,074,645
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,792,238,574	12,469,141,690	12,220,917,269
			Tingkat disiplin aparatur (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang mendapat fasilitas investasi	3672.00 penanam modal	3672.00 penanam modal	3672.00 penanam modal	1,463,000,000	972,018,704	871,806,250
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	344.00 investor	344.00 investor	344.00 investor	1,552,724,000	876,662,141	470,355,141
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	98.70 %	98.70 %	98.70 %	450,000,000	872,951,958	901,945,076
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1.00 nilai	1.00 nilai	1.00 nilai	205,500,000	143,558,726	499,766,728
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	94.00 %	94.00 %	94.00 %	850,042,000	577,321,781	578,284,181

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
2.19.0.00.0.00.01 .00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					45,166,249,703	41,060,227,000	40,189,887,235	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15,912,672,989	14,466,066,352	13,699,585,911
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	62.00 organisasi	62.00 organisasi	62.00 organisasi	4,536,044,891	4,123,677,174	3,462,816,949
			Persentase fasilitasi kegiatan wirausaha muda	85.00 %	85.00 %	85.00 %			
			Persentase organisasi Kepemudaan aktif	25.00 %	25.00 %	25.00 %			
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olahraga	100.00 %	100.00 %	100.00 %	24,717,531,823	22,470,483,474	23,027,484,375
			jumlah Atlet prestasi	550.00 %	550.00 %	550.00 %			
	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	39.00 buah	39.00 buah	39.00 buah					
2.22.3.26.0.00.01 .00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					100,268,186,388	80,419,236,296	65,512,632,974	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20,154,972,786	20,351,713,097	19,351,359,229
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya	80.00 %	80.00 %	80.00 %	5,544,612,712	4,448,931,427	4,939,331,427
			Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	80.00 %	80.00 %	80.00 %			
			Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	90.00 %	90.00 %	90.00 %			
		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	10.00 %	10.00 %	10.00 %	4,806,000,000	2,912,596,373	2,899,401,828
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	65.33 %	65.33 %	65.33 %	1,055,500,000	256,251,038	251,251,038
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	1.60 hari	1.60 hari	1.60 hari	66,238,590,001	50,635,219,237	35,565,378,909		

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
			Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	8633.00 orang	8633.00 orang	8633.00 orang			
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1.35 %	1.35 %	1.35 %	1,682,109,971	1,529,190,883	1,492,523,730
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100.00 %	100.00 %	100.00 %	786,400,918	285,334,241	1,013,386,813
2.23.2.24.0.00.01,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH						11,179,738,649	11,250,229,000	11,306,946,635
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9,541,303,394	8,566,900,981	8,985,971,955
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.00 rasio	1.00 rasio	1,054,478,000	1,404,107,436	1,315,251,223
			Jumlah Rumah Pintar	193.00 unit	193.00 unit	193.00 unit			
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	438,664,255	986,976,862	814,744,604
			Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	500.00 judul	500.00 judul	500.00 judul			
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	145,293,000	292,243,721	190,978,853
			persentase jumlah arsip musnah	50.00 %	50.00 %	50.00 %			
3.25.0.00.0.00.01,00	DINAS PERIKANAN						14,042,346,456	12,013,953,000	12,348,585,774
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8,569,587,952	7,382,945,805	6,553,672,181
			Peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	2801.12 ton	2801.12 ton	2801.12 ton	1,173,462,926	1,066,784,478	1,708,784,478

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3738.00 ton	3738.00 ton	3738.00 ton	2,297,160,492	1,938,194,001	2,460,100,399
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan konsumsi ikan perkapita	33.06 kg/kapita/	33.06 kg/kapita/	33.06 kg/kapita/	203,018,241	184,562,037	184,562,037
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk olahan hasil perikanan	17113.32 ton	17113.32 ton	17113.32 ton	1,799,116,845	1,441,466,679	1,441,466,679
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN						45,531,540,068	29,532,197,000	29,796,334,753
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19,363,243,440	16,749,364,228	16,118,978,047
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi hasil peternakan	35335.00 Ton	35335.00 Ton	35335.00 Ton	7,825,070,533	7,113,700,484	6,835,869,983
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50233.44 Ton	50233.44 Ton	50233.44 Ton			
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	16,941,476,095	4,176,959,764	5,369,070,705
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 %	-5.00 %	-5.00 %	681,750,000	641,884,544	568,433,038
			Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	0.00 buah	0.00 buah	9.00 buah			
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	24.00 Kelompok	24.00 Kelompok	24.00 Kelompok	720,000,000	850,287,980	903,982,980
3.30.0.00.0.00.01.00	DINAS PERDAGANGAN						67,350,541,836	66,726,803,000	68,006,768,244
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	49,467,436,185	43,965,643,655	42,610,228,105
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	5.36	5.36	0.00	263,999,049	239,999,135	246,399,135
			Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	18.00 pasar	18.00 pasar	18.00 pasar	13,501,507,747	17,823,213,192	22,539,356,391
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4.11 %	4.11 %	4.11 %	359,468,429	326,789,481	187,129,641
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas	1522987000.00 U\$	1522987000.00 U\$	1522987000.00 U\$	496,000,000	1,003,993,237	1,003,993,237
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66.00 %	66.00 %	66.00 %	742,000,000	1,076,136,640	988,336,640
		3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan	15.00 %	15.00 %	15.00 %	2,520,130,426	2,291,027,660	431,325,095
3.31.0.00.0.00.01.00	DINAS PERINDUSTRIAN						15,694,175,076	12,916,085,776	34,449,809,242
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (D. Perindustrian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12,443,015,221	9,385,113,150	9,367,984,446
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (D. Perindustrian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri kecil	3635.00 IKM	3635.00 IKM	3635.00 IKM	2,075,941,230	2,462,592,058	24,157,823,047
			Jumlah Industri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif			
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertambahan IKM	0.48 %	0.48 %	0.48 %	107,788,978	97,989,980	97,989,980
			Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 %	4.00 %	4.00			
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya ketersediaan Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	1,067,429,647	970,390,588	826,011,769

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
4.01.0.00.0.00.01 .00	SEKRETARIS DAERAH					154,323,101,696	189,106,730,992	184,033,931,601	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	136,813,241,732	139,828,966,482	136,493,520,258
			Tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	477561.00 layanan	477561.00 layanan	477561.00 layanan	12,819,548,467	45,069,353,727	39,700,290,777
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	8.00 kegiatan	8.00 kegiatan	9.00 kegiatan			
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4,690,311,497	4,208,410,783	7,840,120,566
	Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
4.02.0.00.0.00.01 .00	SEKRETARIAT DPRD					178,780,234,348	129,753,548,360	110,584,942,044	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	126,185,428,684	60,476,580,338	58,567,477,022
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	14.00 raperda	14.00 raperda	14.00 raperda	52,594,805,664	69,276,968,022	52,017,465,022
5.01.5.05.0.00.01 .00	BAPPEDA						52,327,056,011	28,656,991,000	26,461,867,140
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17,891,185,098	15,196,208,877	15,631,064,524
			Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Bappeda)	80.00 %	80.00 %	80.00 %			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	97.00 %	97.00 %	97.00 %	8,116,000,000	3,837,200,000	2,196,405,580
			Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	75.00 %	75.00 %	75.00 %			
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	89.00 %	89.00 %	89.00 %	19,155,430,525	7,522,107,048	6,649,030,996
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92.00 %	92.00 %	92.00 %			
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	93.00 %	93.00 %	93.00 %			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	7,164,440,388	2,101,475,075	1,985,366,040	
5.02.0.00.0.00.01 .00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						179,043,734,594	219,654,312,282	218,344,720,584
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	107,894,809,405	157,631,728,035	156,544,378,617
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.62 %	1.62 %	1.62 %	63,604,656,135	55,472,100,900	56,421,025,883
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	60.96 %	60.96 %	60.96 %	7,544,269,054	6,550,483,347	5,379,316,084
5.02.0.00.0.00.02,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						83,634,966,855	89,240,564,000	85,784,152,071
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	77,196,550,461	72,344,445,091	73,118,412,859
			Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	30,683,000	185,145,300	50,939,825
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	6,407,733,394	16,710,973,609	12,614,799,387
			Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	47.00	47.00	47.00			
5.03.5.04.0.00.01,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						29,399,233,273	34,110,578,000	34,871,994,764
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (BKPP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17,453,519,181	19,126,630,290	18,375,007,936
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	80.00 %	80.00 %	80.00 %	5,767,495,372	6,879,018,088	9,347,008,741

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.15 %	16.15 %	16.15 %			
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 %	99.00 %	99.00 %			
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 %	99.00 %	99.00 %			
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	30.00 %	30.00 %	30.00 %	6,178,218,720	8,104,929,622	7,149,978,087
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT						27,258,644,722	25,353,452,000	22,939,096,283
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	18,995,381,198	18,460,536,698	19,038,994,008
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
			Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Inspektorat)	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	5,448,917,803	4,334,419,192	2,058,264,165
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas SPIP	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	2,814,345,721	2,558,496,110	1,841,838,110
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN SEMARANG SELATAN						45,617,252,200	37,866,145,000	36,557,072,011
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16,961,777,700	14,045,350,000	13,385,482,071
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	9,918,073,000	9,016,430,000	8,999,663,990
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan			

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	18,357,351,500	14,458,865,000	13,837,325,950
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	380,050,000	345,500,000	334,600,000
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN SEMARANG UTARA						44,495,237,016	40,543,940,000	40,996,104,721
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12,498,702,643	12,238,661,973	13,521,165,538
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 jumlah pelayanan	477561.00 jumlah pelayanan	477561.00 jumlah pelayanan	12,133,775,063	13,029,043,908	12,830,736,879
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	19,476,923,310	14,925,474,119	14,293,442,304
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	385,836,000	350,760,000	350,760,000
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN SEMARANG BARAT						79,514,861,574	61,604,091,000	58,388,999,975
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21,104,667,053	18,097,602,055	16,452,058,115
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 Pelayanan	477561.00 Pelayanan	477561.00 Pelayanan	31,680,000,000	17,897,072,063	17,967,068,389
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	26,720,194,521	25,548,100,974	23,908,557,563

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamplang di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	10,000,000	61,315,908	61,315,908
7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN SEMARANG TIMUR						44,971,732,782	41,586,057,000	40,050,821,717
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15,182,024,174	14,368,379,472	13,777,279,250
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	11,799,528,485	10,323,512,075	10,258,175,829
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan	19000.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	17,737,380,123	16,595,522,334	15,697,523,519
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamplang di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	252,800,000	298,643,119	317,843,119
7.01.0.00.0.00.05.00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH						49,835,474,701	49,005,926,000	46,898,285,755
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19,241,240,771	18,865,995,315	18,517,074,098
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	10,595,262,212	9,500,096,216	9,404,890,506
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	14750.00 kelurahan	14750.00 kelurahan	14750.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	19,986,971,718	20,377,697,909	18,757,696,531
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamplang di lingkungan RT	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	12,000,000	262,136,560	218,624,620

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.06 .00	KECAMATAN GUNUNGPATI						57,518,497,902	52,244,089,000	50,782,897,106
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20,421,446,915	18,519,497,195	18,563,112,181
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	11,575,432,862	10,523,120,784	10,434,782,701
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	25,252,247,963	22,956,589,056	21,524,915,009
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	269,370,162	244,881,965	260,087,215		
7.01.0.00.0.00.07 .00	KECAMATAN TUGU						30,782,094,001	25,199,110,000	23,666,149,180
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11,527,959,263	9,926,259,330	8,910,123,002
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	5,162,983,420	4,472,923,109	4,486,732,497
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	14,048,911,318	10,761,527,561	10,227,693,681
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	82.00 %	82.00 %	82.00 %	42,240,000	38,400,000	41,600,000		

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.08 .00	KECAMATAN MIJEN					72,823,091,900	48,867,629,000	48,890,547,858	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Mijen)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21,594,687,100	18,433,261,000	19,814,867,858
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Mijen)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	10,741,725,800	9,494,478,000	9,298,040,000
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	40,188,111,500	20,668,465,000	19,520,640,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	100.00 %	298,567,500	271,425,000	257,000,000		
7.01.0.00.0.00.09 .00	KECAMATAN GENUK					54,852,369,001	49,865,790,000	49,958,118,126	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GENUK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17,234,927,251	15,668,115,682	17,043,605,713
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GENUK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	16,012,182,022	14,556,529,112	14,374,794,897
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	21,323,628,948	19,385,117,224	18,280,367,516
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	281,630,780	256,027,982	259,350,000		

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.10 ,00	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR						34,513,496,300	31,165,933,000	31,069,203,577
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12,895,004,080	11,708,212,800	12,310,642,577
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	7,943,500,000	7,085,000,000	7,125,017,800
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	13,355,992,220	12,082,720,200	11,327,543,200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	319,000,000	290,000,000	306,000,000		
7.01.0.00.0.00.11 ,00	KECAMATAN TEMBALANG						64,564,037,810	58,451,448,000	55,966,936,071
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19,370,501,200	17,487,142,000	17,182,892,921
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	21,261,737,539	19,208,125,033	19,044,138,050
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	23,632,984,071	21,484,530,967	19,449,055,100
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	298,815,000	271,650,000	290,850,000		

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.12 .00	KECAMATAN CANDISARI						35,073,058,801	31,775,508,000	31,412,215,590
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Candisari)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11,018,675,413	9,907,886,740	10,092,142,586
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Candisari)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	10,281,791,433	9,347,083,121	9,386,022,353
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	13,431,880,655	12,210,800,594	11,630,381,469
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	340,711,300	309,737,545	303,669,182		
7.01.0.00.0.00.13 .00	KECAMATAN BANYUMANIK						55,280,366,402	49,246,024,000	47,247,941,532
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18,314,554,677	16,536,495,160	15,549,617,732
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	15,231,981,778	13,830,837,980	13,892,485,186
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	21,557,780,946	18,718,646,314	17,631,001,341
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	176,049,001	160,044,546	174,837,273

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.14 .00	KECAMATAN NGALIYAN					58,707,255,300	48,553,025,000	48,081,712,690	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN NGALIYAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17,944,932,200	15,728,502,000	16,518,835,290
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN NGALIYAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(Ngaliyan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	17,093,484,100	15,094,721,000	15,130,106,000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	23,433,549,000	17,515,902,000	16,222,571,400
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 %	95.00 %	95.00 %			
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	235,290,000	213,900,000	210,200,000
7.01.0.00.0.00.15 .00	KECAMATAN GAYAMSARI					36,738,735,189	30,871,657,000	30,403,539,809	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12,523,929,819	11,091,390,744	11,562,340,874
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	9,263,081,392	7,822,149,130	7,832,182,775
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	14,688,402,532	11,718,733,993	10,752,747,105
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 %	95.00 %	95.00 %			
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	263,321,446	239,383,133	256,269,055

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.16 .00	KECAMATAN PEDURUNGAN					92,043,638,351	61,162,048,000	59,104,196,738	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	22,326,171,700	20,272,297,000	19,695,230,549
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	33,688,087,372	19,333,042,565	19,135,978,938
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %			
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	35,624,364,779	21,188,513,435	19,957,191,011
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	405,014,500	368,195,000	315,796,240		
8.01.0.00.0.00.01 .00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23,495,806,607	16,493,456,000	18,341,175,374	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6,880,402,618	6,236,729,648	6,147,160,639
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		8.01.02 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00 nilai	2.00 nilai	2.00 nilai	814,809,913	564,149,920	507,949,920
		8.01.03 PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	3.00 %	3.00 %	3.00 %	4,769,513,368	4,096,648,516	5,729,634,516

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
			Indikator	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara	100.00 Organisasi	100.00 Organisasi	100.00 Organisasi	3,748,180,124	3,407,436,476	3,846,436,476
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan	1.00 Kejadian	1.00 Kejadian	1.00 Kejadian	766,257,405	378,415,823	340,615,823
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	80.00 %	80.00 %	80.00 %	6,516,643,179	1,810,075,617	1,769,378,000
JUMLAH							4,874,525,172,579	4,854,391,169,040	5,284,851,940,488

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN					1.089.298.342.061	879.381.325.040	1.097.163.463.095	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.089.298.342.061	879.381.325.040	1.097.163.463.095	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	589.566.940.459	507.059.438.048	671.649.094.413	
		Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur (Dinas Pendidikan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					200.000.000	1.435.000.000	790.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	30.000.000	1.350.000.000	715.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	12.500.000	12.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000	12.500.000	12.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan bulanan Monev yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	20.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					525.333.442.800	479.290.448.000	645.546.597.518	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	521.488.382.800	474.080.348.000	640.120.872.518	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	100%	3.660.660.000	5.135.100.000	5.361.525.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.600.000	26.000.000	26.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	30.800.000	28.000.000	28.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	21.000.000	10.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>					55.000.000	50.000.000	50.000.000	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD pada SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.474.999.747	5.405.513.457	4.452.425.322	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya kebutuhan dan perlengkapan komponen listrik dan penerangan	100%	100%	100%	190.000.000	189.999.320	97.999.320	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	180.000.000	324.999.104	324.999.104	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya ATK	100%	100%	100%	800.000.000	299.949.957	309.049.957	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	200.000.000	500.000.430	250.000.430	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tersedianya makan minum	100%	100%	100%	4.500.000.000	699.990.500	699.990.500	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya Anggaran untuk perjalanan dinas dan koordinasi	100%	100%	100%	2.350.000.000	1.340.574.376	740.574.376	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	2.254.999.747	2.049.999.770	2.029.811.635	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					487.299.912	442.999.920	626.114.690	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	100%	100%	100%	47.299.923	42.999.930		DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	439.999.989	399.999.990	626.114.690	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					894.142.000	18.009.637.103	17.988.437.103	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	200.000.000	17.514.037.103	17.514.037.103	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	350.000.000	50.000.000		DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	344.142.000	445.600.000	474.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.122.056.000	2.425.839.568	2.195.519.780	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	975.000.000	214.350.000	214.350.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	947.056.000	860.960.000	860.960.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%	100%	3.900.000.000	361.901.250	361.901.250	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	45.650.000.000	881.820.930	695.810.930	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	650.000.000	106.807.388	62.497.600	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	100.00 %	100.00 %	100.00 %	497.268.371.849	369.637.314.491	424.219.535.680	
		APK SMP/MTs	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		APK PAUD 3-6 tahun	82.00 persen	82.00 persen	82.00 persen				
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	5.00 lembaga	5.00 lembaga	5.00 lembaga				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				277.928.455.020	250.455.112.585	258.710.555.651		
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.880.439.776	10.800.399.796	10.800.399.796	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru yang terlaksana	20 Paket	20 Paket	20 Paket	56.407.750.000	3.220.000.000	3.220.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terlaksana	3 Paket	3 Paket	3 Paket	329.999.937	299.999.943	299.999.943	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang terlaksana			1 Paket			189.084.665	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.099.999.971	999.999.974	1.999.999.974	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang terlaksana	86 Paket	86 Paket	86 Paket	9.151.999.693	8.319.999.721	11.386.876.775	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terlaksana			4 Paket			514.930.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terlaksana	6 Paket	6 Paket	6 Paket	329.999.867	299.999.879	493.745.879	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	2 Paket	219.991.242	199.992.038	323.511.038	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terlaksana	31 Paket	31 Paket	31 Paket	4.399.702.771	3.999.729.792	5.832.517.727	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah yang terlaksana	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.649.999.296	1.499.999.360	1.523.717.142	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang terlaksana	326 Paket	326 Paket	326 Paket	4.614.654.886	4.195.140.805	4.195.140.805	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	100%	100%	100%	82.014.908.330	10.656.000.000	10.656.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang terlaksana	326 Paket	326 Paket	326 Paket	6.769.097.000	3.775.336.876	4.488.778.800	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang terlaksana	100%	100%	100%	64.750.000	2.777.743.739	1.198.482.379	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Kajian	100%	100%	100%	800.000.000	799.999.775	1.519.999.775	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba yang terlaksana	42 Lomba	42 Lomba	42 Lomba	1.600.000.000	1.552.159.816	1.152.159.816	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Sekolah Dasar yang mendapatkan sertifikasi	3144 Orang	3144 Orang	3144 Orang				DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Sekolah Dasar yang mendapatkan sertifikasi	3144 orang	3144 orang	3144 orang	150.000.000	108.872.100.000	110.978.700.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	155 Satpen	155 Satpen	155 Satpen	375.000.000	849.999.934	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	95.822.662.417	87.111.511.288	87.111.511.288	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	247.499.834	224.999.849	224.999.849	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					199.693.425.774	106.697.168.607	116.553.567.439	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru yang terlaksana	20 Paket	20 Paket	20 Paket	95.140.000.000	5.349.999.843	5.349.999.843	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang terlaksana	4 Paket	4 Paket	4 Paket	253.000.000	230.000.000	230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium yang terlaksana	3 Paket	3 Paket	3 Paket	110.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terlaksana	5 Paket	5 Paket	5 Paket	38.500.000	35.000.000	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang terlaksana	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.676.790.420	3.342.536.745	6.999.307.443	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang terlaksana			1 Paket			443.661.565	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium yang terlaksana			3 paket			2.639.831.209	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terlaksana	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1.033.998.100	939.998.273	1.939.998.273	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang terlaksana	53 Paket	53 Paket	53 Paket	4.000.592.231	3.636.902.028	3.636.902.028	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	43.244.752.124	6.267.851.480	6.317.851.480	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang terlaksana	100%	100%	100%	850.000.000	599.999.655	599.999.655	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Kajian	100%	100%	100%	650.000.000	1.049.977.475	1.989.977.475	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba yang terlaksana	35 Lomba	35 Lomba	35 Lomba	1.500.000.000	1.526.878.000	1.250.393.360	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan Sertifikasi	3108 Orang	3108 Orang	3108 Orang	200.000.000	38.912.759.000	40.355.379.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	75 Satpen	75 Satpen	75 Satpen	150.000.000	299.999.836	299.999.836	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	48.621.229.527	44.201.117.752	44.201.117.752	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	224.563.372	204.148.520	164.148.520	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					18.105.968.494	11.109.998.503	41.399.850.113	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terlaksana	4 Paket	4 Paket	4 Paket	14.000.000.000	6.060.000.229	6.287.845.561	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terlaksana	6 Paket	6 Paket	6 Paket	429.000.000	390.000.000	590.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	277.200.000	252.000.000	446.476.173	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	2 Paket	330.000.000	300.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebeluer PAUD yang terlaksana	4 Paket	4 Paket	4 Paket	330.000.033	300.000.030	300.000.030	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD yang terlaksana	15 Paket	15 Paket	15 Paket	379.299.835	344.818.032	362.318.032	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase terlaksananya Operasional Pengelolaan BOP/Pendampingan BOP	100%	100%	100%	1.395.680.013	1.268.800.012	1.268.800.012	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang terlaksana	4 Paket	4 Paket	4 Paket	164.788.613	149.807.830	156.424.830	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD yang terlaksana	100%	100%	100%	245.000.000	349.999.900	285.304.445	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Kajian	100%	100%	100%	330.000.000	300.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru TK/PAUD yang mendapatkan Sertifikasi	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	125.000.000	1.034.572.518	1.034.572.518	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang termonitoring dan terakreditasi	130 Lembaga	130 Lembaga	130 Lembaga	100.000.000	359.999.952	245.108.512	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD			49205 Siswa			29.523.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.540.522.561	1.375.034.796	7.555.562.477	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana			1 Paket			407.246.227	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana			1 Paket			313.478.658	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	3 Paket	3 Paket	3 Paket	185.000.000	40.000.000	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27.092.043	24.629.130	46.689.130	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	2 Paket	219.458.756	199.507.960	214.507.960	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Operasional Pengelolaan BOP/Pendampingan BOP	100%	100%	100%	310.500.000	100.000.096	100.000.096	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.998.221	9.998.383	55.986.383	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	100%	100%	100%	100.000.000	231.832.623	145.787.168	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor/Pamong Belajar yang mendapatkan Sertifikasi	10 Orang	10 Orang	10 Orang	587.473.541	534.066.855	534.066.855	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal yang termonitoring dan terakreditasi	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	100.000.000	234.999.749		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan			3515 Siswa			5.697.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.403.470.476	1.275.882.250	274.234.359	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					1.019.312.950	926.648.136	-	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	219.999.896	199.999.905		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	219.999.879	199.999.890		DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	249.313.175	226.648.341		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	330.000.000	300.000.000		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>					384.157.526	349.234.114	274.234.359	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	137.500.000	125.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	164.157.795	149.234.359	149.234.359	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	82.499.731	74.999.755		DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100.00 %	100.00 %	100.00 %	328.060.800	743.691.636	500.000.000	
1.01.04.2.01	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>					328.060.800	743.691.636	500.000.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	60.000.000	500.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	268.060.800	243.691.636		DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %	731.498.477	664.998.615	520.598.643	
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.01.05.2.01	<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>					373.998.787	339.998.897	195.598.925	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	181.498.818	164.998.925	164.998.925	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	192.499.969	174.999.972	30.600.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					357.499.690	324.999.718	324.999.718	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	164.999.986	149.999.987	149.999.987	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	82.499.780	74.999.800	74.999.800	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	109.999.924	99.999.931	99.999.931	DINAS PENDIDIKAN
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN					438.238.501.713	391.556.130.465	589.163.495.255	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					438.238.501.713	391.556.130.465	589.163.495.255	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	240.918.751.063	228.448.666.952	270.454.476.811	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					133.895.300	291.269.055	58.951.055	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.950.000	107.220.455	1.382.455	DINAS KESEHATAN
		Dokumen renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.140.220	32.854.745	5.484.745	DINAS KESEHATAN
		RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	35.274.160	32.067.418	5.187.418	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	32.312.920	29.375.382	18.225.382	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	11.768.000	29.375.382	18.225.382	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.450.000	60.375.673	10.445.673	DINAS KESEHATAN
		LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KESEHATAN
		SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					175.165.109.000	159.703.650.400	192.103.198.356	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	175.000.859.000	159.091.690.000	191.491.237.956	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelsanan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	154.500.000	603.600.000	603.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000	2.786.800	2.786.800	DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.250.000	2.786.800	2.786.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000	2.786.800	2.786.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					944.258.445	2.115.659.969	1.519.128.151	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	19.083.990	24.877.172	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	408.500.000	56.161.029	56.161.029	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	121.200.000	248.965.000	343.540.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	3.000.000	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	1.551.215.000	854.315.000	DINAS KESEHATAN
		Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
		SPPD dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DUKUNGAN PELAKSANAAN SPBE	100 PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	260.958.445	237.234.950	237.234.950	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					297.324.797	270.295.270	280.521.822	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	297.324.797	270.295.270	280.521.822	DINAS KESEHATAN
		Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1.406.264.000	2.042.410.658	1.884.689.976	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.164.000.000	883.070.658	674.264.976	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	117.964.000	107.240.000	37.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	113.300.000	1.042.100.000	1.162.675.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					2.494.651.460	3.548.133.600	3.681.383.600	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan service	6 kendaraan	6 kendaraan	6 kendaraan	235.785.000	214.350.000	214.350.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.700.000.000	2.337.830.000	2.337.830.000	DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	208.866.460	189.878.600	223.128.600	DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	730.425.000	830.425.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	75.650.000	75.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>					60.477.248.061	60.477.248.000	70.926.603.851	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.450.000.000	1.450.000.000	1.500.000.000	PUSKESMAS PONCOL
		Pelayanan BLUD puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.070.600.000	1.070.600.000	1.342.172.038	PUSKESMAS MIROTO
		Pelayanan BLUD puskesmas bandarharjo	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.198.097.900	2.198.097.900	2.336.176.000	PUSKESMAS BANDARHARJO
		pelayanan BLUD puskesmas bulu lor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.435.298.000	1.435.298.000	1.828.618.560	PUSKESMAS BULU LOR
		pelayanan BLUD puskesmas halmahera	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.850.500.000	1.850.500.000	1.887.500.000	PUSKESMAS HALMAHERA
		pelayanan BLUD puskesmas bugangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	957.276.495	957.276.434	1.025.512.593	PUSKESMAS BUGANGAN
		pelayanan BLUD puskesmas karangdoro	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.700.000.000	1.700.000.000	2.116.500.000	PUSKESMAS KARANGDORO
		pelayanan BLUD puskesmas pandanaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.740.000.000	1.740.000.000	2.104.822.142	PUSKESMAS PANDANARAN
		pelayanan BLUD puskesmas lamper tengah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.110.483.000	1.110.483.000	1.512.027.896	PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		pelayanan BLUD puskesmas karangayu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.197.516.000	1.197.516.000	1.215.697.348	PUSKESMAS KARANGAYU
		pelayanan BLUD puskesmas lebdosari	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.285.395.540	1.285.395.540	1.484.012.174	PUSKESMAS LEBDOSARI
		pelayanan BLUD puskesmas manyaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.057.782.222	1.057.782.222	1.399.805.685	PUSKESMAS MANYARAN
		pelayanan BLUD puskesmas krobokan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.098.647.600	1.098.647.600	1.358.427.756	PUSKESMAS KROBOKAN
		pelayanan BLUD puskesmas ngemplak simongan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	992.400.000	992.400.000	1.095.214.642	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		pelayanan BLUD puskesmas gayamsari	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.597.558.044	2.597.558.044	3.139.599.989	PUSKESMAS GAYAMSARI
		pelayanan BLUD puskesmas candilama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.726.985.086	1.726.985.086	1.956.935.420	PUSKESMAS CANDILAMA
		pelayanan BLUD puskesmas kagok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.202.000.000	1.202.000.000	1.500.000.000	PUSKESMAS KAGOK
		pelayanan BLUD puskesmas pegandan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.577.328.500	1.577.328.500	1.710.000.000	PUSKESMAS PEGANDAN
		pelayanan BLUD puskesmas genuk	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.602.859.500	1.602.859.500	1.800.000.000	PUSKESMAS GENUK
		pelayanan BLUD puskesmas bangetayu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.835.421.000	2.835.421.000	2.835.421.000	PUSKESMAS BANGETAYU
		pelayanan BLUD puskesmas tlogosari wetan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.465.510.250	2.465.510.250	3.047.508.921	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		pelayanan BLUD puskesmas tlogosari kulon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.574.000.000	2.574.000.000	2.765.046.106	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		pelayanan BLUD puskesmas kedungmundu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.585.252.500	3.585.252.500	3.993.598.521	PUSKESMAS KEDUNGMONDU
		pelayanan BLUD puskesmas rowosari	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.369.177.695	2.369.177.695	2.722.440.200	PUSKESMAS ROWOSARI
		pelayanan BLUD puskesmas ngesrep	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.676.576.386	1.676.576.386	1.773.640.342	PUSKESMAS NGESREP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		pelayanan BLUD puskesmas padangsari	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.331.454.000	1.331.454.000	1.938.787.000	PUSKESMAS PADANGSARI
		pelayanan BLUD puskesmas sronдол	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.385.769.468	1.385.769.468	1.563.980.937	PUSKESMAS SRONDOL
		pelayanan BLUD puskesmas pudak payung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.136.000.000	1.136.000.000	1.431.590.483	PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		pelayanan BLUD puskesmas gunungpati	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.598.988.600	2.598.988.600	2.971.739.960	PUSKESMAS GUNUNGPATI
		pelayanan BLUD puskesmas mijen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.884.000.000	1.884.000.000	2.644.190.144	PUSKESMAS MIJEN
		pelayanan BLUD puskesmas karangmalang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.265.030.450	1.265.030.450	1.304.102.181	PUSKESMAS KARANGMALANG
		pelayanan BLUD puskesmas tambakaji	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.058.000.000	1.058.000.000	1.406.189.320	PUSKESMAS TAMBAKAJI
		pelayanan BLUD puskesmas purwoyoso	12 bulan	12 bulan	12 bulan	936.050.000	936.050.000	1.045.537.709	PUSKESMAS PURWOYOSO
		pelayanan BLUD puskesmas ngalihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.162.058.600	2.162.058.600	2.402.095.035	PUSKESMAS NGALIHAN
		pelayanan BLUD puskesmas mangkang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.150.305.225	1.150.305.225	1.784.154.749	PUSKESMAS MANGKANG
		pelayanan BLUD puskesmas karanganyar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	734.400.000	734.400.000	1.036.285.000	PUSKESMAS KARANGANYAR
		pelayanan BLUD puskesmas sekaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.478.526.000	1.478.526.000	1.947.274.000	PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	195.798.660.619	161.959.227.907	277.876.400.834	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					24.825.531.671	12.739.132.171	33.219.477.891	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	pembangunan puskesmas bulusan	1 paket	1 paket	1 paket	5.678.446.895	5.162.224.450	6.396.116.525	DINAS KESEHATAN
		pembangunan puskesmas tambakrejo			1 Paket				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Laboratorium Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket	4.989.443.448	4.535.857.680	3.918.316.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	rehabilitasi lanjutan pembangunan UPTD puskesmas plamongsari	1 paket	1 paket	1 paket	3.138.157.000	285.010.460	266.728.460	DINAS KESEHATAN
		rehabilitasi UPTD puskesmas rowosari			1 Paket				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100 persen	100 persen	100 persen	7.652.345.000	933.631.243	958.213.602	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya sarana prasarana puskesmas	16 paket	16 paket	16 paket				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan							2.943.248.551	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							4.094.085.658	DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							99.053.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	pengadaan obat dan vaksin	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.050.000.000	1.534.099.858	5.808.177.251	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	BMHP dak			100 persen	317.139.328	288.308.480	8.735.538.844	DINAS KESEHATAN
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					162.783.002.171	141.079.861.438	236.338.491.508	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pembekalan Gasurkes	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.664.168.328	1.512.880.298	2.468.039.827	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 persen	100 persen	100 persen	1.039.700.000	121.431.116	1.123.817.579	DINAS KESEHATAN
		JAMPERSAL			100 persen				DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kematian Ibu Maternal	28 kss	28 kss	28 kss				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							56.740.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							579.475.250	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Penguatan model sekolah sehat	80 persen	80 persen	80 persen	1.337.655.000	159.095.390	486.460.090	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan kapasitas kader remaja di posrem	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	cakupan usia produktif	100 persen	100 persen	100 persen	16.335.000	14.850.000	4.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terbentuknya Poksila Hebat dan Kader Poksila Peduli Stunting	90 persen	90 persen	90 persen	204.322.500	49.974.719	169.423.119	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	cakupan penderita hipertensi terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	33.668.250	30.607.500	16.113.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	cakupan DM yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	33.668.250	30.607.500	7.309.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	cakupan ODGJ yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	25.047.000	22.770.000	18.365.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	5.363.409.000	107.160.000	106.953.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100 persen	100 persen	100 persen	775.229.000	28.600.000	69.953.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							7.706.552.600	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							32.537.716.579	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Program GP2SP	2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	1.155.284.181	1.050.258.346	2.428.493.203	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya upaya promotif dan preventif dalam kegiatan wisata edukasi gizi	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN
		Tertanggulangnya masalah gibur dan stunting	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya pelayanan kesehatan olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	111.052.975	100.957.250	194.967.100	DINAS KESEHATAN
		"Mewujudkan Masyarakat Sehat dengan ""Lawang Sewu""	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kelurahan yang melaksanakan STBM	100 persen	100 persen	100 persen	232.431.830	211.301.664	680.649.857	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	100 persen	100 persen	100 persen	1.293.577.000	171.067.605	624.573.435	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan Kesehatan Tradisional & Penyehat Tradisional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23.237.500	21.125.000	21.125.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tertanggulangnya program Surveilans	100 persen	100 persen	100 persen	1.488.602.500	1.353.275.000	2.116.644.020	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							36.031.100	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.668.505.000	1.243.204.905	2.917.309.518	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Koordinasi Tim Pencegahan FRAUD Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	136.975.849.781	124.523.499.801	166.334.344.801	DINAS KESEHATAN
		Operasional Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pembahasan Perjanjian Kerjasama Program JKN	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Pembiayaan Jaminan Kesehatan dengan metode Crowdfunding	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Budaya Pencegahan FRAUD Di FKTP	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Kebijakan Program Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Kontribusi Daerah Dalam JKN	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Program Pembiayaan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Sehat Swastisaba Wistara	100 persen	100 persen	100 persen	945.000.000	4.568.123.457	1.185.416.091	DINAS KESEHATAN
		Summit Seminar dan Expo Kota Sehat	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas							192.630.920	DINAS KESEHATAN
		pelayanan BLUD puskesmas poncol	12 bulan	12 bulan	12 bulan				PUSKESMAS PONCOL
		pelayanan BOK puskesmas poncol	12 bulan	12 bulan	12 bulan				PUSKESMAS PONCOL
		pelayanan BLUD puskesmas miroto	12 bulan	12 bulan	12 bulan				PUSKESMAS MIROTO
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							4.592.044.909	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Instalasi Farmasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000.000	1.035.200.000	1.129.326.200	UPTD Instalasi Farmasi
		Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terpenuhi	100 persen	100 persen	100 persen	1.220.580.593	1.109.618.721	1.109.618.721	UPTD Laboratorium Kesehatan

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi FKTP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.975.678.483	3.614.253.166	4.981.275.166	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Ambulance Siaga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Dasar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							4.940.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							16.340.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							2.421.341.423	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					1.237.027.276	1.124.570.251	1.203.155.251	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tercetaknya buku Profil Kesehatan	50 buku	50 buku	50 buku	120.601.297	109.637.543	109.637.543	DINAS KESEHATAN
		Tercetaknya majalah kesehatan	200 buku	200 buku	200 buku				DINAS KESEHATAN
		Terelaksananya pembuatan konten video animasi	15 menit	15 menit	15 menit				DINAS KESEHATAN
		Terelaksananya desiminasi informasi dng pewarta & influencer	3 kali	3 kali	3 kali				DINAS KESEHATAN
		Terelaksananya informasi melalui media cetak	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tepeliharanya konten media informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	971.433.010	883.120.918	1.003.900.600	DINAS KESEHATAN
		Terbayarnya langganan zoom	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Terelaksananya Pengelolaan sistem informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Tepeliharanya koneksi internet DKK-Pusk	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Tepeliharanya koneksi internet server	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tepeliharanya peralatan SIK DKK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	144.992.969	131.811.790	89.617.108	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya alat pendukung SIK	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					6.953.099.501	7.015.664.047	7.115.276.184	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terelaksananya monev pengendalian sarkes	4 kali	4 kali	4 kali	20.790.000	18.900.000	9.330.000	DINAS KESEHATAN
		Terelaksananya Rakornis pengendalian sarkes	2 kali	2 kali	2 kali				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	HKN	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	432.309.501	393.008.637	571.099.000	DINAS KESEHATAN
		kegiatan rakerkes	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Ambulance Siaga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Dasar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Penilaian kinerja puskesmas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS KESEHATAN
		Reakreditasi Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas				DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelaksanaan Kegiatan Rujukan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000.000	6.603.755.410	6.534.847.184	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.115.472.662	741.970.720	39.748.062.982	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					487.202.662	345.154.356	39.151.163.835	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	198.752.662	180.684.238	180.684.238	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar							38.940.806.871	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	288.450.000	164.470.118	29.672.726	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					628.270.000	396.816.364	596.899.147	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	628.270.000	396.816.364	596.899.147	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	90.00 %	90.00 %	90.00 %	205.681.735	224.505.219	417.757.525	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					123.014.840	149.353.496	140.725.582	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi dan alkes	12 bulan	12 bulan	12 bulan	123.014.840	149.353.496	120.201.380	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							20.524.202	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					82.666.895	75.151.723	123.881.943	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi pangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	82.666.895	75.151.723	123.881.943	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							153.150.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							153.150.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	199.935.634	181.759.667	666.797.103	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					49.060.000	44.600.000	176.509.654	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Jejaring Kemitraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49.060.000	44.600.000	176.509.654	DINAS KESEHATAN
		Koordinasi Pengembangan Jejaring Kemitraan Bidang Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Koordinasi Pengembangan Jejaring Kemitraan dengan Puskesmas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Program	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Operasional Kegiatan dan Pengelolaan Program Pengembangan Jejaring Kemitraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Jejaring Kemitraan dengan Institusi Kesehatan untuk Pencapaian Indikator Bidang Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Jejaring Kemitraan dengan Institusi Pendidikan dalam Pencapaian SPM Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Jejaring Kemitraan dengan Lintas Sektoral/CSR/Swasta untuk mendorong Program Pelayanan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN
		Perencanaan Program Pengembangan Jejaring Kemitraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					150.875.634	137.159.667	490.287.449	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Meningkatnya penguatan dan Bintek Posyandu terintegrasi dan UKBM	100 persen	100 persen	100 persen	150.875.634	137.159.667	490.287.449	DINAS KESEHATAN
		Tercapainya Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan				DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pemberdayaan Generasi Muda melalui Implementasi Krida SBH	6 Krida SBH	6 Krida SBH	6 Krida SBH				DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.02.00	RSUD KRMT WONGSONEGORO					226.313.145.000	324.781.388.882	389.977.563.790	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (RSUD KRMT Wongsonegoro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	56.497.961.000	51.387.077.000	52.681.121.036	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					56.497.961.000	51.387.077.000	52.681.121.036	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	56.467.961.000	51.334.510.000	52.628.554.036	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji TPHP	100%	100%	100%	30.000.000	52.567.000	52.567.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang (RSUD KRMT Wongsonegoro)	75.00 %	75.00 %	75.00 %	169.815.184.000	273.394.311.882	337.296.442.754	
		Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++) (RSUD KRMT Wongsonegoro)	83.00 indek	83.00 indek	83.00 indek				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000.000	13.857.004.882	31.044.220.754	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat-alat Kesehatan	3 alat kesehatan	3 alat kesehatan	11 alat kesehatan	10.000.000.000	13.857.004.882	31.044.220.754	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					159.815.184.000	259.537.307.000	306.252.222.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	100%	100%	159.815.184.000	259.537.307.000	306.252.222.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM					295.419.410.968	365.889.090.000	372.588.579.794	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					295.419.410.968	365.889.090.000	372.588.579.794	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	34.669.984.315	33.826.379.624	32.112.416.520	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.03.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					81.028.615	32.189.366	32.189.366	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen renstra dan renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	6.502.091	6.502.091	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen program dan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	1.944.891	1.944.891	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.089.701	1.899.728	1.899.728	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.096.301	1.905.728	1.905.728	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.089.601	1.899.637	1.899.637	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.753.012	4.320.920	4.320.920	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	13.716.371	13.716.371	DINAS PEKERJAAN UMUM
		dokumen Evaluasi Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					21.388.955.700	19.445.144.680	18.711.650.566	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	21.023.603.700	19.112.367.000	18.378.872.886	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN berjalan dengan baik	100%	100%	100%	357.852.000	325.320.000	325.320.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen keuangan bulanan/semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	4.958.200	4.958.200	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	2.499.480	2.499.480	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					1.150.000.000	1.943.354.930	1.423.693.940	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik & elektronik (lampu pijar-battre kering dll, servis & reparasi panel kelistrikan, operasional genzet	100%	100%	100%	400.000.000	151.097.630	178.817.630	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan gedung kantor yang tersedia	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	100%	100%	100%	75.000.000	56.852.219	70.023.417	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor tersedia	100%	100%	100%	200.000.000	578.953.949	378.953.949	DINAS PEKERJAAN UMUM
		makan dan minum rapat dan kegiatan	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan dokumen	100%	100%	100%	200.000.000	174.812.000	202.084.727	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi antar instansi dan antar OPD	100%	100%	100%	75.000.000	734.429.000	235.157.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	200.000.000	247.210.132	358.657.217	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000	105.143.045	105.143.045	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	tersedianya perlengkapan kantor	100%	100%	100%	200.000.000	105.143.045	105.143.045	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.075.000.000	8.717.498.840	8.830.698.840	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Optimalnya Surat Masuk dan Surat Keluar	100%	100%	100%	75.000.000	40.499.000	70.499.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan surat kabar/majalah	100%	100%	100%	4.000.000.000	3.978.999.840	3.978.999.840	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Perkantoran berjalan lancar	100%	100%	100%	6.000.000.000	4.698.000.000	4.781.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.775.000.000	3.583.048.763	3.009.040.763	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak kendaraan roda dua, roda empat dan alat berat	100%	100%	100%	400.000.000	2.252.540.000	1.802.532.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Perlengkapan Gedung Kantor berfungsi baik	100%	100%	100%	75.000.000	52.800.000	52.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor berfungsi baik	100%	100%	100%	300.000.000	174.803.763	180.803.763	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung/kantor yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	1.000.000.000	1.102.905.000	972.905.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	13.645.044.724	28.489.212.066	29.073.655.897	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					11.145.044.724	24.678.581.852	24.559.528.060	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	5.000.000.000	1.780.559.833	1.780.559.833	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	embung/penampung air beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	3.145.044.724	2.859.131.567	2.859.066.937	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir berfungsi dan beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	3.000.000.000	20.038.890.452	19.919.901.290	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.500.000.000	3.810.630.214	4.514.127.837	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan irigasi yang berfungsi baik	100%	100%	100%	2.500.000.000	3.810.630.214	4.514.127.837	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Blorong Tambangan (DAK)			100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kedung Kreo (DAK)			100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan banjir dan rob	3.40 persen	3.40 persen	3.40 persen	48.553.721.066	69.932.863.729	70.259.936.169	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					48.553.721.066	69.932.863.729	70.259.936.169	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen perencanaan dan DED	100%	100%	100%	1.500.000.000	1.721.337.880	1.711.337.880	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Normalisasi Kawasan Simpang Lima	100%	100%	100%	26.053.721.066	23.685.200.969	23.685.200.969	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul II (lanjutan)	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan Pengendali Banjir Kandang Kebo	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan Saluran Gatot Subroto	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan saluran kedung mundu	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Revitalisasi Kali Semarang lanjutan	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir dan alat berat	100%	100%	100%	1.000.000.000	27.530.399.662	27.530.399.662	Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	saluran/sistem drainase dalam kondisi baik	100%	100%	100%	10.000.000.000	10.799.101.860	10.786.461.860	DINAS PEKERJAAN UMUM
		saluran/sistem drainase dalam kondisi baik	100%	100%	100%	10.000.000.000	6.196.823.358	6.546.535.798	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	86.85 persen	86.85 persen	86.85 persen	198.550.660.863	233.640.634.581	241.142.571.208	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					198.550.660.863	233.640.634.581	241.142.571.208	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen perencanaan dan DED	100%	100%	100%	500.000.000	6.311.201.768	6.173.223.703	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasional Pengembangan teknologi	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasional UPT Laboratorium	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	pembebasan lahan Akses Jalan SPAL D Banjardowo	100%	100%	100%	105.299.785.439	95.727.077.672	95.778.023.683	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Jalan Gajah	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		pembebasan lahan Jalan Gatot Subroto	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Jalan Sleko	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Jalan Veteran	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Jembatan Kaca	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Jembatan Sampangan	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan mangkang-mijen	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan normalisasi sungai	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan spondol - sekaran	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		pembebasan lahan Tambak Lorok	100%	100%	100%				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	data dan informasi leger jalan	100%	100%	100%	500.000.000	749.519.146	638.617.640	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	data kondisi jalan, jembatan dan saluran/drainase	100%	100%	100%	591.000.000	745.040.575	1.093.154.100	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Survey Kondisi Jalan (DAK)			100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan irigasi Utara (mangkang kulon)			100%	2.000.000.000	22.944.049.660	28.808.757.210	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan Jalan Ngadirgo - Palir			100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan Jalan WR Supratman	100%	100%	100%				DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	jalan dalam kondis baik	100%	100%	100%	50.000.000.000	43.300.000.000	44.802.225.160	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	jalan dalam kondis baik	100%	100%	100%	10.000.000.000	34.654.321.624	34.951.781.624	DINAS PEKERJAAN UMUM
		jalan dan saluran drainase dalam kondis baik	100%	100%	100%	5.000.000.000	3.018.794.010	2.918.794.010	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
		jalan dan saluran drainase dalam kondis baik	100%	100%	100%	4.000.000.000	3.133.962.392	3.133.962.392	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
		jalan dan saluran drainase dalam kondis baik	100%	100%	100%	3.000.000.000	5.845.515.380	5.734.940.790	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
		jalan dan saluran drainase dalam kondis baik	100%	100%	100%	3.000.000.000	3.883.992.878	3.831.931.296	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Kaca Tinjomoyo	100%	100%	100%	13.364.559.560	12.149.599.600	12.149.599.600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	jembatan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	1.295.315.864	1.177.559.876	1.127.560.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.2.10.0.00.02.00	DINAS PENATAAN RUANG					297.067.402.191	269.010.090.422	239.632.727.078	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.289.975.334	21.939.702.372	20.983.394.747	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.779.034	41.618.920	41.618.920	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.010.920	12.737.200	12.737.200	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.700.000	2.417.880	2.417.880	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.659.668	2.417.880	2.417.880	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.654.223	2.412.930	2.412.930	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.654.223	2.412.930	2.412.930	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	11.550.000	6.368.700	6.368.700	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LAKIP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.550.000	12.851.400	12.851.400	DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan LKPJ SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.961.638.500	13.171.746.935	13.211.464.556	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	13.620.975.500	12.382.705.000	12.422.422.621	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Jasa (Honor PA, KPA, PPK, SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu)	100%	100%	100%	313.713.000	776.834.740	776.834.740	DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa TPHL	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	11.550.000	4.125.265	4.125.265	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	100%	100%	7.700.000	4.040.965	4.040.965	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	7.700.000	4.040.965	4.040.965	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					63.358.550	57.598.682	-	
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan sistem informasi kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.358.550	57.598.682		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.375.364.559	7.005.163.185	6.289.372.649	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi perkantoran komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	20.000.000	19.990.619	24.392.855	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	6.053.838.559	5.503.489.599	4.550.185.432	DINAS PENATAAN RUANG
		Pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi perkantoran peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	45.791.900	49.058.609	72.282.254	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi perkantoran alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	869.294.000	214.971.700	265.492.440	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi perkantoran barang cetak penggandaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	170.000.000	195.407.258	245.866.268	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi perkantoran bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	5.670.000	5.454.400	5.454.400	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Snack Makan Minum Tamu	100%	100%	100%	1.166.000.000	67.000.000	67.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Snack Makan Minum Rapat	100%	100%	100%	1.044.770.100	949.791.000	1.058.699.000	DINAS PENATAAN RUANG
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					356.899.631	324.454.210	-	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Operasional Dinas Roda Empat	100%	100%	100%	356.899.631	324.454.210		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					559.623.360	502.473.440	604.291.622	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen surat menyurat kantor	100%	100%	100%	8.708.700	7.917.000	7.917.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	65.000.000	52.815.840	52.815.840	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	100%	100%	485.914.660	441.740.600	543.558.782	DINAS PENATAAN RUANG
		Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					920.311.700	836.647.000	836.647.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan biaya pajak Kendaraan Dinas Pejabat Dinas	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
		Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Dinas	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	920.311.700	836.647.000	836.647.000	DINAS PENATAAN RUANG
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Dinas	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	207.669.993.865	188.790.903.513	171.770.988.821	
1.03.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>					207.669.993.865	188.790.903.513	171.770.988.821	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.427.458.099	1.297.689.181	1.297.689.061	DINAS PENATAAN RUANG
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Juklak Juknis Pengendalian Bangunan Gedung di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	154.184.684.668	140.167.895.153	125.420.594.843	DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Identifikasi Bangunan Gedung yang ber-SLF di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Identifikasi Bangunan Kelurahan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Kebutuhan Bangunan Sport Center di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian SIMBG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Sistem SIMBG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Tingkat kerusakan Gedung Milik Pemerintah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Alun-Alun Johar Tahap IV	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Balai Penyuluhan KB, Pagar, & Papan Nama Balai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan & Dinas Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Gedung Gudang Banjardowo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pembangunan Gedung Inspektorat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS Multiyears	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Jalan Lingkungan Balaikota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Kantor Kecamatan Banyumanik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Lapangan Futsal Akpol	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Pagar & Pembangunan Cafe Balaikota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Puskesmas Mijen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan RS Type D Tahap II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan SD Cangkiran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan Sentra PKL di Lapangan Olahraga (5 Titik)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan SMP 45 Tahap II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan DED	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Review Perwal SLF di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Sport Center Kecamatan 1	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Sport Center Kecamatan 2	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Sport Center Kelurahan 1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Sport Center Kelurahan 2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Studi Inventarisasi Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	363.748.590	330.680.536	16.695.206	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	365.577.801	332.343.455	332.343.455	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Balai Kelurahan Karang Tempel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.832.513.002	15.302.284.547	21.854.584.547	DINAS PENATAAN RUANG
		Rehab Balai Kelurahan Kebon Agung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Rehab Balai Kelurahan Lemponsari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Rehab Gedung B Balaikota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Rehab Mall Pelayanan Publik			2 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Renovasi Kantor Kel. Trimulyo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Renovasi Kel. Srandol Kulon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Fasilitas Publik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	34.496.011.705	31.360.010.641	22.849.081.709	DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Sport Center	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang ber-IMB	55.45 %	55.45 %	55.45 %	4.814.748.872	4.377.044.428	3.355.627.750	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					4.814.748.872	4.377.044.428	3.355.627.750	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kajian Pendataan Reklame Permanen di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	428.352.623	389.411.475	389.411.475	DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Perwal tentang Perda Reklame	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Review Perwal Reklame di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembuatan Billboard Sarana Reklame Non Komersial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	944.195.536	858.359.578	166.170.378	DINAS PENATAAN RUANG
		Pembuatan Videotron	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.442.200.713	3.129.273.375	2.800.045.897	DINAS PENATAAN RUANG
		Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Tata Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pengawasan reklame	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Pengendalian dan penertiban reklame	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
		Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame bagi penyelenggara reklame (Sosialisasi Masterplan Reklame)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Perencanaan Konstruksi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	456.194.293	414.722.085	134.940.464	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					456.194.293	414.722.085	134.940.464	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Sertifikasi Bintek dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	307.759.783	279.781.621		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Operasionalisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan gedung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	148.434.510	134.940.464	134.940.464	DINAS PENATAAN RUANG
		Sosialisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan gedung/tahap Pelaku teknis bangunan gedung yang sesuai kriteria	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.200.491.667	15.636.810.606	14.173.397.606	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					8.077.932.614	7.343.575.104	6.497.421.104	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Amdal Underground Simpang Lima	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.764.517.566	6.149.561.424	6.033.661.424	DINAS PENATAAN RUANG
		Andalalin IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Andalalin Underground Simpang Lima	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		DED Gapura Masjid Layur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		DED Gerbang Masuk Kawasan Kampung Melayu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		DED Underground Simpang Lima	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Kawasan Perkotaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Manajemen Plan Kota Semarang Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Dokumen Teknis RTBL	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Review Gedung Creative Hub TBRS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Review Masterplan Kantor Pusat Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Studi Keandalan Bangunan Gedung Shopping Centre Johar (SCJ) Semarang			1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		UKL/UPL IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		UKL/UPL Kantor Ketapang dan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		UKL/UPL Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		UKL/UPL SD Cangkiran I	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		UKL/UPL Technopark	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi KRK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.313.415.048	1.194.013.680	463.759.680	DINAS PENATAAN RUANG
		Sosialisasi Perda RTRW/Sosialisasi Perda Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					7.608.895.575	6.917.177.795	6.223.443.795	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Buku Saku Pelayanan KRK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.478.936.251	2.253.578.410	2.156.082.410	DINAS PENATAAN RUANG
		Draft Raperda RDTR Kecamatan Tugu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Azas Keadilan Retribusi KRK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Daya Dukung Wilayah Pesisir Kota Semarang (Batimetri, Gelombang, Angin, Daya Dukung Tanah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Penyederhanaan Perijinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Penyediaan RTH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Percepatan Perijinan (Paperless, IT, DII)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Perubahan Garis Pantai Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Manual Book Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		TKPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultasi Android Reklame	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.129.959.324	4.663.599.385	4.067.361.385	DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa Konsultasi Dashboard KRK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa Konsultasi Upgrade Android Ukur	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa Konsultasi WEBGIS Reklame	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Belanja Jasa Konsultasi Dashboard PBB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Jejaring Titik Kontrol Horisontal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Pembakuan Nama Rupa Bumi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Video (iklan layanan Informasi Tata Ruang), Leaflet/Pamflet Tata Ruang, Buku Profil Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					1.513.663.478	1.376.057.707	1.452.532.707	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kajian Pengendalian Tata Ruang Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480.639.662	436.945.147	436.945.147	DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian SOP Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	100%	100%	1.033.023.816	939.112.560	1.015.587.560	DINAS PENATAAN RUANG
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					41.635.998.160	37.850.907.418	29.214.377.690	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tertib administrasi pertanahan	75.00 %	75.00 %	75.00 %	832.319.095	756.653.723	681.427.723	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					832.319.095	756.653.723	681.427.723	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Analisa Peran PPNS dalam Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	832.319.095	756.653.723	681.427.723	DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Model Mediasi Sengketa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Pembengkakan Mediator Kepada Aparatur Wilayah Kel. dan Kec.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Penapisan Hukum Sengketa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Penguatan SDM Penanganan Sengketa Tata Ruang Tanah dan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Kajian Penyusunan Database Sengketa yang Terintegasi Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Pengelolaan Tanah Kosong	100.00 %	100.00 %	100.00 %	40.803.679.065	37.094.253.695	28.532.949.967	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					40.803.679.065	37.094.253.695	28.532.949.967	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Fasilitasi proposal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.803.679.065	37.094.253.695	28.532.949.967	DINAS PENATAAN RUANG
		Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
		Survey Primer Data Pertanahan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen				DINAS PENATAAN RUANG
1.04.1.03.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					122.448.876.850	256.464.182.000	240.897.099.286	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					49.454.954.250	118.115.142.000	120.575.156.400	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase cakupan supply air baku	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.009.825.000	2.389.077.000	2.589.077.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.009.825.000	2.389.077.000	2.589.077.000	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan & Perawatan Sumur	20 unit	20 unit	20 unit	3.009.825.000	2.389.077.000	2.589.077.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-	-	250.000.000	
1.03.03.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>							250.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			100%			250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.446.425.000	2.315.898.000	3.365.743.000	
1.03.05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					3.446.425.000	2.315.898.000	3.365.743.000	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100%	100%	100%	3.286.425.000	2.008.698.000	1.983.098.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			100%			1.049.845.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	100%	100%	100%	160.000.000	307.200.000	332.800.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh	100.00 %	100.00 %	100.00 %	33.498.704.250	108.210.167.000	109.170.336.400	
1.03.07.2.01	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>					33.498.704.250	108.210.167.000	109.170.336.400	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran di lingkungan permukiman	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	3.000.000.000	82.548.107.000	82.523.702.400	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.498.704.250	25.662.060.000	26.646.634.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Kondisi Baik	75.32 %	75.32 %	75.32 %	9.500.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	
		Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian	8.00 lokasi	8.00 lokasi	8.00 lokasi				
1.03.09.2.01	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>					9.500.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan rusun	Terpeliharanya bangunan dan sarpras rusun	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	9.500.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					72.793.922.600	84.196.986.000	86.640.031.079	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	36.595.079.600	37.858.590.000	37.627.018.204	
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Disperkim)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(Disperkim)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					197.703.400	636.601.000	460.851.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renstra & Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	52.400.000	16.220.000	2.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	47.215.500	7.053.000	1.203.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	100%	100%	100%	7.758.300	7.053.000	1.203.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.758.300	7.053.000	1.203.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.758.300	7.053.000	1.203.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	100%	100%	100%	35.313.000	584.820.000	451.820.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	39.500.000	7.349.000	1.499.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.596.210.200	22.615.941.000	22.349.991.587	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	23.198.116.700	21.089.197.000	20.823.247.587	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	100%	100%	100%	276.922.000	1.495.310.000	1.495.310.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan penatausahaan & verifikasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	11.302.500	10.275.000	10.275.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37.400.000	7.053.000	7.053.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan semesteran realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36.269.000	7.053.000	7.053.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36.200.000	7.053.000	7.053.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					286.341.100	204.446.000	155.071.000	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian tersedia	100%	100%	100%	145.041.600	131.856.000	131.856.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	100%	100%	100%	7.524.000	6.840.000	6.840.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan sosialisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	115.763.000	49.375.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	100%	100%	100%	18.012.500	16.375.000	16.375.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					6.993.314.300	2.026.764.000	2.066.208.000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	321.900.000	23.895.000	33.758.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	1.480.145.000	570.305.000	570.305.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100.000.000	69.515.000	89.096.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	825.000.000	107.185.000	137.185.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	706.061.000	54.401.000	54.401.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	852.100.000	37.576.000	37.576.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%	1.780.000.000	58.840.000	38.840.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan dan penertiban arsip dinas	100%	100%	100%	7.758.300	7.053.000	7.053.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	920.350.000	1.097.994.000	1.097.994.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					272.726.000	1.715.000.000	1.715.000.000	
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	272.726.000	1.715.000.000	1.715.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					3.506.569.100	2.308.712.000	2.528.770.617	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	11.500.000	9.086.000	9.086.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	1.700.220.000	667.945.000	741.501.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peningkatan Sistem Informasi	100%	100%	100%	689.274.300	626.613.000	715.515.617	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.105.574.800	1.005.068.000	1.062.668.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100%	100%	100%				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1.742.215.500	8.351.126.000	8.351.126.000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	379.005.000	1.831.695.000	1.831.695.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100%	100%	100%	389.000.000	4.708.057.000	4.708.057.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	581.795.500	528.905.000	528.905.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	131.215.000	134.400.000	134.400.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	49.000.000	927.189.000	927.189.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara Rutin/Berkala	100%	100%	100%	212.200.000	220.880.000	220.880.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi kebutuhan perumahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	752.923.000	490.535.000	295.404.000	
1.04.02.2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>					252.923.000	229.930.000	229.930.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100%	100%	100%	252.923.000	229.930.000	229.930.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>					450.000.000	195.131.000	-	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100%	100%	100%	450.000.000	195.131.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>					50.000.000	65.474.000	65.474.000	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000	65.474.000	65.474.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.450.000.000	16.279.236.000	18.839.130.875	
1.04.03.2.02	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>					450.000.000	100.000.000	100.000.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Database survey	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	450.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					25.000.000.000	16.179.236.000	18.739.130.875	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi RTLH	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	25.000.000.000	16.179.236.000	18.739.130.875	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.995.920.000	29.568.625.000	29.878.478.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					9.995.920.000	29.568.625.000	29.878.478.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum	100%	100%	100%	9.745.920.000	27.353.859.000	27.743.712.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya kegiatan penunjang penyediaan PSU	100%	100%	100%	250.000.000	2.214.766.000	2.134.766.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000	54.152.054.000	33.681.911.807	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	46.26 %	46.26 %	46.26 %	200.000.000	54.152.054.000	33.681.911.807	
		Persentase ketersediaan lubang pemakaman	55.00 %	55.00 %	55.00 %				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					200.000.000	54.152.054.000	33.681.911.807	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau dan ketersediaan lubang makam	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	200.000.000	54.152.054.000	33.681.911.807	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05.0.00.0.00.01.00	SATPOL PP					49.951.229.795	33.763.490.000	45.401.934.703	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					49.951.229.795	33.763.490.000	45.401.934.703	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	32.140.312.725	23.704.179.119	35.810.089.244	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tingkat disiplin Aparatur(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.318.150	203.953.326	164.143.936	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	64.706.039	58.823.672	37.014.259	SATPOL PP
		Jumlah dokumen Renstra yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				SATPOL PP
		Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni dan perubahan yang disusun	-	-	-				SATPOL PP
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22.987.631	20.897.846	13.097.846	SATPOL PP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27.000.000	15.352.073	11.152.073	SATPOL PP
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	13.912.240	12.647.491	9.647.491	SATPOL PP
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	13.912.240	12.647.491	9.647.514	SATPOL PP
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.800.000	83.584.753	83.584.753	SATPOL PP
		Jumlah dokumen LKJ yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				SATPOL PP
		Jumlah dokumen LPPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				SATPOL PP
		Pengelolaan Website dan data	100%	100%	100%				SATPOL PP
		Prosentase pengendalian data Trantibum, Gakda dan Linmas	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.984.109.500	20.030.383.454	18.514.460.157	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.752.109.500	19.774.645.000	18.309.721.703	SATPOL PP
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100%	100%	100%	217.000.000	223.560.000	172.560.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.800.000	18.192.818	18.192.818	SATPOL PP
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.600.000	6.992.818	6.992.818	SATPOL PP
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.600.000	6.992.818	6.992.818	SATPOL PP
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.840.000	14.400.000	164.400.000	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi dan Penegakan Perda Cukai dan Tembakau			9 kegiatan			150.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta yang lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	100%	100%	15.840.000	14.400.000	14.400.000	SATPOL PP
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.685.785.000	900.268.937	14.455.633.854	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	17.500.000	13.466.164	16.946.346	SATPOL PP
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	100%	100%	18.000.000	23.995.812	30.425.521	SATPOL PP
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	220.000.000	35.700.689	45.698.689	SATPOL PP
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	70.000.000	26.470.392	14.867.238	SATPOL PP
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan fasilitasi tamu	100%	100%	100%	2.505.285.000	123.750.000	55.740.000	SATPOL PP
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat dan Tamu Yang di jamu	100%	100%	100%	1.795.000.000	541.196.000	14.055.491.000	SATPOL PP
		Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	100%	100%				SATPOL PP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	60.000.000	135.689.880	236.465.060	SATPOL PP
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.135.000.000	493.670.016	493.670.016	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 unit	4 unit	4 unit	1.100.000.000	283.133.636	283.133.636	SATPOL PP
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan kipas angin	4 unit	4 unit	4 unit	35.000.000	210.536.380	210.536.380	SATPOL PP
		Terlaksananya pengadaan genset	1 unit	1 unit	1 unit				SATPOL PP
		Terlaksananya pengadaan pompa air	1 unit	1 unit	1 unit				SATPOL PP
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.307.470.000	639.460.763	639.460.763	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Listrik, telekomunikasi dan internet kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	324.000.000	289.000.554	289.000.554	SATPOL PP
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung/ruang/lokasi yang dijaga kebersihannya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.983.470.000	350.460.209	350.460.209	SATPOL PP
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.861.790.075	1.422.042.623	1.378.320.518	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 persen	100 persen	100 persen	60.000.000	991.210.000	991.210.000	SATPOL PP
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	149.584.075	135.985.523	92.263.418	SATPOL PP
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.635.750.000	279.887.100	279.887.100	SATPOL PP
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	16.456.000	14.960.000	14.960.000	SATPOL PP
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi					-	-	-	
1.05.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan	31.00 Perda	31.00 Perda	31.00 Perda	17.810.917.070	10.059.310.881	9.591.845.459	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					17.305.781.888	9.212.941.264	8.715.528.606	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah objek rawan gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang teridentifikasi	31 Objek	31 Objek	31 Objek	56.932.196	51.756.542	49.236.542	SATPOL PP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata	11520 kali	11520 kali	11520 kali				SATPOL PP
		Prosentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%	8.019.850.000	775.010.456	715.065.456	SATPOL PP
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Linmas wilayah yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	239.599.999	217.818.181	217.818.181	SATPOL PP
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5664 siskamling	5664 siskamling	5664 siskamling	8.324.119.973	7.567.381.794	7.523.825.994	SATPOL PP
		Persentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani	100%	100%	100%				SATPOL PP
		persentase kegiatan provinsi yang diikuti dan pembinaan SDM yang dilaksanakan	100%	100%	100%				SATPOL PP
		Persentase kejadian bencana dan gangguan keamanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti per tahun	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase peserta yang lulus pembinaan fisik	100%	100%	100%	170.000.000	150.720.000	150.720.000	SATPOL PP
		Persentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	465.560.040	423.236.400	58.862.433	SATPOL PP
		Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	3 kerjasama	3 kerjasama	3 kerjasama				SATPOL PP
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terpenuhinya Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	29.719.680	27.017.891		SATPOL PP
1.05.02.2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>					350.135.182	685.266.917	625.954.335	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi aturan perda	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	24.789.848	22.536.225	21.381.225	SATPOL PP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pada kelompok kecamatan) dan pelaksanaan patroli pariwisata	-	-	-	15.000.000	380.598.570	350.598.570	SATPOL PP
		Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100%	100%	100%				SATPOL PP
		Persentase unjuk rasa yang diamankan	100%	100%	100%				SATPOL PP
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	60 kasus	60 kasus	310.345.334	282.132.122	253.974.540	SATPOL PP
		Jumlah sidang ditempat	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan				SATPOL PP
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					155.000.000	161.102.700	250.362.518	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan	180 Orang	180 Orang	180 Orang	155.000.000	161.102.700	250.362.518	SATPOL PP
1.05.0.00.0.00.02.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					31.043.962.779	27.792.657.000	27.020.225.728	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	15.937.385.042	14.059.404.512	13.227.055.310	
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatu	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.553.556	5.957.778	5.957.778	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.099.507	999.552	999.552	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.089.138	990.125	990.125	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.080.080	981.891	981.891	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.091.741	992.492	992.492	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA perubahan Dinas Pemadam Kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.094.341	994.855	994.855	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1.098.749	998.863	998.863	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.289.883.890	11.257.553.536	10.885.122.264	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12.085.450.300	10.986.773.000	10.614.341.728	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja Penanggungjawab Pengelola keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	200.000.000	266.750.000	266.750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengurus / Penyimpan BMD	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	444.080	403.709	403.709	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	319.000	290.000	290.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2 bulan	2 bulan	2 bulan	1.153.208	1.048.371	1.048.371	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	264.000	240.000	240.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1.406.911	1.279.010	1.279.010	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 bulan	2 bulan	2 bulan	846.391	769.446	769.446	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>					605.000	550.000	550.000	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	319.000	290.000	290.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	121.000	110.000	110.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	165.000	150.000	150.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>					492.160	447.418	447.418	
1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	93.180	84.709	84.709	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Terlaksananya penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	152.580	138.709	138.709	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pelaporan pengelolaan retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	246.400	224.000	224.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					459.323.700	417.567.000	113.543.500	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	6 bulan	6 bulan	6 bulan	459.323.700	417.567.000	113.543.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					942.227.287	342.511.099	255.429.439	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	45.634.787	41.486.170	41.486.170	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	180.000.000	49.824.049	51.034.049	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	18.000.000	39.980.880	41.689.220	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	1 tahun	1 tahun	1 tahun	608.092.500	80.820.000	30.690.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	90.500.000	130.400.000	90.530.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					522.252.071	474.774.610	475.944.610	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	333.842.942	303.493.584	304.663.584	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Tersedianya Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Tersedianya Sumber daya air	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	188.409.129	171.281.026	171.281.026	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.716.047.378	1.560.043.071	1.490.060.301	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Dinas Pemadam Kebakaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.185.155.940	1.077.414.491	1.077.352.601	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	12 bulan	12 bulan	12 bulan	111.763.377	101.603.070	101.664.960	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Pemadam Kebakaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	293.030.694	266.391.540	266.391.540	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	1 tahun	126.097.367	114.633.970	44.651.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran	88.00 %	88.00 %	88.00 %	15.106.577.737	13.733.252.488	13.793.170.418	
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebakaran	25.22 %	25.22 %	25.22 %				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					13.312.369.004	12.102.153.640	12.187.243.732	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya pencegahan kebakaran melalui rekomendasi teknis gambar dan sosialisasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	187.626.571	170.569.610	136.629.610	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Terwujudnya pemenuhan Alat Pelindung Diri bagi petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13.112.733.689	11.920.666.990	12.039.697.082	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		2. Terwujudnya fisik dan mental yang baik bagi petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		3. Terwujudnya pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisien	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penyelamatan dan evakuasi korban bagi petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12.008.744	10.917.040	10.917.040	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya SDM Aparatur Pemadam Kebakaran	60 Orang	60 Orang	60 Orang				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>					1.145.212.263	1.041.102.057	1.015.929.895	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Didapatkannya data proteksi kebakaran gedung di Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	41.302.928	37.548.116	14.723.116	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	dihasilkan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran sesuai standar yang berlaku	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.103.909.335	1.003.553.941	1.001.206.779	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>					648.996.470	589.996.791	589.996.791	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	287.645.906	261.496.278	261.496.278	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	361.350.564	328.500.513	328.500.513	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.03.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					14.824.729.490	13.681.889.000	24.181.881.669	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (BPBD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.409.975.390	9.572.910.524	8.819.384.228	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.05.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					26.775.000	18.264.010	18.264.010	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.355.000	10.724.218	10.724.218	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan RKA terpenuhi	100%	100%	100%	5.355.000	1.632.733	1.632.733	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA	100%	100%	100%	5.355.000	1.614.600	1.614.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	100%	100%	100%	5.355.000	1.588.050	1.588.050	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LKJip dan LKPJ	100%	100%	100%	5.355.000	2.704.409	2.704.409	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					8.243.190.700	7.529.296.250	6.919.591.919	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	8.027.125.700	7.297.387.000	6.687.682.669	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Operasional pendukung kinerja OPD	100%	100%	100%	200.000.000	226.931.000	226.931.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	5.355.000	1.557.300	1.557.300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	100%	100%	5.355.000	1.556.350	1.556.350	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	5.355.000	1.864.600	1.864.600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					923.900.000	582.525.330	494.336.330	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor	100%	100%	100%	11.000.000	12.095.998	12.095.998	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor	100%	100%	100%	50.000.000	11.801.560	11.801.560	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	50.000.000	58.533.974	58.533.974	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	100%	100%	100%	70.000.000	10.343.617	10.343.617	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	45.000.000	44.945.981	44.945.981	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat yang tersedia	100%	100%	100%	95.500.000	55.440.000	15.750.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	100%	100%	100%	550.000.000	173.337.000	124.838.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	52.400.000	216.027.200	216.027.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>								
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	100%	100%	100%				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					551.980.000	663.610.970	607.978.005	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	3.000.000	2.996.000	2.996.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, air dan internet telah terbayarkan	100%	100%	100%	319.000.000	257.738.261	202.105.296	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	229.980.000	402.876.709	402.876.709	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					664.129.690	779.213.964	779.213.964	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Service dan penggantian sparepart mobil jabatan	100%	100%	100%	333.751.000	303.410.000	303.410.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan penggantian sparepart	100%	100%	100%	40.000.000	284.170.000	284.170.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer	100%	100%	100%	4.840.000	4.400.000	4.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	105.538.690	95.944.264	95.944.264	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	100%	100%	100%	180.000.000	91.289.700	91.289.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.414.754.100	4.108.978.476	15.362.497.441	
1.05.03.2.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>					252.817.900	399.139.000	384.939.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	100%	100%	100%	96.622.900	87.839.000	87.839.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	100%	100%	100%	156.195.000	311.300.000	297.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	100%	100%	100%				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>					2.995.606.200	1.568.195.964	12.419.864.024	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang Kebencanaan	100%	100%	100%	400.000.000	25.830.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Kebencanaan	100%	100%	100%	235.100.000	113.455.389	107.083.489	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Early warning system dan Pemeliharaan	1 titik	1 titik	1 titik	2.000.000.000	408.789.740	375.789.740	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Workshop stekholder kebencanaan berbasis komunitas (Forum PRB, KSB dan KATANA)	100%	100%	100%	300.000.000	436.496.294	391.537.094	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	60.506.200	583.624.541	11.545.453.701	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>					1.066.330.000	1.751.078.512	2.356.643.512	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pusat Pengendali Operasi seluruh kegiatan kebencanaan terpenuhi	100%	100%	100%	215.930.000	1.347.300.972	1.319.160.972	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana yang tersedia	100%	100%	100%	850.400.000	403.777.540	1.037.482.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>					100.000.000	390.565.000	201.050.905	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana serta monitoring dan evaluasi bencana	100%	100%	100%	100.000.000	390.565.000	201.050.905	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.0.00.0.00.01.00	DINAS SOSIAL					74.197.102.268	41.296.269.000	35.104.292.665	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					74.197.102.268	41.296.269.000	35.104.292.665	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.681.794.885	11.353.858.801	11.747.351.304	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Dinas Sosial)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29.617.000	30.865.800	115.713.069	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Program dan Kegiatan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9.817.000	27.865.800	112.713.069	DINAS SOSIAL
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000	2.000.000	2.000.000	DINAS SOSIAL
		Jumlah dokumen evaluasi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.133.569.702	8.259.767.911	7.989.008.376	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial	14 bulan	14 bulan	14 bulan	8.221.589.200	7.474.172.000	7.203.412.465	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dihonori	37 Orang/Kegiatan	37 Orang/Kegiatan	37 Orang/Kegiatan	859.755.502	781.595.911	781.595.911	DINAS SOSIAL
		Jumlah penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	8 OB	8 OB	8 OB				DINAS SOSIAL
		Jumlah penyediaan satpam dan OB	9 Orang	9 Orang	9 Orang				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.975.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan bulanan/semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.075.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.075.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.314.290.588	1.152.151.640	1.682.205.009	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10.648.000	1.000.000	1.000.000	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	201.700.000	54.723.180	62.946.690	DINAS SOSIAL
		Penyediaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	19.800.000	17.000.000	17.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	2130 buah	2130 buah	2130 buah	55.000.000	40.490.000	40.490.000	DINAS SOSIAL
		Jumlah materai yang disediakan	500 lembar	500 lembar	500 lembar				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	146.131.000	43.763.780	43.763.780	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	4.320.000	4.320.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	638.000.000	98.500.000	127.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.597.200.000	318.889.600	555.402.000	DINAS SOSIAL
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	630.811.588	573.465.080	830.282.539	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					690.263.195	393.239.450	551.200.250	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	4 buah	4 buah	4 buah	600.000.000	311.182.000	311.182.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pemenuhan pengadaan mebel	70%	70%	70%	90.263.195	82.057.450	240.018.250	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					220.000.000	101.100.000	100.357.500	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	220.000.000	101.100.000	100.357.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.294.054.400	1.416.734.000	1.308.867.100	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	878.445.000	721.775.000	721.775.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebel	80%	80%	80%	5.808.000	5.280.000	5.280.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	31.356.400	49.740.000	85.818.000	DINAS SOSIAL
		Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.378.445.000	639.939.000	495.994.100	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi					-	-	-	
1.06.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	terlaksananya tata laksana pelayanan publik	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi				DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.06.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemenuhan pemeliharaan mebel	70%	70%	70%				DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	92.00 %	92.00 %	92.00 %	30.755.420.815	12.485.314.960	9.207.924.633	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					76.098.798	69.180.725	69.180.725	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pendataan CSR	100%	100%	100%	76.098.798	69.180.725	69.180.725	DINAS SOSIAL
		Pengelolaan CSR	100%	100%	100%				DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					30.679.322.017	12.416.134.235	9.138.743.908	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan PSM	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	3.950.000.000	3.594.911.460	3.566.727.210	DINAS SOSIAL
		Pemberdayaan Puskesmas	177 kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan				DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketepatan Sasaran KPM	95%	95%	95%	375.000.000	357.703.125	343.270.080	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial keluarga kewenangan sosial keluarga	100%	100%	100%	24.037.500.000	2.828.697.980	513.540.080	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%	569.400.000	4.046.256.200	3.906.442.290	DINAS SOSIAL
		Permakanan panti	100%	100%	100%				DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dilaksanakannya kegiatan kepahlawanan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.747.422.017	1.588.565.470	808.764.248	DINAS SOSIAL
		Dilaksanakannya kegiatan komda lansia (rakerda dan sosialisasi)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS SOSIAL
		Dilaksanakannya kegiatan LK3 (sosialisasi)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS SOSIAL
		Dilaksanakannya kegiatan ziarah wongsonegoro	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS SOSIAL
		Dilaksanakannya Peningkatan kompetensi relawan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	50.00 warga	50.00 warga	50.00 warga	35.288.000	32.080.000	40.560.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.06.03.2.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>					35.288.000	32.080.000	40.560.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemenuhan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%	35.288.000	32.080.000	40.560.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penanganan PPKS	98.00 %	98.00 %	98.00 %	20.656.003.845	14.971.311.114	11.506.269.060	
1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>					4.442.397.034	3.641.693.156	3.641.693.156	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan bagi warga terlantar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	55.000.000	50.000.000	44.765.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS terlantar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.500.000	15.000.000	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi PMKS terlantar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.538.665	15.035.150	1.270.150	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	610.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	102.740.000	93.400.000	93.400.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79.090.000	71.900.000	71.900.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta dan Kartu Identitas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.028.369	10.025.790	10.025.790	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.500.000	15.000.000	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60.500.000	55.000.000	55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pemberian pelayanan kedaruratan bagi orang terlantar	100%	100%	100%	3.260.000.000	3.106.332.216	3.106.332.216	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.500.000	15.000.000	15.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	198.000.000	180.000.000	199.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>					16.213.606.811	11.329.617.958	7.864.575.904	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya layanan data dan pengaduan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.750.000.000	569.828.436	602.394.345	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	terpenuhinya layanan kedaruratan bagi pmks	12 bulan	12 bulan	12 bulan	46.827.000	42.570.000	42.570.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Tersedianya penyediaan permakanan bagi PMKS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.086.196.000	10.078.360.000	6.418.482.400	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Tersedianya penyediaan sandang bagi PMKS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.402.831	19.457.119	19.457.096	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi disabilitas	100 buah	100 buah	100 buah	967.413.000	415.101.058	590.687.818	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya penyediaan perbekalan kesehatan di Luar panti	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12.420.480	11.291.345	11.291.345	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.240.000.000	111.785.000	98.467.900	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	27.500.000	25.000.000	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pelayanan Penelusuran Keluarga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12.127.500	11.025.000	11.025.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.770.000	10.700.000	10.700.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya layanan rujukan bagi PMKS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.770.000	10.700.000	10.700.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	26.180.000	23.800.000	23.800.000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan jaminan social	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.301.510.723	1.577.779.065	1.314.312.508	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					109.205.723	99.277.930	105.927.930	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan anak-anak terlantar	100%	100%	100%	54.952.623	49.956.930	53.281.930	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	100%	100%	100%	54.253.100	49.321.000	52.646.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					2.192.305.000	1.478.501.135	1.208.384.578	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pendataan fakir miskin di Kota Semarang	100%	100%	100%	1.525.000.000	1.190.053.855	964.399.290	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPS yang ditangani	96%	96%	96%	667.305.000	288.447.280	243.985.288	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan sosial	4.00 %	4.00 %	4.00 %	3.767.084.000	875.925.060	1.287.875.160	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					3.492.084.000	625.925.060	1.054.405.160	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	penyediaan makanan	100%	100%	100%	1.990.000.000	261.625.060	531.903.360	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100%	100%	100%	1.266.354.000	150.000.000	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100%	100%	100%	5.500.000	5.000.000	5.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pemenuhan Kebutuhan Logistik, Penanganan Sarana dan Prasarana Posko dan Peningkatan Kapasitas bagi Relawan	100%	100%	100%	89.100.000	81.000.000	232.676.800	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	terpenuhinya dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	100%	100%	100%	141.130.000	128.300.000	134.825.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					275.000.000	250.000.000	233.470.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100%	100%	100%	110.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100%	100%	100%	165.000.000	150.000.000	133.470.000	DINAS SOSIAL
2.07.0.00.0.00.01.00	DINAS TENAGA KERJA					18.015.407.366	16.196.576.885	15.792.121.269	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					18.015.407.366	16.196.576.885	15.792.121.269	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen 100.00 % 100.00 %	100.00 persen 100.00 % 100.00 %	100.00 persen 100.00 % 100.00 %	14.710.407.509	12.682.147.179	11.843.582.990	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.386.577	7.122.320	4.567.400	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja OPD	30 buku	30 buku	30 buku	1.000.000	4.293.150	2.423.150	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	3 buku	3 buku	3 buku	1.500.000	530.670	304.030	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	3 buku	3 buku	3 buku	583.737	530.670	304.030	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	6 buku	6 buku	6 buku	651.420	592.200	592.200	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	6 buku	6 buku	6 buku	651.420	592.200	360.560	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ, LKJIP, LPPD	9 buku	9 buku	9 buku	1.000.000	583.430	583.430	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.113.674.400	9.268.969.820	9.003.011.892	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	9.894.174.400	8.994.704.000	8.812.075.578	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara	100%	100%	100%	218.000.000	273.660.000	190.330.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan OPD	100%	100%	100%	1.500.000	605.820	606.314	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.868.593.035	951.892.767	700.796.046	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	18.000.000	29.994.905	29.994.905	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 buah	4 buah	4 buah	5.000.000	2.334.530		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	46.938.630	31.698.295	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	600.000.000	31.121.812	30.015.956	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.019.440	21.463.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	999.780.000	7.590.000	7.590.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	559.450.000	230.381.600	54.040.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	memenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	636.363.035	578.511.850	525.993.890	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000	80.198.000		
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebeleur yang diadakan	39 buah	39 buah	39 buah	25.000.000	80.198.000		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	15 buah	15 buah	15 buah				DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.132.753.497	1.218.930.452	1.238.905.452	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon, air, listrik dan koran yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	357.753.497	325.230.452	325.230.452	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi, keamanan, kebersihan, driver	12 bulan	12 bulan	12 bulan	775.000.000	893.700.000	913.675.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565.000.000	1.155.033.820	896.302.200	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	365.000.000	608.641.000	428.920.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	249.627.820	170.617.200	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	150.000.000	296.765.000	296.765.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terampil	60.00 %	60.00 %	60.00 %	482.693.645	1.219.575.915	2.531.292.467	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					228.882.240	988.838.274	2.355.052.395	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jml peserta pelatihan (buruh industri rokok)			390 orang	115.760.000	885.999.874	2.252.213.995	DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah peserta uji kompetensi	60 orang	60 orang	60 orang				DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah Tenaga Kerja Terlatih	160 orang	160 orang	140 orang				DINAS TENAGA KERJA
		Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	20 orang	20 orang	20 orang				DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan Kapasitas FKJP	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan				DINAS TENAGA KERJA
		Penyusunan Modul Pelatihan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis				DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pelatihan keterampilan pencaker	5 paket	5 paket	5 paket	113.122.240	102.838.400	102.838.400	DINAS TENAGA KERJA
		Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					110.000.147	100.000.134	74.044.183	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Fasilitasi Pelatihan Kerja	20 orang	20 orang	20 orang	110.000.147	100.000.134	74.044.183	DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan Kapasitas Instruktur LPK	25 orang	25 orang	25 orang				DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					27.500.198	25.000.180	17.716.854	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Monitoring LPK	50 LPK	50 LPK	50 LPK	27.500.198	25.000.180	17.716.854	DINAS TENAGA KERJA
		Verifikasi ijin , penambahan program, pindah alamat LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK				DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					82.499.913	74.999.921	69.105.221	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Peningkatan Produktivitas kerja bagi tenaga kerja di perusahaan kecil Kota Semarang	3 kali	3 kali	3 kali	82.499.913	74.999.921	69.105.221	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					33.811.147	30.737.406	15.373.814	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sosialisasi Pengukuran Kompetensi Tenaga Kerja LPK Yang Terakreditasi	25 LPK	25 LPK	25 LPK	33.811.147	30.737.406	15.373.814	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peluang Kerja Mandiri	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	1.266.278.525	1.395.488.395	727.656.719	
		Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen				
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					912.910.326	936.489.840	297.636.435	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan calon transmigran	3 kk	3 kk	3 kk	78.000.000	177.480.453	140.265.953	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kesiapan para pekerja yang rentan PHK dan ter PHK untuk berusaha mandiri	220 orang	220 orang	orang	658.232.174	598.392.885		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pembekalan Perluasan Kesempatan Kerja	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	176.678.152	160.616.502	157.370.482	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					260.500.000	349.999.285	337.079.237	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan Antar Kerja Online	9 kali	9 kali	9 kali	26.500.000	226.373.130	213.453.082	DINAS TENAGA KERJA
		Tersedianya Informasi Lowongan Kerja	20000 lowongan	20000 lowongan	20000 lowongan				DINAS TENAGA KERJA
		Terselenggaranya Forum Komunikasi Pengguna Kerja	50 orang	50 orang	50 orang				DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan Bursa Kerja	1 kali	1 kali	1 kali	234.000.000	123.626.155	123.626.155	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					22.500.000	45.028.180	43.993.930	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah peserta pelatihan wirausaha bagi PMI purna penempatan	12 orang	12 orang	12 orang	22.500.000	45.028.180	43.993.930	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.05	<i>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					70.368.199	63.971.090	48.947.117	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Perpanjangan IMTA	100%	100%	100%	70.368.199	63.971.090	48.947.117	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	1.556.027.687	899.365.396	689.589.093	
2.07.05.2.01	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					488.456.736	444.051.578	335.790.053	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta bimtek PP	50 orang	50 orang	50 orang	54.999.923	49.999.930	33.100.300	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah peserta bimtek PKB	50 orang	50 orang	50 orang	54.999.923	49.999.930		DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI dan Jamsos	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	378.456.890	344.051.718	302.689.753	DINAS TENAGA KERJA
		Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-Undangan dan Jaminan Sosial	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan				DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>					1.067.570.951	455.313.818	353.799.040	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	40 orang	40 orang	40 orang	127.599.951	115.999.955	85.742.995	DINAS TENAGA KERJA
		Konsolidasi Hubungan Industrial	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS TENAGA KERJA
		Terlaksananya Deteksi Kerawanan Ketenagakerjaan	8 perusahaan	8 perusahaan	8 perusahaan				DINAS TENAGA KERJA
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan				DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya mediasi Penyelesaian PHI / PHK	150 kasus	150 kasus	150 kasus	507.254.000	74.999.925	58.513.635	DINAS TENAGA KERJA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah peserta bimtek bagi SP/SB tentang Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan	50 orang	50 orang	50 orang	45.315.000	49.996.090	32.817.800	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi & masukan ketenagakerjaan, pemantauan tenaga kerja asing	100%	100%	100%	387.402.000	214.317.848	176.724.610	DINAS TENAGA KERJA
2.08.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.200.479.724	17.450.324.000	15.987.828.269	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.200.479.724	17.450.324.000	15.987.828.269	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.269.346.850	10.626.270.716	9.960.579.250	
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DP3A)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.735.250	5.202.500	5.202.500	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1.125.000	1.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000	500.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000	500.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	500.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	500.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LKJIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1.500.000	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Penyusunan Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyusunan Dokumen LPPD,PK,SAKIP dan RTP	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	635.250	577.500	577.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.172.250.600	8.317.856.000	7.806.980.269	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	8.884.200.600	8.076.546.000	7.573.020.269	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Honor PA,KPA,PPK dan Bendahara	100%	100%	100%	272.500.000	239.060.000	231.710.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembuatan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	750.000	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya dokumen pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000	500.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	750.000	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembuatan Laporan Prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	250.000	250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000	183.932.500	407.438.182	
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kualitas SDM	100%	100%	100%	100.000.000	183.932.500	57.438.182	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase kegiatan sosialisasi perundangan cukai			100%			350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					763.985.000	1.357.109.724	950.352.144	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100%	100%	100%	3.800.000	3.179.360	3.179.360	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	20.000.000	84.581.140	84.581.140	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	20.000.000	24.798.960	24.798.960	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK yang Tersedia	100%	100%	100%	300.000.000	81.114.684	87.864.684	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Makan dan Minum OPD	100%	100%	100%				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	35.700.000	41.470.310	41.559.070	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	199.485.000	181.350.000	64.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Kegiatan Monitoring dan Rakor PPPA	100%	100%	100%	35.000.000	847.546.420	553.050.080	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terpenuhinya Kegiatan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	100%	100%	100%				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	150.000.000	93.068.850	91.318.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					210.615.000	39.754.600	86.695.763	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	10.615.000	9.650.000	57.891.163	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	200.000.000	30.104.600	28.804.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.800.000	310.135.392	326.510.392	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon, listrik, air, internet	100%	100%	100%	123.500.000	110.035.392	110.035.392	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	298.300.000	200.100.000	216.475.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					578.961.000	412.280.000	377.400.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	428.000.000	238.804.000	238.804.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas	100%	100%	100%	98.461.000	89.510.000	54.630.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	100%	25.000.000	35.660.000	35.660.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	100%	27.500.000	48.306.000	48.306.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.081.704.000	1.595.541.055	1.181.006.625	
2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					280.538.000	197.599.020	163.189.020	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terumuskannya Kebijakan Pelaksanaan PUG	100%	100%	100%	161.540.000	87.313.400	50.133.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan PUG yang didukung adanya ARG di setiap OPD	100%	100%	100%	118.998.000	110.285.620	113.055.620	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					201.756.000	862.702.330	872.714.312	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Pengetahuan tentang perempuan di bidang sosial, politik, Hukum dan Ekonomi	100%	100%	100%	100.356.000	779.272.250	782.384.232	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di bidang sosial, politik, Hukum dan Ekonomi	100%	100%	100%	101.400.000	83.430.080	90.330.080	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					599.410.000	535.239.705	145.103.293	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemberian advokasi dan pendampingan terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	500.000.000	400.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	99.410.000	135.239.705	145.103.293	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17.04 point	17.04 point	17.04 orang	2.065.862.118	1.726.794.026	1.770.460.690	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					263.581.533	341.051.090	246.780.528	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	96.772.000	189.406.060	178.941.498	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	10 Stake holder	10 Stake holder	10 Stake holder	166.809.533	151.645.030	67.839.030	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					1.733.228.100	1.322.967.950	1.465.758.866	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 lembaga	17 lembaga	17 lembaga	1.610.170.000	1.211.096.950	1.139.396.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	5 layanan rujukan	5 layanan rujukan	5 layanan rujukan	123.058.100	111.871.000	326.361.916	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					69.052.485	62.774.986	57.921.296	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	55.147.994	50.134.540	45.280.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	10 Stake holder	10 Stake holder	10 Stake holder	13.904.491	12.640.446	12.640.446	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.536.021.439	1.973.071.153	1.401.602.913	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					676.772.919	1.020.065.443	985.175.443	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kesetaraan Gender (KG)	100%	100%	100%	106.772.919	97.066.290	58.851.290	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%	570.000.000	922.999.153	926.324.153	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					419.248.520	553.005.710	416.427.470	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan peningkatan kualitas keluarga Kota Semarang	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	51.735.310	47.032.100	23.032.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang kapable guna meningkatkan layanan Kualitas Keluarga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	17.513.210	15.921.100	15.921.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sinergitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	100%	350.000.000	490.052.510	377.474.270	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					440.000.000	400.000.000	-	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Bagi Generasi Muda Pelajar Perempuan yang dapat menjadi sarana Pengembangan Potensi Ekonomi Diri sehingga dapat Membantu Memutus Rantai Kemiskinan Keluarga	100%	100%	100%	440.000.000	400.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 %	100.00 %	100.00 %	379.200.000	465.699.890	471.151.847	
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					379.200.000	465.699.890	471.151.847	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Gender dan Anak	2 Paket	2 Paket	2 Paket	150.000.000	238.914.460	248.591.042	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Gender dan Anak	2 Paket	2 Paket	2 Paket	229.200.000	226.785.430	222.560.805	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	494.200.833	652.659.580	569.087.058	
2.08.06.2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					168.585.000	190.214.850	144.924.850	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	54 lembaga	54 lembaga	54 lembaga	18.585.000	13.655.530	13.655.530	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak	5 elemen stakeholder	5 elemen stakeholder	5 elemen stakeholder	150.000.000	176.559.320	131.269.320	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					325.615.833	462.444.730	424.162.208	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan peningkatan kualitas hidup anak	3 Jejaring	3 Jejaring	3 Jejaring	26.664.000	24.240.000	12.990.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 jejaring	3 jejaring	3 jejaring	88.000.000	61.334.000	64.909.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 jejaring	3 jejaring	3 jejaring	156.240.000	327.132.700	296.525.178	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjalinnnya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 jejaring	3 jejaring	3 jejaring	54.711.833	49.738.030	49.738.030	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01 %	0.01 %	0.01 %	374.144.484	410.287.580	633.939.886	
2.08.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>					106.664.712	254.917.920	270.730.800	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	37.419.712	34.017.920	34.017.920	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	69.245.000	220.900.000	236.712.880	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					224.705.832	116.484.260	323.430.436	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	18.477.327	16.797.570	16.797.570	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	10.848.761	9.862.510	227.401.426	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	19.609.744	17.827.040	17.827.040	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	175.770.000	71.997.140	61.404.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					42.773.940	38.885.400	39.778.650	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	4 Jejaring	4 Jejaring	4 Jejaring	42.773.940	38.885.400	39.778.650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.0.00.0.00.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN					16.948.370.520	12.838.642.000	12.085.828.144	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16.948.370.520	12.838.642.000	12.085.828.144	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.385.245.503	10.386.306.023	9.307.561.199	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (ketapang)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.009.490	15.620.310	15.620.310	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan P-Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	6.983.970	6.983.970	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	R-DPPA dan DPPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	2.012.810	2.012.810	DINAS KETAHANAN PANGAN
		RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1.900.310	1.900.310	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.566.620	1.424.200	1.424.200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.870	1.311.700	1.311.700	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
		LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1.987.320	1.987.320	DINAS KETAHANAN PANGAN
		LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.986.504.000	8.240.995.070	7.490.341.214	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	8.710.504.000	7.918.640.000	7.175.826.144	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Terbayarnya TPP ASN	100%	100%	100%				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelancaran administrasi keuangan	100%	100%	100%	267.000.000	317.250.000	309.410.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1.701.690	1.701.690	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3.000.000	1.701.690	1.701.690	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	3.000.000	1.701.690	1.701.690	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.479.227.744	955.129.489	783.898.521	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	100%	100%	12.500.000	7.262.570	7.262.570	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	26.815.382	24.377.620	24.377.620	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	100%	100%	9.600.000	141.578.580	141.578.580	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ATK yang disediakan	100%	100%	100%	148.500.000	48.612.678	48.612.678	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	18.500.000	19.937.050	22.177.082	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Perundang	100%	100%	100%	1.800.000	5.700.000	5.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan Dan Minuman	100%	100%	100%	650.000.000	73.008.480	51.408.480	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	350.000.000	396.914.000	245.043.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	261.512.362	237.738.511	237.738.511	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					450.336.000	-	-	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	450.336.000			DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					416.835.269	378.941.154	373.141.154	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	157.235.269	142.941.154	117.941.154	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas caraka	1 orang	1 orang	1 orang	259.600.000	236.000.000	255.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pramubakti	2 orang	2 orang	2 orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tenaga Keamanan Kantor	1 orang	1 orang	1 orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tenaga Kebersihan Kantor	1 orang	1 orang	1 orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tenaga Pengemudi	1 orang	1 orang	1 orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.037.333.000	795.620.000	644.560.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sparepart, Servis, bbm,pajak kendaraan dinas pejabat	100%	100%	100%	400.000.000	39.950.000	39.950.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sparepart, Servis, dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	12.650.000	427.800.000	334.340.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	109.483.000	99.530.000	41.930.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	515.200.000	228.340.000	228.340.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan distribusi pangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.552.560.587	1.984.915.475	2.321.140.513	
		Ketersediaan Energi / Kapita	3.05 Kkal/kapita/tahun	3.05 Kkal/kapita/tahun	3.05 Kkal/kapita/tahun				
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.019.920.834	450.102.486	418.614.356	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.660.521	26.964.110	26.964.110	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Neraca Bahan Pangan	1 Buku	1 Buku	1 Buku				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Prognosa Kebutuhan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Data Base Pangan Terpadu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	499.000.000	120.569.739	120.569.739	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Obor Pangan Lestari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelatihan pengembangan sumber daya pangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi Instansi Terkait	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kegiatan	250.000.000	128.133.930	96.645.800	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Petugas IT dan Aplikasi Ketahanan Pangan	2 Orang	2 Orang	2 Orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Profil dan Selayang Pandang Dinas Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Base Distribusi Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	108.799.352	108.799.352	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Informasi Harga Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 Orang	1 Orang	1 Orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pasar Murah	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Petugas Enumerator Distribusi	16 Orang	16 Orang	16 Orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Fasilitasi Pemasaran Produk Pangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	28.125.980	28.125.980	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemberdayaan KDPM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Toko Tani Indonesia	20 TTI	20 TTI	20 TTI	41.260.313	37.509.375	37.509.375	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>					1.782.627.857	1.139.782.180	1.139.782.180	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	46.507.857	42.279.870	42.279.870	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Beras ATM	80.75 Ton	80.75 Ton	80.75 Ton	1.605.000.000	978.302.310	978.302.310	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Beras Cadangan Pangan	6.8 Ton	6.8 Ton	6.8 Ton				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentasi Penyaluran Terhadap Lokasi Bencana	100%	100%	100%				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Petugas movev	6 orang	6 orang	6 orang	131.120.000	119.200.000	119.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Petugas Pengelola ATM Beras	20 Orang	20 Orang	20 Orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>					750.011.896	395.030.809	762.743.977	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Diseminasi Pola Pangan Harapan (PPH)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.011.896	45.465.360	34.078.360	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Intervensi Pangan Anak Harapan (IPAH)	100 Rumah Tangga Miskin	100 Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Miskin				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Apresiasi B2SA Anak Usia Dini	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	700.000.000	349.565.449	728.665.617	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Event promosi pangan lokal	4 kegiatan	4 kegiatan	kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Forum Olahan Pangan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pekarangan Pangan Lestari DAKNF			7 Kelompok				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelatihan Kemasan Pangan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelatihan pengembangan pangan lokal	6 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelatihan RPL (Rumah Pangan Lestari)	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penanganan Daerah rentan rawan pangan	7.00 %	7.00 %	7.00 %	250.000.000	152.207.970	159.357.970	
2.09.04.2.01	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>					250.000.000	152.207.970	159.357.970	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	152.207.970	159.357.970	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Peta FSVA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Peta SKPG	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Petugas Pemantau Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	80.00 persen	80.00 persen	80.00 persen	760.564.430	315.212.532	297.768.462	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					760.564.430	315.212.532	297.768.462	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Kader Keamanan Pangan	60 orang	60 orang	55 orang	200.225.000	18.575.000	18.100.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan BIMTEK Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	44.590.953	40.537.230	34.937.230	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	40 Pelaku Usaha Pangan	40 Pelaku Usaha Pangan	Pelaku Usaha Pangan	24.028.477	21.844.070		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	241.720.000	51.249.680	51.249.680	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Sosialisasi Keamanan Pangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Petugas Pengawasan Keamanan Pangan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	250.000.000	183.006.552	193.481.552	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Petugas Survei Keamanan Pangan	1 Orang	1 Orang	1 Orang				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Survei Keamanan Pangan dan Mini Laboratorium	77 Survei	77 Survei	77 Survei				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Olahan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				DINAS KETAHANAN PANGAN
		Uji dan Sampel Keamanan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				DINAS KETAHANAN PANGAN
2.11.1.03.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					59.060.684.185	115.309.813.000	134.161.035.334	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					59.060.684.185	115.309.813.000	134.161.035.334	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Lingkungan Hidup)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.211.728.249	37.446.978.905	38.507.878.705	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Lingkungan Hidup)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					78.389.740	79.122.022	79.122.022	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	14.343.940	14.343.940	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen Renstra DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	848.250	848.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	848.250	848.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	933.075	848.250	848.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	933.757	848.870	848.870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	67.522.908	61.384.462	61.384.462	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen LKPI DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen LPPD DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dokumen money DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sistem Money Internal DLH yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.731.059.466	18.878.953.367	18.746.912.556	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	18.779.885.300	17.072.623.000	16.870.286.889	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang kegiatan PA, KPA, Bendahara dan Pengurus Barang yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	485.000.000	475.082.220	475.082.220	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1.457.424.166	1.324.931.060	1.395.226.360	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Belanja jasa keamanan, belanja jasa tukang dan belanja jasa administrasi perkantoran non ASN yang telah terbayar	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1.694.199	1.694.199	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran DLH yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1.937.693	1.937.693	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DLH yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.750.000	2.685.195	2.685.195	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.450.487.043	1.225.959.882	1.109.565.322	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan	100%	100%	100%	55.000.000	45.899.975	45.899.975	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terbeli	100%	100%	100%	230.000.000	97.700.510	106.390.510	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	100%	400.000.000	132.918.487	137.833.927	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peralatan kebersihan, bahan pembersih, perlengkapan rumah tangga untuk UPTD dan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	55.000.000	46.045.300	46.045.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kebutuhan barang cetakan dan pengadaan yang tercukupi	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan	9 buku	9 buku	9 buku	10.000.000	2.454.480	2.454.480	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan & minuman rapat serta jamuan tamu	100%	100%	100%	1.200.000.000	80.388.000	80.388.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	320.000.000	656.474.000	526.474.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	180.487.043	164.079.130	164.079.130	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					835.340.000	881.471.842	797.571.102	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air, listrik dan surat kabar	100%	100%	100%	650.000.000	727.583.092	630.882.352	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	44 orang	44 orang	44 orang	185.340.000	153.888.750	166.688.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.116.452.000	16.381.471.792	17.774.707.703	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional, fasilitas BBM dan perpanjangan STNK	100%	100%	100%	500.000.000	15.516.288.430	16.909.524.341	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan/ penggantian sparepart kendaraan bermotor/ operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1.452.000	1.320.000	1.320.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala AC, CCTV, aquarium, pompa air, tandon air yang dilaksanakan	100%	100%	100%	85.000.000	285.349.180	285.349.180	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah terlaksananya pemeliharaan genset dan pembelian BBM genset	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah terlaksananya pemeliharaan notebook, komputer, printer dan scanner	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Atap, plafon, dan saluran air	100%	100%	100%	530.000.000	578.514.182	578.514.182	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan Lahar Parkir Pool Banyumanik	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Perbaikan Pagar dan Paving Lahan Parkir	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Perbaikan Sarana Pool Kaligawe	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Perbaikan Sarana Pool Tapak	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 %	100.00 %	100.00 %	375.300.000	358.742.285	358.742.285	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					375.300.000	358.742.285	358.742.285	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	240.000.000	130.404.636	130.404.636	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen DIKPLHD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	135.300.000	228.337.649	228.337.649	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)	55.00 indeks	55.00 indeks	55.00 indeks	3.148.005.801	5.480.713.460	5.674.301.954	
		Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air	65.00 hektar	65.00 hektar	65.00 hektar				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.11.03.2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>					1.978.842.528	4.417.837.757	4.657.836.655	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen IKLH yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	195.000.000	2.817.255.191	2.959.986.166	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah inventarisasi kegiatan/usaha penghasil limbah cair	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah IPAL Usaha Skala Kecil yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pagar kantor UPT terbangun	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah perwal kelas mutu air yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta bintek pemanfaatan SDA	100 industri	100 industri	100 industri				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri	100 industri	100 industri				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Taman Ecobric yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	25 kali	25 kali	25 kali				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik	60 titik	60 titik				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah titik pantau kualitas udara ambien di lokasi CFD	8 titik	8 titik	8 titik				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	200 buah	200 buah	212 buah				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah wilayah titik pantau Adipura	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah wilayah yang mengikuti lomba toilet bersih	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah wilayah yang mengikuti pembinaan LBS	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelenggaraan event pendukung CFD di Jl. Pemuda	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah alat bor biopori yang terbeli	150 buah	150 buah	150 buah	898.842.528	817.129.571	817.129.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Bangunan RWH yang terbangun	3 unit	3 unit	3 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen DED Rain Water Harvesting	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen DED Sumur Resapan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kampung iklim yang terbangun	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah lubang biopori yang terbangun	1000 unit	1000 unit	1000 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir	710 m2	710 m2	710 m2				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Rain Harvesting	75 orang	75 orang	75 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah sumur resapan yang terbangun	8 unit	8 unit	8 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	885.000.000	783.452.995	880.720.918	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah monitoring kualitas air sungai	20 kali	20 kali	20 kali				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	24 jenis	24 jenis	24 jenis				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang	14 orang	14 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3 titik	3 titik	3 titik				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					659.778.704	599.798.822	553.388.822	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen DLH dalam angka yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	659.778.704	599.798.822	553.388.822	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah edisi Buletin Green yang tersusun	6 edisi	6 edisi	6 edisi				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat bidang Lingkungan Hidup melalui media cetak	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat bidang Lingkungan Hidup melalui media elektronik	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah paket kegiatan pembuatan kalender	1000 buah	1000 buah	1000 buah				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah paket kegiatan pengelolaan website	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah sistem aplikasi informasi lingkungan hidup yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan website	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Tutorial pengalolaan sampah	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					509.384.569	463.076.881	463.076.477	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	509.384.569	463.076.881	463.076.477	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air yang terbeli	1000 batang	1000 batang	1000 batang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan taman kehati Tinjomoyo	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang terbangun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	800.780.840	727.982.582	745.120.082	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					800.780.840	727.982.582	745.120.082	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan DED Pembangunan Instalasi Air	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	116.998.735	106.362.490	124.099.990	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Master Plan Penataan Kawasan Konservasi Gunung Talang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Peta Lahan Kritis dan Ruang Terbuka Hijau	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah frekuensi pemeliharaan Taman Kehati Hutan Tinjomoyo	12 bulan	12 bulan	12 bulan	324.134.209	294.667.463	294.667.463	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Tanaman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang tersedia	500 batang	500 batang	500 batang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pembangunan Instalasi Air	2 unit	2 unit	2 unit	359.647.892	326.952.629	326.352.629	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebun Koleksi DLH	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	50.00 %	50.00 %	50.00 %	224.094.386	203.722.169	1.768.672.769	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3					224.094.386	203.722.169	1.768.672.769	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Penuhannya Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Pemetaan Sebaran Limbah B3 di Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	224.094.386	203.722.169	1.768.672.769	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	50 orang	50 orang	50 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kegiatan dan atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	55 perusahaan	55 perusahaan	55 perusahaan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.00 %	85.00 %	85.00 %	713.554.924	592.567.175	561.076.175	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					713.554.924	592.567.175	561.076.175	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Penuhannya Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	120 buah	120 buah	120 buah	363.554.924	330.504.476	283.213.476	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta pembinaan konsultan penyusun Dokumen Lingkungan	80 orang	80 orang	80 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi / Bimbingan Teknis	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang undangan	100%	100%	100%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan atau industri yang diawasi	180 industri	180 industri	180 industri	350.000.000	262.062.699	277.862.699	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL Tahu dan S. Bajak	32 titik	32 titik	32 titik				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	46.00 %	46.00 %	46.00 %	1.098.580.810	1.021.666.410	856.010.769	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.098.580.810	1.021.666.410	856.010.769	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Banyaknya peliputan sosialisasi kebijakan LH	10 kali	10 kali	10 kali	698.580.810	635.073.464	595.073.464	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Bintek dan sosialisasi kebijakan Lingkungan Hidup	2 kali	2 kali	2 kali				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta Bintek SDA	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta kegiatan pendampingan TPST	156 orang	156 orang	156 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah peserta pendampingan TTG	150 orang	150 orang	150 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta peringatan HPSN	1000 orang	1000 orang	1000 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi green transportasi LH	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengawasan pelaksanaan kebijakan LH	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi SDA	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi TTG	25 orang	25 orang	25 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta talk show , dialog interaktif HSPN	100 orang	100 orang	100 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota Saka Kalpataru	40 orang	40 orang	40 orang	400.000.000	386.592.946	260.937.305	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali	1 kali	1 kali				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru	1 kali	1 kali	1 kali				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah bidang Lingkungan Hidup	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan sekolah Adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	10.00 %	10.00 %	10.00 %	525.000.000	496.220.949	496.220.949	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					525.000.000	496.220.949	496.220.949	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan ramah lingkungan yang terbangun	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	525.000.000	496.220.949	496.220.949	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta Lomba KRL	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	650 orang	650 orang	650 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah sekolah yang menerapkan program Adiwiyata	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tanaman yang tersedia untuk kegiatan Adiwiyata dan Kalpataru	405 batang	405 batang	405 batang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tanaman yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat	310 batang	310 batang	310 batang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	30 unit	30 unit	30 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tong sampah yang tersedia	32 unit	32 unit	32 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00 %	290.144.173	179.160.721	107.658.746	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					290.144.173	179.160.721	107.658.746	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	58 kasus	58 kasus	58 kasus	225.000.000	119.938.746	107.658.746	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pulbaket (air limbah, air sungai, air sumur, udara)	20 titik	20 titik	20 titik				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan					65.144.173	59.221.975		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi pengaduan & penegakan hukum lingkungan	250 orang	250 orang	250 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	90.00 %	90.00 %	90.00 %	26.673.495.002	68.802.058.344	85.085.352.900	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					26.673.495.002	68.802.058.344	85.085.352.900	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Jakstrada yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.161.050.000	99.987.907	26.458.907	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Bangunan gudang, paving jalan masuk dan MCK yang dibangun	1 paket	1 paket	1 paket	1.000.000.000	468.729.421	505.363.876	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah alat pengolah sampah yang terbeli	3 jenis	3 jenis	3 jenis				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pendampingan optimalisasi TPST	8 bulan	8 bulan	8 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan dan pengangkutan sampah pasar serta kebersihan TPS pasar	15 zona	15 zona	15 zona	7.422.795.000	52.697.295.560	64.446.090.065	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					76.058.257	69.143.870	169.143.870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perda dan Perwal tentang pengelolaan persampahan di Kota Semarang melalui media cetak dan elektronik	200 orang	200 orang	200 orang				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat kebersihan pengelolaan persampahan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	10.465.163.550	9.513.785.045	9.513.785.045	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Alat Berat Buldozer	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Road Sweeper	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Tong Sampah Kegiatan Pembangunan Kampung Melayu	1000 unit	1000 unit	1000 unit				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan					995.450.236	904.954.760	904.954.760	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pungutan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD yang tercapai	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Apraisal pengadaan perluasan lahan TPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.552.977.959	5.048.161.781	9.519.556.377	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DED perluasan zona buang baru TPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DED saluran IPAL TPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah TPS yg terbangun	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		LARAP pengadaan perluasan lahan TPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Masterplan fisik TPA			1 dokumen				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan TPA Jatibarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan TPS di wilayah kota semarang	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27.285.259.900	23.732.059.000	24.881.524.828	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27.285.259.900	23.732.059.000	24.881.524.828	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	23.503.508.993	20.294.103.630	22.386.503.668	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				
2.12.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					50.575.118	45.977.380	192.163.925	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%	39.603.333	36.003.030	35.803.030	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	1.340.570	1.218.700	10.218.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	100%	1.340.570	1.218.700	1.218.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	100%	1.340.570	1.218.700	1.218.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100%	1.340.570	1.218.700	1.218.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	1.318.075	1.198.250	1.198.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.291.430	3.901.300	141.287.845	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					15.444.340.945	14.040.309.950	13.535.717.778	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	15.187.709.900	13.807.009.000	13.280.306.828	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	246.351.270	223.955.700	246.065.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	100%	100%	4.439.050	4.035.500	4.035.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	2.961.200	2.692.000	2.692.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan_Triwulanan_Semesteran SKPD	100%	100%	100%	1.550.450	1.409.500	1.409.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	1.329.075	1.208.250	1.208.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					23.705.000	21.550.000	308.407.496	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	23.705.000	21.550.000	308.407.496	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					2.375.773.599	2.159.794.181	4.097.618.705	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	207.114.270	188.285.700	79.157.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50.931.100	46.301.000	2.359.364.891	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	169.254.976	153.868.160	97.530.415	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	419.126.268	381.023.880	380.223.880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	215.452.755	195.866.141	118.896.701	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	13.365.000	12.150.000	7.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	335.629.800	305.118.000	273.087.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	964.899.430	877.181.300	781.708.118	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					334.471.521	304.065.019	559.290.637	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	171.561.609	155.965.099	155.165.099	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan gedung kantor/Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	162.909.912	148.099.920	404.125.538	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					2.779.637.960	2.526.943.600	2.499.441.627	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	783.420.000	712.200.000	686.148.027	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	1.996.217.960	1.814.743.600	1.813.293.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					2.495.004.850	1.195.463.500	1.193.863.500	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	489.269.000	444.790.000	444.790.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel	100%	100%	100%	12.100.000	11.000.000	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	397.235.850	361.123.500	360.123.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	1.596.400.000	378.550.000	377.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-elektronik	98.11 persen	98.11 persen	98.11 persen	2.480.432.548	2.254.938.680	1.376.210.880	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	60.57 %	60.57 %	60.57 %				
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>					1.905.165.009	1.731.968.190	969.381.800	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					930.380.000	845.800.000	916.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100%	100%	100%	974.785.009	886.168.190	53.181.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>					535.700.000	487.000.000	385.850.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	100%	100%	100%	535.700.000	487.000.000	385.850.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					23.076.988	20.979.080	20.979.080	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	23.076.988	20.979.080	20.979.080	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					16.490.551	14.991.410	-	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	16.490.551	14.991.410		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	93.42 %	93.42 %	93.42 %	571.921.141	519.928.310	526.736.900	
2.12.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>					532.120.600	483.746.000	505.546.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100%	100%	100%	91.790.600	83.446.000	83.046.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	295.680.000	268.800.000	291.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	100%	100%	100%	144.650.000	131.500.000	131.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>					23.309.990	21.190.900	21.190.900	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	23.309.990	21.190.900	21.190.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>					16.490.551	14.991.410	-	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	16.490.551	14.991.410	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.50 % 100.00 %	37.50 % 100.00 %	37.50 % 100.00 %	624.039.988	567.309.080	551.744.080	
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>					521.854.564	474.413.240	466.698.240	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	521.854.564	474.413.240	466.698.240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>					29.207.992	26.552.720	26.552.720	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	29.207.992	26.552.720	26.552.720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>					72.977.432	66.343.120	58.493.120	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	23.266.694	21.151.540	21.151.540	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	100%	100%	100%	49.710.738	45.191.580	37.341.580	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi data kependudukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105.357.230	95.779.300	40.329.300	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					105.357.230	95.779.300	40.329.300	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	100%	100%	100%	105.357.230	95.779.300	40.329.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.0.00.0.00.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					17.289.879.150	15.024.093.000	20.132.224.889	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					17.289.879.150	15.024.093.000	20.132.224.889	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.535.803.111	8.884.023.876	8.711.740.984	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.375.940	9.292.264	9.292.264	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000	3.017.118	3.017.118	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	950.000	1.028.564	1.028.564	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	950.000	859.364	859.364	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	668.260	607.509	607.509	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	575.200	522.909	522.909	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPJ, LKJIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.715.300	1.559.364	1.559.364	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.867.180	1.697.436	1.697.436	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.005.659.300	6.692.402.609	7.031.830.998	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.002.233.700	6.365.667.000	6.760.955.389	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.725.600	1.568.727	1.568.727	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000	1.894.891	1.894.891	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	525.000	322.422.309	266.562.309	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	525.000	849.682	849.682	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.739.254.655	821.620.243	353.280.662	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	15.000.000	16.252.371	5.624.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	15.000.000	18.754.572	27.642.191	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	64.365.325	58.513.932	22.836.196	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	185.000.000	37.252.796	37.252.796	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	35.000.000	39.156.272	8.308.449	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	1.769.025.000	55.450.000	10.967.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen perencanaan dan hasil kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	447.683.797	406.985.270	51.395.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	100%	100%				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	208.180.533	189.255.030	189.255.030	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.068.192	27.334.720	27.334.720	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	18 Buah	18 Buah	18 Buah				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Buah	8 Buah	8 Buah	30.068.192	27.334.720	27.334.720	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.337.524	430.306.840	456.406.840	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air, dan Listrik	100%	100%	100%	128.817.524	117.106.840	117.106.840	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	344.520.000	313.200.000	339.300.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.107.500	903.067.200	833.595.500	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas / Operasional	100%	100%	100%	30.000.000	623.140.000	623.140.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki	100%	100%	100%	52.607.500	47.825.000	42.865.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Komponen Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	100%	100%	100%				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Komponen Gedung Kantor yang Diperbaiki	100%	100%	100%	197.500.000	232.102.200	167.590.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 th	0.50 %	0.50 %	0.50 %	900.229.940	818.390.854	595.203.207	
2.14.02.2.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>					567.236.687	515.669.714	293.814.067	
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Pelaksanaan Survey	12 bulan	12 bulan	12 bulan	43.890.000	39.900.000	43.225.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	44.784.241	40.712.946		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.769.420	20.699.473		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.397.111	77.633.737	77.615.737	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.746.471	29.769.519		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	112.633.352	102.393.956	58.521.192	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	129.245.971	117.496.337	51.534.247	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	1. Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangsa Kencana	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	95.770.121	87.063.746	62.917.893	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>					332.993.253	302.721.140	301.389.140	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Parameter Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.042.523	15.493.203	15.493.203	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 edisi	1 edisi	1 edisi	6.075.939	5.523.581	5.523.581	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Rapat Penyusunan Profil Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 Pertemuan	1 Pertemuan	1 Pertemuan				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40.976.000	37.250.909	37.250.909	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sitem Informasi data Pengendalian Penduduk	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	27.262.200	24.783.818	24.783.818	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Sosialisasi Pendataan Keluarga Tahun 2021	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.445.750	22.223.409	22.223.409	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS/2021	30.9 lembar	30.9 lembar	30.9 lembar	110.551.498	100.501.362	95.371.362	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Penyajian data Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.453.999	17.685.454	17.685.454	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Penjilidan laporan umpan balik	372 Buku	372 Buku	372 Buku	61.476.155	55.887.414	59.685.414	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	25.709.189	23.371.990	23.371.990	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Orientasi petugas updating kegiatan pengendalian lapangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS unmet need	7.00 %	7.00 %	7.00 %	4.339.081.479	3.944.619.525	9.810.003.886	
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.20 %				
		Cakupan Angka Kelahiran TFR	1.99 angka	1.99 angka	1.99 angka				
		Peserta KB Aktif	77.04 %	77.04 %	77.04 %				
2.14.03.2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>					1.054.342.408	958.493.098	3.497.961.112	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	592.594.267	538.722.061	299.941.743	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Laporan dan Dokumentasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.974.750	14.522.500	14.522.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi			16 kecamatan			197.372.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan Dikumentasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	445.773.391	405.248.537	389.371.869	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK							2.596.753.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>					975.371.385	886.701.259	2.426.210.758	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan			100%			1.589.152.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	112.317.279	102.106.617	76.574.817	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	863.054.106	784.594.642	760.483.941	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>					2.040.088.633	1.854.626.029	2.902.436.914	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							1.681.333.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatny Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	100%	100%	387.257.200	352.052.000	256.802.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	57.519.000	52.290.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	100%	100%	360.853.742	328.048.856	211.127.719	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	100%	100%	144.584.185	131.440.168	87.867.440	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	608.679.720	553.345.200	494.951.950	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KBer	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	120.724.786	109.749.805	83.729.805	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100%	100%	100%	276.430.000	251.300.000	70.900.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	84.040.000	76.400.000	15.725.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>					269.279.053	244.799.139	983.395.102	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	269.279.053	244.799.139	191.715.102	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB							791.680.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	58.89 %	58.89 %	58.89 %	1.514.764.620	1.377.058.745	1.015.276.812	
2.14.04.2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>					1.328.986.430	1.208.169.481	893.394.003	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 2	16 2	16 2	160.525.140	145.931.945	139.796.954	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 2	16 2	16 2	337.161.099	306.510.090	215.515.090	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	16 2	16 2	16 2	129.393.836	117.630.760	86.011.183	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 2	16 2	16 2	375.280.214	341.163.831	261.544.467	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 2	16 2	16 2	326.626.141	296.932.855	190.526.309	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>					185.778.190	168.889.264	121.882.809	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 2	16 2	16 2	185.778.190	168.889.264	121.882.809	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN					92.558.566.219	246.564.488.000	243.315.499.788	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					92.558.566.219	246.564.488.000	243.315.499.788	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat disiplin Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	75.229.545.458	69.333.422.169	53.413.761.874	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.15.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					105.670.125	56.803.650	56.803.650	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	24.000.000	31.377.260	31.377.260	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	40.000.000	2.793.960	2.793.960	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	2.223.375	2.021.250	2.021.250	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	2.223.375	2.021.250	2.021.250	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	2.223.375	2.021.250	2.021.250	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	35.000.000	16.568.680	16.568.680	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.132.828.700	17.301.783.980	16.563.327.585	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan	12 bln	12 bln	12 bln	18.410.828.700	16.737.117.000	15.998.660.605	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib adminiatrasi	100%	100%	100%	650.000.000	538.200.000	538.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1 dok	1 dok	1 dok	24.000.000	8.863.690	8.863.690	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	1 dok	1 dok	1 dok	24.000.000	8.757.820	8.757.820	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan	1 dok	1 dok	1 dok	24.000.000	8.845.470	8.845.470	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					708.704.240	556.282.400	556.282.400	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jml pakaian dinas	300 stel	300 stel	300 stel	508.704.240	462.458.400	462.458.400	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	200.000.000	93.824.000	93.824.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.574.380.073	4.455.983.419	4.098.115.279	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronika	100%	100%	100%	190.000.000	126.049.220	77.541.080	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis perlengkapan kantor	100%	100%	100%	414.281.373	376.619.430	376.619.430	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan kebersihan	100%	100%	100%	85.000.000	184.392.820	184.392.820	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK	100%	100%	100%	190.000.000	182.736.880	182.736.880	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	100%	100%	100%	400.000.000	293.615.819	293.615.819	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan & Snack	100%	100%	100%	350.000.000	369.030.000	306.450.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	2.445.098.700	2.222.817.000	1.976.037.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Perjalanan dinas	100%	100%	100%				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	500.000.000	700.722.250	700.722.250	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000	318.581.110	318.581.110	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	500.000.000	318.581.110	318.581.110	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.815.000.000	5.272.726.410	5.259.775.050	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi surat menyurat yang terlaksana	100%	100%	100%	15.000.000	30.400.000	30.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik air, koran dan majalah	100%	100%	100%	1.300.000.000	1.019.860.410	1.006.909.050	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan kebersihan	100%	100%	100%	3.500.000.000	4.222.466.000	4.222.466.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Tenaga TPHL, Non PNS	100%	100%	100%				DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.659.277.320	7.067.911.200	6.610.876.800	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan	100%	100%	100%	5.229.820.970	4.754.382.700	4.297.348.300	DINAS PERHUBUNGAN
		pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor	100%	100%	100%	200.000.000	286.750.000	286.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor	100%	100%	100%	1.677.388.680	1.524.898.800	1.524.898.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jenis perlengkapan kantor	100%	100%	100%	552.067.670	501.879.700	501.879.700	DINAS PERHUBUNGAN
		Pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor	100%	100%	100%				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					37.733.685.000	34.303.350.000	19.950.000.000	
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jml pelayanan BRT	12 bln	12 bln	12 bln	37.733.685.000	34.303.350.000	19.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	61.73 %	61.73 %	61.73 %	17.329.020.761	177.231.065.831	189.901.737.914	
		lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebesar 61,73%; (2) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk dengan rasio	6.68 %	6.68 %	6.68 %				
		Jumlah trayek BRT	11.00 trayek	11.00 trayek	11.00 trayek				
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35.00 %	35.00 %	35.00 %				
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	84.00 %	84.00 %	84.00 %				
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					1.428.776.250	1.298.887.500	1.298.887.500	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok DED Pemasangan APIL	1 paket	1 paket	1 paket	1.428.776.250	1.298.887.500	1.298.887.500	DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Kajian Lokasi Rawan Kecelakaan LL	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Kajian Lokasi Rawan Kemacetan LL	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Kajian UP PKB	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Kajian UPTD BRT	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Kajian UPTD Terminal	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Studi Jaringan Lintas	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Studi Kecepatan	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Studi LHR	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Studi MRLL Kawasan Dedicated Lane BRT	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Dok. Studi Persimpangan Non APILL	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah studi Trem	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERHUBUNGAN
		Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APIL	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					4.542.438.022	7.240.903.390	7.240.903.390	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Back Up	10 set	10 set	10 set	3.782.438.022	3.438.580.020	3.438.580.020	DINAS PERHUBUNGAN
		Cermin tikung	12 unit	12 unit	12 unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml APILL	3 Simpang	3 Simpang	3 Simpang				DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jml controller ATCS	1 Unit	1 Unit	1 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml HT	25 unit	25 unit	25 unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml lampu flashing	5 Unit	5 Unit	5 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml perlengkapan Keamanan Jalan	5 Unit	5 Unit	5 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml RPPJ	8 Unit	8 Unit	8 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		NVR	2 Unit	2 Unit	2 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Server	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Smart TV	4 set	4 set	4 set				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml gasson	15 Unit	15 Unit	15 Unit	200.000.000	1.425.338.970	1.425.338.970	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kabel FO	379 m	379 m	379 m				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml marka jalan	600 m2	600 m2	600 m2				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml marka jalur sepeda	600 m2	600 m2	600 m2				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml median jalan portable	120 Unit	120 Unit	120 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml papan nama jalan	50 Unit	50 Unit	50 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml rambu	80 Unit	80 Unit	80 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml traffic cone	260 Unit	260 Unit	260 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml JPO	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1.719.825.000	1.719.825.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml pemeliharaan lampu flashing	15 Unit	15 Unit	15 Unit				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan TI	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jmlm pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	200 Unit	200 Unit	200 Unit	260.000.000	657.159.400	657.159.400	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml pemeliharaan marka	2000 m2	2000 m2	2000 m2				DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					25.000.000	360.906.400	360.906.400	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jml perawatan terminal cangkiran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	360.906.400	360.906.400	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml perawatan terminal gunungpati	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					385.000.000	1.496.926.000	1.471.426.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml dokumen	3 dok	3 dok	3 dok	305.000.000	1.134.700.000	1.120.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kegiatan sosialisasi / penyuluhan	4 keg	4 keg	4 keg				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	80.000.000	362.226.000	350.826.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					3.600.000.000	2.724.852.410	3.126.112.790	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml alat uji	2 Set	2 Set	2 Set	1.600.000.000	853.617.610	853.617.610	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu uji	40000 set	40000 set	40000 set	1.500.000.000	1.000.770.000	1.442.700.180	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	870.464.800	829.795.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					4.180.200.000	3.063.601.000	4.662.143.184	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml keg cfd	52 keg	52 keg	52 keg	900.000.000	81.601.000	1.702.643.184	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kegiatan pengamanan lebaran, natal dan thn baru	3 keg	3 keg	3 keg				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml keg PPKM			16 hari				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengamanan	45 keg	45 keg	45 keg	3.280.200.000	2.982.000.000	2.959.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kegiatan pengawasan	12 keg	12 keg	12 keg				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kegiatan pengendalian	12 keg	12 keg	12 keg				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					100.000.000	29.697.470		
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jml kegiatan	60 keg	60 keg	60 keg	100.000.000	29.697.470		DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					50.000.000	10.184.836	-	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jml laporan	2 paket	2 paket	2 paket	50.000.000	10.184.836		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.050.000.000	160.172.633.335	171.119.683.923	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml pelayanan BRT	12 bln	12 bln	12 bln	2.000.000.000	159.978.117.935	171.119.683.923	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jml mudik	1 keg	1 keg	1 keg	50.000.000	194.515.400		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					282.606.489	256.914.990	46.116.227	
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Dokumen Updating Data Angkutan Barang Khusus Dan Hewan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.606.489	256.914.990	46.116.227	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml penyuluhan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml Studi Perencanaan Fasilitasi Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					500.000.000	391.147.700	391.147.700	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen Penataan Dan Pengembangan Trayek	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	195.825.000	195.825.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml kajian	1 dok	1 dok	1 dok				DINAS PERHUBUNGAN
		Jml pembangunan fasilitas perhubungan	2 Paket	2 Paket	2 Paket				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml database	1 paket	1 paket	1 paket	300.000.000	195.322.700	195.322.700	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jml Dokumen Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					185.000.000	184.410.800	184.410.800	
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml dokumen Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	139.230.000	139.230.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml dokumen Kajian Angkutan Tidak Dalam Trayek	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml keg	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	45.180.800	45.180.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.2.20.2.21.01.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					69.146.174.714	59.743.506.640	57.631.082.962	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					67.108.260.560	57.907.194.324	55.748.301.290	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.049.712.175	11.490.332.156	12.093.517.073	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.744.758	10.047.818	7.404.098	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8.500.000	3.303.465	2.073.465	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	1.095.010	435.179	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.425.325	1.295.750	635.750	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.463.759	1.330.690	1.836.801	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.355.674	1.232.431	1.232.431	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	1.790.472	1.190.472	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.835.816.140	8.750.420.781	8.300.887.126	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.218.330.000	8.380.300.000	7.933.046.345	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang	100%	100%	100%	600.000.000	365.160.000	365.160.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	2.216.036	1.316.036	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	1.393.709	793.709	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.486.140	1.351.036	571.036	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>							199.876.231	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Video tentang Cukai Tembakau			3 buah			199.876.231	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					3.477.132.477	1.296.502.440	1.853.343.578	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	400.000.000	250.592.142	269.115.332	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	75.000.000	44.932.805	44.932.805	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	100%	100%	100%	200.000.000	78.904.213	78.904.213	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	100%	100%	50.000.000	17.999.210	17.999.210	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah snack dan jumlah makan	100%	100%	100%	750.000.000	143.990.000	143.990.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	1.500.000.000	303.600.000	227.476.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	502.132.477	456.484.070	1.070.926.018	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					600.000.000	189.991.740	189.991.740	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	100%	100%	100%	100.000.000	42.283.740	42.283.740	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	100%	100%	100%	500.000.000	147.708.000	147.708.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					600.000.000	476.833.877	357.410.400	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, telpon dan air yang tersedia	100%	100%	100%	600.000.000	476.833.877	357.410.400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.510.018.800	766.535.500	1.184.603.900	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	290.805.010	290.805.010	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional serta pemeliharaan genset	12 bulan	12 bulan	12 bulan	800.000.000	224.214.990	188.770.990	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur yang terlaksana	100%	100%	100%	50.000.000	9.944.000	9.944.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	10.018.800	9.108.000	9.108.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	600.000.000	232.463.500	685.975.900	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.988.391.345	4.534.901.222	5.314.991.440	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4.988.391.345	4.534.901.222	5.314.991.440	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan, Langganan CC 112, Langganan Aplikasi Lapor Hendi	100%	100%	100%	1.425.448.701	1.295.862.455	1.742.778.673	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Publikasi kegiatan perangkat daerah, Pengelolaan Media Komunikasi	100%	100%	100%	1.800.364.404	1.636.694.913	2.031.694.913	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Penyelenggaraan PPID, tersusunnya LLID Kota Semarang, pelaksanaan uji konsekuensi	100%	100%	100%	782.695.460	711.541.327	681.541.327	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kajian Potensi Pendapatan Menara Telekomunikasi	100%	100%	100%	222.012.714	201.829.740	190.995.740	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pelatihan Saka Milenial	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Sosialisasi Menara telekomunikasi	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Fasilitasi Pengembangan SDM TIK dan Pemberdayaan Komunitas TIK	100%	100%	100%	186.202.165	169.274.695	148.282.695	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Fasilitasi kegiatan komunitas, Kajian Co Working Space di kecamatan	100%	100%	100%	571.667.901	519.698.092	519.698.092	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Bandwidth domestik dan internasional	100.00 %	100.00 %	100.00 %	46.070.157.040	41.881.960.946	38.339.792.777	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	0.00 %	0.00 %	0.00 %				
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					30.150.161.999	27.409.238.181	20.045.363.158	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	bandwith domestik dan internasional, free wifi, dan internet CCTV RT	100%	100%	100%	30.150.161.999	27.409.238.181	20.045.363.158	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					15.919.995.041	14.472.722.765	18.294.429.619	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	server data center dan FO Kota Lama	100%	100%	100%	8.884.019.075	8.076.380.977	10.779.906.221	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya media display dan alat studio	100%	100%	100%	963.729.063	876.117.330	1.366.337.330	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi	25 buah	25 buah	25 buah	1.328.262.100	1.207.511.000	1.507.511.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dokumen Smart City	100%	100%	100%	3.082.143.000	2.801.948.182	2.807.948.182	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	pemeliharaan hardware dan software, kelengkapan data center	100%	100%	100%	1.520.438.603	1.382.216.912	1.704.178.522	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen SPBE	100%	100%	100%	141.403.200	128.548.364	128.548.364	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.537.914.154	1.356.330.644	1.402.800.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.537.914.154	1.356.330.644	1.402.800.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					1.537.914.154	1.356.330.644	1.402.800.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Sektoral yang Berkualitas	100%	100%	100%	375.000.000	299.135.960	299.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya SDM yang kompeten dalam Pengelolaan Data Statistik & Data Lainnya di Setiap Instansi	100%	100%	100%	76.999.676	69.999.705	72.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%	106.308.114	96.643.740	97.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terintegrasinya Data Sektoral & Lainnya antar Instansi dengan Semarang Satu Data	100%	100%	100%	136.303.173	123.911.975	153.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Sarana & Prasarana Kemudahan Pelayanan Akses Data	100%	100%	100%	733.601.835	666.910.759	680.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rekomendasi Statistik Sektoral yang Dikeluarkan	100%	100%	100%	109.701.356	99.728.505	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					500.000.000	479.981.672	479.981.672	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	500.000.000	479.981.672	479.981.672	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					500.000.000	479.981.672	479.981.672	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lisensi Keamanan informasi sistem pemerintahan	100%	100%	100%	500.000.000	479.981.672	479.981.672	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.17.0.00.0.00.01.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					26.077.387.600	23.706.716.000	21.742.870.123	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					26.077.387.600	23.706.716.000	21.742.870.123	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.424.249.110	9.476.590.100	8.716.673.017	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.475.620	8.614.200	8.614.200	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.490.290	2.263.900	2.263.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Renstra OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000	1.800.000	1.800.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.947.000	1.770.000	1.770.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.111.770	1.010.700	1.010.700	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.159.070	1.053.700	1.053.700	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP/LKJIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	787.490	715.900	715.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.724.003.310	7.930.912.100	7.576.762.223	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UM	100%	100%	100%	8.447.102.400	7.679.184.000	7.325.034.123	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara dan Pengurus BarangAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	275.418.000	250.380.000	250.380.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	739.200	672.000	672.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	743.710	676.100	676.100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					959.004.970	871.822.700	622.094.794	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	100%	208.483.000	189.530.000	181.859.091	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor	100%	100%	100%	30.010.090	27.281.900	27.281.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%	102.882.560	93.529.600	73.613.905	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	100%	100%	100%	30.869.300	28.063.000	18.631.698	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	100%	100%	100%	6.336.000	5.760.000	5.760.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat dinas dan tamu	100%	100%	100%	75.487.500	68.625.000	24.750.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	212.795.000	193.450.000	35.729.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaksanaan penugasan dinas ke luar Daerah	100%	100%	100%				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan sarana prasarana pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	292.141.520	265.583.200	254.469.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.610.280	50.554.800	50.554.800	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan kantor	100%	100%	100%	55.610.280	50.554.800	50.554.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.192.000	114.720.000	114.720.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	100%	100%	100%	126.192.000	114.720.000	114.720.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					549.962.930	499.966.300	343.927.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	472.059.830	429.145.300	289.400.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	77.903.100	70.821.000	54.527.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5.00 %	5.00 %	5.00 %	215.221.050	195.655.500	189.916.820	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					82.669.290	75.153.900	74.374.560	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang menerima fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam	90 Koperasi	90 Koperasi	90 Koperasi	82.669.290	75.153.900	74.374.560	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					132.551.760	120.501.600	115.542.260	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang menerima fasilitasi pemenuhan Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	3 Koperasi	3 Koperasi	3 Koperasi	132.551.760	120.501.600	115.542.260	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	55.00 %	55.00 %	55.00 %	290.776.640	264.342.400	256.267.400	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					290.776.640	264.342.400	256.267.400	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan manajemen pengawasan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	210.254.990	191.140.900	185.915.900	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		peningkatan pengendalian koperasi	400 koperasi	400 koperasi	400 koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan kepatuhan koperasi	110 koperasi	110 koperasi	110 koperasi	80.521.650	73.201.500	70.351.500	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	30.00 %	30.00 %	30.00 %	584.010.900	530.919.000	508.309.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					584.010.900	530.919.000	508.309.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	penilaian kesehatan koperasi	600 koperasi	600 koperasi	600 koperasi	584.010.900	530.919.000	508.309.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 %	10.00 %	10.00 %	571.542.840	519.584.400	852.277.846	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2.00 %	2.00 %	2.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.17.05.2.01	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					571.542.840	519.584.400	852.277.846	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang mendapat pelatihan perkoperasian	240 koperasi	240 koperasi	200 koperasi	571.542.840	519.584.400	852.277.846	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		jumlah koperasi yang mendapat pelatihan perkoperasian (DAK)			240 Koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		jumlah masyarakat yang mendapat pemahaman perkoperasian	640 orang	640 orang	480 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Peningkatan kapasitas kewirausahaan (DAK)			60 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25.00 %	25.00 %	25.00 %	2.726.180.820	2.478.346.200	1.713.421.640	
2.17.06.2.01	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					2.726.180.820	2.478.346.200	1.713.421.640	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	fasilitasi informasi koperasi	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	2.726.180.820	2.478.346.200	1.713.421.640	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		fasilitasi kelembagaan koperasi	700 koperasi	700 koperasi	680 koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		pembubaran koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	152 koperasi	152 koperasi	152 koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		pengembangan usaha koperasi	274 koperasi	274 koperasi	232 koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		rapat koordinasi notaris	60 orang	60 orang	30 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60.00 %	60.00 %	60.00 %	6.166.223.360	5.605.657.600	5.605.657.600	
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	10.00 %	10.00 %	10.00 %				
		Prosentase Akses Pembiayaan	40.00 %	40.00 %	40.00 %				
		Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50.00 %	50.00 %	50.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					6.166.223.360	5.605.657.600	5.605.657.600	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	750 orang	750 orang	750 orang	2.457.573.030	2.234.157.300	2.234.157.300	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	250 orang	250 orang	250 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	100 orang	100 orang	100 orang	66.774.400	60.704.000	60.704.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi kemudahan perijinan usahanya	180 orang	180 orang	180 orang	312.081.000	283.710.000	269.660.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	180 orang	180 orang	180 orang	380.259.330	345.690.300	345.690.300	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	700 orang	700 orang	700 orang	2.949.535.600	2.681.396.000	2.695.446.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	580 orang	580 orang	580 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan branding/Packaging	200 orang	200 orang	200 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Akses Pemasaran	23.00 %	23.00 %	23.00 %	5.099.182.880	4.635.620.800	3.900.346.800	
		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 %	20.00 %	20.00 %				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					5.099.182.880	4.635.620.800	3.900.346.800	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pelaku Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi perluasan akses pasar	100 orang	100 orang	100 orang	5.099.182.880	4.635.620.800	3.900.346.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaku Usaha Mikro yang mendapat fasilitasi promosi produk	1140 orang	1140 orang	1140 orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7.313.504.574	15.911.655.000	15.543.074.645	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.313.504.574	15.911.655.000	15.543.074.645	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.792.238.574	12.469.141.690	12.220.917.269	
		Tingkat disiplin aparatur (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					101.800.574	29.001.099	25.897.866	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	15.000.096	13.896.863	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1.392.550	1.392.550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1.106.445	1.106.445	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	750.646	750.646	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	750.645	750.645	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.000.195	2.000.195	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.574	8.000.522	6.000.522	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Tersusunnya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					294.378.000	10.117.799.085	10.180.856.730	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya gaji ,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	9.921.792.000	9.974.259.645	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya honorarium PA,KPA,PPK,PPTK,Bendahara dan Pembantu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239.378.000	190.070.000	200.660.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1.936.695	1.936.695	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.000.195	2.000.195	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.000.195	2.000.195	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					343.988.000	32.400.000	32.400.000	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhiya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 stel	100 stel	100 stel	343.988.000	32.400.000	32.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.672.110.000	1.730.544.962	1.414.766.129	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	70.472.000	461.757.391	274.263.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis/logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	400.000.000	59.918.290	59.918.290	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	442.119.000	115.634.700	90.571.973	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	140.000.000	161.598.545	161.598.545	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah ASN dan Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	469.519.000	472.636.000	369.413.385	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	150.000.000	459.000.036	459.000.036	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					101.962.000	81.325.000	88.925.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60.002.000	38.400.000	38.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Langganan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya administrasi keuangan dan Pembayaran honor TPHL	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41.960.000	42.925.000	50.525.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					278.000.000	478.071.544	478.071.544	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	220.000.000	291.560.000	291.560.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	112.540.000	112.540.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeleur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	27.315.544	27.315.544	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38.000.000	46.656.000	46.656.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang mendapat fasilitasi investasi	3672.00 penanam modal	3672.00 penanam modal	3672.00 penanam modal	1.463.000.000	972.018.704	871.806.250	
2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>					913.000.000	735.458.790	635.246.336	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya data dan analisa perizinan dalam rangka penataan kebijakan pelayanan penanaman modal dan PTSP	100%	100%	100%	693.000.000	353.011.788	362.611.788	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	220.000.000	382.447.002	272.634.548	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>					550.000.000	236.559.914	236.559.914	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	99.049.791	99.049.791	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Potensi Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	137.510.123	137.510.123	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	344.00 investor	344.00 investor	344.00 investor	1.552.724.000	876.662.141	470.355.141	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.552.724.000	876.662.141	470.355.141	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.552.724.000	876.662.141	470.355.141	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	98.70 %	98.70 %	98.70 %	450.000.000	872.951.958	901.945.076	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					450.000.000	872.951.958	901.945.076	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%	100%	100%	450.000.000	872.951.958	901.945.076	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1.00 nilai	1.00 nilai	1.00 nilai	205.500.000	143.558.726	499.766.728	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					205.500.000	143.558.726	499.766.728	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal							50.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal							227.262.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersusunnya laporan pengendalian kerjasama investasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	205.500.000	143.558.726	221.684.728	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	94.00 %	94.00 %	94.00 %	850.042.000	577.321.781	578.284.181	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					850.042.000	577.321.781	578.284.181	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	850.042.000	577.321.781	578.284.181	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					45.166.249.703	41.060.227.000	40.189.887.235	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					45.166.249.703	41.060.227.000	40.189.887.235	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.912.672.989	14.466.066.352	13.699.585.911	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.585.743	182.350.675	148.867.811	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	191.959.433	174.508.575	141.025.711	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.100.000	1.000.000	1.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		penyusunan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.085.700	987.000	987.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusunan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.000.000	1.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.000.000	1.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.240.610	3.855.100	3.855.100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.327.273.200	11.206.612.000	10.826.827.235	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11.962.711.200	10.875.192.000	10.495.407.235	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	358.512.000	325.920.000	325.920.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.210.000	1.100.000	1.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.210.000	1.100.000	1.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.210.000	1.100.000	1.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	pelaporan semesteran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.210.000	1.100.000	1.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.210.000	1.100.000	1.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.686.841.522	1.533.492.292	1.241.927.553	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.576.346	15.069.405	15.069.405	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 persen	100 persen	100 persen	92.171.013	83.791.830	83.791.830	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	100 persen	100 persen	100 persen	55.004.391	50.003.992	50.003.992	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	100 persen	100 persen	100 persen	49.617.838	45.107.125	45.107.125	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47.113.506	42.830.460	42.830.460	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.910.000	8.100.000	8.100.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	89.080.200	80.982.000	61.728.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah sppd luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.125.542.000	1.023.220.000	750.909.261	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	memenuhan dukungan pelaksana spbe	100 persen	100 persen	100 persen	202.826.228	184.387.480	184.387.480	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					162.246.975	147.497.250	147.497.250	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan meubeler	100 persen	100 persen	100 persen	51.306.970	46.642.700	46.642.700	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	logistik kantor	100 persen	100 persen	100 persen	110.940.005	100.854.550	100.854.550	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					833.453.099	757.684.635	685.184.635	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10.664.000	9.694.545	9.694.545	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BELANJA LISTRIK DAN AIR	12 bulan	12 bulan	12 bulan	291.154.160	264.685.600	164.685.600	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan rutin peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	70.906.000	64.460.000	64.460.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	460.728.935	418.844.490	446.344.490	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					565.585.900	514.169.000	479.289.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	448.932.000	408.120.000	373.240.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	100 persen	100 persen	100 persen	116.653.900	106.049.000	106.049.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>					136.686.550	124.260.500	169.992.427	
2.19.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	monitoring dah evaluasi kegiatan	100 persen	100 persen	100 persen	80.245.825	72.950.750	72.950.750	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	monitoring dah evaluasi kegiatan	100 persen	100 persen	100 persen	56.440.725	51.309.750	97.041.677	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	62.00 organisasi	62.00 organisasi	62.00 organisasi	4.536.044.891	4.123.677.174	3.462.816.949	
		Persentase fasilitasi kegiatan wirausaha muda	85.00 %	85.00 %	85.00 %				
		Persentase organisasi Kepemudaan aktif	25.00 %	25.00 %	25.00 %				
2.19.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>					1.149.788.918	1.045.262.653	628.080.740	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100 persen	100 persen	100 persen	369.052.016	335.501.833	182.384.354	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	penghargaan pemuda dan organisasi kepemudaan	100 persen	100 persen	100 persen	208.450.243	189.500.221	95.968.971	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	100 persen	100 persen	100 persen				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	seleksi dan pelatihan petugas bendera	100 persen	100 persen	100 persen	572.286.655	520.260.599	349.727.415	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					3.386.255.973	3.078.414.521	2.834.736.209	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	100 persen	100 persen	100 persen	2.310.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	100 persen	100 persen	100 persen	1.076.255.973	978.414.521	734.736.209	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olahraga	100.00 %	100.00 %	100.00 %	24.717.531.823	22.470.483.474	23.027.484.375	
		Jumlah Atlet prestasi	550.00 %	550.00 %	550.00 %				
		Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	39.00 buah	39.00 buah	39.00 buah				
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.278.531.276	3.889.573.887	3.997.369.037		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	operasional UPTD gelanggang Olahraga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.278.531.276	3.889.573.887	3.997.369.037	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				18.577.472.291	16.888.611.174	17.448.136.178		
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	18.150.558.210	16.500.507.464	16.457.267.443	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	200.027.982	181.843.620	160.563.947	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	226.886.099	206.260.090	830.304.788	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				923.096.445	839.178.586	904.268.386		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	923.096.445	839.178.586	904.268.386	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				356.151.139	323.773.762	157.984.709		
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	standarisasi organisasi keolahragaan	100 persen	100 persen	100 persen	59.905.855	54.459.868	18.215.868	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	pengembangan organisasi keolahragaan	100 persen	100 persen	100 persen	84.434.744	76.758.858	33.287.858	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	kerja sama keolahragaan dengan instansi terkait	100 persen	100 persen	100 persen	211.810.540	192.555.036	106.480.983	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				582.280.672	529.346.065	519.726.065		
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	98.276.640	89.342.400	89.342.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	294.852.261	268.047.510	271.247.510	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	36.566.294	33.242.085	33.242.085	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	KEJUARAAN OLAHRAGA MULY EVENT	100 persen	100 persen	100 persen	152.585.477	138.714.070	125.894.070	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.22.3.26.0.00.01.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				100.268.186.388	80.419.236.296	65.512.632.974		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.561.085.498	27.969.491.935	27.441.343.522		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.154.972.786	20.351.713.097	19.351.359.229	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disbudpar)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.236.685	2.650.950	2.650.950	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	803.645	730.590	730.590	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Dokumen Renstra Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	328.405	298.550	298.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	R DPPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500.000	322.550	322.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500.000	295.050	295.050	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	354.805	322.550	322.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	749.826	681.660	681.660	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		LKPJ Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.007.054.100	13.642.902.650	13.290.056.176	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	14.500.630.100	13.182.391.000	12.823.144.526	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemenuhan TPP ASN	100%	100%	100%				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium KPA, PPK, PPTK dan bendahara	100%	100%	100%	505.824.000	459.840.000	466.240.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Honorarium Non ASN	100%	100%	100%				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	298.550	298.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	200.550	200.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Disbudpar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	172.550	172.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							330.000.000	
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai lewat wayang orang/ kethoprak			3 Event			330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.286.838.217	2.669.749.879	3.249.432.234	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	260.000.000	193.223.129	72.172.529	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	20.000.000	75.842.776	257.836.950	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100%	100%	100%	200.000.000	156.329.818	156.329.818	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	50.000.000	46.842.686	46.842.686	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.22.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pemenuhan Konsumsi Rapat, Tamu dan Peserta Kegiatan	100%	100%	100%	1.500.000.000	1.332.215.000	1.198.214.263	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%	800.000.000	449.989.000	703.256.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	456.838.217	415.307.470	814.779.988	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					664.302.584	603.911.440	619.820.531	
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Operasional Dinas	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	664.302.584	603.911.440	619.820.531	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					600.000.000	1.623.270.504	931.605.738	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Langganan Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	400.000.000	862.796.880	454.608.291	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	200.000.000	760.473.624	476.997.447	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					593.541.200	1.809.227.674	927.793.600	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Biaya Service, Penggantian Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	375.000.000	1.034.150.860	321.948.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja	100%	100%	100%	1.900.000	2.250.000	2.250.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	100%	50.000.000	621.334.814	452.103.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	166.641.200	151.492.000	151.492.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya	80.00 %	80.00 %	80.00 %	5.544.612.712	4.448.931.427	4.939.331.427	
		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	80.00 %	80.00 %	80.00 %				
		Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	90.00 %	90.00 %	90.00 %				
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					753.863.691	685.330.628	691.730.628	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 Event	2 Event	2 Event	753.863.691	685.330.628	691.730.628	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Drama Tari Tradisional	1 Event	1 Event	1 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Drama Tradisional	1 Event	1 Event	1 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Dalang	1 Event	1 Event	1 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 Event	1 Event	1 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 Event	5 Event	5 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak	1 Event	1 Event	1 Event				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelarasan Gamelan	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					3.590.749.021	3.264.317.292	3.767.517.292	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Apresiasi Insan Semarang Hebat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.590.749.021	3.264.317.292	3.767.517.292	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	24 Kegiatan	24 Kegiatan	45 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Goa Kreo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival HAM			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Keroncong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	10 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Semarang Jelajah Musik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Semarang Night Carnival	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.200.000.000	499.283.507	480.083.507	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.200.000.000	499.283.507	480.083.507	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Gebyuran Bustaman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	10.00 %	10.00 %	10.00 %	4.806.000.000	2.912.596.373	2.899.401.828	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.806.000.000	2.912.596.373	2.899.401.828	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi Kelompok Seni	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	3.740.500.000	2.214.239.318	2.217.439.318	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kreativitas Seni Film			2 kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Kreativitas Dalam Seni			3 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Seni	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Parade Seni	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Seni	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Workshop Seni			16 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.065.500.000	698.357.055	681.962.510	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	65.33 %	65.33 %	65.33 %	1.055.500.000	256.251.038	251.251.038	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					1.055.500.000	256.251.038	251.251.038	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Up Date Data)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.055.500.000	256.251.038	251.251.038	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Sejarah Kawasan Depok	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Sejarah Kawasan Kampung Kauman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Gambar 3D Dengan Media Wallpaper	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Story Telling Kota Semarang Lama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					68.707.100.890	52.449.744.361	38.071.289.452	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	1.60 hari 8633.00 orang	1.60 hari 8633.00 orang	1.60 hari 8633.00 orang	66.238.590.001	50.635.219.237	35.565.378.909	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					22.133.290.001	20.121.172.728	20.088.366.364	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan Wisata Religi Depok	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.133.290.001	20.121.172.728	20.088.366.364	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					42.751.400.000	30.414.518.911	14.652.154.007	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang di Bangun di UPTD dan Obyek Wisata Kota Semarang	8 Obyek	8 Obyek	8 Obyek	42.751.400.000	30.414.518.911	14.652.154.007	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					-	-	725.330.940	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Kebersihan, Keamanan, dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata			40 orang			123.225.428	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Menara Pandang			1 Paket			602.105.512	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pedestrian			1 Paket				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Toilet beserta Jaringan			1 Paket				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kualitasnya			200 orang				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					1.353.900.000	99.527.598	99.527.598	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	SDM Pariwisata yang meningkat kualitasnya	300 orang	300 orang	300 orang	1.353.900.000	99.527.598	99.527.598	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1.35 %	1.35 %	1.35 %	1.682.109.971	1.529.190.883	1.492.523.730	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1.682.109.971	1.529.190.883	1.492.523.730	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembuatan Calendar of Event	360 Buku	360 Buku	350 Buku	561.928.775	510.844.341	504.444.341	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5000 Lembar	5000 Lembar	6000 Lembar				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pembuatan Souvenir	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Media Sosial	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan dan Pengelolaan Website	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Promosi Media Cetak/ Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pameran Pariwisata	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	594.072.538	540.065.944	509.798.791	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemilihan Denok Kenang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	526.108.658	478.280.598	478.280.598	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Denok Kenang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kerjasama Pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Parade Duta Seni	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100.00 %	100.00 %	100.00 %	786.400.918	285.334.241	1.013.386.813	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					786.400.918	285.334.241	1.013.386.813	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bimbingan Teknis Pelaku Wisata	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	535.929.000	57.632.497	536.034.213	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DAK Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir, Fotografi.			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DAK Pelatihan Pemandu Outbound/Fasilitator Experiential Learning (Fasel)			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DAK Pelatihan Pemandu Wisata			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DAK Pelatihan Pemandu Wisata Budaya			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	DAK Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata			1 Kegiatan	250.471.918	227.701.744	477.352.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DAK Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/ Pondok Wisata			1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Desa Wisata Jawa Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Pokdarwis Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembinaan SDM Pokdarwis	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					11.179.738.649	11.250.229.000	11.306.946.635	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.438.692.439	9.828.200.276	10.134.069.927	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.384.214.439	8.424.092.840	8.818.818.704	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.971.239	54.895.709	54.895.709	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Forum Konsultasi Publik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.500.000	47.517.917	47.517.917	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	RKA dan DPA OPD tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	1.159.928	1.159.928	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya penyusunan laporan capaian kinerja OPD bulanan dan triwulanan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	1.244.010	1.244.010	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya penyusunan LKJP dan LKJ IP OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.471.239	4.973.854	4.973.854	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.508.343.200	6.864.579.874	6.735.241.009	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	7.240.543.200	6.582.312.000	6.452.973.135	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terbayarnya TPP ASN	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor BP,BPP, PPTK, dll	100%	100%	100%	260.000.000	280.360.000	280.360.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya CALK dan LPPD OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	916.628	916.628	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.800.000	991.246	991.246	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					354.900.000	351.572.057	177.458.394	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan atau komponen listrik dan lampu - lampu yang dibutuhkan tersedia	100%	100%	100%	11.000.000	8.134.182	27.277.271	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan yang dibutuhkan selama 1 th	100%	100%	100%	11.000.000	15.124.381	15.124.381	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan selama 1 tahun	100%	100%	100%	120.000.000	42.317.132	42.317.132	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Tersedianya masker untuk pencegahan Covid-19	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang cetakan yang dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang selama 1 tahun tersedia	100%	100%	100%	47.900.000	19.700.362	19.799.610	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Majalah dan surat kabar yang dibutuhkan tersedia	100%	100%	100%	10.000.000	4.920.000	4.920.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat-rapat	100%	100%	100%	120.000.000	23.460.000	23.460.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	100%	100%	100%	35.000.000	237.916.000	44.560.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000	89.921.054	79.029.818	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana / perlengkapan yang dibutuhkan kantor tersedia	100%	100%	100%	250.000.000	89.921.054	79.029.818	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.000.000	205.456.146	296.525.774	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet	100%	100%	100%	281.000.000	115.019.782	199.689.410	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor di gd. Arsip Banyumanik dengan adanya jasa cleaning service	100%	100%	100%	106.000.000	90.436.364	96.836.364	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					865.000.000	857.668.000	1.475.668.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaganya kendaraan dinas	100%	100%	100%	685.000.000	548.690.000	548.690.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya pemeliharaan mesin dan alat-alat kantor	100%	100%	100%	70.000.000	285.326.000	301.526.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terawat dan terhindarnya peralatan kerja dari kerusakan	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terpeliharanya arsip, bahan perpustakaan dan perlengkapan kantor dari kerusakan	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung perpustakaan / gedung arsip dari kerusakan	100%	100%	100%	110.000.000	23.652.000	625.452.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.00 rasio	1.00 rasio	1.054.478.000	1.404.107.436	1.315.251.223	
		Jumlah Rumah Pintar	193.00 unit	193.00 unit	193.00 unit				
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					550.343.000	624.557.860	552.387.560	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya minat baca masyarakat	100%	100%	100%	127.183.000	115.620.909	187.156.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terpenuhinya kebutuhan parabol untuk layanan perpustakaan			100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan dan rumah pintar	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	207.997.000	99.069.589	67.149.589	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehab Rumah Pintar	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150.893.000	20.629.600		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	terpenuhinya sarana prasarana berupa buku dan rak untuk Rumpin/Masyarakat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	204.855.699	204.855.699	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000 buku	6000 buku	6000 buku				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	terpenuhinya media informasi kegiatan perpustakaan arsip dan rumpin dalam 1 tahun	100 edisi	100 edisi	100 edisi	24.270.000	152.604.790	86.108.499	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000 buku	6000 buku	6000 buku				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data dan informasi melalui kunjungan kerja perpustakaan	100%	100%	100%	20.000.000	31.777.273	7.117.273	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					504.135.000	779.549.576	762.863.663	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Perpusling	350 Lokasi	350 Lokasi	350 Lokasi	161.000.000	656.112.093	638.620.181	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah buku yang ditukarkan	4300 buku	4300 buku	4300 buku	48.135.000	51.840.946	52.646.945	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pameran buku	2 Kali	2 Kali	2 Kali	295.000.000	71.596.537	71.596.537	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					741.046.210	1.422.028.724	1.172.876.708	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	157.088.955	142.808.141	167.153.251	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.088.955	142.808.141	167.153.251	
2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	157.088.955	142.808.141	167.153.251	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	438.664.255	986.976.862	814.744.604	
		Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	500.00 judul	500.00 judul	500.00 judul				
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					278.425.500	579.425.700	450.615.090	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Adanya pembuatan film/arsip sejarah yang ada di Kota Semarang	2 Paket	2 Paket	2 Paket	167.425.500	152.205.000	143.900.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Tersusunnya Perda Kearsipan	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Arsip yang disusutkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	19000 dokumen	19000 dokumen	19000 dokumen	111.000.000	427.220.700	306.715.090	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	283.783.916	246.014.916	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip	10000 dokumen	10000 dokumen	10000 dokumen	20.000.000	283.783.916	246.014.916	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					140.238.755	123.767.246	118.114.598	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Adanya Pembinaan Arsip Keliling Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kearsipan yang lebih bagi OPD	10000 Berkas	10000 Berkas	10000 Berkas	69.505.755	63.187.050	63.187.050	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Informasi / Data yang Up to Date / Terbaru	100%	100%	100%				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Kegiatan Pameran arsip 2 kali dalam setahun	2 Paket	2 Paket	2 Paket	70.733.000	60.580.196	54.927.548	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Adanya Kegiatan Sosialisasi Tentang Arsip	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	145.293.000	292.243.721	190.978.853	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	persentase jumlah arsip musnah	50.00 %	50.00 %	50.00 %	90.293.000	52.634.345	36.221.345	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Adanya penarikan/ pendataan, penataan dan pengolahan arsip-arsip in aktif unit kerja di lingkungan Pemkot Semarang	10000 dokumen	10000 dokumen	10000 dokumen	90.293.000	52.634.345	36.221.345	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					55.000.000	239.609.376	154.757.508	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Sistem Kearsipan Yang Lebih Baik/Digitalisasi Arsip	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55.000.000	239.609.376	154.757.508	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN					14.042.346.456	12.013.953.000	12.348.585.774	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.042.346.456	12.013.953.000	12.348.585.774	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.569.587.952	7.382.945.805	6.553.672.181	
		Peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (dinas perikanan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					44.372.006	34.911.220	34.911.220	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	buku RENJA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	14.999.880	14.999.880	DINAS PERIKANAN
		buku RENSTRA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	buku IKU, IKK, dan penetapan kinerja	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3.949.775	3.949.775	DINAS PERIKANAN
		dokumen RKA murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1.987.275	1.987.275	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.186.003	1.987.275	1.987.275	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.186.003	1.987.275	1.987.275	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	buku LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	9.999.740	9.999.740	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.597.011.000	6.020.009.770	5.784.258.646	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji pokok PNS/uang representasi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6.365.568.000	5.786.880.000	5.599.606.376	DINAS PERIKANAN
		pembulatan gaji	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tunjangan beras	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tunjangan fungsional umum	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tunjangan jabatan	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tunjangan keluarga	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
		tunjangan PPh/tunjangan khusus	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.443.000	183.130.000	182.710.000	DINAS PERIKANAN
		honor KPA, PPTK, BPP, pelaku administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				DINAS PERIKANAN
		pembayaran honor non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	buku CALK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	29.999.790	1.942.270	DINAS PERIKANAN
		buku LKPJ walikota OPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERIKANAN
		perikanan dalam angka	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	buku laporan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	9.999.990		DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	buku laporan prognosis	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	9.999.990		DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.999.747	19.999.540	3.876.520	
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.999.747	9.999.770	3.876.520	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000	9.999.770		DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.065.786.895	502.810.940	227.735.992	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	alat kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	86.888.604	78.989.640	60.908.000	DINAS PERIKANAN
		sewa akuarium	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.537.541	28.670.492	28.670.492	DINAS PERIKANAN
		alat tulis kantor	100%	100%	100%				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	fotokopi dan cetak	100%	100%	100%	45.000.000	45.472.308	30.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jamuan makan minum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	430.000.000	43.500.000	20.925.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas	100%	100%	100%	400.000.000	240.396.000	21.450.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laptop	2 buah	2 buah	2 buah	72.360.750	65.782.500	65.782.500	DINAS PERIKANAN
		LCD	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERIKANAN
		printer	4 buah	4 buah	4 buah				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000	85.743.150	65.743.150	
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kursi putar pegawai	10 buah	10 buah	10 buah	50.000.000	85.743.150	65.743.150	DINAS PERIKANAN
		kursi rapat	27 buah	27 buah	27 buah				DINAS PERIKANAN
		laptop	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERIKANAN
		LCD	3 buah	3 buah	3 buah				DINAS PERIKANAN
		printer	5 buah	5 buah	5 buah				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.076.904	212.797.185	212.797.185	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	langganan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	144.646.904	131.497.185	131.497.185	DINAS PERIKANAN
		langganan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERIKANAN
		langganan telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERIKANAN
		langgan surat kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	89.430.000	81.300.000	81.300.000	DINAS PERIKANAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					557.341.400	506.674.000	224.349.468	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM dan oli kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	463.260.600	421.146.000	170.047.468	DINAS PERIKANAN
		servis kendaraan dinas	29 unit	29 unit	29 unit				DINAS PERIKANAN
		STNK kendaraan dinas	29 unit	29 unit	29 unit				DINAS PERIKANAN
		suku cadang kendaraan dinas	29 unit	29 unit	29 unit				DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	94.080.800	85.528.000	54.302.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	2801.12 ton	2801.12 ton	2801.12 ton	1.173.462.926	1.066.784.478	1.708.784.478	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					312.076.133	283.705.575	662.454.005	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Belanja Bibit Ikan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	312.076.133	283.705.575	662.454.005	DINAS PERIKANAN
		Pendampingan Konversi BBM ke BGG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pengadaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERIKANAN
		Validasi Data Nelayan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					243.490.038	221.354.580	239.020.810	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Forum KUB Nelayan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	243.490.038	221.354.580	239.020.810	DINAS PERIKANAN
		Magang Nelayan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi Nelayan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					617.896.755	561.724.323	807.309.663	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DED TPI sementara Tambaklorok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	617.896.755	561.724.323	807.309.663	DINAS PERIKANAN
		FS TPI sementara Tambaklorok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PERIKANAN
		Money TPI	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pembangunan Fisik TPI sementara Tambaklorok	1 Unit	1 Unit	1 Unit				DINAS PERIKANAN
		Pembinaan Nelayan dan bakul TPI	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pengawasan TPI sementara Tambaklorok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				DINAS PERIKANAN
		Sarpras Pengelolaan TPI	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi TPI	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3738.00 ton	3738.00 ton	3738.00 ton	2.297.160.492	1.938.194.001	2.460.100.399	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					500.000.000	304.411.736	304.411.736	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Panen Raya Ikan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	500.000.000	304.411.736	304.411.736	DINAS PERIKANAN
		Pelatihan aklimatisasi bandeng di tambak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pelatihan aklimatisasi udang vanamei di tambak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pelatihan aquaponik	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERIKANAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pelatihan budidaya ikan dalam kolam terpal	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pelatihan budidaya ikan dan sayuran di dalam ember	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.797.160.492	1.633.782.265	2.155.688.663	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	induk ikan berkualitas	6 jenis	6 jenis	6 jenis	758.152.923	689.229.930	1.211.136.328	DINAS PERIKANAN
		lomba mancing	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERIKANAN
		obat ikan	3 jenis	3 jenis	3 jenis				DINAS PERIKANAN
		pakan ikan	4200 kg	4200 kg	4200 kg				DINAS PERIKANAN
		pelatihan budidaya UPB air tawar	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS PERIKANAN
		pembinaan UPB	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Gudang pakan dan toilet Minapolitan di Kecamatan Gunungpati	1 paket	1 paket	1 paket	1.039.007.569	944.552.335	944.552.335	DINAS PERIKANAN
		Jalan, Kolam, dan Saluran Minapolitan di Kecamatan Gunungpati	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERIKANAN
		Rehab bangunan panti benih/bangsai hatchery	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERIKANAN
		Rehab saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar)	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan konsumsi ikan perkapita	33.06 kg/kapita/	33.06 kg/kapita/	33.06 kg/kapita/	203.018.241	184.562.037	184.562.037	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					203.018.241	184.562.037	184.562.037	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan POKMASWAS	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	203.018.241	184.562.037	184.562.037	DINAS PERIKANAN
		Studi Aplikasi Manajemen Pemulihan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Temu Usaha Perikanan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Uji Mutu Hasil Perikanan	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk olahan hasil perikanan	17113.32 ton	17113.32 ton	17113.32 ton	1.799.116.845	1.441.466.679	1.441.466.679	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					190.606.162	173.278.329	173.278.329	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Profile Data Pedagang Ikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	190.606.162	173.278.329	173.278.329	DINAS PERIKANAN
		"Sistem Informasi Spasial Usaha Perikanan Kota Semarang ""Si Paus Semarang""	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi Pemasaran Bagi Pengolah dan Pemasar Ikan di Kota Semarang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					392.015.683	356.377.894	356.377.894	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cooking Class	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	392.015.683	356.377.894	356.377.894	DINAS PERIKANAN
		Kampanye Gemarikan TP PKK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jateng	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pelatihan Pengolahan Ikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Penderita Gizi Buruk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Pembinaan Pengolah Ikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi Gemarikan Anak Sekolah dan PMT Anak Sekolah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.216.495.000	911.810.456	911.810.456	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pedagang PIH	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.216.495.000	911.810.456	911.810.456	DINAS PERIKANAN
		Rehab Gedung PIH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
		Sarana Prasarana PIH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERIKANAN
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN					45.531.540.068	29.532.197.000	29.796.334.753	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					45.531.540.068	29.532.197.000	29.796.334.753	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.363.243.440	16.749.364.228	16.118.978.047	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (dinas pertanian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.412.000	11.699.740	11.699.740	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja tahunan (Renja, Renja-P, RKA/DPA, DPPA) (dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6.800.000	6.702.820	6.702.820	DINAS PERTANIAN
		Renstra SKPD (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP (LKJIP) (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.612.000	4.996.920	4.996.920	DINAS PERTANIAN
		Laporan capaian kinerja dan pelayanan SKPD (dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				DINAS PERTANIAN
		Laporan move pelaksanaan prog & keg (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				DINAS PERTANIAN
		LKPJ (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.391.796.400	12.606.495.700	12.451.914.925	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & tunjangan ASN	100%	100%	100%	13.633.096.400	12.393.724.000	12.261.463.225	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SDM penunjang pelaksanaan tupoksi	100%	100%	100%	755.000.000	208.600.000	186.280.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.100.000	1.157.920	1.157.920	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semestaran Dinas	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.855.860	1.855.860	DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.100.000	1.157.920	1.157.920	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.803.950.900	1.075.071.457	959.556.012	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik dan penerangan kantor	100%	100%	100%	15.000.000	75.699.730	63.663.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA retribusi bidang pertanian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	117.462.400	106.784.000	106.784.000	DINAS PERTANIAN
		NA retribusi bidang peternakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih	100%	100%	100%	150.000.000	212.798.727	232.070.000	DINAS PERTANIAN
		Alat tulis kantor	100%	100%	100%				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang-barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	40.000.000	56.902.000	32.227.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi rapat-rapat dinas dan jamuan tamu	100%	100%	100%	550.000.000	39.414.000	49.424.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	470.000.000	163.938.000	43.306.000	DINAS PERTANIAN
		Perjalanan dinas luar daerah	100%	100%	100%				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	CCTV	1 set	1 set	1 set	461.488.500	419.535.000	432.082.012	DINAS PERTANIAN
		kamera	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
		Laptop	4 buah	4 buah	3 buah				DINAS PERTANIAN
		PC			6 unit				DINAS PERTANIAN
		Printer	3 buah	3 buah	10 buah				DINAS PERTANIAN
		Sistem Informasi Manajemen Kebun	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
		Sistem Informasi Pertanian Terpadu	1 buah	1 buah	buah				DINAS PERTANIAN
		Sistem Informasi Rekam Medik Hewan	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		text display	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		TV	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS PERTANIAN
		UPS	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS PERTANIAN
		wifi belkin	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
		wireless	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					210.403.818	211.919.940	205.319.940	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	bangku kebun	10 buah	10 buah	10 buah	135.403.818	123.094.380	123.094.380	DINAS PERTANIAN
		kursi	5 buah	5 buah	5 buah				DINAS PERTANIAN
		lemari	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERTANIAN
		meja	11 buah	11 buah	11 buah				DINAS PERTANIAN
		papan nama	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERTANIAN
		rak	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERTANIAN
		sketsel	2 buah	2 buah	2 buah				DINAS PERTANIAN
		tenda promosi	3 buah	3 buah	3 buah				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	8 unit	8 unit	8 unit	75.000.000	88.825.560	82.225.560	DINAS PERTANIAN
		Blender	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
		Dispenser	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS PERTANIAN
		Kompas Gas	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		kulkas	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS PERTANIAN
		Mesin potong rumput	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Penyedot debu	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
		Power sprayer dan penggerak	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		timbangan digital	1 buah	1 buah	1 buah				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					832.709.800	790.459.280	742.339.500	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik, sarana komunikasi dan informasi	100%	100%	100%	230.000.000	242.541.280	148.771.500	DINAS PERTANIAN
		Website Dinas Pertanian terkelola	100%	100%	100%				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan keuangan SKPD	100%	100%	100%	602.709.800	547.918.000	593.568.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.115.970.522	2.053.718.111	1.748.147.930	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan operasional Kepala Dinas terpelihara	100%	100%	100%	37.000.000	39.950.000	39.950.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional aparaturnya terpelihara	100%	100%	100%	375.000.000	464.704.000	310.354.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor terpelihara	100%	100%	100%	143.964.810	130.877.100	123.881.100	DINAS PERTANIAN
		Perlengkapan gedung kantor terpelihara	100%	100%	100%				DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DED Pagar kebun dinas	1 paket	1 paket	1 paket	1.560.005.712	1.418.187.011	1.273.962.830	DINAS PERTANIAN
		Gedung kantor dinas terpelihara	100%	100%	100%				DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Gedung kantor Gayamsari	1 unit	1 unit	unit				DINAS PERTANIAN
		Pagar kebun dinas			3 unit				DINAS PERTANIAN
		Pavingisasi kantor gayamsari	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERTANIAN
		Peningkatan sarana parkir BPP Banyumanik	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi hasil peternakan	35335.00 Ton	35335.00 Ton	35335.00 Ton	7.825.070.533	7.113.700.484	6.835.869.983	
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50233.44 Ton	50233.44 Ton	50233.44 Ton				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					3.295.906.684	2.996.278.803	2.682.334.546	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Alat ubinan	3 unit	3 unit	3 unit	115.259.954	104.781.776	104.781.776	DINAS PERTANIAN
		Demplot Jagung Organik	2 unit	2 unit	2 unit				DINAS PERTANIAN
		Demplot Mina Padi	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Demplot Padi Organik	10 unit	10 unit	10 unit				DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bintek APPO	1 Kali	1 Kali	1 Kali	3.180.646.730	2.891.497.027	2.577.552.770	DINAS PERTANIAN
		Bintek P2HP (Pengamatan Susut Hasil Padi)	1 Kali	1 Kali	1 Kali				DINAS PERTANIAN
		Bintek P2HP (Penyusunan Dokumen Sistem Mutu)	2 Kali	2 Kali	2 Kali				DINAS PERTANIAN
		Bintek Pengendalian OPT TP	1 Kali	1 Kali	1 Kali				DINAS PERTANIAN
		Bintek Pertanian Perkotaan	1 kali	1 kali	1 kali				DINAS PERTANIAN
		Data informasi Harga Produk Peternakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				DINAS PERTANIAN
		Data Statistik Peternakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				DINAS PERTANIAN
		Demplot Agensi Hayati (PPAH)	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Demplot Pembuatan Rumah Burung Hantu (RUBUHA)	1 Unit	1 Unit	1 Unit				DINAS PERTANIAN
		Fasilitasi bibit dan Saprodi Lainnya untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan	16 Paket	16 Paket	16 Paket				DINAS PERTANIAN
		Fasilitasi Lomba Pemanfaatan Pekarangan	8 Kali	8 Kali	8 Kali				DINAS PERTANIAN
		Gerakan Minum Susu	2 Kali	2 Kali	2 Kali				DINAS PERTANIAN
		Hand Sprayer	5 buah	5 buah	5 buah				DINAS PERTANIAN
		Pameran	12 Kali	12 Kali	12 Kali				DINAS PERTANIAN
		Pameran Produk Peternakan	3 Kali	3 Kali	3 Kali				DINAS PERTANIAN
		Pasar Tani	10 Kali	10 Kali	10 Kali				DINAS PERTANIAN
		Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Pelaku Pertanian Perkotaan	16 kelompok	16 kelompok	16 kelompok				DINAS PERTANIAN
		Pembuatan HMT	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERTANIAN
		Penanaman Sukun	6100 Batang	6100 Batang	6100 Batang				DINAS PERTANIAN
		Pengolah Pupuk Organik	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Bibit Tanaman Pangan & Hortikultura	20000 Batang	20000 Batang	20000 Batang				DINAS PERTANIAN
		Peralatan pembuat kripik buah	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS PERTANIAN
		peralatan pembuat tepung sukun	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERTANIAN
		Perlengkapan Ternak (Pendampingan Relokasi Sapi TPA Jatibarang)	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERTANIAN
		Pompa Air	2 Unit	2 Unit	2 Unit				DINAS PERTANIAN
		Sarpras IB	1 Paket	1 Paket	Paket				DINAS PERTANIAN
		Uji Sampel Pakan	32 Sampel	32 Sampel	21 Sampel				DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					2.429.314.611	2.208.467.828	2.297.567.828	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bintek Budidaya Ternak Kelinci dan Observasi lapang	1 kali	1 kali	1 kali	2.429.314.611	2.208.467.828	2.297.567.828	DINAS PERTANIAN
		Pemeliharaan Kebun Dinas Pertanian	14 unit	14 unit	14 unit				DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Pembibitan Anggrek	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Pembibitan Durian	1000 batang	1000 batang	1000 batang				DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Tanaman Hortikultura	1639 Batang	1639 Batang	1639 Batang				DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					2.099.849.238	1.908.953.853	1.855.967.609	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pemantauan ternak bantuan pemerintah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.099.849.238	1.908.953.853	1.855.967.609	DINAS PERTANIAN
		Perlengkapan Ternak	1 Paket	1 Paket	1 Paket				DINAS PERTANIAN
		Ternak Kelinci	25 ekor	25 ekor	25 ekor				DINAS PERTANIAN
		Ternak Sapi PFH Betina	5 Ekor	5 Ekor	Ekor				DINAS PERTANIAN
		Ternak Sapi PO Jantan	103 ekor	103 ekor	103 ekor				DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	16.941.476.095	4.176.959.764	5.369.070.705	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					12.477.090.000	118.426.950	118.426.950	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kajian pengembangan pertanian perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12.477.090.000	118.426.950	118.426.950	DINAS PERTANIAN
		Reviu Perda Keswan & Kesmavet	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERTANIAN
		sosialisasi asuransi pertanian/peternakan	7 kali	7 kali	7 kali				DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					4.464.386.095	4.058.532.814	5.250.643.755	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi air tanah (dangkal/dalam)			1 unit	26.706.860	24.278.964	87.212.000	DINAS PERTANIAN
		Rehab Jaringan Irigasi Tersier	1 unit	1 unit	unit				DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	embung			1 unit			120.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jalan produksi			2 unit			939.835.328	DINAS PERTANIAN
		Jalan usaha tani			3 unit				DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	dam parit			2 unit			240.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Renovasi Ruang Data dan Informasi			1 unit			242.381.200	DINAS PERTANIAN
		sarana keinformasian			3 paket				DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Greenhouse (BPP Banyumanik)	1 unit	1 unit	1 unit	4.437.679.235	4.034.253.850	3.621.215.227	DINAS PERTANIAN
		Gudang alsin	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		instalasi biogas	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		kandang kelinci	5 unit	5 unit	unit				DINAS PERTANIAN
		pembangunan kandang sapi Cangkiran	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Pengembangan pusat agro Plalangan	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		Pengembangan pusat agro Wates	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
		rehab/bedah kandang	15 unit	15 unit	15 unit				DINAS PERTANIAN
		rehab sumur lahan ex-JSDF	1 unit	1 unit	unit				DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Sumur bor	3 unit	3 unit	1 unit				DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 %	-5.00 %	-5.00 %	681.750.000	641.884.544	568.433.038	
		Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	0.00 buah	0.00 buah	9.00 buah				
3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					296.500.000	408.897.784	398.086.751	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bintek Keswan dan Kesmavet	7 kali	7 kali	3 kali	296.500.000	408.897.784	398.086.751	DINAS PERTANIAN
		Obat-obatan Hewan	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERTANIAN
		Pelayanan Kesehatan Hewan	4000 ekor	4000 ekor	4000 ekor				DINAS PERTANIAN
		Peralatan medis Veteriner	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS PERTANIAN
		Surveillance PHM	10 kelurahan	10 kelurahan	10 kelurahan				DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>					385.250.000	232.986.760	170.346.287	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peredaran BAH dan Produk Hewan Terpantau	12 bulan	12 bulan	12 bulan	385.250.000	232.986.760	170.346.287	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	24.00 Kelompok	24.00 Kelompok	24.00 Kelompok	720.000.000	850.287.980	903.982.980	
3.27.07.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>					720.000.000	850.287.980	903.982.980	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot / Kaji Terap	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000	62.883.000	62.883.000	DINAS PERTANIAN
		Latihan dan Kunjungan / LAKU	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERTANIAN
		Pembinaan Saka Taruna Bumi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS PERTANIAN
		Programa Penyuluhan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Temu Teknis Penyuluh Pertanian Swadaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Data Kelompok Tani yang terupdate	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	420.000.000	724.474.980	774.594.980	DINAS PERTANIAN
		Lomba Poktan / Gapoktan / Kelembagaan Ekonomi / Petani	2 kali	2 kali	2 kali				DINAS PERTANIAN
		Pembinaan Kelembagaan Petani	50 kali	50 kali	50 kali				DINAS PERTANIAN
		UFCs (Urban Farming Courses/Pelatihan Pertanian Perkotaan))	24 kali	24 kali	24 kali				DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Media penyuluhan	3 paket	3 paket	3 paket	100.000.000	62.930.000	66.505.000	DINAS PERTANIAN
3.30.0.00.0.00.01.00	DINAS PERDAGANGAN					67.350.541.836	66.726.803.000	68.006.768.244	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					67.350.541.836	66.726.803.000	68.006.768.244	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	49.467.436.185	43.965.643.655	42.610.228.105	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (D. Perdagangan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.990.000	26.952.266	19.330.190	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.920.000	7.622.076		DINAS PERDAGANGAN
		Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, DPA, R-DPPA, DPPA	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.575.000	7.622.076	7.622.076	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.575.000			DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.920.000	11.708.114	11.708.114	DINAS PERDAGANGAN
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.877.621.000	31.782.583.114	31.095.042.782	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	238 orang	238 orang	238 orang	34.416.041.000	31.287.310.000	30.607.391.744	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	450.000.000	483.840.000	483.840.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.600.000	3.811.038	3.811.038	DINAS PERDAGANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan Keuangan Semester I	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.990.000	3.811.038		DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.990.000	3.811.038		DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					4.093.612.122	2.574.688.918	1.854.653.958	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan alat listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	5.213.200	5.213.200	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	40.000.000	464.620.290	427.535.130	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	29.819.010	27.108.191	27.108.191	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	700.000.000	199.737.825	159.737.825	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan karcis retribusi, buku laporan, blangko	12 bulan	12 bulan	12 bulan	750.000.000	896.829.492	696.829.492	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan minum rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.800.000.000	184.140.000	50.400.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	350.000.000	417.228.000	136.847.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	417.793.112	379.811.920	350.983.120	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					44.037.796	40.034.360	40.034.360	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelayakan mebel kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun				DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	44.037.796	40.034.360	40.034.360	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					9.083.124.267	8.257.385.697	8.298.985.697	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Listrik, Air dan Jaringan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.085.650.487	7.350.591.352	7.350.591.352	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa layanan kebersihan kantor Dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	997.473.780	906.794.345	948.394.345	DINAS PERDAGANGAN
		Jasa layanan kebersihan kantor UPTD Metrologi	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian, Pelayanan Publik, Pengamanan Gedung Kantor, Pengoperasian Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1.350.051.000	1.283.999.300	1.302.181.118	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar, suku cadang, perawatan kendaraan dinas/operasional	60 unit	60 unit	60 unit	700.000.000	720.480.000	720.480.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kelayakan mebel kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	17.864.000	16.240.000	16.240.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	232.187.000	315.262.300	333.444.118	DINAS PERDAGANGAN
		Perawatan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	400.000.000	232.017.000	232.017.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	263.999.049	239.999.135	246.399.135	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	5.36	5.36	0.00				
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					263.999.049	239.999.135	246.399.135	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembuatan Media Informasi Berupa Banner tentang Alur Perijinan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	263.999.049	239.999.135	246.399.135	DINAS PERDAGANGAN
		Penerbitan Surat Ijin Tempat Dasar bagi Pedagang Pasar Tradisional dan PKL Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Profil Pasar Tradisional Kota Semarang	6 buku	6 buku	6 buku				DINAS PERDAGANGAN
		Sosialisasi Perijinan bagi Pedagang Pasar Tradisional dan PKL Kota Semarang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				DINAS PERDAGANGAN
		Updating / Penyesuaian Data Pedagang Pasar dan PKL Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Upgrade Sistem Informasi Pedagang Pasar dan PKL Kota Semarang	1 paket	1 paket	1 paket				DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	18.00 pasar	18.00 pasar	18.00 pasar	13.501.507.747	17.823.213.192	22.539.356.391	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					6.846.000.000	11.772.751.604	16.335.294.803	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembuatan Pasar Rakyat	1 pasar	1 pasar	1 pasar	6.532.000.000	4.016.506.844	8.426.996.254	DINAS PERDAGANGAN
		Perbaikan bangunan pasar	6 wilayah	6 wilayah	6 wilayah				DINAS PERDAGANGAN
		Perbaikan Listrik Pasar	6 wilayah	6 wilayah	6 wilayah				DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kajian pasar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	314.000.000	7.756.244.760	7.908.298.549	DINAS PERDAGANGAN
		Operasional sarana prasarana pasar	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan kebersihan pasar	12 pasar	12 pasar	12 pasar				DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					6.655.507.747	6.050.461.588	6.204.061.588	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pemantauan dan pengendalian keamanan dan ketertiban pasar dan PKL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.496.366.770	3.178.515.245	3.229.715.245	DINAS PERDAGANGAN
		Penataan pasar dan registrasi pedagang	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Penghitungan potensi pasar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Kajian Pasar Grosir	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Kajian Perwal Penataan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				DINAS PERDAGANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Monitoring PKL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.159.140.977	2.871.946.343	2.974.346.343	DINAS PERDAGANGAN
		Optimalisasi PAD	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Pembinaan Organisasi PKL	1440 pedagang	1440 pedagang	1440 pedagang				DINAS PERDAGANGAN
		Pembinaan Pedagang Pasar	1200 pedagang	1200 pedagang	1200 pedagang				DINAS PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4.11 %	4.11 %	4.11 %	359.468.429	326.789.481	187.129.641	
3.30.04.2.01	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>					177.968.755	161.789.777	130.193.777	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Penyusunan Naskah Akademis Dalam Rangka Raperda LPG Bersubsidi	100%	100%	100%	177.968.755	161.789.777	130.193.777	DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Naskah Akademis Dalam Rangka Raperda Pupuk Bersubsidi	100%	100%	100%				DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>					181.499.674	164.999.704	56.935.864	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bazaar Ramadhan dalam Rangka Stabilisasi Harga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	181.499.674	164.999.704	56.935.864	DINAS PERDAGANGAN
		Monitoring Harga dan Kebutuhan Pokok sereta Barang Penting Lainnya Pada Pasar Rakyat Tradisional yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas	1522987000.00 US\$	1522987000.00 US\$	1522987000.00 US\$	496.000.000	1.003.993.237	1.003.993.237	
3.30.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					496.000.000	1.003.993.237	1.003.993.237	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pelatihan pelaku usaha potensi ekspor Metode Cost Sharing dengan Kemendag RI	30 orang	30 orang	30 orang	248.000.000	133.999.727	133.999.727	DINAS PERDAGANGAN
		Tersusunnya Buku Profil Eksportir Kota Semarang	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Terlaksananya Pameran/Expo Produk Unggulan Potensi Ekspor Kota Semarang	4 Kegiatan Pameran	4 Kegiatan Pameran	4 Kegiatan Pameran	248.000.000	869.993.510	869.993.510	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66.00 %	66.00 %	66.00 %	742.000.000	1.076.136.640	988.336.640	
3.30.06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>					742.000.000	1.076.136.640	988.336.640	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelayanan tera dan tera ulang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	227.000.000	644.322.208	579.722.208	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Sosialisasi kemetrolgian pada wajib tera	12 bulan	12 bulan	12 bulan	515.000.000	431.814.432	408.614.432	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan	15.00 %	15.00 %	15.00 %	2.520.130.426	2.291.027.660	431.325.095	
3.30.07.2.01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>					2.520.130.426	2.291.027.660	431.325.095	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dugderan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	864.713.662	786.103.329	260.795.093	DINAS PERDAGANGAN
		Semarang Great Sale	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pameran Produk Fashion	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1.548.793.762	1.407.994.329	73.600.000	DINAS PERDAGANGAN
		Pameran Produk Kerajinan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi				DINAS PERDAGANGAN
		Pameran Produk Kreatif	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi				DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Monitoring barang beredar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	106.623.002	96.930.002	96.930.002	DINAS PERDAGANGAN
		Pembinaan pelaku usaha	12 bulan	12 bulan	12 bulan				DINAS PERDAGANGAN
		Updating Toko Modern	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				DINAS PERDAGANGAN
3.31.0.00.0.00.01.00	DINAS PERINDUSTRIAN					15.694.175.076	12.916.085.776	34.449.809.242	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					15.694.175.076	12.916.085.776	34.449.809.242	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (D. Perindustrian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.443.015.221	9.385.113.150	9.367.984.446	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (D. Perindustrian)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
3.31.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					7.811.095	4.223.875	4.223.875	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	2.000.000	1.129.400	1.129.400	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	2.000.000	517.050	517.050	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	2.000.000	930.975	930.975	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan Administrasi perkantoran serta penyelenggaraan kapasitas SDM dan sinkronisasi budaya kerja	100%	100%	100%	568.755	517.050	517.050	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	1.242.340	1.129.400	1.129.400	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.470.462.800	6.763.363.080	6.546.456.376	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	7.163.974.400	6.512.704.000	6.295.797.296	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Layanan Administrasi keuangan	100%	100%	100%	300.000.000	249.000.000	249.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	488.400	444.000	444.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	2.000.000	762.200	762.200	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	226.440	226.440	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	226.440	226.440	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							199.778.000	
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Menurunnya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai			100%			199.778.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.784.913.071	640.103.029	744.992.029	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat komponen listrik / penerangan bangunan	100%	100%	100%	100.000.000	21.340.350	21.340.350	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	125.000.000	110.378.685	50.378.685	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya bahan logistik kantor	100%	100%	100%	600.000.000	44.642.430	48.349.404	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	100%	100%	100%	100.000.000	97.063.082	97.063.082	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	100%	100%	100%	750.000.000	68.677.800	57.427.800	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	100%	1.000.000.000	198.079.708	198.079.708	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pembelian handycam	1 unit	1 unit	1 unit	109.913.071	99.920.974	272.353.000	DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembelian kamera			1 unit				DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Terlaksananya pembelian komputer dekstop	1 unit	1 unit	3 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembelian laptop	2 unit	2 unit	5 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembelian printer	2 unit	2 unit	5 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembelian scanner	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembelian wireless	1 unit	1 unit	2 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.334.754	58.486.140	75.362.140	
3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	3 unit	3 unit	3 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembelian ac			2 unit	64.334.754	58.486.140	75.362.140	DINAS PERINDUSTRIAN
		Terpenuhinya pengadaan canopy di Galeri Industri	1 unit	1 unit	1 unit				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.422.770.000	1.350.979.120	1.266.904.120	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	300.000.000	330.279.120	242.879.120	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pempromosikan produk galeri industri	100%	100%	100%	1.122.770.000	1.020.700.000	1.024.025.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					692.723.501	567.957.906	530.267.906	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	350.000.000	397.454.609	397.454.609	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	42.723.501	38.839.546	38.839.546	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	150.000.000	44.826.751	44.826.751	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	150.000.000	86.837.000	49.147.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri kecil	3635.00 IKM	3635.00 IKM	3635.00 IKM	2.075.941.230	2.462.592.058	24.157.823.047	
		Jumlah Industri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif	658.00 Indutri Kreatif				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					2.075.941.230	2.462.592.058	24.157.823.047	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dialog Interaktif di Radio mengenai Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Cukai	1 materi	1 materi	1 materi	106.408.500	672.107.758	36.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN
		Pubikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Melalui Media Masa Televisi			1 materi				DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya kegiatan Temu Usaha Industri	300 orang	300 orang	150 orang	949.731.443	863.392.221	707.771.041	DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Kayu	120 IKM	120 IKM	120 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Pelatihan Lukis Kaca			75 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Pelatihan Olahan Makanan	120 IKM	120 IKM	60 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Pelatihan Olahan Minuman	120 IKM	120 IKM	60 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Workshop Plastik			50 Orang				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pemantapan Tata Laksana Industri	2 sentra industri	2 sentra industri	2 sentra industri	152.168.821	138.335.292	138.335.292	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Batik			30 IKM	867.632.466	788.756.787	23.275.216.714	DINAS PERINDUSTRIAN
		Pelatihan IKM Kerajinan Craft	100 IKM	100 IKM	60 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pelatihan IKM Kulit dan Imitasi	100 IKM	100 IKM	90 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri Karet Ban	30 orang	30 orang	30 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pelatihan Promosi Produk Online Bagi IKM	2 kegiatan	2 kegiatan	90 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pembuatan Film Promosi Produk IKM	2 paket	2 paket	2 paket				DINAS PERINDUSTRIAN
		Talk Show dan Fashion Show	1 kegiatan	1 kegiatan	100 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya pembangunan sentra IKM Logam			100 Persen				DINAS PERINDUSTRIAN
		Termotivasinya IKM melalui IKM Award	100 IKM	100 IKM	100 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Workshop Brand DNA	100 IKM	100 IKM	50 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Workshop Trend Forecasting	100 IKM	100 IKM	100 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertambahan IKM	0.48 %	0.48 %	0.48 %	107.788.978	97.989.980	97.989.980	
		Persentase jumlah penetapan IUI, IPU, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 %	4.00 %	4.00				
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					107.788.978	97.989.980	97.989.980	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersosialisasinya kebijakan perizinan industri kepada pelaku usaha	150 IKM	150 IKM	150 IKM	52.157.578	47.415.980	47.415.980	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Industri	15 Pabrik	15 Pabrik	15 Pabrik	55.631.400	50.574.000	50.574.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya ketersediaan Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	1.067.429.647	970.390.588	826.011.769	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					1.067.429.647	970.390.588	826.011.769	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi IKM Alat Angkut	60 Orang	60 Orang	60 Orang	238.975.230	217.250.209	217.250.209	DINAS PERINDUSTRIAN
		Diseminasi Pemahaman dan Pemanfaatan SIINAS dan OSS bagi IKM	90 IKM	90 IKM	50 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Monitoring dan Evaluasi SIINAS	30 Perusahaan	30 Perusahaan	15 Perusahaan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pendataan Kawasan Industri			9 Kawasan				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Awarding Kreatif Konten			100 IKM	766.699.550	696.999.591	552.620.772	DINAS PERINDUSTRIAN
		FGD Industri Kreatif Konten			50 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		FGD Sentra Industri	75 IKM	75 IKM	75 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Kajian Pembentukan UPT Logam			1 Kegiatan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Konten Kreatif Fotografi	30 IKM	30 IKM	30 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Pendataan IKM 1 Paket	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Talkshow Industri Kreatif Konten			30 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Tersedianya Profil IKM Sentra	20 Sentra	20 Sentra	20 Sentra				DINAS PERINDUSTRIAN
		Video Profil IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Konten Kreatif Fotografi	30 IKM	30 IKM	30 IKM	61.754.867	56.140.788	56.140.788	DINAS PERINDUSTRIAN
		Pendataan IKM 1 Paket	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Penguatan Sentra Industri	90 IKM	90 IKM	90 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Promosi Industri Kreatif	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Publikasi Industri Kreatif Konten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				DINAS PERINDUSTRIAN
		Terlaksananya Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi IKM	200 IKM	200 IKM	200 IKM				DINAS PERINDUSTRIAN
		Tersedianya Profil IKM Sentra	20 Sentra	20 Sentra	20 Sentra				DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.01.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIS DAERAH					154.323.101.696	189.106.730.992	184.033.931.601	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					154.323.101.696	189.106.730.992	184.033.931.601	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	136.813.241.732	139.828.966.482	136.493.520.258	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tingkat disiplin aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					62.330.029	7.062.547	7.062.547	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	58.725.000	3.785.248	3.785.248	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Setda Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Dokumen Perubahan RKA Setda Kota Semarang	100%	100%	100%	3.605.029	3.277.299	3.277.299	BAGIAN TATA USAHA
		Dokumen RKA Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		DPA Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		Perubahan DPA Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39.005.974.700	35.635.054.550	36.177.926.311	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100%	100%	100%	38.153.474.700	34.684.977.000	35.271.048.761	BAGIAN TATA USAHA
		Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja KPA, PPK, PPTK, Pengurus Barang dan Bendahara di lingkungan Setda Kota Semarang	100%	100%	100%	850.000.000	948.600.000	905.400.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda Kota Semarang	100%	100%	100%	2.500.000	1.477.550	1.477.550	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					135.683.570	123.348.700	101.012.200	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Buku Rencana Pengadaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.481.005	73.164.550	47.253.050	BAGIAN PERLENGKAPAN
		Buku Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAGIAN PERLENGKAPAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Buku Inventaris BMD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	55.202.565	50.184.150	53.759.150	BAGIAN PERLENGKAPAN
		Buku Laporan Checking Distribusi Pengadaan BMD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				BAGIAN PERLENGKAPAN
		Buku Monitoring Inventaris Ruangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					157.030.610	142.755.100	411.716.082	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas	100%	100%	100%	157.030.610	142.755.100	85.055.100	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT)			100%			326.660.982	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.347.001.554	43.067.398.413	33.973.027.555	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	342.467.070	311.333.700	340.029.090	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	100%	1.391.034.022	1.264.576.384	1.612.923.093	BAGIAN PERLENGKAPAN
		Peralatan dapur/rumah tangga	100%	100%	100%				BAGIAN PERLENGKAPAN
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	100%	100%				BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	100%	100%	100%	1.711.148.942	1.555.589.947	1.569.861.159	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	610.234.515	554.758.650	553.226.389	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bacaan koran dan majalah	100%	100%	100%	365.000.000	391.440.000	391.440.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jamuan makanan dan minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100%	16.500.000.000	14.055.957.000	12.166.027.617	BAGIAN TATA USAHA
		Jamuan Rapat kegiatan di lingkungan Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100%	100%	100%	26.989.213.979	24.535.649.072	16.754.919.465	BAGIAN TATA USAHA
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan gedung kantor berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	437.903.026	398.093.660	584.600.742	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.659.983.301	14.236.348.455	19.071.187.035	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100%	100%	100%				BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	100%	100%	2.725.387.500	2.477.625.000	7.183.484.080	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kendaraan tak bermotor	100%	100%	100%	215.891.500	196.265.000	196.065.000	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meubelair	100%	100%	100%	632.877.817	575.343.470	589.687.970	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	261.250.000	237.500.000	392.635.000	BAGIAN PERLENGKAPAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%	100%	11.824.576.484	10.749.614.985	10.709.314.985	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.869.252.448	9.473.478.955	8.472.427.893	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib administrasi surat menyurat	100%	100%	100%	230.033.320	209.121.200	173.520.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik	100%	100%	100%	7.600.000.000	6.602.887.094	6.103.137.396	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	2.500.000.000	1.381.529.636	835.829.472	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100%	100%	100%	339.219.128	308.381.025	308.381.025	BAGIAN TATA USAHA
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		luran Forsesdasi	100%	100%	100%				BAGIAN TATA USAHA
		tenaga pengemudi dan kendaraan sewa tersedia	100%	100%	100%	200.000.000	971.560.000	1.051.560.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.745.680.000	17.486.630.585	18.665.563.585	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surat-surat kendaraan, service, perbaikan, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	100%	100%	225.000.000	184.360.000	184.360.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surat-surat kendaraan, service, perbaikan, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan operasional dinas	100%	100%	100%	250.000.000	3.145.980.000	3.009.763.073	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	perbaikan, perawatan mebeluer	100%	100%	100%	250.000.000	120.000.000	120.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan, perawatan gedung kantor dan rumah dinas	100%	100%	100%	3.410.000.000	10.876.233.103	11.983.878.639	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%	100%	2.422.330.000	2.215.959.482	2.408.133.873	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100%	100%	100%	1.188.350.000	944.098.000	959.428.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4.407.836.891	4.007.124.446	4.018.785.369	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	173.292.900	157.539.000	169.199.923	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	824.817.891	749.834.446	749.834.446	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	3.409.726.100	3.099.751.000	3.099.751.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.961.704.891	3.601.549.900	3.601.549.900	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100%	100%	100%	2.575.108.179	2.341.007.435	2.341.007.435	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	1.386.596.712	1.260.542.465	1.260.542.465	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					847.624.138	670.227.971	615.274.921	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Anjab dan ABK berdasarkan Permenpan RB No. 1 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	140.305.871	127.550.792	118.088.055	BAGIAN ORGANISASI
		Dokumen Anjab dan ABK Fungsional	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Pemeliharaan Aplikasi Monevaga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	397.659.684	361.508.804	349.464.389	BAGIAN ORGANISASI
		Dokumen Proses Bisnis	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Jumlah OPD Yang Telah Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	14 OPD	14 OPD	14 OPD				BAGIAN ORGANISASI
		OPD Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	40 OPD	40 OPD	40 OPD				BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25 OPD	25 OPD	25 OPD				BAGIAN ORGANISASI
		Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25 OPD	25 OPD	25 OPD				BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25 OPD	25 OPD	25 OPD				BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map 2020-2024	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	59.658.583	54.235.075	51.189.227	BAGIAN ORGANISASI
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%	100%	250.000.000	126.933.300	96.533.250	BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					5.613.139.600	11.377.986.860	11.377.986.860	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah kegiatan keprotokolan dan tugas dinas pimpinan daerah yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	707.751.000	1.066.736.840	965.976.500	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah kebijakan dan program kegiatan pimpinan daerah yang tersosialisasi	100 persen	100 persen	100 persen	3.261.388.600	7.472.227.110	7.651.345.630	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah dokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	1.644.000.000	2.839.022.910	2.760.664.730	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.819.548.467	45.069.353.727	39.700.290.777	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	477561.00 layanan	477561.00 layanan	477561.00 layanan				
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	8.00 kegiatan	8.00 kegiatan	9.00 kegiatan				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					2.516.496.944	2.287.724.494	2.012.701.744	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Kegiatan Dialog Audiensi dan Jalan Sehat Walikota Semarang dengan Masyarakat	20 Kegiatan	20 Kegiatan	7 Kegiatan	452.003.229	410.912.026	259.366.572	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Monitoring Administrasi Kelurahan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Rapat Koordinasi OPD, Camat dan Lurah di Kota Semarang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Pelaksanaan Kajian Penataan Wilayah Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pelaksanaan Survey Kinerja Pemerintahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Tertib Administrasi dan Peningkatan Kinerja Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pengelolaan Data Potensi dan Perkembangan Kelurahan	177 Kecamatan	177 Kecamatan	177 Kecamatan	345.029.444	313.663.131	116.334.224	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba Kampung Siaga Candi HEBAT	100%	100%	%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Persentase Fasilitasi Kegiatan LPMK	100%	100%	100%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Posyandu	100%	100%	%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%	100%	100%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas antar Kelurahan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	1.626.713.239	1.478.830.217	1.571.193.578	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMDD)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Stabilitas Daerah Kota Semarang tercapai	100%	100%	100%				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Laporan SPM dan Laporan Monitoring SPM	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	92.751.032	84.319.120	65.807.370	BAGIAN OTONOMI DAERAH
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan oleh Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>					7.000.000.000	34.967.159.481	30.912.159.481	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji, kegiatan keagamaan, kegiatan MTQ dan Pesparawi serta pembinaan tenaga pendidik keagamaan non formal di Kota Semarang	100%	100%	100%	3.500.000.000	28.899.730.515	24.844.730.515	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan Modin Perawat Jenazah dan pemberian bantuan sarpras kepada tempat ibadah di Kota Semarang	100%	100%	100%	3.000.000.000	5.306.154.791	5.306.154.791	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan donor darah, sunatan massal, sosialisasi bahaya narkoba dan aids dan pembinaan UKS di Kota Semarang	100%	100%	100%	500.000.000	761.274.175	761.274.175	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>					1.733.784.523	1.576.167.748	1.320.069.748	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cetak Himpunan Keputusan Walikota Semarang	50 buku	50 buku	50 buku	576.146.633	523.769.666	496.993.939	BAGIAN HUKUM
		Cetak Leaflet	5970 Lembar	5970 Lembar	5970 Lembar				BAGIAN HUKUM
		Cetak Lembaran Daerah Lepas dan Berita Daerah Lepas	1750 buku	1750 buku	1750 buku				BAGIAN HUKUM
		Peraturan Daerah Kota Semarang	10 PERDA	10 PERDA	10 PERDA				BAGIAN HUKUM
		Peraturan Walikota Kota Semarang	5 PERWAL	5 PERWAL	5 PERWAL				BAGIAN HUKUM
		Rako Penyusunan Produk Hukum Daerah	62 orang	62 orang	62 orang				BAGIAN HUKUM
		Sosialisasi Produk Hukum	15 Kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan				BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pembinaan Keluarga sadar hukum	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	1.000.454.741	909.504.310	622.254.310	BAGIAN HUKUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah perkara hukum yang mendapat penanganan	7 perkara	7 perkara	7 perkara				BAGIAN HUKUM
		Jumlah Rakor Pokja Ranham	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				BAGIAN HUKUM
		Jumlah Tenaga Ahli	1 orang	1 orang	1 orang				BAGIAN HUKUM
		Jumlah Warga miskin yang mendapat bantuan	25 orang	25 orang	25 orang				BAGIAN HUKUM
		Jumlah workshop penanganan perkara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cetak Buku Himpunan Perda 2019	155 buku	155 buku	155 buku	157.183.149	142.893.772	200.821.499	BAGIAN HUKUM
		Cetak Buku Himpunan Perda 2020	155 buku	155 buku	155 buku				BAGIAN HUKUM
		Cetak Buku Himpunan Perda perwal retribusi	155 buku	155 buku	155 buku				BAGIAN HUKUM
		Cetak Buku Himpunan Perwal 2019	155 buku	155 buku	155 buku				BAGIAN HUKUM
		Cetak Buku Himpunan Perwal 2020	155 buku	155 buku	155 buku				BAGIAN HUKUM
		Stiker Buku JDH	1900 buah	1900 buah	1900 buah				BAGIAN HUKUM
		Stiker buku UPJ	1900 buah	1900 buah	1900 buah				BAGIAN HUKUM
		stiker website jdih	1200 buah	1200 buah	1200 buah				BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.569.267.000	6.238.302.004	5.455.359.804	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MoU/Lol Kerjasama/Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.119.267.000	804.575.399	5.186.124.378	BAGIAN OTONOMI DAERAH
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan/ Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah MoU/Lol Kerjasama Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	450.000.000	5.433.726.605	269.235.426	BAGIAN OTONOMI DAERAH
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.690.311.497	4.208.410.783	7.840.120.566	
		Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					748.363.207	839.801.414	752.365.414	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	150.000.000	295.834.862	370.443.953	BAGIAN PEREKONOMIAN
		Fasilitasi Kegiatan Perekonomian Daerah	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Kajian BUMD dalam menghadapi Pandemi	1 kajian	1 kajian	1 kajian				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Pembahasan RKAP BUMD	5 BUMD	5 BUMD	5 BUMD				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Peraturan tentang BUMD Kota Semarang	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan				BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	144.008.207	130.916.552	119.647.727	BAGIAN PEREKONOMIAN
		Forum Koordinasi LPG dan Pupuk	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Kajian tentang Lahan Sempit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Monitoring Data CSR	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Pengelolaan Data CSR	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Data Perkembangan Lembaga Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan Hukum dan belum berbadan hukum	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	454.355.000	413.050.000	262.273.734	BAGIAN PEREKONOMIAN
		Fasilitasi Kegiatan Pameran	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Laporan realisasi semester DBHCHT	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Program KUR bagi usaha mikro di Kota Semarang tersalurkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pengajuan kredit untuk usaha	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
		Terlaksananya pemantauan haerga, sarana dan prasarana menjelang idul fitri, hari natal dan tahun baru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					1.225.036.620	898.689.669	846.911.669	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Pedoman Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	177.076.273	160.978.430	122.681.500	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Tersusunnya Standarisasi Harga Satuan Bahan bangunan, Upah, dan Analisa Pekerjaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Buku Standar Satuan Harga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	387.635.347	352.395.770	346.545.770	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya peresmian hasil pembangunan TA. 2020 dan rapat koordinasi pengendalian kegiatan OPD (DAK, Ban-Keu, DID)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	483.000.000	194.435.894	175.441.291	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota Semarang	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	177.325.000	190.879.575	202.243.108	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Tersusunnya laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Semarang	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					2.716.911.670	2.469.919.700	2.099.519.700	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa OPD di lingkungan Kota Semarang	387 paket	387 paket	387 paket	1.951.304.080	1.773.912.800	1.475.164.700	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan secara Elektronik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	274.054.000	249.140.000	227.395.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Sosialisasi dan Pelatihan LPSE & Rencana Umum Pengadaan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Pengadaan	1 paket	1 paket	1 paket	491.553.590	446.866.900	396.960.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Pembinaan / sosialisasi terhadap pelaku pengadaan barang jasa	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Sosialisasi peningkatan kematangan UKPBJ	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							4.141.323.783	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Rokok			5200 orang			4.141.323.783	BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD					178.780.234.348	129.753.548.360	110.584.942.044	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					178.780.234.348	129.753.548.360	110.584.942.044	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	126.185.428.684	60.476.580.338	58.567.477.022	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.498.921	66.851.855	66.851.855	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.064.000	14.339.880	14.339.880	SEKRETARIAT DPRD
		Dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37.836.000	5.940.937	5.940.937	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					6.535.031	5.940.937	5.940.937	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6.449.955	5.863.599	5.863.599	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					6.535.031	5.940.937	5.940.937	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%	9.119.000	18.862.020	18.862.020	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.959.900	9.963.545	9.963.545	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.901.239.999	8.092.036.363	7.836.587.944	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	8.308.405.600	7.553.096.000	7.297.647.581	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					592.834.399	538.940.363	538.940.363	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas	12 bulan	12 bulan	12 bulan				SEKRETARIAT DPRD
		Honor BP, BPP, Pengurus Barang yang terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					458.033.000	417.000.000	217.000.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek/Workshop Bagi Sekretariat DPRD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	458.033.000	417.000.000	217.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.746.496.764	5.690.865.293	4.300.065.293	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik yang digunakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	55.294.000	50.265.900	50.265.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Pengharum Ruangan yang terpakai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	212.318.000	417.627.845	417.627.845	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jamuan Makan dan Minum yang tersedia	1 tahun	1 tahun	1 tahun	453.313.000	573.413.980	573.413.980	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100%	100%	100%	204.746.000	214.999.700	214.999.700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran/Majalah dan bahan bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang terbayar	100%	100%	100%	101.640.000	357.646.268	357.646.268	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					2.890.695.764	2.627.905.240	1.627.905.240	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas SDM Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	63.828.490.000	1.449.006.360	1.058.206.360	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.876.781.000	2.060.881.790	2.547.881.790	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	100%	100%	100%	1.200.000.000	200.650.000	500.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	529.307.000	665.158.950	839.158.950	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	147.474.000	1.195.072.840	1.208.072.840	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					919.848.000	2.609.031.256	2.612.831.256	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang terpakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.805.000	12.145.000	12.145.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Telepon, Air, dan TV Kabel Terbayar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	226.387.000	167.162.256	167.162.256	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium bagi tenaga kebersihan yang terbayar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	683.656.000	2.429.724.000	2.433.524.000	SEKRETARIAT DPRD
		Tenaga Operasional yang terbayar (Pengemudi dan Pantry)	1 tahun	1 tahun	1 tahun				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.024.209.000	2.426.934.826	2.526.934.826	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.650.000.000	1.112.544.366	1.112.544.366	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terawat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	266.026.000	340.014.560	340.014.560	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	863.025.000	561.044.000	561.044.000	SEKRETARIAT DPRD
		Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				SEKRETARIAT DPRD
		Tenaga Ketertiban dan Pengamanan kantor DPRD Kota Semarang terbayar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terawat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	245.158.000	413.331.900	513.331.900	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					41.515.504.000	37.960.612.255	37.306.957.358	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	40.678.429.000	36.980.390.000	36.326.735.103	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	718.024.000	824.222.255	824.222.255	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	119.051.000	156.000.000	156.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					1.642.818.000	1.152.366.700	1.152.366.700	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.642.818.000	1.152.366.700	1.152.366.700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	14.00 raperda	14.00 raperda	14.00 raperda	52.594.805.664	69.276.968.022	52.017.465.022	
4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					764.032.000	19.793.247.889	17.893.247.889	
4.02.02.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen penyusunan Raperda	100%	100%	100%	764.032.000	19.793.247.889	17.893.247.889	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					18.254.628.503	19.476.153.441	12.686.153.441	
4.02.02.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan					7.474.544.503	6.795.040.457	5.040.457	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen Kajian	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	5.275.832.000	9.493.731.184	9.493.731.184	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dialog Interaktif	100%	100%	100%	5.504.252.000	3.187.381.800	3.187.381.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					6.015.773.000	4.952.682.909	4.952.682.909	
4.02.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	6.015.773.000	4.952.682.909	4.952.682.909	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.08	Fasilitasi Tugas DPRD					27.560.372.161	25.054.883.783	16.485.380.783	
4.02.02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen Kunjungan Kerja Dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	25.358.827.762	23.053.479.784	14.483.976.784	SEKRETARIAT DPRD
		Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%				SEKRETARIAT DPRD
		Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%				SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik	100%	100%	100%	2.201.544.399	2.001.403.999	2.001.403.999	SEKRETARIAT DPRD
		Rapat Paripurna	100%	100%	100%				SEKRETARIAT DPRD
5.01.5.05.0.00.01.00	BAPPEDA					52.327.056.011	28.656.991.000	26.461.867.140	
5.01	PERENCANAAN					45.162.615.623	26.555.515.925	24.476.501.100	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.891.185.098	15.196.208.877	15.631.064.524	
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Bappeda)	80.00 %	80.00 %	80.00 %				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bappeda)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.933.298	6.623.000	6.623.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra serta Renja dan Perubahan Renja Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	1.506.000	1.506.000	BAPPEDA
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.098	919.180	919.180	BAPPEDA
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.858	1.200.780	1.200.780	BAPPEDA
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.101.342	1.001.220	1.001.220	BAPPEDA
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	1.282.820	1.282.820	BAPPEDA
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	713.000	713.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.974.251.800	10.939.890.500	11.202.564.326	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	11.622.751.800	10.566.138.000	10.823.021.826	BAPPEDA
		Persentase Pemenuhan TPP ASN	100%	100%	100%				BAPPEDA
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	100%	100%	100%	350.000.000	372.875.000	378.665.000	BAPPEDA
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	522.200	522.200	BAPPEDA
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	196.900	196.900	BAPPEDA
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	158.400	158.400	BAPPEDA
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					55.000.000	25.000.000	25.000.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100%	100%	100%	55.000.000	25.000.000	25.000.000	BAPPEDA
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.295.000.000	2.310.624.677	2.468.731.498	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	10.000.000	4.773.200	2.964.822	BAPPEDA
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	160.000.000	34.444.650	34.444.650	BAPPEDA
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	15.000.000	36.329.676	41.893.758	BAPPEDA
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	100%	100%	100%	198.000.000	62.399.406	66.933.656	BAPPEDA
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	31.000.000	45.859.825	41.896.572	BAPPEDA
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Perundang -undangan	2 Buku	2 Buku	5 Buku	1.000.000	1.363.600	1.363.600	BAPPEDA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100%	100%	100%	1.500.000.000	143.921.700	52.316.700	BAPPEDA
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	100%	100%	2.100.000.000	722.488.000	104.259.000	BAPPEDA
		Persentase pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%				BAPPEDA
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	280.000.000	1.259.044.620	2.122.658.740	BAPPEDA
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000	98.292.500	109.167.500	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Langganan telepon & surat kabar/majalah/jurnal	100%	100%	100%	15.000.000	7.323.500	7.323.500	BAPPEDA
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	100%	100%	100%	20.000.000	90.969.000	101.844.000	BAPPEDA
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.517.000.000	1.815.778.200	1.818.978.200	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional / lapangan	100%	100%	100%	17.000.000	440.340.000	443.540.000	BAPPEDA
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.500.000.000	1.375.438.200	1.375.438.200	BAPPEDA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	75.00 %	75.00 %	75.00 %	8.116.000.000	3.837.200.000	2.196.405.580	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	97.00 %	97.00 %	97.00 %				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					4.216.000.000	2.257.200.000	1.486.166.850	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	176.000.000	160.000.000	84.502.500	BAPPEDA
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				BAPPEDA
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000	60.000.000	41.448.600	BAPPEDA
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	319.000.000	290.000.000	86.360.050	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	110.000.000	101.454.200	BAPPEDA
		Jumlah Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Raperda RPJMD, Dokumen RKPD Tahun 2022, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000.000	1.637.200.000	1.172.401.500	BAPPEDA
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					300.000.000	200.000.000	148.562.100	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	185.000.000	138.571.350	BAPPEDA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Data	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				BAPPEDA
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	15.000.000	9.990.750	BAPPEDA
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					3.600.000.000	1.380.000.000	561.676.630	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000	1.130.000.000	344.293.000	BAPPEDA
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan evaluasi hasil RKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000.000	250.000.000	217.383.630	BAPPEDA
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	89.00 %	89.00 %	89.00 %	19.155.430.525	7.522.107.048	6.649.030.996	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92.00 %	92.00 %	92.00 %				
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	93.00 %	93.00 %	93.00 %				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3.479.647.240	1.835.351.000	1.535.050.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000	163.492.600	110.500.000	BAPPEDA
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175.734.240	159.758.400	150.000.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pemasangan CCTV RT dalam Rangka Mendukung Konduktivitas Wil. di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000	781.270.000	736.550.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen RAD Konvergensi Aksi Pencegahan dan Penurunan Stunting	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen RAD Semarang Kota Inklusif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	803.913.000	730.830.000	538.000.000	BAPPEDA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Profil Gerbang Hebat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang 2020/2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					7.816.500.055	1.936.702.315	1.559.100.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pariwisata Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.650.000.000	1.132.715.685	896.000.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Tabel Input-Output Kota Semarang Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	269.544.740	185.600.000	BAPPEDA
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.650.000.000	519.441.840	470.000.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Roadmap Technopark Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Review RAD Pangan dan Gizi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Studi Potensi Sumber Daya Alam di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.055	15.000.050	7.500.000	BAPPEDA
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					7.859.283.230	3.750.053.733	3.554.880.996	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Sektor Hulu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.623.206.601	2.384.733.274	2.353.380.000	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen LARAP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Lingkungan Kawasan dan Jaringan Sewerage System	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Review Dokumen RP3KP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen RP2KPKPK dan Draft Perwal Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Updating Dokumen EHRA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Kajian Transportasi Berkelanjutan Kota Semarang dan Draft Perwal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	509.300.495	463.000.450	466.703.772	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pemantauan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kampung Melayu			1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pemetaan Air Minum dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Masterplan Semarang Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.150.000.000	377.978.069	464.252.408	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)			1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Kampung Tangguh Mangunharjo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	576.776.134	524.341.940	270.544.816	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					7.164.440.388	2.101.475.075	1.985.366.040	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	7.164.440.388	2.101.475.075	1.985.366.040	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					120.199.712	109.272.465	102.900.000	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.199.712	109.272.465	102.900.000	BAPPEDA
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					850.000.000	223.253.870	205.900.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000	223.253.870	205.900.000	BAPPEDA
5.05.02.2.03	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>					2.304.240.676	1.052.742.050	1.010.177.200	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	332.792.550	302.482.000	BAPPEDA
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.190.000.000	616.094.340	605.408.200	BAPPEDA
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114.240.676	103.855.160	102.287.000	BAPPEDA
5.05.02.2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>					3.890.000.000	716.206.690	666.388.840	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan lomba krenova	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	184.397.580	134.579.730	BAPPEDA
		Jumlah Laporan penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen pendukung / pengembangan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	325.943.640	325.943.640	BAPPEDA
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				BAPPEDA
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Evaluasi SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	2 Edisi	2 Edisi	1.190.000.000	174.867.720	174.867.720	BAPPEDA
		Jumlah Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BAPPEDA
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	30.997.750	30.997.750	BAPPEDA
5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					179.043.734.594	219.654.312.282	218.344.720.584	
5.02	KEUANGAN					179.043.734.594	219.654.312.282	218.344.720.584	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	107.894.809.405	157.631.728.035	156.544.378.617	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur (BPKAD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					202.027.632	122.650.364	88.256.372	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	75.707.000	75.438.970	52.807.258	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA BPKAD Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36.457.000	6.695.313	5.690.268	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	53.086.000	7.081.870	6.018.925	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen dpa bpkad	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.197.672	8.361.520	7.107.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.588.240	6.898.400	5.863.505	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP BPKAD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	19.991.720	18.174.291	10.769.291	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Dokumen LKPJ BPKAD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					728.305.000	69.758.948.045	68.768.283.366	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD Kota Semarang terpenuhi	100%	100%	100%	4.675.000	69.366.378.000	68.328.101.886	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan	100%	100%	100%	700.036.000	382.243.750	430.663.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.444.000	2.240.700	2.205.480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	buku laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.290.000	5.258.770	4.892.970	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.860.000	2.826.825	2.419.280	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					220.720.000	699.321.982	577.266.400	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Perundang-undangan terlaksana	100%	100%	100%	220.720.000	699.321.982	577.266.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					3.780.817.773	2.271.130.989	1.996.535.235	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik / penrangan bangunan kantor yang telah tersedia	100%	100%	100%	68.870.000	39.936.630	28.109.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	85.000.000	113.919.110	219.804.833	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jasa kebersihan kantor tersedia	100%	100%	100%	50.116.000	23.025.819	27.537.971	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor tersedia	100%	100%	100%	791.493.000	82.643.168	49.515.444	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan tersedia	100%	100%	100%	136.000.000	23.869.668	19.546.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	5.000.000	6.198.182	5.206.473	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan minum dan snack rapat tamu yg tersedia	100%	100%	100%	1.474.647.000	76.320.000	100.920.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	141.900.000	1.005.044.000	817.682.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100%	100%	100%	50.000.000	11.272.800	11.272.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	977.791.773	888.901.612	716.939.414	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					127.907.000	246.313.620	37.125.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	mebeleur gedung kantor	100%	100%	100%	127.907.000	246.313.620	37.125.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					100.465.030.000	83.768.049.565	84.477.834.874	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat terpenuhi	100%	100%	100%	6.000.000	1.000.000	1.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi SDA dan Listrik tersedia	100%	100%	100%	100.000.000.000	83.349.749.565	84.143.294.874	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen penyusunan keuangan	100%	100%	100%	459.030.000	417.300.000	333.540.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					2.370.002.000	765.313.470	599.077.370	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	100%	100%	1.046.913.000	470.580.000	470.580.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebel	100%	100%	100%	22.000.000	20.000.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Tanaman-Tanaman	100%	100%	100%	53.724.000	48.840.000	39.336.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan bangunan gedung	100%	100%	100%	1.067.365.000	71.933.400		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	180.000.000	153.960.070	89.161.370	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.62 %	1.62 %	1.62 %	63.604.656.135	55.472.100.900	56.421.025.883	
5.02.02.2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>					5.617.152.001	3.138.078.586	2.992.267.153	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	tersusunnya KUA PPAS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	410.044.000	124.282.550	106.102.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	tercapainya target serapan anggaran	100%	100%	100%	130.739.389	118.853.990	107.653.990	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		tersusunnya KUA PPAS PERUBAHAN 2021	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Terverifikasinya RKA SKPD dan PPKD	100%	100%	100%	17.440.665	15.855.150	13.280.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	terverifikasinya RKA Perubahan	100%	100%	100%	12.160.665	11.055.150	9.320.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	buku perda APBD dan buku perwal penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	388.080.000	362.738.598	352.656.598	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	buku perda tentang perubahan APBD dan buku perwal penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	325.355.000	522.632.416	497.682.416	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen SK Penatausahaan Pengelolaan keuangan & buku perwal pergeseran anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	431.508.820	392.280.745	364.912.095	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		perwal untuk ASB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100%	100%	100%	3.813.919.000	1.510.466.840	1.538.859.204	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	terselenggaranya sosialisasi penganggaran	100%	100%	100%	87.904.462	79.913.147	1.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>					1.140.801.978	1.058.738.632	1.032.092.195	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Uang Kas Daerah	100%	100%	100%	126.200.000	206.821.180	175.781.548	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Surat Penyediaan Dana	100%	100%	100%	337.845.000	91.774.390	78.054.158	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Surat Perintah Pencairan Dana	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Optimalisasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100%	59.890.886	54.446.260	48.701.260	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Realisasi APBD Pemkot telah tersusun	100%	100%	100%	32.340.000	174.309.445	154.136.060	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Optimalisasi Pelunasan Piutang Daerah dan Penempatan Uang Daerah	100%	100%	100%	219.494.000	199.540.000	248.284.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Optimalisasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100%	100%	100%	178.795.092	162.540.993	122.457.896	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rekonsiliasi Taspen dan BPJS,	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tertib Administrasi dalam Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Penatausahaan Keuangan di Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100%	186.237.000	169.306.364	204.677.273	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>					1.428.702.156	1.195.413.663	904.254.554	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	122.291.836	111.174.396	71.727.201	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Aturan	100%	100%	100%	88.567.782	80.516.165	96.385.903	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Pemda yang sesuai dengan Peraturan	100%	100%	100%	339.782.487	308.893.170	257.927.687	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	128.865.100	117.150.091	91.738.371	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Hasil Tindak Lanjut atas LHP BPK	100%	100%	100%	22.700.000	24.883.740	7.983.280	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Panduan Teknis Operasional	100%	100%	100%	287.530.000	153.737.055	56.004.596	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100%	319.272.400	290.247.636	144.578.296	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelola Keuangan SKPD Mampu Menyusun Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	119.692.551	108.811.410	177.909.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>					55.418.000.000	50.079.870.019	51.492.411.981	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	proses pencairan bantuan pemerintah kota yang lancar	1 tahun	1 tahun	1 tahun	418.000.000	79.870.019		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	pendanaan dana tidak terduga	1 tahun	1 tahun	1 tahun	55.000.000.000	50.000.000.000	51.492.411.981	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	60.96 %	60.96 %	60.96 %	7.544.269.054	6.550.483.347	5.379.316.084	
5.02.03.2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>					7.544.269.054	6.550.483.347	5.379.316.084	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	RKBMD dan DKBMD Kota Semarang telah tersusun	100%	100%	100%	10.950.000	91.731.365	15.410.235	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD	100%	100%	100%	759.309.526	690.281.387	512.914.697	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data aset Pemerintah Kota Semarang yang valid	100%	100%	100%	425.825.444	387.114.040	387.114.040	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengelolaan BMD terdokumentasi dengan baik	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penelusuran Aset Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	100%	174.748.354	158.862.140	158.862.140	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jaminan asuransi terhadap aset Pemerintah Kota Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam	100%	100%	100%	4.343.380.636	3.948.527.851	2.639.386.036	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset yang telah terwujud	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyelesaian kerugian daerah	100%	100%	100%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Meminimalisasi BMD yang belum ada nilai dan mendapatkan nilai wajar atas BMD yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	286.372.000	589.953.189	772.480.467	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemanfaatan BMD	100%	100%	100%	577.000.000	77.964.676	77.964.676	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Fasilitasi Kegiatan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	690.610.000	355.073.159	395.313.159	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	peningkatan kualitas SDM Pengelola BMD	100%	100%	100%	276.073.094	250.975.540	419.870.634	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					83.634.966.855	89.240.564.000	85.784.152.071	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	77.196.550.461	72.344.445.091	73.118.412.859	
		Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur (BAPENDA)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.754.683	36.394.190	16.555.695	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	17.777.040	7.908.245	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		dokumen Renstra dan Perubahan Renstra	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA Bapenda murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.463.570	3.148.700		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA Bapenda perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	3.053.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA Bapenda murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.146.313	3.769.375	3.769.375	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.144.800	3.768.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP/LKIP dan LKP Bapenda	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	4.878.075	4.878.075	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.365.529.900	64.373.308.541	66.753.206.886	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	69.732.529.900	63.393.209.000	66.155.627.345	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen group band/korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial	100%	100%	100%	615.000.000	969.100.000	586.580.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Dokumen pembayaran Tenaga Keamanan	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Dokumen penunjang Kinerja PA, PPK, PPTK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	3.352.475	3.352.475	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bahan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6.500.000	4.068.015	4.068.015	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis dan realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.579.051	3.579.051	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					18.455.000	39.369.200	10.748.350	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi	100%	100%	100%	6.235.000	24.153.800	1.624.950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.220.000	15.215.400	9.123.400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					216.499.573	242.940.130	83.181.430	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut Korsik	100%	100%	100%	91.499.573	83.181.430	83.181.430	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya biaya bagi peserta sosialisasi, bintek dan workshop	100%	100%	100%	125.000.000	159.758.700		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.455.546.473	3.370.942.991	2.276.414.783	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	50.000.000	49.877.000	36.132.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	70.246.473	63.860.430	63.860.430	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Logistik Kantor terpenuhi	100%	100%	100%	900.000.000	355.876.458	273.882.050	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan tersedia	100%	100%	100%	400.000.000	725.513.885	490.955.285	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	100%	100%	100%	15.000.000	20.000.000	9.090.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	100%	100%	100%	1.300.000.000	46.875.000	6.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%	100%	100%	500.000.000	898.087.000	292.337.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya penatausahaan arsip dinamis kantor	100%	100%	100%	50.000.000	33.283.108	33.283.108	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	170.300.000	1.177.570.110	1.070.874.910	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					444.405.148	404.004.680	404.004.680	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel kantor tersedia	100%	100%	100%	162.028.636	147.298.760	147.298.760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor tersedia	100%	100%	100%	279.376.592	253.978.720	253.978.720	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset tetap lainnya tersedia	100%	100%	100%	2.999.920	2.727.200	2.727.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					726.903.220	2.053.966.819	2.044.531.095	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat-surat Dinas terkirim	9000 paket	9000 paket	9000 paket	77.900.000	120.000.000	101.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, SDA dan Listrik tersedia	100%	100%	100%	500.000.000	569.364.619	402.288.896	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	69.003.220	62.730.200	62.730.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	80.000.000	1.301.872.000	1.478.511.999	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.944.456.464	1.823.518.540	1.529.769.940	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara	100%	100%	100%	1.062.417.000	1.028.466.000	904.076.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tersedia	100%	100%	100%	76.736.000	69.760.000	69.760.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel tersedia	100%	100%	100%	12.100.000	11.000.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	434.366.713	394.878.830	293.349.530	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	100%	100%	100%	8.836.751	8.033.410	8.033.410	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan	100%	100%	100%	350.000.000	311.380.300	254.551.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	30.683.000	185.145.300	50.939.825	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					14.488.000	160.660.300	47.725.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.488.000	160.660.300	47.725.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase koordinasi penggunaan dana transfer	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase tersajinya data DAU dan DAK yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bahan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					16.195.000	24.485.000	3.214.825	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.195.000	24.485.000	3.214.825	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	6.407.733.394	16.710.973.609	12.614.799.387	
		Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	47.00	47.00	47.00				
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					6.407.733.394	16.710.973.609	12.614.799.387	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100%	100%	100%	212.000.000	413.041.640	412.239.763	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal	1500 Wajib Pajak	1500 Wajib Pajak	1500 Wajib Pajak	1.298.900.000	3.409.818.318	2.409.818.318	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Rakornis Evaluasi Pendapatan	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah yang memadai	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase tersedianya validasi Data Pajak Daerah	100%	100%	100%	312.988.000	199.431.430	199.431.430	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data pendapatan pajak daerah yang valid tercapai	100%	100%	100%	2.965.000	1.109.256.510	928.756.510	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Paket Modul sistem informasi pendapatan daerah terupdate	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah yang memadai	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	8000 WP	8000 WP	8000 WP	470.670.000	1.806.663.521	930.513.521	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase penilaian NJOP PBB dan BPHTB	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	11.980.000	3.722.081.664	3.549.296.664	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		SPPT PBB tepat waktu yang tersampaikan	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak	100%	100%	100%	314.600.000	301.304.024	301.304.024	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100%	100%	100%	13.620.000	139.966.640	108.899.080	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Target penerimaan PAD tercapai	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Konfirmasi tunggakan PBB DI 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan	100%	100%	100%	463.100.000	2.571.160.165	1.733.976.135	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi sisir 700 SSPD	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kompensasi dan restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan	100%	100%	100%	111.722.000	160.400.940	45.425.940	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-				3.114.728.394	2.831.571.267	1.980.929.252	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Prosentase terpungutnya setoran pajak	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase penerimaan pajak dan peningkatan PAD	100%	100%	100%	80.460.000	46.277.490	14.208.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Target penerimaan retribusi daerah tercapai	100%	100%	100%				BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					29.399.233.273	34.110.578.000	34.871.994.764	
5.03	KEPEGAWAIAN					23.221.014.553	26.005.648.378	27.722.016.677	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (BKPP)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.453.519.181	19.126.630.290	18.375.007.936	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					134.556.770	47.013.281	33.663.281	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja	1 buku	1 buku	1 buku	39.418.601	11.564.881	9.064.881	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Renstra	1 buku	1 buku	1 buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPA Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	7.487.494	6.806.813	5.666.813	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		RKA Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	42.614.704	6.677.693	5.177.693	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA Perangkat Daerah	1 buku	1 buku	1 buku	3.105.685	2.823.350	2.823.350	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 buku	1 buku	1 buku	2.511.685	2.283.350	2.283.350	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	1 Buku	1 Buku	1 Buku	39.418.601	16.857.194	8.647.194	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Laporan Monitoring Evaluasi	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.202.070.865	12.671.456.261	12.526.334.135	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pemenuhan gaji, tunjangan dan TPP ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13.544.448.500	12.313.135.000	12.171.692.874	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	557.962.068	345.480.000	345.480.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	39.031.195	5.386.973	3.546.973	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	2 dok	39.515.453	3.830.019	3.080.019	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	21.113.649	3.624.269	2.534.269	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					54.664.000	34.068.882	34.068.882	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta	115 orang	115 orang	115 orang	54.664.000	34.068.882	34.068.882	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					898.195.648	2.437.890.568	1.770.640.340	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan komponen instalasi listrik (sekretariat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.762.161	50.737.260	50.737.260	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemenuhan komponen instalasi listrik (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga (sekretariat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49.525.763	223.529.663	223.529.663	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	81.879.334	150.505.070	150.505.070	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan (sekretariat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66.118.968	234.892.835	234.892.835	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.015.551	2.181.760	2.181.760	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	65.903.493	264.726.000	186.411.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	106.350.000	1.042.554.000	453.618.772	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Transport dalam kota	898 OH	898 OH	898 OH				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	515.640.378	468.763.980	468.763.980	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93.297.680	613.879.560	613.879.560	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan BBM dan oli, perbaikan dan penggantian spre part, serta jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	93.297.680	613.879.560	613.879.560	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pemenuhan perlengkapan gedung kantor	5 bulan	5 bulan	5 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					277.863.823	1.693.989.998	1.768.089.998	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Belanja Telepon, Listrik dan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	212.952.719	449.427.678	449.427.678	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	25.626.700	355.362.320	355.362.320	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Perbaikan peralatan kerja (sekretariat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Perbaikan peralatan kerja (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.284.404	889.200.000	963.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.792.870.395	1.628.331.740	1.628.331.740	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan BBM dan oli, perbaikan dan penggantian spre part, serta jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	769.152.185	43.945.000	43.945.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan BBM dan oli, perbaikan dan penggantian spre part, serta jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas Operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	611.247.637	555.679.670	555.679.670	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair (sekretariat)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	18.482.745	75.760.000	75.760.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemenuhan pemeliharaan mebelair (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ perbaikan gedung dan pagar (UPTB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	393.987.828	952.947.070	952.947.070	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	80.00 %	80.00 %	80.00 %	5.767.495.372	6.879.018.088	9.347.008.741	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.15 %	16.15 %	16.15 %				
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 %	99.00 %	99.00 %				
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 %	99.00 %	99.00 %				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.743.359.024	1.937.781.879	4.971.450.806	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Buku Formasi Kebutuhan Jabatan Pegawai	20 Buku	20 Buku	20 Buku	40.940.973	137.551.989	25.286.226	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Peserta Pengarahan Pengisian Aplikasi E-Formasi dan Rekonsiliasi Data Formasi Pegawai	300 Orang	300 Orang	300 Orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Buku Laporan Kegiatan Pengadaan ASN	10 Buku	10 Buku	10 Buku	1.147.334.043	1.043.030.948	4.212.759.838	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelamar yang mengikuti seleksi pengadaan ASN	12000 Orang	12000 Orang	12000 Orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembekalan Purna Tugas	75 Orang	75 Orang	75 Orang	176.557.945	442.843.453	442.843.453	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian SK yang tepat waktu bagi PNS yang Purna Tugas	775 Lembar	775 Lembar	775 Lembar				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Aplikasi Kepegawaian	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	176.557.945	130.748.109	130.748.109	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tersedianya Data Pegawai yang ter update	10000 Pegawai	10000 Pegawai	10000 Pegawai				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tersedianya Data Utama PNS	10000 Pegawai	10000 Pegawai	10000 Pegawai				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan Cetak ulang Konversi NIP	10 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	201.968.118	183.607.380	159.813.180	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan Kartu Pegawai	100 Kartu	100 Kartu	100 Kartu				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan Kenaikan Gaji Berkala	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan Pengurusan Kartu Istri	100 Kartu	100 Kartu	100 Kartu				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan Pengurusan Kartu Suami	100 Kartu	100 Kartu	100 Kartu				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan Update Data Pegawai	10000 Data	10000 Data	10000 Data				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Arsip Pegawai	10000 Arsip	10000 Arsip	10000 Arsip				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					2.557.299.973	1.799.124.120	1.705.221.515	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan evaluasi penempatan	1 kali	1 kali	1 kali	136.896.378	181.015.900	181.015.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		mutasi intern PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		perubahan jabatan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pelaksanaan desk asistensi verifikasi dan validasi KP	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	494.258.765	449.326.150	455.776.150	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 kali	2 kali	2 kali				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembuatan daftar penjaagaan kenaikan pangkat	4 bulan	4 bulan	4 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penelitian berkas usul kenaikan Pangkat	4 bulan	4 bulan	4 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada PNS	4 kali	4 kali	4 kali				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/Rotasi JPT Pratama	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.926.144.830	1.168.782.070	1.068.429.465	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelantikan Struktural	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pembuatan aplikasi	2 paket	2 paket	2 paket				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penilaian Mandiri Sistem Merit	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Seleksi Terbuka JPT Pratama	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi Penguatan Sistem Merit	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tim Penilai Kinerja PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Uji Kompetensi JPT Pratama	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					776.914.272	1.552.326.147	1.232.209.396	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Buku Statistik Pegawai	1 Buku	1 Buku	1 Buku	298.101.458	778.462.247	481.707.247	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta motivation achievement	130 Orang	130 Orang	130 Orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta rakor kepegawaian	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Survei kepuasan pegawai	1 Buku	1 Buku	1 Buku				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan danlanjutan PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	234.285.425	212.986.750	170.048.686	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pelaksanaan ujian dinas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pelaksanaan UKPPI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberian beasiswa PNS Tugas Belajar	5 orang	5 orang	5 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		penyelesaian ijin belajar	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		penyelesaian ijin gelar	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		penyelesaian surat keterangan belajar dan surat keterangan memiliki ijasah	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi aplikasi kegiatan Pengembangan Karir PNS	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	kenaikan Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	68.448.189	400.805.150	400.805.150	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembekalan Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		update data Jabatan Fungsional	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Penyelesaian Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS Pemerintah Kota Semarang	1000 PNS	1000 PNS	1000 PNS	176.079.200	160.072.000	179.648.313	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian Pemberhentian Jabatan Fungsional PNS Pemerintah Kota Semarang	25 PNS	25 PNS	25 PNS				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian Pengangkatan Jabatan Fungsional PNS Pemerintah Kota Semarang	750 PNS	750 PNS	750 PNS				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional PNS Pemerintah Kota Semarang	25 PNS	25 PNS	25 PNS				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					689.922.103	1.589.785.942	1.438.127.024	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99.900.789	90.818.899	172.321.399	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Sosialisasi Penilaian Kinerja ASN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Juara PNS Berprestasi/Teladan	9 orang	9 orang	9 orang	176.557.945	858.712.567	529.815.513	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Kajian TPP	1 kajian	1 kajian	1 kajian				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan kegiatan konseling	12 bulan	12 bulan	12 bulan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan kegiatan senam	44 kali	44 kali	44 kali				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan uji kesehatan (PNS reguler)	50 orang	50 orang	50 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penghargaan PNS Meninggal Dunia	60 orang	60 orang	60 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian berkas ijin cuti (sakit, CLTN, Perjalanan keluar negeri, cuti besar dan JKM)	480 berkas	480 berkas	480 berkas				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	180 Piagam	180 Piagam	180 Piagam				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 kegiatan	90 kegiatan	90 kegiatan	271.233.945	543.463.839	639.199.475	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan kegiatan bintang	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan kegiatan pelepasan haji	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan kegiatan pembekalan disiplin	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan sosialisasi LHKASN	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan sosialisasi LHKPN	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pelaksanaan Sidak	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	94.251.721	85.683.383	85.683.383	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 kasus	2 kasus	2 kasus				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penghadapan PNS yang dipanggil aparat penegak hukum	75 orang	75 orang	75 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan sidang kasus	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		SK Hukuman disiplin	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Ijin Perceraian	30 kasus	30 kasus	30 kasus	47.977.703	11.107.254	11.107.254	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					6.178.218.720	8.104.929.622	7.149.978.087	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	30.00 %	30.00 %	30.00 %	6.178.218.720	8.104.929.622	7.149.978.087	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					768.427.041	3.186.937.187	2.828.638.652	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	111.508.917	125.359.696	125.359.696	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Kajian Pengembangan Pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	186.340.000	322.969.660	330.969.660	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan Pengembangan Kurikulum Pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Capacity Building	100 orang	100 orang	100 orang	307.696.999	2.615.024.231	2.239.325.696	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Diklat Teknis Customer Service (2 angkatan)	64 orang	64 orang	64 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Diklat Teknis Manajemen Kesekretariatan	30 orang	30 orang	30 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Teknis Etiket Keprotokolan (2 angkatan)	40 orang	40 orang	40 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Teknis Keuangan Kelurahan Angkatan (4 angkatan)	160 orang	160 orang	160 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang	30 orang	30 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Diklat Teknis Penyusunan RENSTRA	30 orang	30 orang	30 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengiriman Diklat Teknis	60 orang	60 orang	60 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um	Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	162.881.125	123.583.600	132.983.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan Monitoring Peningkatan Kapasitas SDM Pada OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					5.409.791.679	4.917.992.435	4.321.339.435	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengiriman Diklat Fungsional	35 orang	35 orang	35 orang	5.409.791.679	4.917.992.435	4.321.339.435	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengiriman Latsar Golongan III	12 orang	12 orang	12 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	5 orang	5 orang	5 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan Latsar Golongan II	236 orang	236 orang	236 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	60 orang	60 orang	60 orang				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT					27.258.644.722	25.353.452.000	22.939.096.283	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					27.258.644.722	25.353.452.000	22.939.096.283	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	18.995.381.198	18.460.536.698	19.038.994.008	
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				
		Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Inspektorat)	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Inspektorat)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					97.404.701	292.983.060	153.481.060	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000	204.687.000	65.185.000	INSPEKTORAT
		tersusunnya dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		tersusunnya dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				INSPEKTORAT
		tersusunnya dokumen RPJMD Tk. OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				INSPEKTORAT
		tersusunnya IKU (Indikator Kinerja Utama)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		tersusunnya RKPD Tk. OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		tersusunnya RKT (Rencana Kerja Tahunan)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.626.655	64.206.050	64.206.050	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.726.650	2.726.650	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	tersusunnya DPA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.965.731	3.605.210	3.605.210	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	tersusunnya DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.812.315	2.556.650	2.556.650	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen LKJIP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	15.201.500	15.201.500	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.615.814.805	10.698.413.600	11.178.333.273	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	100%	100%	100%	11.388.797.200	10.353.452.000	10.939.096.283	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan kegiatan	100%	100%	100%	200.000.000	231.219.000	221.301.640	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan setiap bulan	100%	100%	100%	17.017.605	15.470.550	15.470.550	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	96.287.350	480.100	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya laporan prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1.984.700	1.984.700	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.731.875.530	2.517.044.300	1.640.556.900	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi APIP	60 orang	60 orang	60 orang	1.731.875.530	1.574.432.300	975.629.900	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan APIP Terhadap Peraturan Perundang-undangan	3 Level	3 Level	3 Level	1.000.000.000	942.612.000	664.927.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.016.062.140	2.369.476.536	3.013.830.028	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	25.000.000	54.780.667	95.426.467	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat	100%	100%	100%	150.000.000	94.912.717	116.353.717	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Inspektorat	100%	100%	100%	150.000.000	165.866.797	165.866.797	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya buku bacaan di perpustakaan Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional	20 Buku	20 Buku	20 Buku	10.000.000	6.818.000	6.818.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terpenuhinya jamuan makan dan minum untuk tamu	100%	100%	100%	500.000.000	228.306.364	243.420.637	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	100%	100%	100%	125.000.000	858.735.500	803.727.500	INSPEKTORAT
		terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah	100%	100%	100%				INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung SPBE	100%	100%	100%	1.056.062.140	960.056.491	1.582.216.910	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.312.559.350	2.102.326.682	2.572.500.227	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya pengadaan kendaraan operasional (10 unit motor)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.042.696.152	1.856.996.502	1.648.996.502	INSPEKTORAT
		terpenuhinya pengadaan kendaraan operasional (5 unit mobil)	5 Unit	5 Unit	5 Unit				INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana mebeleur	100%	100%	100%	269.863.198	245.330.180	923.503.725	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	100%	100%				INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.433.472	14.939.520	14.939.520	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya abonemen telepon, surat kabar, dan internet	100%	100%	100%	16.433.472	14.939.520	14.939.520	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.231.200	465.353.000	465.353.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	38.973.000	35.430.000	35.430.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Inspektorat	27 Unit	27 Unit	27 Unit	25.000.000	321.830.000	321.830.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					3.605.800	3.278.000	3.278.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor Inspektorat	100%	100%	100%	87.652.400	79.684.000	79.684.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat	100%	100%	100%	50.000.000	25.131.000	25.131.000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	5.448.917.803	4.334.419.192	2.058.264.165	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					4.144.951.803	3.768.138.002	1.815.042.975	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala	64 Obrik	64 Obrik	64 Obrik	265.572.230	241.429.300	126.629.300	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan keuangan OPD	114 obrik	114 obrik	114 obrik	740.001.911	672.729.010	367.729.010	INSPEKTORAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terevaluasinya SAKIP OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	413.806.470	376.187.700	92.897.700	INSPEKTORAT
		Tereviunya LKJIP Pemkot Semarang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				INSPEKTORAT
		Tereviunya LPPD Pemkot Semarang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				INSPEKTORAT
		Tereviunya Renstra OPD	51 Laporan	51 Laporan	51 Laporan				INSPEKTORAT
		Tereviunya RKPD Murni Kota Semarang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				INSPEKTORAT
		Tereviunya RKPD Perubahan Kota Semarang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				INSPEKTORAT
		Tereviunya RPJMD Kota Semarang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Tereviunya DAK Fisik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	65.274.226	59.340.205	45.090.205	INSPEKTORAT
		Tereviunya LKPD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				INSPEKTORAT
		Terlaksananya reviu KUA PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		Terlaksananya reviu RKA Murni OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD				INSPEKTORAT
		Terlaksananya reviu RKA Perubahan OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD				INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kegiatan Saber Pungli	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.327.576.578	2.115.978.707	993.503.680	INSPEKTORAT
		Terlaksananya Rakorwastas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan				INSPEKTORAT
		Terlaksananya RIKMA dengan BPKP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya TLHP BPK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	332.720.388	302.473.080	189.193.080	INSPEKTORAT
		Terlaksananya TLHP Inspektorat Kota Semarang	51 OPD	51 OPD	51 OPD				INSPEKTORAT
		Terselenggaranya kegiatan Larwasda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				INSPEKTORAT
		Terselenggaranya kegiatan Rakorwas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					1.303.966.000	566.281.190	243.221.190	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	53.966.000	49.060.000		INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pemeriksaan khusus (ARG, Probitry Audit, Pelayanan Publik dll) dan kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	109 Laporan	109 Laporan	109 Laporan	1.250.000.000	517.221.190	243.221.190	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas SPIP	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	2.814.345.721	2.558.496.110	1.841.838.110	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					710.731.824	646.119.840	229.635.840	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					76.889.934	69.899.940	36.615.940	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					633.841.890	576.219.900	193.019.900	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					2.103.613.897	1.912.376.270	1.612.202.270	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan asistensi / Quality Assurance ke OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	915.133.340	831.939.400	704.341.400	INSPEKTORAT
		Terlaksananya Pendampingan DPRD	130 Kali	130 Kali	130 Kali				INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan PMPRB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	162.657.770	147.870.700	147.870.700	INSPEKTORAT
		Terselenggaranya kegiatan PMPZI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				INSPEKTORAT
		Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya kegiatan Korsupgah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	869.384.461	790.349.510	737.773.510	INSPEKTORAT
		Terlaksananya kegiatan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Tk. Kecamatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan				INSPEKTORAT
		Terlaksananya kegiatan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Tk Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				INSPEKTORAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Terlaksananya Laporan Gratifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		Terlaksananya monitoring dan verifikasi LHKASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
		Tersusunnya Laporan UPG	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas (SPI)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	156.438.326	142.216.660	22.216.660	INSPEKTORAT
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN SEMARANG SELATAN					45.617.252.200	37.866.145.000	36.557.072.011	
7.01	KECAMATAN					45.617.252.200	37.866.145.000	36.557.072.011	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.961.777.700	14.045.350.000	13.385.482.071	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.960.000	17.550.000	17.550.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	3.650.000	3.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.815.000	1.650.000	1.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.650.000	1.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.815.000	1.650.000	1.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.815.000	1.650.000	1.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	3.650.000	3.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.015.000	3.650.000	3.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.805.277.700	11.496.637.000	11.093.724.011	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100%	100%	100%	12.275.842.700	11.159.857.000	10.850.784.011	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100%	100%	100%	523.920.000	331.480.000	237.640.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.650.000	1.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.015.000	3.650.000	3.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.822.145.000	1.234.120.000	1.112.800.060	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	15.000.000	12.300.000	12.300.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	132.880.000	120.800.000	79.580.060	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	100.000.000	38.700.000	38.700.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	50.000.000	32.770.000	26.770.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan jamuan rapat dan kegiatan	100%	100%	100%	1.500.000.000	98.400.000	80.550.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	94.215.000	85.650.000	29.400.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi penunjang tugas kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	930.050.000	845.500.000	845.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.185.000	138.350.000	75.300.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	asilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	100%	100%	100%	152.185.000	138.350.000	75.300.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.450.000	109.500.000	85.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor	100%	100%	100%	120.450.000	109.500.000	85.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.047.760.000	1.049.193.000	1.000.608.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	20.000.000	290.643.000	206.858.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	100%	100%	415.500.000	201.950.000	201.950.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	504.515.000	458.650.000	493.850.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		rumah dinas yang dipelihara	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	107.745.000	97.950.000	97.950.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	9.918.073.000	9.016.430.000	8.999.663.990	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					96.393.000	87.630.000	40.431.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					96.393.000	87.630.000	40.431.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					9.290.380.000	8.445.800.000	8.463.880.290	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	716.760.000	651.600.000	681.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan	70000 pelayanan	70000 pelayanan	70000 pelayanan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		umlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%	100%	100%	556.600.000	506.000.000	500.720.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%	100%	100%	764.500.000	695.000.000	693.222.290	KELURAHAN BARUSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%	100%	100%	889.240.000	808.400.000	808.400.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%	100%	100%	958.540.000	871.400.000	867.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%	100%	100%	833.800.000	758.000.000	757.338.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%	100%	100%	1.374.340.000	1.249.400.000	1.249.400.000	KELURAHAN WONODRI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%	100%	100%	875.380.000	795.800.000	795.800.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Lor	100%	100%	100%	695.200.000	632.000.000	632.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%	100%	100%	709.060.000	644.600.000	644.600.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%	100%	100%	916.960.000	833.600.000	833.600.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					531.300.000	483.000.000	495.352.700	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	300 kegiatan	300 kegiatan	300 kegiatan	531.300.000	483.000.000	495.352.700	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Keluraha	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	80%	80%	80%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan sekecamatan	50%	50%	50%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	18.357.351.500	14.458.865.000	13.837.325.950	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.209.621.500	14.324.565.000	13.703.025.950	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lokasi yang masuk daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	82 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	129.431.500	117.665.000	99.371.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	58 kegiatan	58 kegiatan	58 kegiatan	7.282.770.000	6.620.700.000	6.620.700.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	68 kegiatan	68 kegiatan	68 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	10 paket	10 paket	10 paket				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulustalan	5 paket	5 paket	5 paket	1.056.000.000	491.000.000	490.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Barusari	5 paket	5 paket	5 paket	1.031.000.000	457.000.000	453.447.182	KELURAHAN BARUSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Randusari	11 paket	11 paket	11 paket	1.025.000.000	507.000.000	507.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Mugassari	6 paket	6 paket	6 paket	545.380.000	495.800.000	407.900.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Pleburan	15 paket	15 paket	15 paket	1.015.000.000	502.200.000	500.612.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Wonodri	5 paket	5 paket	5 paket	1.014.000.000	486.800.000	485.800.000	KELURAHAN WONODRI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Peterongan	5 paket	5 paket	5 paket	551.100.000	501.000.000	436.356.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Lor	5 paket	5 paket	5 paket	551.100.000	501.000.000	501.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Kidul	6 paket	6 paket	6 paket	515.900.000	469.000.000	467.795.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Tengah	5 paket	5 paket	5 paket	546.700.000	497.000.000	497.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	625.900.000	569.000.000	254.178.640	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah paket kegiatan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Bulustalan	10 paket	10 paket	10 paket	219.780.000	199.800.000	191.080.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%	100%	100%				KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah paket kegiatan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Barusari	10 paket	10 paket	10 paket	271.040.000	246.400.000	236.730.528	KELURAHAN BARUSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%	100%	100%				KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Randusari	10 paket	10 paket	10 paket	216.040.000	196.400.000	181.400.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%	100%	100%				KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah paket kegiatan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Mugassari	10 paket	10 paket	10 paket	228.360.000	207.600.000	197.600.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100%	100%	100%				KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Pleburan	11 paket	11 paket	11 paket	202.840.000	184.400.000	171.650.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%	100%	100%				KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Wonodri	9 paket	9 paket	9 paket	256.740.000	233.400.000	219.400.000	KELURAHAN WONODRI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%	100%	100%				KELURAHAN WONODRI
		Jumlah paket kegiatan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Peterongan	9 paket	9 paket	9 paket	227.260.000	206.600.000	193.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%	100%	100%				KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah paket kegiatan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Lor	10 paket	10 paket	10 paket	213.400.000	194.000.000	179.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Lor	100%	100%	100%				KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Kidul	11 paket	11 paket	11 paket	253.220.000	230.200.000	216.405.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%	100%	100%				KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah paket kegiatan Non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Lamper Tengah	10 paket	10 paket	10 paket	231.660.000	210.600.000	195.600.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%	100%	100%				KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					147.730.000	134.300.000	134.300.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	108.900.000	99.000.000	99.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah kegiatan lembaga masyarakat kelurahan (LPMK dn PKK)	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah pembinaan, Monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	80%	80%	80%				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	38.830.000	35.300.000	35.300.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	380.050.000	345.500.000	334.600.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					380.050.000	345.500.000	334.600.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	30%	30%	30%	380.050.000	345.500.000	334.600.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN SEMARANG UTARA					44.495.237.016	40.543.940.000	40.996.104.721	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.498.702.643	12.238.661.973	13.521.165.538	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Semarang Utara)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000	14.153.000	12.581.943	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ	100%	100%	100%	10.000.000	11.680.500	10.109.443	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Dokumen Renja	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PENINGKATAN EKONOMI	100%	100%	100%	10.000.000			KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LAKIP	100%	100%	100%	10.000.000	2.472.500	2.472.500	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.280.596.300	9.366.557.000	10.738.719.622	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN Kecamatan Semarang Utara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.800.596.300	8.909.633.000	10.438.189.622	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	450.000.000	454.924.000	298.530.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	10.000.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	10.000.000	500.000	500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	100%	100%	100%	10.000.000	500.000	500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.775.344.967	1.492.948.170	1.404.860.170	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik dan penerangan bangunan	100%	100%	100%	30.000.000	5.400.637	5.400.637	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	200.000.000	1.074.479.858	1.074.479.858	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan ATK kantor kecamatan	100%	100%	100%	95.000.000	23.560.143	23.560.143	KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan jilid	100%	100%	100%	80.000.000	22.434.562	22.434.562	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jamuan makan minum rapat	100%	100%	100%	1.200.000.000	212.880.000	198.480.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada tahun yang berkenaan	100%	100%	100%	100.000.000	90.243.000	16.555.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	70.344.967	63.949.970	63.949.970	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.359.376	638.186.196	638.186.196	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	langganan telepon, listrik, PDAM, dan Koran	100%	100%	100%	159.359.376	144.872.160	144.872.160	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Printer, komputer, Laptop	100%	100%	100%	125.000.000	493.314.036	493.314.036	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.402.000	726.817.607	726.817.607	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan service kendaraan dinas	100%	100%	100%	15.000.000	150.914.218	150.914.218	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat dan bahan pembersih	100%	100%	100%	83.402.000	75.820.000	75.820.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Gedung kantor bersih dan indah	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
		gedung kantor layak pakai	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pemenuhan pemeliharaan kantor kecamatan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
		perlengkapan perkantoran yang layak pakai	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	30.000.000	500.083.389	500.083.389	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 jumlah pelayanan	477561.00 jumlah pelayanan	477561.00 jumlah pelayanan	12.133.775.063	13.029.043.908	12.830.736.879	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Honor Non ASN	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					12.053.775.063	11.637.273.778	11.607.723.778	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%	1.111.071.001	1.010.064.546	992.064.546	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		OPRASIONAL KELURAHAN	100%	100%	100%	45.000.000	720.205.540	720.205.540	KELURAHAN PLOMBOKAN
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%	100%	100%	1.318.890.970	1.198.991.791	1.198.991.791	KELURAHAN BULU LOR
		Operasional Kelurahan	100%	100%	100%	819.940.000	745.400.000	745.400.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Operasional Kelurahan	100%	100%	100%	1.443.646.421	1.312.405.837	1.312.405.837	KELURAHAN KUNINGAN
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%	100%	100%	1.984.180.151	1.803.800.137	1.803.800.137	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%	100%	100%	528.885.771	480.805.246	480.805.246	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		OPERASIONAL KELURAHAN	100%	100%	100%	1.679.260.000	1.526.600.000	1.515.050.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Operasional Kelurahan	100%	100%	100%	2.081.200.000	1.892.000.000	1.892.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Operasional Kelurahan	100%	100%	100%	1.041.700.749	947.000.681	947.000.681	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					80.000.000	1.391.770.130	1.223.013.101	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	100%	100%	100%	80.000.000	1.391.770.130	1.223.013.101	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	19.476.923.310	14.925.474.119	14.293.442.304	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.848.708.173	14.758.514.904	14.152.768.089	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase jumlah RW yang mengusulkan ke musrenbang	100%	100%	100%	120.000.000	117.403.923	92.203.923	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah fasilitasi hasil musrenbang	100%	100%	100%	5.648.090.236	5.134.627.487	5.115.227.487	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		JUMLAH PAKET KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PLOMBOKAN	100%	100%	100%	2.086.490.000	662.126.988	662.126.988	KELURAHAN PLOMBOKAN
		JUMLAH PAKET KEGIATAN SARANA DAN PRASARAN	100%	100%	100%	465.489.521	423.172.292	423.172.292	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	581.914.670	529.013.336	529.013.336	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	1.169.316.141	1.063.014.674	1.063.014.674	KELURAHAN KUNINGAN
		JUMLAH PAKET KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	100%	100%	100%	994.404.326	904.003.933	904.003.933	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		JUMLAH PAKET KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA	100%	100%	100%	999.900.000	909.000.000	909.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN	100%	100%	100%	1.188.913.736	1.080.830.669	1.080.830.669	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	901.857.934	819.870.849	819.870.849	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	449.219.404	408.381.276	408.381.276	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pelaksanaan hasil musrenbang	100%	100%	100%	297.343.999	270.312.726	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN PLOMBOKAN	100%	100%	100%	1.549.210.000	258.067.472	231.086.567	KELURAHAN PLOMBOKAN
		JUMLAH LEMBAGA DIKELURAHAN	100%	100%	100%	289.532.009	263.210.917	224.764.197	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%	100%	100%	285.105.330	259.186.664	233.199.968	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga DiKelurahan	100%	100%	100%	301.377.438	273.979.489	236.254.929	KELURAHAN KUNINGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN PANGGUNG LOR	100%	100%	100%	303.375.523	275.795.930	239.297.917	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		JUMLAH KELEMBAGAAN DI KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	100%	100%	100%	319.654.229	290.594.754	258.121.767	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		JUMLAH LEMBAGA DI KELURAHAN	100%	100%	100%	300.266.264	272.969.331	248.598.459	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%	100%	100%	312.641.066	284.219.151	237.352.511	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Lembaga di Kelurahan	100%	100%	100%	284.606.347	258.733.043	232.746.347	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					628.215.137	166.959.215	140.674.215	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	100%	100%	100%	128.215.137	116.559.215	90.274.215	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%	500.000.000	50.400.000	50.400.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	385.836.000	350.760.000	350.760.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					385.836.000	350.760.000	350.760.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan se kecamatan	100%	100%	100%	385.836.000	350.760.000	350.760.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN SEMARANG BARAT					79.514.861.574	61.604.091.000	58.388.999.975	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21.104.667.053	18.097.602.055	16.452.058.115	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.987.860	9.700.621	9.700.621	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	2 dok	2 dok	2 dok	6.000.000	2.336.118	2.336.118	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	4 dok	4 dok	4 dok	10.000.000	4.118.963	4.118.963	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD,EKK dan Evkin kelurahan	3 dok	3 dok	3 dok	6.000.000	1.438.395	1.438.395	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1 dok	1 dok	1 dok	1.987.860	1.807.145	1.807.145	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.520.514.400	15.938.431.974	14.455.890.380	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Semarang Barat dan Pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Semarang Barat	100%	100%	100%	16.702.514.400	15.184.104.000	13.969.015.126	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	800.000.000	749.992.720	482.540.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1 dok	1 dok	1 dok	6.000.000	1.419.809	1.419.809	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	1.382.218	1.382.218	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	1.533.227	1.533.227	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.891.692.993	1.492.958.866	1.432.360.866	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	40.000.000	36.585.090	36.585.090	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	100%	100%	50.000.000	14.882.000	14.882.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	120.000.000	22.690.302	22.690.302	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	30.000.000	15.628.390	16.101.390	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan	100%	100%	100%	1.000.000.000	124.365.272	112.365.272	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	300.000.000	49.996.000	925.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhi Kebutuhan Sarpras Komunikasi dan Informasi	100%	100%	100%	1.351.692.993	1.228.811.812	1.228.811.812	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.000.000	119.874.000	119.874.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Rekening Telepon, Listrik, Koran	100%	100%	100%	300.000.000	119.874.000	119.874.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.471.800	536.636.594	434.232.248	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	20.000.000	314.532.971	314.532.971	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	38.471.800	34.974.364	34.974.364	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	100%	100%	50.000.000	15.449.346		KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	100.000.000	111.540.000	24.585.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	160.000.000	60.139.913	60.139.913	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 Pelayanan	477561.00 Pelayanan	477561.00 Pelayanan	31.680.000.000	17.897.072.063	17.967.068.389	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4.000.000.000	2.739.388.000	2.870.588.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Capaian Kinerja	100%	100%	100%	4.000.000.000	2.739.388.000	2.870.588.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					27.620.000.000	14.727.212.290	14.695.184.571	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	20.000.000	90.343.327	81.343.327	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.800.000.000	972.392.130	972.392.130	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	2.200.000.000	1.451.000.000	1.451.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000.000	783.200.000	775.002.260	KELURAHAN KRAPYAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.000.000.000	456.637.834	456.637.834	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000.000	752.554.407	752.554.407	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.200.000.000	597.387.565	597.387.565	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	3.000.000.000	1.555.145.748	1.555.145.748	KELURAHAN GISIKDRONO
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.800.000.000	959.600.000	959.600.000	KELURAHAN BONGSARI
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.800.000.000	912.217.750	912.217.750	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.200.000.000	554.791.180	554.791.180	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.000.000.000	417.800.000	416.001.500	KELURAHAN CABEAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.300.000.000	696.946.996	695.428.996	KELURAHAN KARANGAYU
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	2.300.000.000	1.377.224.183	1.377.224.183	KELURAHAN KROBOKAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000.000	782.497.154	770.983.675	KELURAHAN TAWANGSARI
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000.000	826.748.941	826.748.941	KELURAHAN TAWANGMAS
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	3.000.000.000	1.540.725.075	1.540.725.075	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>					60.000.000	430.471.773	401.295.818	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Aset yang Dikelola di Kecamatan Kelurahan, Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura, Persentase Jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan, Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan G	100%	100%	100%	60.000.000	430.471.773	401.295.818	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	26.720.194.521	25.548.100.974	23.908.557.563	
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					-	-	-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen				KELURAHAN NGENEMPLAK SIMONGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KRAPYAK
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen				KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen				KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN GISIKDRONO
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN BONGSARI
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen				KELURAHAN CABEAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGAYU
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen				KELURAHAN KROBOKAN
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN TAWANGSARI
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN TAWANGMAS
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					24.670.194.521	23.849.332.782	22.218.687.443	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	80.000.000	126.124.319	61.593.046	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan	100 persen	100 persen	100 persen	2.166.925.000	12.471.589.409	12.419.285.409	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.028.000.000	252.622.450	252.622.450	KELURAHAN NGENEMPLAK SIMONGAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.079.000.000	253.237.183	253.237.183	KELURAHAN MANYARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.064.000.000	599.339.338	599.339.338	KELURAHAN KRAPYAK
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.022.000.000	483.795.786	483.795.786	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.002.000.000	473.201.985	473.201.985	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.037.000.000	615.023.230	615.023.230	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.242.000.000	236.316.207	236.316.207	KELURAHAN GISIKDRONO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.075.000.000	252.909.183	252.909.183	KELURAHAN BONGSARI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.007.000.000	386.514.740	386.514.740	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.038.000.000	394.935.270	394.935.270	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.014.000.000	714.001.445	714.001.445	KELURAHAN CABEAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.017.000.000	463.286.204	463.286.204	KELURAHAN KARANGAYU
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.138.000.000	254.447.957	254.447.957	KELURAHAN KROBOKAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	1.049.000.000	427.436.246	427.436.246	KELURAHAN TAWANGSARI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.011.000.000	365.229.974	365.229.974	KELURAHAN TAWANGMAS
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	1.039.000.000	258.616.095	258.616.095	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan, Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	900.000.000	583.188.017	411.926.755	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	275.533.962	250.485.420	180.574.590	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	285.189.099	259.262.817	184.424.972	KELURAHAN MANYARAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	279.576.728	254.160.662	192.026.177	KELURAHAN KRAPYAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	251.533.018	228.666.380	177.148.078	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100 persen	100 persen	100 persen	269.987.969	245.443.608	187.459.455	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	258.268.126	234.789.205	185.772.652	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	313.321.850	284.838.045	235.616.665	KELURAHAN GISIKDRONO
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	280.269.899	254.790.817	180.805.500	KELURAHAN BONGSARI
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	264.844.261	240.767.510	126.514.010	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	619.600.905	563.273.550	202.783.842	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	252.998.411	229.998.555	146.643.302	KELURAHAN CABEAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	224.473.480	204.066.800	153.474.432	KELURAHAN KARANGAYU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	295.160.646	268.327.860	192.727.360	KELURAHAN KROBOKAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	244.273.260	222.066.600	176.726.535	KELURAHAN TAWANGSARI
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	250.933.194	228.121.085	138.795.860	KELURAHAN TAWANGMAS
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	295.304.713	268.458.830	233.475.510	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2.050.000.000	1.698.768.192	1.689.870.120	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	50.000.000	98.768.192	89.870.120	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%	2.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	10.000.000	61.315.908	61.315.908	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					10.000.000	61.315.908	61.315.908	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kapasitas perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	10.000.000	61.315.908	61.315.908	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN SEMARANG TIMUR					44.971.732.782	41.586.057.000	40.050.821.717	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.182.024.174	14.368.379.472	13.777.279.250	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.413.116	17.259.456	17.259.456	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.820.000	4.717.830	4.717.830	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.409.990	2.190.900	2.190.900	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.225.000	2.943.100	2.943.100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.472.160	2.247.418	2.247.418	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.467.760	2.243.418	2.243.418	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.645.000	759.330	759.330	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.373.206	2.157.460	2.157.460	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.407.421.200	11.495.454.570	11.351.927.421	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	12.064.296.200	10.967.542.000	10.868.414.851	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA,KPA,PPK,Bendahara dan Bendahara Pembantu Terpenuhi	100%	100%	100%	338.000.000	524.080.000	479.680.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.820.000	2.242.300	2.242.300	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.485.000	752.090	752.090	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.820.000	838.180	838.180	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.916.999.393	1.252.385.601	1.106.513.776	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	6.600.000	5.979.800	5.979.800	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	158.803.765	144.367.059	144.367.059	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	70.475.000	24.724.940	24.724.940	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	19.200.000	27.228.686	13.651.131	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Jamuan rapat	100%	100%	100%	700.000.000	140.550.000	77.655.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	100%	100%	100%	90.000.000	116.880.000	52.184.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					871.920.628	792.655.116	787.951.846	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75.000.000	347.875.870	211.729.655	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	75.000.000	347.875.870	211.729.655	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.000.000	151.328.832	94.844.973	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telepon,air,listrik, dan Koran kantor	100%	100%	100%	182.000.000	151.328.832	94.844.973	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					583.190.465	1.104.075.143	995.003.969	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai	26 unit	26 unit	26 unit	10.000.000	280.076.665	195.490.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah instalasi listrik kantor yang diperbaiki/dinaikkan	2 unit	2 unit	2 unit	15.000.000	241.201.499	240.601.499	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor	2 buah	2 buah	2 buah				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenan	11 gedung	11 gedung	11 gedung	538.190.465	489.264.059	514.903.550	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Rumah dinas yang di pelihara	10 unit	10 unit	10 unit				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	20.000.000	93.532.920	44.008.920	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 buah	3 buah	3 buah				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	11.799.528.485	10.323.512.075	10.258.175.829	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 kelurahan	95.00 kelurahan	19000.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					62.000.000	29.036.390	29.036.390	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	62.000.000	29.036.390	29.036.390	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					11.071.690.000	9.689.167.971	9.660.935.687	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	494.320.000	871.746.422	903.230.958	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah pelayanan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan	19000 jumlah pelayanan	19000 jumlah pelayanan	19000 jumlah pelayanan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100%	100%	100%	1.429.440.000	1.236.800.000	1.232.474.989	KELURAHAN KEMIJEN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100%	100%	100%	861.920.000	670.220.000	668.780.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100%	100%	100%	1.164.940.000	985.339.921	979.836.029	KELURAHAN MLATIBARU
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	823.510.000	657.629.073	656.219.073	KELURAHAN MLATIHARJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100%	100%	100%	614.330.000	455.959.846	446.249.846	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan Bugangkelurahan	100%	100%	100%	1.194.200.000	1.010.599.908	1.008.349.908	KELURAHAN BUGANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100%	100%	100%	972.990.000	796.339.926	786.599.926	KELURAHAN SARIREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%	100%	100%	2.120.380.000	1.903.970.052	1.903.970.052	KELURAHAN REJOSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi Kelurahan	100%	100%	100%	623.160.000	468.500.276	456.074.885	KELURAHAN KARANGTURI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	100%	100%	100%	772.500.000	632.062.547	619.150.021	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					665.838.485	605.307.714	568.203.752	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					665.838.485	605.307.714	568.203.752	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	17.737.380.123	16.595.522.334	15.697.523.519	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					16.479.084.996	15.451.617.673	14.670.533.718	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	147 lokasi	147 lokasi	147 lokasi	43.000.000	202.796.764	159.478.334	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	10 paket	10 paket	10 paket	1.875.210.000	6.628.323.708	7.166.935.574	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan	48 paket	48 paket	48 paket				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	42 paket	42 paket	42 paket				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah pembangunan gapuro, Balai RW, Poskamling, Taman di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik lingkungan Kelurahan Kemijen	6 paket	6 paket	6 paket	1.342.000.000	725.700.000	720.372.636	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Rejomulyo	5 paket	5 paket	5 paket	1.017.000.000	610.800.000	606.399.981	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di kelurahan Mlatibaru	7 paket	7 paket	7 paket	1.001.000.000	352.701.482	349.720.600	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	1.000.000.000	490.500.000	487.163.118	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik lingkungan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	3 paket	3 paket	3 paket	1.051.000.000	649.116.352	644.067.666	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik kelurahan hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket	1.006.000.000	277.300.052	276.533.802	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik Kelurahan Sarirejo	7 paket	7 paket	7 paket	1.008.000.000	276.954.572	276.154.572	KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Rejosari	6 paket	6 paket	6 paket	1.425.000.000	612.683.733	606.607.983	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Karangturi	6 paket	6 paket	6 paket	1.032.000.000	664.900.000	661.170.063	KELURAHAN KARANGTURI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jmlah paket kegiatan fisik di Kelurahan Karangtempel	6 paket	6 paket	6 paket	1.054.000.000	664.500.105	660.798.628	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	875.400.625	795.818.750	146.509.355	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan Kemijen	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	289.520.000	263.200.000	215.024.699	KELURAHAN KEMIJEN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan KemijenKelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan Rejomulyo	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	270.578.000	245.980.000	166.319.864	KELURAHAN REJOMULYO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100%	100%	100%				KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di kelurahan Mlatibaru	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	279.684.457	254.258.597	175.049.632	KELURAHAN MLATIBARU
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100%	100%	100%				KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik pelaksanaan hasil musrenbang Kelurahan Mlatiharjo	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	270.568.020	245.970.927	195.972.509	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik lingkungan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	266.336.182	242.123.802	179.167.135	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100%	100%	100%				KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan Bugangan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	284.240.044	258.400.040	248.504.159	KELURAHAN BUGANGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100%	100%	100%				KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik Kelurahan Sarirejo	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	279.626.052	254.205.502	174.610.082	KELURAHAN SARIREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100%	100%	100%				KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan Rejosari	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	304.200.837	276.546.215	220.277.904	KELURAHAN REJOSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%	100%	100%				KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan non fisik di Kelurahan Karangturi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	261.469.696	237.699.724	198.963.681	KELURAHAN KARANGTURI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGTURI
		Jmlah paket kegiatan non fisik di Kelurahan Karangtempel	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	243.251.083	221.137.348	134.731.741	KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan KarangtempelKelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGTEMPEL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					1.258.295.127	1.143.904.661	1.026.989.801	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jasa Tenaga Non ASN untuk menunjang administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	108.820.581	98.927.801	98.927.801	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan	480 kegiatan	480 kegiatan	480 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Laporan Hasil Monev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	730 kegiatan	730 kegiatan	730 kegiatan	1.149.474.546	1.044.976.860	928.062.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	80%	80%	80%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan	80%	80%	80%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase jumlah titik pantau adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	50%	50%	50%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	252.800.000	298.643.119	317.843.119	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					252.800.000	298.643.119	317.843.119	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	80%	80%	80%	252.800.000	298.643.119	317.843.119	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	50%	50%	50%				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.0.00.0.00.05.00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					49.835.474.701	49.005.926.000	46.898.285.755	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.241.240.771	18.865.995.315	18.517.074.098	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.587.694	11.268.620	7.285.711	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra perangkat Daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	4.824.580	3.842.640	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.815.644	1.650.585	780.276	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.422.350	1.293.045	805.145	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.422.350	1.293.045	618.355	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.350	1.293.045	618.355	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan (kec smg tengah)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.505.000	287.980	287.980	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	626.340	332.960	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah dokumen LKPJ perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.670.991.900	15.449.492.790	15.303.722.550	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	16.129.661.900	14.663.329.000	14.555.688.760	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA, KPA, PPTK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	100%	100%	535.330.000	783.949.140	745.819.140	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3.500.000	1.822.800	1.822.800	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah (Kec Smg Tengah)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	391.850	391.850	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.752.967.577	1.336.999.125	1.189.735.826	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	2.500.000	5.252.550	5.252.550	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	152.638.300	217.373.920	179.804.290	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	24.598.000	21.833.511	25.742.911	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	10.000.000	10.229.750	9.360.081	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan rapat dan kegiatan	100%	100%	100%	525.500.000	99.660.960	54.672.560	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	95.000.000	125.620.000	58.575.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	942.731.277	857.028.434	856.328.434	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.536.600	471.609.930	380.323.662	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	165.536.600	471.609.930	380.323.662	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.500.000	98.554.200	80.554.409	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telepon, air, listrik dan koran kantor	100%	100%	100%	115.500.000	98.554.200	80.554.409	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521.657.000	1.498.070.650	1.555.451.940	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	54 unit	54 unit	54 unit	23.000.000	355.704.000	282.204.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan ringan/sedang gedung kantor	3 gedung	3 gedung	3 gedung	350.000.000	278.640.880	453.507.180	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	3.600.000	731.855.770	739.850.760	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	145.057.000	131.870.000	79.890.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	10.595.262.212	9.500.096.216	9.404.890.506	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	14750.00 kelurahan	14750.00 kelurahan	14750.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					452.342.000	54.330.000	44.680.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan movev	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	452.342.000	54.330.000	44.680.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pembinaan, monitoring, evaluasi pemerintah kec dan kel	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase jumlah RW dikelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	50%	50%	50%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					9.644.132.212	8.986.203.252	8.974.525.972	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	30.000.000	1.027.128.700	1.025.151.420	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kelurahan	14750 layanan	14750 layanan	14750 layanan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2 jenis	2 jenis	2 jenis				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	805.655.000	657.440.000	657.440.000	KELURAHAN MIROTO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	706.955.000	569.120.000	569.120.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	823.505.000	670.100.000	670.100.000	KELURAHAN JAGALAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	642.455.000	506.119.000	506.119.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	870.105.000	708.020.000	708.020.000	KELURAHAN GABAHAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	693.755.000	544.100.000	544.100.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	487.155.000	329.694.450	319.994.450	KELURAHAN SEKAYU
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	534.555.000	380.240.000	380.240.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	556.105.000	417.980.000	417.980.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	376.618.000	342.380.000	342.380.000	KELURAHAN KAUMAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	640.156.000	581.960.000	581.960.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	515.270.283	468.427.530	468.427.530	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	598.378.000	543.980.000	543.980.000	KELURAHAN PEKUNDEN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	612.370.000	556.700.000	556.700.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	751.094.929	682.813.572	682.813.572	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					498.788.000	459.562.964	385.684.534	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (aset tanah)	68 unit	68 unit	68 unit	498.788.000	459.562.964	385.684.534	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	312 kegiatan	312 kegiatan	312 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah RT di Kelurahan se-Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	380 RT	380 RT	380 RT				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan	91%	91%	91%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	2%	2%	2%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	19.986.971.718	20.377.697.909	18.757.696.531	
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>					19.822.971.718	20.186.430.419	18.648.666.811	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	105 Lokasi	105 Lokasi	105 Lokasi	82.250.000	416.306.300	415.442.650	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.211.220.000	5.198.853.000	5.348.079.600	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah paket kegiatan pembangunan gapura, taman, tugu lain-lain sarpras di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musren	27 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah paket pembangunan saluran lingkungan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musren	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarpras di kelurahan miroto	10 paket	10 paket	10 paket	1.018.210.000	699.079.000	698.929.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.069.100.000	710.624.000	710.424.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.022.000.000	644.703.000	644.553.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.031.000.000	622.614.000	622.464.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1.019.000.000	540.083.000	539.933.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.057.000.000	805.328.000	805.178.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.072.000.000	675.595.250	675.445.250	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarpras di kelurahan pandansari	10 paket	10 paket	10 paket	1.098.000.000	677.947.000	530.222.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	8 paket	8 paket	8 paket	1.054.000.000	661.429.000	661.029.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarpras di kelurahan kauman	10 paket	10 paket	10 paket	808.317.400	734.834.000	734.359.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	560.261.900	509.329.000	509.004.000	KELURAHAN PURWODINATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	653.225.931	593.841.755	593.491.755	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	744.452.500	676.775.000	676.475.000	KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	995.889.400	905.354.000	904.754.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	743.038.751	675.489.774	675.193.774	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan non fisik kecamatan	27 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	736.380.000	940.403.671	183.358.600	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kecamatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	241.747.000	219.770.000	174.005.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan miroto	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN MIROTO
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	247.808.000	225.280.000	183.594.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	261.470.000	237.700.000	175.781.928	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	247.808.000	225.280.000	174.780.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	270.578.000	245.980.000	184.980.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	261.470.000	237.700.000	166.515.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	247.780.830	225.255.300	161.591.700	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	256.916.000	233.560.000	197.260.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	252.362.000	229.420.000	172.820.500	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	252.362.000	229.420.000	166.735.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	266.024.000	241.840.000	211.590.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17%	17%	17%	256.909.087	233.553.715	169.089.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	252.362.000	229.420.000	181.961.400	KELURAHAN PEKUNDEN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	261.470.000	237.700.000	192.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	270.558.919	245.962.654	207.627.654	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Jumlah kegiatan non fisik kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan				KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					164.000.000	191.267.490	109.029.720	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga Kemasyarakatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	99.000.000	127.327.900	83.154.010	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	65.000.000	63.939.590	25.875.710	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	12.000.000	262.136.560	218.624.620	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.000.000	262.136.560	218.624.620	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT di kelurahan se-Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	380 RT	380 RT	380 RT	12.000.000	262.136.560	218.624.620	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	2%	2%	2%				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.0.00.0.00.06.00	KECAMATAN GUNUNGPATI					57.518.497.902	52.244.089.000	50.782.897.106	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.421.446.915	18.519.497.195	18.563.112.181	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.319.655	14.836.050	1.889.700	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dolumen Renstra dan renja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.056.285	1.869.350		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.031.371	937.610		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA perubahan Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.031.371	937.610		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA perubahan Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	917.664	834.240		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA perubahan Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	917.664	834.240		KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD , EKK Kecamatan, dan Ekin kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.078.670	1.889.700	1.889.700	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.286.630	7.533.300		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Dokumen LKPJ Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					17.110.568.750	15.555.062.500	15.936.161.106	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Gunungpati, pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Gunungpati	100%	100%	100%	16.298.208.300	14.816.553.000	15.355.361.106	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA,KPA, PPK, Bendaharan dan Bendahara Pembantu	100%	100%	100%	805.728.000	732.480.000	580.800.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.164.315	2.876.650		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Gunungpati	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.839.915	1.672.650		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.628.220	1.480.200		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					1.622.152.604	1.474.684.185	1.284.170.535	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	11.032.285	10.029.350	10.029.350	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan kantor yang mendukung kerja Pegawai	100%	100%	100%	238.003.315	216.366.650	189.956.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	33.005.775	30.005.250	25.005.250	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Baran cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan ,Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	49.574.910	45.068.100	25.068.100	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Rapat dan kegiatan	100%	100%	100%	107.569.000	97.790.000	35.778.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	63.358.900	57.599.000	7.600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	1.119.608.419	1.017.825.835	990.733.835	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					13.049.916	11.863.560		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	13.049.916	11.863.560		KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					91.996.410	83.633.100	72.113.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telepone, listrik, koran, Air dan Listrik	100%	100%	100%	91.996.410	83.633.100	72.113.200	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1.567.359.580	1.379.417.800	1.268.777.640	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	293.462.400	266.784.000	153.051.600	KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan sedang , berat gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	245.410.000	223.100.000	248.126.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	860.732.510	782.484.100	823.872.500	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pemeliharaan rumah dinas Camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	117.754.670	107.049.700	43.727.540	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	11.575.432.862	10.523.120.784	10.434.782.701	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					111.972.127	101.792.843	60.019.843	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	111.972.127	101.792.843	60.019.843	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah pembinaan, Monitoring , dan Evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Presentase Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	80%	80%	80%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10.271.654.963	9.337.868.148	9.347.504.486	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan aparatur Kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	908.420.029	825.836.390	871.011.390	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di kecamatan dan Kelurahan	43169 kegiatan	43169 kegiatan	43169 kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Sarana Prasarana komunikasi dan informasi masyarakat standar PATEN	2 buah	2 buah	2 buah				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	100%	100%	1.388.200.000	1.262.000.000	1.255.613.045	KELURAHAN SUKOREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	100%	100%	931.109.342	846.463.038	846.472.331	KELURAHAN SADENG
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	100%	100%	487.300.000	443.000.000	440.700.000	KELURAHAN KANDRI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	100%	100%	612.040.000	556.400.000	545.909.000	KELURAHAN SEKARAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	100%	100%	528.880.000	480.800.000	480.800.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan kalisegoro	100%	100%	100%	459.580.000	417.800.000	417.600.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	100%	100%	320.945.592	291.768.720	291.768.720	KELURAHAN JATIREJO
		Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	100%	100%	418.000.000	380.000.000	368.250.000	KELURAHAN NGIJO
		Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	100%	100%	542.740.000	493.400.000	493.400.000	KELURAHAN PATEMON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluahan Nongkosawit	100%	100%	100%	487.300.000	443.000.000	443.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	100%	100%	348.700.000	317.000.000	317.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	100%	100%	819.940.000	745.400.000	745.400.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	100%	100%	501.160.000	455.600.000	455.600.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100%	100%	100%	515.020.000	468.200.000	465.980.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	100%	100%	431.860.000	392.600.000	390.400.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sumurejo	100%	100%	100%	570.460.000	518.600.000	518.600.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.191.805.772	1.083.459.793	1.027.258.372	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan kebersihan	64 kegiatan	64 kegiatan	64 kegiatan	1.191.805.772	1.083.459.793	1.027.258.372	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase pembayaran PBB	81%	81%	81%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	25.252.247.963	22.956.589.056	21.524.915.009	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					24.163.588.481	21.966.898.618	20.596.686.930	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW , kelurahan dan Kecamatan	120 lokasi	120 lokasi	120 lokasi	130.760.685	118.873.350	118.873.350	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan hasil Musrenbang	28 paket	28 paket	28 paket	10.577.080.137	9.615.527.397	9.341.628.523	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan	44 paket	44 paket	44 paket				KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas saluran Lingkungan	76 paket	76 paket	76 paket				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	4 paket	4 paket	4 paket	519.112.000	471.920.000	471.920.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	4 paket	4 paket	4 paket	491.055.373	446.413.975	446.413.975	KELURAHAN SADENG
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket	491.700.000	447.000.000	446.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket	528.088.000	480.080.000	464.571.000	KELURAHAN SEKARAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	8 paket	8 paket	8 paket	559.057.400	508.234.000	474.778.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	526.900.000	479.000.000	479.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	530.783.091	482.530.083	482.530.083	KELURAHAN JATIREJO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%	492.800.000	448.000.000	448.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	491.700.000	447.000.000	447.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	7 paket	7 paket	7 paket	535.194.000	486.540.000	482.140.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	4 paket	4 paket	4 paket	534.820.000	486.200.000	467.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	7 paket	7 paket	7 paket	519.112.000	471.920.000	447.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	531.916.000	483.560.000	461.560.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	528.088.000	480.080.000	476.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	524.029.000	476.390.000	476.390.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	6 paket	6 paket	6 paket	491.700.000	447.000.000	447.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Kelompok Masyarakat di kelurahan sebagai Media Pembinaan dan pemberdayaan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	652.552.592	593.229.629	307.555.153	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	29 Kegiatan	29 Kegiatan	29 Kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	302.478.000	274.980.000	223.666.955	KELURAHAN SUKOREJO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN SUKOREJO
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	316.385.286	287.622.987	229.196.694	KELURAHAN SADENG
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN SADENG
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	292.930.000	266.300.000	221.800.000	KELURAHAN KANDRI
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN KANDRI
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	275.022.000	250.020.000	219.720.000	KELURAHAN SEKARAN
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN SEKARAN
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	239.432.600	217.666.000	195.172.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN PONGANGAN
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	276.210.000	251.100.000	195.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN KALISEGORO
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	253.771.317	230.701.197	189.701.197	KELURAHAN JATIREJO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN JATIREJO
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	319.550.000	290.500.000	261.050.000	KELURAHAN NGIJO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN NGIJO
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	311.410.000	283.100.000	233.100.000	KELURAHAN PATEMON
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN PATEMON
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	254.056.000	230.960.000	181.860.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	254.430.000	231.300.000	196.300.000	KELURAHAN CEPOKO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN CEPOKO
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	302.478.000	274.980.000	241.280.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN GUNUNGPATI
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	261.954.000	238.140.000	200.040.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN MANGUNSARI
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	270.402.000	245.820.000	192.770.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN PAKINTELAN
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	269.841.000	245.310.000	207.720.000	KELURAHAN PLALANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN PLALANGAN
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan	100%	100%	100%	306.790.000	278.900.000	222.950.000	KELURAHAN SUMURREJO
		Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	100%	100%	100%				KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.088.659.482	989.690.438	928.228.079	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	8067 Kegiatan	8067 Kegiatan	8067 Kegiatan	178.877.817	162.616.197	122.473.071	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah aset yang dikelola di kecamatan dan kelurahan	350 bidang	350 bidang	350 bidang	909.781.665	827.074.241	805.755.008	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon di jalan protokol dan lingkungan sekitarnya	3000 kegiatan	3000 kegiatan	3000 kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase Jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95.69 %	95.69 %	95.69 %				KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Peraturan dan gangguan Trantibum dikelurahan se Kecamatan Gunungpati	80%	80%	80%				KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	269.370.162	244.881.965	260.087.215	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					269.370.162	244.881.965	260.087.215	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum	95%	95%	95%	269.370.162	244.881.965	260.087.215	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN TUGU					30.298.964.001	25.199.110.000	23.666.149.180	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.044.829.263	9.926.259.330	8.910.123.002	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Tugu)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.955.100	13.141.000	13.141.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4.020.830	3.655.300	3.655.300	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.309.110	1.190.100	1.190.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.309.110	1.190.100	1.190.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.309.110	1.190.100	1.190.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.309.110	1.190.100	1.190.100	KECAMATAN TUGU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD, EKK Kecamatan, dan Evkin Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.732.610	1.575.100	1.575.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.465.220	3.150.200	3.150.200	KECAMATAN TUGU
		Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.170.261.320	8.336.601.200	7.703.330.380	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji ASN Kecamatan Tugu	100%	100%	100%	8.743.318.100	7.948.471.000	7.415.510.180	KECAMATAN TUGU
		Pemenuhan tunjangan ASN Kecamatan Tugu	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu	100%	100%	100%	423.478.000	384.980.000	284.670.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.732.610	1.575.100	1.575.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Tugu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.732.610	1.575.100	1.575.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.297.362.843	1.104.017.130	711.551.622	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	11.929.170	10.844.700	10.844.700	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	100%	100%	519.771.197	472.519.270	158.068.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	82.066.820	74.606.200	74.606.200	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	27.861.350	25.328.500	9.276.052	KECAMATAN TUGU
		Penggandaan yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jamuan Rapat dan Kegiatan	100%	100%	100%	46.799.280	42.544.800	42.544.800	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	100%	100%	98.678.800	89.708.000	40.594.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	427.312.226	388.465.660	375.617.870	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.150.000	86.500.000	86.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Rekening Telepon, Listrik, Koran	100%	100%	100%	95.150.000	86.500.000	86.500.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					463.100.000	386.000.000	395.600.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	146.256.000	132.960.000	132.960.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	100%	239.800.000	218.000.000	227.600.000	KECAMATAN TUGU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Pemeliharaan Rumah Dinas Camat yang Terpelihara untuk Menunjang Kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	38.544.000	35.040.000	35.040.000	KECAMATAN TUGU
		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD								
7.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilakukan pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	5.162.983.420	4.472.923.109	4.486.732.497	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					383.237.250	348.397.500	377.222.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	383.237.250	348.397.500	377.222.500	KECAMATAN TUGU
		Penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
		Persentase jumlah RW dKelurahan yang memenukriteria LHBS dan PHBS	80%	80%	80%				KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					4.060.041.445	3.681.855.859	3.672.776.997	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	574.310.770	522.100.700	560.800.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan				KECAMATAN TUGU
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 jenis	2 jenis	2 jenis				KECAMATAN TUGU
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100%	100%	100%	376.453.107	342.230.097	336.449.070	KELURAHAN JERAKAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100%	100%	100%	633.755.397	576.141.270	566.663.425	KELURAHAN TUGUREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100%	100%	100%	460.108.909	418.280.826	416.155.716	KELURAHAN KARANGANYAR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	100%	100%	100%	279.414.589	254.013.263	245.161.801	KELURAHAN RANDUGARUT
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100%	100%	100%	735.215.657	668.377.870	656.259.875	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%	100%	545.061.749	495.510.681	492.645.856	KELURAHAN MANGUNHARJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100%	100%	100%	445.721.267	405.201.152	398.641.254	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					719.704.725	442.669.750	436.733.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Aset yang Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	151 bidang	151 bidang	151 bidang	486.936.725	442.669.750	436.733.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon di Jalan Protokol dan Lingkungan Sekitarnya	3300 kegiatan	3300 kegiatan	3300 kegiatan				KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				KECAMATAN TUGU
		Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang Tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
		Persentase Jumlah WP yang Membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	75%	75%	75%				KECAMATAN TUGU
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan se Kecamatan Tugu	88%	88%	88%				KECAMATAN TUGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	14.048.911.318	10.761.527.561	10.227.693.681	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan	120 lokasi	120 lokasi	120 lokasi				KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					13.012.458.747	10.417.607.951	9.895.540.701	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan	120 lokasi	120 lokasi	120 lokasi	31.834.770	28.940.700	8.015.000	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	7 paket	7 paket	7 paket	4.539.339.596	4.126.672.360	4.093.672.360	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket				KECAMATAN TUGU
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket				KECAMATAN TUGU
		Jumlah Paket Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket				KECAMATAN TUGU
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 paket	5 paket	5 paket	702.758.026	638.870.933	638.870.933	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Tugurejo	5 paket	5 paket	5 paket	531.847.102	483.497.365	483.497.365	KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Karanganyar	5 paket	5 paket	5 paket	890.602.738	809.638.853	809.638.853	KELURAHAN KARANGANYAR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Kelurahan Randugarut	5 paket	5 paket	5 paket	799.360.911	726.691.737	726.691.737	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Mangkang Wetan	5 paket	5 paket	5 paket	494.156.599	449.233.272	449.233.272	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Mangunharjo	5 paket	5 paket	5 paket	441.418.384	401.289.440	401.289.440	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Mangkang Kulon	5 paket	5 paket	5 paket	515.560.207	468.691.097	468.691.097	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	732.853.055	666.230.050	198.088.500	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan				KECAMATAN TUGU
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	204.851.867	186.228.970	186.228.970	KELURAHAN JERAKAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	275.232.502	250.211.365	250.211.365	KELURAHAN TUGUREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100%	100%	100%				KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	230.868.353	209.880.321	209.880.321	KELURAHAN KARANGANYAR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	248.633.000	226.030.000	226.030.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	100%	100%	100%				KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	287.857.744	261.688.858	261.688.858	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100%	100%	100%				KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	287.110.867	261.009.879	261.009.879	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%	100%				KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	245.083.026	222.802.751	222.802.751	KELURAHAN MANGKANG KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100%	100%	100%				KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.036.452.571	343.919.610	332.152.980	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	108.812.000	98.920.000	98.920.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN TUGU
		Penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN TUGU
		Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	80%	80%	80%				KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	269.499.571	244.999.610	233.232.980	KECAMATAN TUGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	82.00 %	82.00 %	82.00 %	42.240.000	38.400.000	41.600.000	
7.01.04.2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					42.240.000	38.400.000	41.600.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan se Kecamatan Tugu	88%	88%	88%	42.240.000	38.400.000	41.600.000	KECAMATAN TUGU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.0.00.0.00.08.00	KECAMATAN MIJEN					72.637.091.900	48.867.629.000	48.890.547.858	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Mijen)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21.408.687.100	18.433.261.000	19.814.867.858	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Mijen)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.043.000	19.130.000	9.820.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja OPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5.472.500	4.975.000	2.315.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renstra dan Renja OPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.908.500	1.735.000	1.070.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.936.000	1.760.000	1.095.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.771.000	1.610.000	945.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.771.000	1.610.000	945.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.755.500	2.505.000	1.175.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ OPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.428.500	4.935.000	2.275.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah LKJP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.576.913.100	15.069.921.000	16.470.079.858	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.896.101.100	14.451.001.000	15.873.919.858	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	675.884.000	614.440.000	594.340.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.700.500	2.455.000	1.125.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.227.500	2.025.000	695.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.938.369.000	1.415.790.000	1.342.285.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	9.922.000	9.020.000	5.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	529.551.000	481.410.000	481.416.000	KECAMATAN MIJEN
		Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	56.646.700	51.497.000	24.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	23.809.500	21.645.000	15.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan	100%	100%	100%	83.253.500	75.685.000	40.005.000	KECAMATAN MIJEN
		Pengadaan Jamuan Rapat	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
		Pengadaan Jamuan Tamu	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	86.347.800	78.498.000	20.047.000	KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	767.838.500	698.035.000	756.817.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeluer Kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					279.094.000	244.540.000	173.238.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan listrik, telepon, air dan koran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	182.275.500	165.705.000	131.600.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	86.718.500	78.835.000	41.638.000	KECAMATAN MIJEN
		Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.592.268.000	1.683.880.000	1.819.445.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	255.662.000	232.420.000	138.585.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	1.596.606.000	1.451.460.000	1.680.860.000	KECAMATAN MIJEN
		kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	10.741.725.800	9.494.478.000	9.298.040.000	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					103.609.000	94.190.000	15.730.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	103.609.000	94.190.000	15.730.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	806 kegiatan	806 kegiatan	806 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
		Laporan Hasil Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					9.728.913.800	8.755.558.000	8.719.410.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	868.513.800	789.558.000	824.730.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5255 pelayanan	5255 pelayanan	5255 pelayanan				KECAMATAN MIJEN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 jenis	2 jenis	2 jenis				KECAMATAN MIJEN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	736.780.000	669.800.000	662.300.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	418.000.000	380.000.000	377.850.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	279.400.000	254.000.000	253.270.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	237.820.000	216.200.000	208.700.000	KELURAHAN POLAMAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	418.000.000	380.000.000	372.500.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	320.980.000	291.800.000	284.300.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	972.400.000	884.000.000	877.000.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	764.500.000	695.000.000	694.200.000	KELURAHAN MIJEN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	362.560.000	329.600.000	322.100.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	709.060.000	644.600.000	637.100.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	764.500.000	695.000.000	694.360.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	501.160.000	455.600.000	455.600.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.762.420.000	1.602.200.000	1.594.700.000	KELURAHAN JATISARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	515.020.000	468.200.000	460.700.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					909.203.000	644.730.000	562.900.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	209 bidang	209 bidang	209 bidang	709.203.000	644.730.000	562.900.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkar bangunan tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3216 kegiatan	3216 kegiatan	3216 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan	90%	90%	90%				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	98%	98%	98%				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN MIJEN
		Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	35%	35%	35%				KECAMATAN MIJEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	40.188.111.500	20.668.465.000	19.520.640.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					37.964.422.500	19.301.475.000	18.230.600.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	112.645.500	102.405.000	67.700.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	5.699.705.000	5.181.550.000	5.180.100.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	61 kegiatan	61 kegiatan	61 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	54 kegiatan	54 kegiatan	54 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	1.016.400.000	924.000.000	924.000.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	1.080.200.000	982.000.000	982.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.024.100.000	931.000.000	931.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	1.042.800.000	948.000.000	948.000.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	990.000.000	900.000.000	900.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	1.015.300.000	923.000.000	923.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.076.900.000	979.000.000	979.000.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	752.265.800	683.878.000	683.878.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	665.573.700	605.067.000	605.067.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	342.579.600	311.436.000	311.436.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Pembangunan Saluran Lingkungan, Jalan dan Jembatan di Kelurahan pelaksanaan Hasil Musrenbang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	312.764.100	284.331.000	284.331.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	758.285.000	689.350.000	687.750.000	KELURAHAN WONOPLUMBON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	396.638.000	360.580.000	360.580.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan, jalan dan jembatan di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	529.053.800	480.958.000	480.958.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	623.392.000	566.720.000	273.980.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	98%	98%	98%				KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	275.660.000	250.600.000	199.400.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	218.680.000	198.800.000	147.850.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	280.280.000	254.800.000	195.430.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	252.560.000	229.600.000	185.400.000	KELURAHAN POLAMAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	261.800.000	238.000.000	191.100.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	19 kegiatan	19 kegiatan	19 kegiatan	257.180.000	233.800.000	188.200.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Operasionalisasi Pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	303.380.000	275.800.000	215.700.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	284.900.000	259.000.000	198.300.000	KELURAHAN MIJEN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor berkenaan	100%	100%	100%				KELURAHAN MIJEN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	266.420.000	242.200.000	193.800.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	266.420.000	242.200.000	193.800.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KEDUNGPANE

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	303.380.000	275.800.000	209.340.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	257.180.000	233.800.000	182.300.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan	28 kegiatan	28 kegiatan	28 kegiatan	308.000.000	280.000.000	219.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN JATISARI
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kelurahan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	257.180.000	233.800.000	188.200.000	KELURAHAN PESANTREN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					2.223.689.000	1.366.990.000	1.290.040.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Kegiatan lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	220 kegiatan	220 kegiatan	220 kegiatan	108.944.000	99.040.000	99.040.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Tematik yang terbangun	6 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	1.394.745.000	1.267.950.000	1.191.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	100.00 %	298.567.500	271.425.000	257.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					298.567.500	271.425.000	257.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	25%	25%	25%	298.567.500	271.425.000	257.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN GENUK					54.852.369.001	49.865.790.000	49.958.118.126	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GENUK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.234.927.251	15.668.115.682	17.043.605.713	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GENUK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.014.736	15.467.941	15.467.941	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.767.280	3.424.800	3.424.800	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.413.215	2.193.832	2.193.832	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.603.979	2.367.254	2.367.254	KECAMATAN GENUK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.205.881	1.096.255	1.096.255	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.205.881	1.096.255	1.096.255	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.818.500	5.289.545	5.289.545	KECAMATAN GENUK
		Penyusunan Dokumen LKJP Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.323.557.180	13.021.415.618	14.473.543.744	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13.649.451.200	12.408.592.000	13.900.920.126	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	670.428.000	609.480.000	569.280.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.482.500	2.256.818	2.256.818	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Semester	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.195.480	1.086.800	1.086.800	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.451.830.165	1.319.845.604	1.291.850.640	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan komponennya di kantor kecamatan	100%	100%	100%	14.439.120	13.126.473	13.126.473	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase peralatan kantor yang mendukung kerja aparatur	100%	100%	100%	262.973.720	239.067.018	242.037.781	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	37.323.176	33.930.160	33.930.160	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan	100%	100%	100%	8.380.940	7.619.036	7.619.036	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kegiatan rapat, jamuan tamu, pelatihan, penyuluhan dan even-even kegiatan masyarakat	100%	100%	100%	42.240.000	38.400.000	38.400.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	54.970.300	49.973.000		KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan sarana kerja yang memadahi	100%	100%	100%	1.031.502.909	937.729.917	956.737.190	KECAMATAN GENUK
		prosentase peralatan kantor yang mendukung kerja aparatur	100%	100%	100%				KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.998.402	236.362.184	216.436.960	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langgaran Telepon, Listrik dan Air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	178.273.656	162.066.960	162.066.960	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	81.724.746	74.295.224	54.370.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.182.526.768	1.075.024.335	1.046.306.428	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	18 unit	18 unit	18 unit	288.451.798	262.228.907	183.636.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan sedang/berat gedung kantor kecamatan	100%	100%	100%	189.284.011	172.076.374	172.076.374	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase komponen gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	704.790.959	640.719.054	690.594.054	KECAMATAN GENUK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	16.012.182.022	14.556.529.112	14.374.794.897	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan	477561.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					114.010.274	103.645.704	84.890.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	114.010.274	103.645.704	84.890.000	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					15.152.738.086	13.775.216.443	13.589.626.749	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi di kantor kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	730.337.480	663.943.164	711.362.663	KECAMATAN GENUK
		Operasional Pelayanan Administrasi Dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.373.680.000	1.248.800.000	1.224.819.545	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.162.528.686	1.056.844.260	1.043.494.260	KELURAHAN KUDU
		Operasional Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	2.062.059.464	1.874.599.513	1.848.749.513	KELURAHAN KARANGROTO
		Pemenuhan operasional kelurahan	100%	100%	100%	1.568.034.845	1.425.486.223	1.417.086.223	KELURAHAN GENUKSARI
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.188.880.000	1.080.800.000	1.062.625.910	KELURAHAN BANJARDOWO
		Operasional Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan	100%	100%	100%	1.193.500.000	1.085.000.000	1.071.950.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	551.320.000	501.200.000	486.200.000	KELURAHAN TRIMULYO
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	832.928.021	757.207.292	739.568.055	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	612.049.780	556.408.891	525.946.163	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.737.764.501	1.579.785.910	1.565.522.274	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.470.700.769	1.337.000.699	1.323.815.699	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Operasional Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan	100%	100%	100%	320.914.540	291.740.491	276.926.171	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Operasional Pelayanan Administrasi dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	348.040.000	316.400.000	291.560.273	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					745.433.662	677.666.965	700.278.148	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Capaian peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	745.433.662	677.666.965	700.278.148	KECAMATAN GENUK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	21.323.628.948	19.385.117.224	18.280.367.516	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					19.824.642.397	18.022.402.178	16.916.121.685	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penyusunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	113.549.305	103.226.641	47.488.722	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan	13 kelurahan	13 kelurahan	13 kelurahan	5.310.522.620	4.827.747.836	4.666.138.187	KECAMATAN GENUK
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	1.127.500.000	1.025.000.000	1.025.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Sarana dan Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	1.008.402.313	916.729.375	916.729.375	KELURAHAN KUDU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	1.386.666.725	1.260.606.114	1.070.606.114	KELURAHAN KARANGROTO
		Sarana dan Prasarana diKelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	641.429.467	583.117.697	583.117.697	KELURAHAN GENUKSARI
		Sarana dan Prasarana Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	797.500.000	725.000.000	725.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	994.400.000	904.000.000	904.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		jumlah pemeliharaan sarpras dan pemberdayaan masyarakat	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	991.100.000	901.000.000	827.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	781.205.093	710.186.448	710.186.448	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Sarana Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	788.700.000	717.000.000	717.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	5 titik	5 titik	5 titik	798.465.199	725.877.454	725.877.454	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		presentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (genuk)	55%	55%	55%				KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Sarana dan Prasarana di Kelurahan Terpenuhi	100%	100%	100%	1.103.300.000	1.003.000.000	1.003.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	860.359.202	782.144.729	712.429.819	KELURAHAN TERBOYO KULON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		jumlah pemeliharaan sarpras dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	660.000.000	600.000.000	531.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kecamatan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	983.181.078	893.800.980	555.685.447	KECAMATAN GENUK
		Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	92.400.000	84.000.000	84.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	110.469.002	100.426.365	92.470.391	KELURAHAN KUDU
		Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	57.633.810	52.394.373	18.529.828	KELURAHAN KARANGROTO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	110.765.688	100.696.080	76.226.830	KELURAHAN GENUKSARI
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	55.000.000	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	110.000.000	100.000.000	67.765.006	KELURAHAN GEBANGSARI
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	110.000.000	100.000.000	100.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	110.006.886	100.006.260	80.116.805	KELURAHAN PENGGARON LOR
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	335.930.220	305.391.109	305.391.109	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	104.210.300	94.736.636	82.000.272	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	109.999.231	99.999.301	83.047.401	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terpenuhi	100%	100%	100%	61.946.258	56.314.780	56.314.780	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	110.000.000	100.000.000	100.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.498.986.551	1.362.715.046	1.364.245.831	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	109.092.958	99.175.416	99.175.416	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	1.389.893.593	1.263.539.630	1.265.070.415	KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	281.630.780	256.027.982	259.350.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					281.630.780	256.027.982	259.350.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban wilayah	100%	100%	100%	281.630.780	256.027.982	259.350.000	KECAMATAN GENUK
7.01.0.00.0.00.10.00	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR					34.513.496.300	31.165.933.000	31.069.203.577	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.895.004.080	11.708.212.800	12.310.642.577	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.925.000	31.750.000	31.750.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	8.277.500	7.525.000	7.525.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.225.000	4.750.000	4.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.225.000	4.750.000	4.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.685.000	3.350.000	3.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.685.000	3.350.000	3.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.942.500	2.675.000	2.675.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.885.000	5.350.000	5.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Penyusunan LKPJ dan LKJIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.391.916.700	9.447.197.000	10.392.967.577	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	10.024.571.700	9.113.247.000	10.059.017.577	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target kinerja dan ikhtisar KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	361.614.000	328.740.000	328.740.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.586.000	3.260.000	3.260.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis	100%	100%	100%	2.145.000	1.950.000	1.950.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.339.598.800	1.204.208.000	997.525.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.350.000	8.500.000	4.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	274.230.000	249.300.000	179.320.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan dan Kelurahan)	100%	100%	100%	66.000.000	60.000.000	20.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	10.142.000	9.220.000	6.775.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan Gajahmungkur)	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Rapat dan Kegiatan	100%	100%	100%	107.085.000	97.350.000	45.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	100%	100%	152.916.500	139.015.000	100.557.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					704.905.300	640.823.000	640.823.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.343.750	10.312.500	7.215.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	11.343.750	10.312.500	7.215.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					161.370.000	146.700.000	138.300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telepon air listrik dan koran (Kecamatan dan Kelurahan)	100%	100%	100%	161.370.000	146.700.000	138.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					954.849.830	868.045.300	742.885.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	265.485.000	241.350.000	122.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	100%	100%	166.100.000	151.000.000	151.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	438.900.000	399.000.000	423.260.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Pemeliharaan rumah dinas camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	84.364.830	76.695.300	45.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	7.943.500.000	7.085.000.000	7.125.017.800	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					205.700.000	187.000.000	148.600.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%	100%	205.700.000	187.000.000	148.600.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					6.890.250.000	6.127.500.000	6.158.875.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	679.690.000	617.900.000	660.875.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6200 Pelayanan	6200 Pelayanan	6200 Pelayanan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	100%	100%	556.600.000	506.000.000	506.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	100%	100%	556.600.000	506.000.000	505.200.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	100%	100%	1.429.780.000	1.299.800.000	1.299.800.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	100%	100%	625.900.000	569.000.000	569.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100%	100%	100%	709.060.000	644.600.000	633.800.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	100%	100%	681.340.000	619.400.000	619.400.000	KELURAHAN PETOMPON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	100%	100%	958.540.000	871.400.000	871.400.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	100%	100%	542.740.000	493.400.000	493.400.000	KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					847.550.000	770.500.000	817.542.800	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	100%	100%	847.550.000	770.500.000	817.542.800	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	13.355.992.220	12.082.720.200	11.327.543.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12.702.013.720	11.547.285.200	10.792.108.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	160 Lokasi	160 Lokasi	160 Lokasi	150.150.000	136.500.000	97.065.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	4.978.218.520	4.525.653.200	4.525.653.200	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	23 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendan Duwur	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	651.200.000	592.000.000	467.200.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendan Ngisor	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	581.240.000	528.400.000	525.159.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Gajahmungkur	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	317.350.000	288.500.000	287.700.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Karangrejo	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	662.310.000	602.100.000	560.920.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Lemponsari	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	658.680.000	598.800.000	597.200.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Petompon	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	874.500.000	795.000.000	785.600.000	KELURAHAN PETOMPON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Sampangan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	503.580.000	457.800.000	404.025.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kelurahan Bendungan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	686.180.000	623.800.000	608.450.000	KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	507.245.200	461.132.000	177.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Bendan Duwur Pelaksanaan Hasil musrenbang	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	266.420.000	242.200.000	223.552.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	100%	100%				KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Bendan Ngisor Pelaksanaan Hasil musrenbang	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	261.800.000	238.000.000	216.650.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	100%	100%				KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Gajahmungkur Pelaksanaan Hasil musrenbang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	275.660.000	250.600.000	222.400.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	100%	100%				KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Karangrejo Pelaksanaan Hasil musrenbang	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	266.420.000	242.200.000	211.234.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	100%	100%				KELURAHAN KARANGREJO
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Lemponsari Pelaksanaan Hasil musrenbang	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	266.420.000	242.200.000	225.335.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100%	100%	100%				KELURAHAN LEMPONGSARI
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Petompon Pelaksanaan Hasil musrenbang	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	261.800.000	238.000.000	219.065.000	KELURAHAN PETOMPON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	100%	100%				KELURAHAN PETOMPON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Sampangan Pelaksanaan Hasil musrenbang	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	271.040.000	246.400.000	217.870.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	100%	100%				KELURAHAN SAMPANGAN
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Bendungan Pelaksanaan Hasil musrenbang	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	261.800.000	238.000.000	220.030.000	KELURAHAN BENDUNGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	100%	100%				KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					653.978.500	535.435.000	535.435.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Kegiatan lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	800 Kegiatan	800 Kegiatan	800 Kegiatan	98.307.000	89.370.000	89.370.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan(jml bidang tanah)	49 Aset	49 Aset	49 Aset	490.671.500	446.065.000	446.065.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	319.000.000	290.000.000	306.000.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					319.000.000	290.000.000	306.000.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase jumlah siskamling yang ada di lingkungan RT	90%	90%	90%	319.000.000	290.000.000	306.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase RT yang memiliki petugas linmas	90%	90%	90%				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN TEMBALANG					64.564.037.810	58.451.448.000	55.966.936.071	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.370.501.200	17.487.142.000	17.182.892.921	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN TEMBALANG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.351.200	30.642.000	30.642.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	684.200	622.000	622.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	11.464.585	10.422.350	10.422.350	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.746.805	7.042.550	7.042.550	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.889.610	4.445.100	4.445.100	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.664.000	4.240.000	4.240.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	550.000	500.000	500.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.707.000	3.370.000	3.370.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.930.186.800	13.481.988.000	13.485.926.071	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tembalang	100%	100%	100%	14.141.765.000	12.856.150.000	12.871.638.071	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100%	100%	681.274.000	619.340.000	607.790.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.926.800	5.388.000	5.388.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.221.000	1.110.000	1.110.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.858.417.265	2.568.561.150	2.363.963.880	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	8.580.440	7.800.400	7.800.400	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	98.851.753	89.865.230	44.228.860	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%	40.562.940	36.875.400	36.875.400	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	40.152.200	36.502.000	36.502.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan rapat	100%	100%	100%	301.532.000	274.120.000	167.500.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	206.951.800	188.138.000	147.910.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	2.128.786.132	1.935.260.120	1.923.147.220	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.201.845	104.728.950	40.939.070	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	115.201.845	104.728.950	40.939.070	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.330.520	147.573.200	83.173.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telpon, air, listrik dan koran	100%	100%	100%	162.330.520	147.573.200	83.173.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.269.013.570	1.153.648.700	1.178.248.700	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan pembayaran pajak serta perijinan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	189.706.000	172.460.000	172.460.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	469.150.770	426.500.700	425.700.700	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	543.584.800	494.168.000	532.568.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	66.572.000	60.520.000	47.520.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	21.261.737.539	19.208.125.033	19.044.138.050	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan	100.00 kelurahan				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					343.705.439	312.459.490	193.120.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil movev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	343.705.439	312.459.490	193.120.500	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					20.314.388.846	18.354.171.676	18.319.546.083	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.139.758.400	1.036.144.000	1.052.915.543	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	24000 jumlah pelayanan	24000 jumlah pelayanan	24000 jumlah pelayanan				KECAMATAN TEMBALANG
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100%	100%	100%	3.190.536.470	2.900.487.700	2.900.285.200	KELURAHAN METESEH
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%	100%	1.222.412.616	1.111.284.196	1.108.817.886	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100%	100%	100%	1.998.572.616	1.816.884.196	1.793.552.196	KELURAHAN TANDANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100%	100%	100%	1.846.116.470	1.678.287.700	1.675.226.240	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100%	100%	100%	765.032.616	695.484.196	695.169.901	KELURAHAN JANGLI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100%	100%	100%	1.208.556.470	1.098.687.700	1.095.781.500	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100%	100%	100%	668.016.470	607.287.700	605.487.700	KELURAHAN TEMBALANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100%	100%	100%	4.368.632.616	3.971.484.196	3.979.432.896	KELURAHAN SENDANGMULYO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100%	100%	100%	793.852.400	721.684.000	721.312.600	KELURAHAN BULUSAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100%	100%	100%	543.272.616	493.884.196	482.915.700	KELURAHAN KRAMAS
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100%	100%	100%	862.052.616	783.684.196	768.381.596	KELURAHAN ROWOSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100%	100%	100%	1.582.776.470	1.438.887.700	1.440.267.125	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					603.643.254	541.493.867	531.471.467	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah aset yang tercatat dan di kelola di Kecamatan dan Kelurahan	3 bidang	3 bidang	3 bidang	595.643.254	541.493.867	531.471.467	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkar bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	5400 kegiatan	5400 kegiatan	5400 kegiatan				KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase jumlah titik pantau adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	95%	95%	95%				KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	23.632.984.071	21.484.530.967	19.449.055.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					23.311.437.964	21.192.216.324	19.191.792.457	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	230 dokumen	230 dokumen	230 dokumen	163.567.800	148.698.000	36.679.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	65 paket	65 paket	65 paket	7.368.900.000	6.699.000.000	6.686.200.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	18 paket kegiatan	18 paket kegiatan	18 paket kegiatan	1.279.954.484	1.163.594.985	1.159.994.985	KELURAHAN METESEH
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	665.580.838	605.073.489	603.073.489	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	14 paket kegiatan	14 paket kegiatan	14 paket kegiatan	1.442.512.213	1.311.374.739	1.308.574.739	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	14 paket kegiatan	14 paket kegiatan	14 paket kegiatan	1.113.323.734	1.012.112.485	1.009.312.485	KELURAHAN SENDANGGUWO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	618.387.945	562.170.859	560.170.859	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedungmundu	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	10 paket kegiatan	591.045.164	537.313.785	535.313.785	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	7 paket kegiatan	7 paket kegiatan	7 paket kegiatan	644.792.979	586.175.435	584.775.435	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	22 paket kegiatan	22 paket kegiatan	22 paket kegiatan	1.736.747.665	1.578.861.514	1.574.461.514	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	9 paket kegiatan	9 paket kegiatan	9 paket kegiatan	747.886.904	679.897.185	678.097.185	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramas	6 paket kegiatan	6 paket kegiatan	6 paket kegiatan	626.806.421	569.824.019	491.723.191	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	12 paket kegiatan	12 paket kegiatan	12 paket kegiatan	894.618.713	813.289.739	810.889.739	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	9 paket kegiatan	9 paket kegiatan	9 paket kegiatan	715.610.951	650.555.410	648.755.410	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	1.102.250.600	1.002.046.000	751.944.625	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	88 kegiatan	88 kegiatan	88 kegiatan	381.609.047	346.917.315	153.997.315	KELURAHAN METESEH
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	81 kegiatan	81 kegiatan	81 kegiatan	283.956.547	258.142.315	137.286.125	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	82 kegiatan	82 kegiatan	82 kegiatan	308.815.172	280.741.065	164.990.565	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	86 kegiatan	86 kegiatan	86 kegiatan	290.509.797	264.099.815	154.988.775	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	86 kegiatan	86 kegiatan	86 kegiatan	261.079.440	237.344.945	135.036.740	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedungmundu	87 kegiatan	87 kegiatan	87 kegiatan	279.398.367	253.998.515	143.932.215	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	81 kegiatan	81 kegiatan	81 kegiatan	265.690.552	241.536.865	142.529.365	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	77 kegiatan	77 kegiatan	77 kegiatan	404.419.719	367.654.290	137.353.090	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	85 kegiatan	85 kegiatan	85 kegiatan	274.910.697	249.918.815	138.217.715	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	81 kegiatan	81 kegiatan	81 kegiatan	265.420.964	241.291.785	150.907.781	KELURAHAN KRAMAS

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	93 kegiatan	93 kegiatan	93 kegiatan	286.028.672	260.026.065	159.651.165	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	84 kegiatan	84 kegiatan	84 kegiatan	297.612.579	270.556.890	132.934.965	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					321.546.107	292.314.643	257.262.643	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan pada tahun berkenaan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	109.182.161	99.256.510	99.256.510	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	212.363.946	193.058.133	158.006.133	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	298.815.000	271.650.000	290.850.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					298.815.000	271.650.000	290.850.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					298.815.000	271.650.000	290.850.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN CANDISARI					35.073.058.801	31.775.508.000	31.412.215.590	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Candisari)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.018.675.413	9.907.886.740	10.092.142.586	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Candisari)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.995.926	7.269.024	7.269.024	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.628.171	1.480.155	1.480.155	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	380.645	346.041	346.041	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	380.645	346.041	346.041	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	380.645	346.041	346.041	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	380.710	346.100	346.100	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LPPD,EKK Kecamatan dan Evkin Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.694.320	2.449.382	2.449.382	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LAKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.150.790	1.955.264	1.955.264	KECAMATAN CANDISARI
		Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.837.111.010	8.033.737.282	8.229.684.872	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	8.337.385.100	7.579.441.000	7.916.148.590	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu yang Terpenuhi	100%	100%	100%	497.640.000	452.400.000	311.640.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.085.910	1.896.282	1.896.282	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.224.229.468	1.003.844.971	966.553.227	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	59.371.122	53.973.747	53.973.747	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	83.600.000	76.000.000	76.000.000	KECAMATAN CANDISARI
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	61.761.755	56.147.054	68.091.310	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	9.725.000	8.840.909	8.840.909	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja	100%	100%	100%	47.850.000	43.500.000	43.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	78.926.100	71.751.000	22.515.000	KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	762.995.487	693.632.261	693.632.261	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.125.000	13.750.000	13.750.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	15.125.000	13.750.000	13.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.143.040	133.766.400	133.766.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan rekening telepon, air, listrik, dan koran	100%	100%	100%	147.143.040	133.766.400	133.766.400	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					787.070.969	715.519.063	741.119.063	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%	149.864.000	136.240.000	136.240.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ringan / sedang gedung kantor	100%	100%	100%	237.864.000	216.240.000	216.240.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%	361.370.969	328.519.063	354.119.063	KECAMATAN CANDISARI
		Rumdin yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%				KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%	37.972.000	34.520.000	34.520.000	KECAMATAN CANDISARI
		Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%				KECAMATAN CANDISARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	10.281.791.433	9.347.083.121	9.386.022.353	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					279.818.124	254.380.113	248.530.113	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	279.818.124	254.380.113	248.530.113	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>					8.959.775.359	8.145.250.326	8.182.360.326	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	7000 pelayanan	7000 pelayanan	7000 pelayanan	885.410.500	804.918.636	860.718.636	KECAMATAN CANDISARI
		Oprasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.054.168.589	958.335.081	958.035.081	KELURAHAN JATINGALEH
		OPERASIONAL PELAYANAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR KELURAHAN	100%	100%	100%	849.870.459	772.609.508	772.609.508	KELURAHAN WONOTINGAL
		Operasional Kelurahan Tegalsari	100%	100%	100%	1.610.082.365	1.463.711.241	1.463.711.241	KELURAHAN TEGALSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiru	100%	100%	100%	488.989.600	444.536.000	428.696.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan	100%	100%	100%	881.155.000	801.050.000	801.050.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan	100%	100%	100%	1.206.579.219	1.096.890.199	1.094.340.199	KELURAHAN CANDI
		Oprasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100%	100%	100%	1.983.519.627	1.803.199.661	1.803.199.661	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>					1.042.197.950	947.452.682	955.131.914	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	1.042.197.950	947.452.682	955.131.914	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	13.431.880.655	12.210.800.594	11.630.381.469	
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>					12.431.662.335	11.301.511.212	10.721.092.087	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	82 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	17.336.075	15.760.068	8.214.613	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	4.158.095.092	3.780.086.447	3.750.367.356	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Talud / Saluran Di Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	923.076.444	839.160.404	839.160.404	KELURAHAN JATINGALEH
		JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN TALUD/SALURAN DI KELURAHAN PELAKSANAAN HASIL MUSRENBANG	5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	759.663.654	690.603.322	690.603.322	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan di Kelurahan Tegalsari Pelaksanaan Hasil Musrenbang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	653.202.427	593.820.388	593.820.388	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan saluran di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	542.353.752	493.048.865	493.048.865	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.003.046.029	911.860.026	911.860.026	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah kegiatan pembangunan jalan di Kelurahan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan talud / saluran di Kelurahan Pelaksanaan hasil musrenbang	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	939.997.015	854.542.741	854.542.741	KELURAHAN CANDI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		jumlah kegiatan pembangunan jalan dan talud/saluran di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	3%	3%	3%	1.033.089.173	939.171.975	939.171.975	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	549.006.026	499.096.387	187.497.549	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di Kelurahan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	262.959.967	239.054.515	212.054.506	KELURAHAN JATINGALEH
		JUMLAH KEGIATAN NON FISIK HASIL MUSRENBANG DI KELURAHAN	11 KEGIATAN	11 KEGIATAN	11 KEGIATAN	241.215.887	219.287.170	193.544.442	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di Kelurahan Tegalsari	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	268.035.208	243.668.371	211.335.956	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Kegiatan Fisik Non Fisik hasil Musrenbang di Kelurahan Kaliwuru	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	238.331.649	216.665.135	175.906.744	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di Kelurahan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	244.628.971	222.389.974	186.390.683	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		jumlah kegiatan non fisik hasil Musrenbang di Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	289.483.766	263.167.060	230.375.698	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di Kelurahan	5%	5%	5%	308.141.200	280.128.364	243.196.819	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					1.000.218.320	909.289.382	909.289.382	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah kegiatan lembaga masyarakat Kelurahan (LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT)	340 kegiatan	340 kegiatan	340 kegiatan	109.078.345	99.162.132	99.162.132	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	891.139.975	810.127.250	810.127.250	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	340.711.300	309.737.545	303.669.182	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					340.711.300	309.737.545	303.669.182	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	50%	50%	50%	340.711.300	309.737.545	303.669.182	KECAMATAN CANDISARI
7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN BANYUMANIK					54.313.096.402	49.246.024.000	47.247.941.532	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18.314.554.677	16.536.495.160	15.549.617.732	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN BANYUMANIK)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.414.555	9.467.777	9.467.777	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renja dan renstra kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.933.795	3.576.177	3.576.177	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen RKA dan DPA kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.286.450	1.169.500	1.169.500	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.313.950	1.194.500	1.194.500	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.300.200	1.182.000	1.182.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.300.200	1.182.000	1.182.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	446.050	405.500	405.500	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJP kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	833.910	758.100	758.100	KECAMATAN BANYUMANIK
		Dokumen LKPJ kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.915.572.550	12.650.520.500	12.591.654.532	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13.443.993.200	12.221.812.000	12.223.729.532	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	100%	469.656.000	426.960.000	367.440.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan akhir tahun kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.389.850	1.263.500		KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosisi realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	533.500	485.000	485.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.250.221.233	1.966.792.030	1.892.945.454	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	30.649.696	27.863.360	14.488.920	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	1.307.325.015	1.188.477.286	1.166.101.216	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	94.600.000	86.000.000	86.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	42.725.874	38.841.704	30.070.238	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan jauman rapat	100%	100%	100%	63.041.000	57.310.000	81.850.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koodinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%	71.081.560	64.619.600	10.755.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	554.048.088	503.680.080	503.680.080	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					91.973.620	83.612.382	83.612.382	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					91.973.620	83.612.382	83.612.382	KECAMATAN BANYUMANIK
		pengadaan kendaraan dinas dan operasional roda 3	3 unit	3 unit	3 unit				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.534.717	182.304.288	149.747.114	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lengganan Rekening listrik, telepon, koran dan air	100%	100%	100%	106.154.717	96.504.288	50.947.114	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	94.380.000	85.800.000	98.800.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.845.838.002	1.643.798.183	822.190.473	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%	461.760.482	419.782.256	203.390.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan ringan/ sedang gedung kantor	100%	100%	100%	593.310.000	539.372.727	64.425.273	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	572.740.520	520.673.200	518.145.200	KECAMATAN BANYUMANIK
		Pemeliharaan rutin /berkala Rumah Dinas	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	memenuhan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	180.367.000	163.970.000	36.230.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	15.231.981.778	13.830.837.980	13.892.485.186	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					21.230.000	19.300.000	8.160.909	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	memenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	100 persen	21.230.000	19.300.000	8.160.909	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					14.511.349.173	13.183.044.703	13.220.631.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kegiatan pembinaan aparaturnya kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100%	100%	100%	588.610.000	535.100.000	575.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Pelayanan administrasi di kantor kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	944.680.000	858.800.000	852.569.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.111.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	570.460.000	518.600.000	518.600.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.374.340.000	1.249.400.000	1.249.400.000	KELURAHAN NGESREP
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.665.400.000	1.514.000.000	1.514.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.166.440.000	1.060.400.000	1.060.400.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	2.247.520.000	2.043.200.000	2.043.200.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.111.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	2.123.639.873	1.930.581.703	1.930.582.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	778.360.000	707.600.000	711.517.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	819.899.300	745.363.000	745.363.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					699.402.605	628.493.277	663.693.277	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bimbingan anggota Linmas kecamatan kelurahan	50 orang	50 orang	50 orang	691.342.605	628.493.277	663.693.277	KECAMATAN BANYUMANIK
		monotoring pengendalian aset	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		optimalisasi PBB	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan	12 kali	12 kali	12 kali				KECAMATAN BANYUMANIK
		Penanggulangan kemiskinan Gerbang Hebat kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan				KECAMATAN BANYUMANIK
		peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		presentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tetangani	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		Prosentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	20.590.510.946	18.718.646.314	17.631.001.341	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					18.966.697.020	17.242.451.836	16.218.655.136	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dokumen skala prioritas pembangunan kelurahan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	72.106.225	65.551.114	65.551.114	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	pembangunan fisik prioritas tahun berkenana di kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	11.473.000.000	10.430.000.000	10.418.038.182	KECAMATAN BANYUMANIK
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	314.600.000	286.000.000	286.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	347.600.000	316.000.000	316.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	327.800.000	298.000.000	298.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	319.000.000	290.000.000	290.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	347.600.000	316.000.000	316.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	314.600.000	286.000.000	286.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	325.600.000	296.000.000	296.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	335.776.018	305.250.925	305.251.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	333.300.000	303.000.000	303.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100%	100%	100%	307.781.100	279.801.000	279.801.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pembangunan non fisik prioritas tahun berkenana di kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	926.689.968	842.445.425	65.528.840	KECAMATAN BANYUMANIK
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	262.900.000	239.000.000	225.746.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	234.520.000	213.200.000	191.301.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	245.080.000	222.800.000	204.604.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	272.360.000	247.600.000	217.560.000	KELURAHAN NGESREP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	257.620.000	234.200.000	206.737.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	253.660.000	230.600.000	221.676.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	363.440.000	330.400.000	294.573.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	251.900.000	229.000.000	213.272.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	300.924.109	273.567.372	232.765.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	225.720.000	205.200.000	192.644.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	260.519.600	236.836.000	226.607.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					1.623.813.926	1.476.194.478	1.412.346.205	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	penenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	100 persen	121.057.893	110.052.630	110.052.630	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bimbingan anggota Linmas kecamatan kelurahan	50 orang	50 orang	50 orang	1.502.756.033	1.366.141.848	1.302.293.575	KECAMATAN BANYUMANIK
		Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan	12 kali	12 kali	12 kali				KECAMATAN BANYUMANIK
		Penanggulangan kemiskinan Gerbang Hebat kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan				KECAMATAN BANYUMANIK
		presentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tetangani	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100%	100%	100%				KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	176.049.001	160.044.546	174.837.273	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					176.049.001	160.044.546	174.837.273	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam gangguan trantibmas	100%	100%	100%	176.049.001	160.044.546	174.837.273	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN NGALIYAN					56.496.145.300	48.553.025.000	48.081.712.690	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN NGALIYAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.944.932.200	15.728.502.000	16.518.835.290	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN NGALIYAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(Ngaliyan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.922.500	16.675.000	16.675.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.167.000	1.970.000	1.970.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.547.500	3.225.000	3.225.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Dokumen RKA/DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.811.500	3.465.000	3.465.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.085.500	2.805.000	2.805.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.887.500	2.625.000	2.625.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.633.500	1.485.000	1.485.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.000	1.100.000	1.100.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.313.784.000	12.103.440.000	13.111.527.690	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Ngaliyan	100%	100%	100%	12.734.249.000	11.576.590.000	12.605.197.690	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	100%	100%	578.028.000	525.480.000	504.960.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	407.000	370.000	370.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.980.621.300	2.152.383.000	1.974.079.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	8.800.000	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitas Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	100%	100%	648.819.600	589.836.000	497.200.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	50.270.000	45.700.000	45.700.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	12.808.400	11.644.000	13.854.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Penggandaan yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Jamuan Rapat	100%	100%	100%	62.040.000	56.400.000	56.400.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilakukan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	182.383.300	165.803.000	57.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.402.500.000	1.275.000.000	1.295.925.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.559.600	143.236.000	122.007.600	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Rekening Telepon, Air, Listrik dan Koran	100%	100%	100%	157.559.600	143.236.000	122.007.600	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.469.044.800	1.312.768.000	1.294.546.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	189.558.600	172.326.000	172.326.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	100%	100%	440.143.000	400.130.000	399.730.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%	712.800.000	648.000.000	692.800.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Rumah Dinas yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	101.543.200	92.312.000	29.690.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	17.093.484.100	15.094.721.000	15.130.106.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					70.463.200	9.512.000	6.041.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	10.463.200	9.512.000	6.041.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	76 kegiatan	76 kegiatan	76 kegiatan				KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kali	4 kali	4 kali				KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Jumlah RW di Kelurahan yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	80%	80%	80%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					16.357.915.000	14.501.050.000	14.573.400.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	974.215.000	885.650.000	958.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6500 Pelayanan	6500 Pelayanan	6500 Pelayanan				KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 Buah	2 Buah	2 Buah				KECAMATAN NGALIYAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	2.413.840.000	2.194.400.000	2.194.400.000	KELURAHAN BRINGIN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.970.320.000	1.791.200.000	1.791.200.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	612.040.000	556.400.000	556.400.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.457.500.000	1.325.000.000	1.325.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	653.620.000	594.200.000	594.200.000	KELURAHAN WATES
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.984.180.000	1.803.800.000	1.803.800.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	2.108.920.000	1.917.200.000	1.917.200.000	KELURAHAN WONOSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.083.280.000	984.800.000	984.800.000	KELURAHAN PODOREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.700.000.000	1.413.200.000	1.413.200.000	KELURAHAN PURWOYOSO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	1.300.000.000	1.035.200.000	1.035.200.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					665.105.900	584.159.000	550.665.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3900 Angka	3900 Angka	3900 Angka	642.574.900	584.159.000	550.665.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan				KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Jumlah Aset yang Tercatat dan Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se-Kecamatan Tahun Berkenaan	85%	85%	85%				KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang Tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	60%	60%	60%				KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	21.222.439.000	17.515.902.000	16.222.571.400	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 %	95.00 %	95.00 %				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					20.673.539.000	17.016.902.000	15.723.571.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	165 Lokasi	165 Lokasi	165 Lokasi	67.306.800	61.188.000	18.255.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	11.656.234.700	10.596.577.000	10.081.916.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Bringin	15 Paket	15 Paket	15 Paket	300.080.000	272.800.000	272.800.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Kalipancur	15 Paket	15 Paket	15 Paket	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Ngaliyan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	314.754.000	286.140.000	286.140.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wates	15 Paket	15 Paket	15 Paket	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Tambakaji	15 Paket	15 Paket	15 Paket	293.700.000	267.000.000	267.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Podorejo	15 Paket	15 Paket	15 Paket	292.600.000	266.000.000	266.000.000	KELURAHAN PODOREJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Purwoyoso	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1.279.000.000	273.820.000	213.820.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	1.005.000.000	277.092.000	277.092.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	919.750.700	836.137.000	323.234.400	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan				KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Bringin	15 Paket	15 Paket	15 Paket	342.100.000	311.000.000	294.200.000	KELURAHAN BRINGIN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Kalipancur	15 Paket	15 Paket	15 Paket	303.380.000	275.800.000	259.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KALIPANCUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	275.660.000	250.600.000	211.251.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Ngaliyan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	271.986.000	247.260.000	238.860.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wates	5 Paket	5 Paket	5 Paket	271.040.000	246.400.000	210.115.000	KELURAHAN WATES
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN WATES
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Tambakaji	15 Paket	15 Paket	15 Paket	385.440.000	350.400.000	350.400.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wonosari	15 Paket	15 Paket	15 Paket	363.440.000	330.400.000	320.950.000	KELURAHAN WONOSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Podorejo	15 Paket	15 Paket	15 Paket	294.140.000	267.400.000	263.200.000	KELURAHAN PODOREJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Purwoyoso	15 Paket	15 Paket	15 Paket	308.638.000	280.580.000	274.630.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Gondoriyo	15 Paket	15 Paket	15 Paket	281.938.800	256.308.000	230.708.000	KELURAHAN GONDORIYO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan00	100%	100%	100%				KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					548.900.000	499.000.000	499.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	108.900.000	99.000.000	99.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	440.000.000	400.000.000	400.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	235.290.000	213.900.000	210.200.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					235.290.000	213.900.000	210.200.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	80%	80%	80%	235.290.000	213.900.000	210.200.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN GAYAMSARI					36.738.735.189	30.871.657.000	30.403.539.809	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.523.929.819	11.091.390.744	11.562.340.874	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GAYAMSARI)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.594.438	18.394.944	18.394.944	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.744.759	7.949.781	7.949.781	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah dokumen LKPI Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.172.500	1.975.000	1.975.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.282.500	2.075.000	2.075.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.117.500	1.925.000	1.925.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.097.700	1.907.000	1.907.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.819.479	2.563.163	2.563.163	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.933.768.641	9.030.698.764	9.562.581.573	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	9.480.093.700	8.618.267.000	9.150.149.809	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	447.678.000	406.980.000	406.980.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.168.621	3.789.655	3.789.655	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	803.580	730.527	730.527	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.024.740	931.582	931.582	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.329.883.977	1.208.985.433	1.157.732.754	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan	100%	100%	100%	13.761.930	12.510.845	12.510.845	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%	90.907.269	82.642.972	82.642.972	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis	100%	100%	100%	28.125.081	25.568.255	26.610.576	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	16.714.159	15.194.690	11.194.690	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan rapat	100%	100%	100%	123.255.000	112.050.000	112.050.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	98.158.500	89.235.000	40.940.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Tertib capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	958.962.038	871.783.671	871.783.671	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					136.290.000	123.900.000	105.900.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Listrik, Telepon, Air dan langganan Surat Kabar	100%	100%	100%	136.290.000	123.900.000	105.900.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1.101.392.763	709.411.603	717.731.603	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	111.496.000	101.360.000	101.360.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	227.361.080	206.691.891	206.691.891	KECAMATAN GAYAMSARI
		perbaikan sedang / berat gedung kantor	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	rumah dinas yang dipelihara	100%	100%	100%	398.474.683	362.249.712	385.569.712	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	43.021.000	39.110.000	24.110.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %	9.263.081.392	7.822.149.130	7.832.182.775	
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>					8.839.660.000	7.438.129.683	7.427.343.328	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100%	100%	100%	611.160.000	555.600.000	589.345.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan				KECAMATAN GAYAMSARI
		Piket pelayanan publik dan Penyusunan laporan kinerja OPD	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.306.050.000	858.759.952	837.375.271	KELURAHAN TAMBAKREJO
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.731.500.000	1.148.550.803	1.148.550.803	KELURAHAN KALIGAWA
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.011.650.000	871.398.081	870.788.081	KELURAHAN SAWAH BESAR
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	749.400.000	594.199.650	593.949.650	KELURAHAN SIWALAN
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.011.650.000	835.218.905	832.765.847	KELURAHAN SAMBIREJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.331.400.000	1.539.205.206	1.528.527.671	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%	1.036.850.000	1.035.197.086	1.026.041.005	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					423.421.392	384.019.447	404.839.447	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Inventarisasi dan monitoring aset Kecamatan	16 Bidang Tanah	16 Bidang Tanah	16 Bidang Tanah	422.421.392	384.019.447	404.839.447	KECAMATAN GAYAMSARI
		Optimalisasi pemungutan PBB	85%	85%	85%				KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	55.00 %	14.688.402.532	11.718.733.993	10.752.747.105	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95.00 %	95.00 %	95.00 %				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					13.884.517.550	10.987.929.464	10.060.812.578	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	31.609.761	28.736.146	18.986.146	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	3.628.100.300	3.298.273.000	3.293.725.537	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tambakrejo pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.213.000.000	992.807.377	989.845.322	KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kaligawe pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.066.000.000	728.884.725	726.932.401	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sawah Besar pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.012.000.000	455.441.279	454.341.279	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Siwalan pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.041.000.000	747.005.464	744.805.464	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sambirejo pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.003.000.000	591.591.683	590.044.561	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pandean Lamper pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.092.000.000	871.753.967	868.706.727	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Gayamsari pelaksanaan Hasil Musrenbang	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.001.000.000	730.883.560	728.975.742	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	220 Kegiatan	220 Kegiatan	220 Kegiatan	824.321.301	749.383.001	207.597.223	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	85 Kegiatan	85 Kegiatan	85 Kegiatan				KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tambakrejo pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	280.535.938	255.032.671	216.181.407	KELURAHAN TAMBAKREJO
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kaligawe pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	284.860.919	258.964.472	196.306.796	KELURAHAN KALIGAWA
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sawah Besar pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	284.897.404	258.997.640	212.766.640	KELURAHAN SAWAH BESAR
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Siwalan pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	257.174.375	233.794.886	188.916.886	KELURAHAN SIWALAN
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN SIWALAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sambirejo pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	280.961.353	255.419.412	208.279.592	KELURAHAN SAMBIREJO
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pandean Lamper pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	294.404.910	267.640.827	200.912.602	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Gayamsari pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	100%	289.651.289	263.319.354	213.488.253	KELURAHAN GAYAMSARI
		oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100%	100%	100%				KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					803.884.982	730.804.529	691.934.527	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Fasilitasi FKK	100%	100%	100%	112.644.980	102.404.527	91.934.527	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	220 Kegiatan	220 Kegiatan	220 Kegiatan				KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
		Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan				KECAMATAN GAYAMSARI
		Pembinaan Administrasi, Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK, PKK dan Karang Taruna)	100%	100%	100%				KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi FKK	100%	100%	100%	691.240.002	628.400.002	600.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	263.321.446	239.383.133	256.269.055	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					263.321.446	239.383.133	256.269.055	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di Kecamatan	100%	100%	100%	263.321.446	239.383.133	256.269.055	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.0.00.0.00.16.00	KECAMATAN PEDURUNGAN					80.803.638.351	61.162.048.000	59.104.196.738	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	22.326.171.700	20.272.297.000	19.695.230.549	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN PEDURUNGAN)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					58.901.400	29.324.000	12.670.782	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.726.400	7.024.000	1.995.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.000.000	1.995.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.538.600	4.126.000	1.995.400	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.537.500	4.125.000	1.994.400	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.687.100	4.261.000	2.002.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.266.800	4.788.000	2.688.982	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.423.291.930	15.839.356.300	15.572.586.516	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	14 kali	16.752.756.900	15.229.779.000	14.971.927.734	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14 kali	14 kali	14 kali				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PPK SKPD, KPA, PPTK, bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	660.741.620	600.674.200	595.797.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.339.400	4.854.000	2.854.091	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.454.010	4.049.100	2.007.691	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.766.194.530	2.514.722.300	2.314.636.487	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun yang berkenaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.050.300	22.773.000	22.773.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Kantor Yang Mendukung Kerja Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	282.189.600	256.536.000	209.712.364	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60.957.710	55.416.100	45.416.100	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	55.113.300	50.103.000	35.103.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum tamu kegiatan dan rutin kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	123.453.000	112.230.000	105.587.203	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	54.996.920	49.997.200	14.997.200	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan pelaksanaan SPBE	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.164.433.700	1.967.667.000	1.881.047.620	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					154.015.400	140.014.000	139.814.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	meja eselon	2 unit	2 unit	2 unit				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Meja Rapat	10 unit	10 unit	10 unit				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitas Peralatan Kantor Yang Mendukung Kerja Pegawai Pengadaan Tahun Berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	154.015.400	140.014.000	139.814.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.267.440	232.970.400	182.970.401	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah re kening telpon, air, listrik dan koran kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	256.267.440	232.970.400	182.970.401	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.667.501.000	1.515.910.000	1.472.552.363	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	251.222.400	228.384.000	228.384.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional ang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	558.451.300	507.683.000	505.010.363	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Komponen Gedung Yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	655.250.200	595.682.000	585.910.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	202.577.100	184.161.000	153.248.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Perlengkapan Gedung kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitas penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	0.00 kelurahan	33.688.087.372	19.333.042.565	19.135.978.938	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85.00 %	85.00 %	85.00 %				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					327.705.400	297.914.000	43.064.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	327.705.400	297.914.000	43.064.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Laporan Hasil Movev	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Bantuan Transpot RT RW , PKK RT , RW operasional pelayanan kantor kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN KALICARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					32.679.257.572	18.415.924.565	18.460.179.883	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	758.340.000	689.400.000	767.575.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	40000 Pelayanan	40000 Pelayanan	40000 Pelayanan				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan muktharjo Kidul	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	3.425.620.000	3.114.200.000	3.104.200.000	KELURAHAN MUKTHARJO KIDUL
		operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan Tlogosari Kulon	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	3.938.921.975	3.580.838.159	3.580.838.159	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		transpot RT RW PKK RT RW	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100%	100%	100%	722.920.000	657.200.000	657.200.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Bantuan Transpot RT RW , PKK RT , RW	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.471.722.183	1.337.929.257	1.337.929.257	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Operasional pelayanan kantor kelurahan Tlogomulyo	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				KELURAHAN TLOGOMULYO
		operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.023.676.341	930.614.855	921.658.116	KELURAHAN KALICARI
		transpot RT RW PKK RT W	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN KALICARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongansari	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	1.557.316.523	1.415.742.294	1.415.742.294	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		transpot RT RW PKK RT RW	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Tengah	100%	100%	100%	1.734.700.000	1.577.000.000	1.572.616.057	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Bantuan Transpot RT RW , PKK RT , RW	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.027.840.000	934.400.000	934.400.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Lor	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.457.500.000	1.325.000.000	1.325.000.000	KELURAHAN GEMAH
		transpot RT RW PKK RT RW	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN GEMAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Palebon	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	1.332.760.000	1.211.600.000	1.202.021.000	KELURAHAN PALEBON
		transpot RT RW PKK RT RW	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN PALEBON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul	100%	100%	100%	1.194.160.000	1.085.600.000	1.085.600.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan Penggaron Kidul	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	612.040.000	556.400.000	555.400.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					681.124.400	619.204.000	632.735.055	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Di Kecamatan dan Kelurahan	22 Bidang	22 Bidang	22 Bidang	681.124.400	619.204.000	632.735.055	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon, dll. Yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	156 Kegiatan	156 Kegiatan	156 Kegiatan				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Jumlah RW di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	90%	90%	90%				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Presentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se-Kecamatan Tahun Berkenaan	80%	80%	80%				KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Presentase Jumlah Titik Pantau Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani	100%	100%	100%				KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00 %	95.00 %	95.00 %	24.384.364.779	21.188.513.435	19.957.191.011	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					23.141.527.579	20.058.661.435	18.849.089.011	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	69.646.500	63.315.000	63.315.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan Di Kecamatan dan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6.851.895.600	6.228.996.000	6.001.476.530	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Kegiatan Pembangunan fisik di Kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	10 PAKET	10 PAKET	10 PAKET	462.880.000	420.800.000	418.397.322	KELURAHAN Muktiharjo Kidul
		Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	7 PAKET	7 PAKET	7 PAKET	751.849.998	683.499.998	680.553.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Pembangunan Sarpras usulan musrenbang	7 paket	7 paket	7 paket	1.042.800.000	948.000.000	943.044.190	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.096.453.069	996.775.517	989.666.227	KELURAHAN TLOGOMULYO
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				KELURAHAN TLOGOMULYO
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	765.557.300	695.961.182	691.422.155	KELURAHAN KALICARI
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN KALICARI
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Plamongansari	15 PAKET	15 PAKET	15 PAKET	1.031.188.290	937.443.900	932.574.900	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Pedurungan Tengah	4 PAKET	4 PAKET	4 PAKET	889.526.440	808.660.400	737.964.332	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Pedurungan Lor	14 PAKET	14 PAKET	14 PAKET	833.030.000	757.300.000	750.871.533	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Gemah	7 paket	7 paket	7 paket	1.150.545.000	1.045.950.000	1.041.828.648	KELURAHAN GEMAH
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Palebon	11 PAKET	11 PAKET	11 PAKET	896.830.000	815.300.000	811.047.498	KELURAHAN PALEBON
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Pedurungan Kidul	4 Paket	4 Paket	4 Paket	875.600.000	796.000.000	790.940.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Pembangunan Sarpras Usulan Musrenbang 7 Paket	7 paket	7 paket	7 paket	1.051.380.000	955.800.000	952.080.527	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Media Pembina Dan Pemberdayaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	864.627.500	786.025.000	93.311.514	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di kecamatan dan Kelurahan	203 Kegiatan	203 Kegiatan	203 Kegiatan				KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%				KECAMATAN PEDURUNGAN
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	354.200.000	322.000.000	304.500.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	362.958.027	329.961.843	300.855.043	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		FKK	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	261.800.000	238.000.000	222.286.800	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Karang Taruna	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		LPMK	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Pemberdayaan Masyarakat	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Pemberdayaan Perempuan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		PKK	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Posyandu	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Kegiatan Pembangnan fisik di Kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang	7 Paket	7 Paket	7 Paket	281.264.749	255.695.226	235.397.844	KELURAHAN TLOGOMULYO
		kegiatan pembangunan fisik di kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	5 LEMBAGA	5 LEMBAGA	5 LEMBAGA	262.706.359	238.823.963	238.823.963	KELURAHAN KALICARI
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Plamongsari	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	274.025.187	249.113.806	238.924.575	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	287.803.560	261.639.600	252.509.600	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pedurungan Tengah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	257.400.000	234.000.000	217.054.238	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Presentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	4 paket	4 paket	4 paket	294.140.000	267.400.000	250.765.000	KELURAHAN GEMAH
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	265.320.000	241.200.000	240.540.000	KELURAHAN PALEBON
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN				KELURAHAN PALEBON
		Presentase Kondisi Sarpras Kelurahan dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Kelurahan Pedurungan Kidul	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	282.260.000	256.600.000	239.914.936	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Kegiatan lembaga kemasyarakatan	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	246.840.000	224.400.000	209.023.636	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan				KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.242.837.200	1.129.852.000	1.108.102.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	108.900.000	99.000.000	99.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.133.937.200	1.030.852.000	1.009.102.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %	90.00 %	90.00 %	405.014.500	368.195.000	315.796.240	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					405.014.500	368.195.000	315.796.240	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan keamanan dan ketertiban	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	405.014.500	368.195.000	315.796.240	KECAMATAN PEDURUNGAN
8.01.0.00.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23.495.806.607	16.493.456.000	18.341.175.374	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23.495.806.607	16.493.456.000	18.341.175.374	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.880.402.618	6.236.729.648	6.147.160.639	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kesbangpol)	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.891.658	8.083.324	8.083.324	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja OPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.666.419	3.333.108	3.333.108	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah dokumen renstra yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni yang disusun,	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	420.220	382.018	382.018	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Anggaran Perubahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	405.720	368.836	368.836	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Anggaran Murni yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	420.220	382.018	382.018	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Anggaran Perubahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	405.720	368.836	368.836	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.573.355	3.248.508	3.248.508	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.146.788.392	4.678.898.537	4.832.561.911	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100%	4.879.453.700	4.435.867.000	4.594.600.374	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tunjangan kinerja PA, PPK,PPTK,Bendahara dan Bendahara Pembantu yang dibayarkan	100%	100%	100%	255.387.000	232.170.000	227.100.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.761.611	2.510.555	2.510.555	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.630.420	6.936.745	6.936.745	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.555.661	1.414.237	1.414.237	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					32.296.160	29.360.145	25.295.145	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sumber daya aparatur	60 orang	60 orang	60 orang	32.296.160	29.360.145	25.295.145	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					979.670.052	890.609.137	637.070.681	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia	100%	100%	100%	6.225.043	5.659.130	5.659.130	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah ketersediaan terhadap peralatan rumah tangga dan alat-alat kebersihan	100%	100%	100%	39.030.262	35.482.056	35.482.056	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	100%	141.889.946	128.990.860	85.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan terhadap barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	39.625.009	36.022.735	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	100%	100%	100%	1.363.600	1.239.636	1.239.636	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai, keperluan rapat, maupun tamu	100%	100%	100%	123.640.000	112.400.000	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dibayarkan	100%	100%	100%	415.334.700	377.577.000	211.138.675	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	212.561.492	193.237.720	233.551.184	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					96.330.245	87.572.950	135.044.023	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pemenuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	51.595.632	46.905.120	94.376.193	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	44.734.613	40.667.830	40.667.830	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.934.240	191.758.400	166.558.400	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%	100%				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran terhadap jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	112.198.240	101.998.400	72.998.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan pembayaran TPHL dan Driver Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	100%	98.736.000	89.760.000	93.560.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					385.491.871	350.447.155	342.547.155	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya	100%	100%	100%	319.432.471	290.393.155	282.493.155	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	perlengkapan gedung/kantor yang terpenuhi kebutuhan dan pemeliharaannya	100%	100%	100%	7.260.000	6.600.000	6.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	58.799.400	53.454.000	53.454.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00 nilai	2.00 nilai	2.00 nilai	814.809.913	564.149.920	507.949.920	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					814.809.913	564.149.920	507.949.920	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta kegiatan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan	100 orang	100 orang	100 orang	555.426.966	504.933.605	468.379.643	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	100 orang	100 orang	100 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta kegiatan pengembangan pembauran kebangsaan	200 orang	200 orang	100 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	100 orang	100 orang	60 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta kegiatan upacara bela negara	500 orang	500 orang	500 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta kegiatan TMMD untuk urusan Wawasan Kebangsaan	150 orang	150 orang	100 orang	65.137.947	59.216.315	39.570.277	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	3.00 %	3.00 %	3.00 %	4.769.513.368	4.096.648.516	5.729.634.516	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemil					4.769.513.368	4.096.648.516	5.729.634.516	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	2.976.049.690	2.705.499.718	4.414.378.437	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah paket pelatihan dan praktek penyelenggaraan pemilihan umum	25 paket	25 paket	paket	1.303.092.549	1.184.629.590	1.137.559.244	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan partai politik	63 orang	63 orang	63 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Toga/ Toma dan Generasi Muda	1000 orang	1000 orang	800 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	jumlah partai politik yang dipantau keberadaan, kepengurusan, maupun aktivitasnya	9 partai politik	9 partai politik	9 partai politik	227.171.129	206.519.208	177.696.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah pemantauan terhadap atribut partai politik dan organisasi kemasyarakatan	24 pantauan	24 pantauan	24 pantauan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah wilayah yang dipantau situasi dan kondisi sosial politiknya	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara	100.00 Organisasi	100.00 Organisasi	100.00 Organisasi	3.748.180.124	3.407.436.476	3.846.436.476	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					3.748.180.124	3.407.436.476	3.846.436.476	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi penerima hibah	5 organisasi	5 organisasi	5 organisasi	3.621.625.865	3.292.387.150	3.703.457.241	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah ormas yang diberdayakan	5 organisasi	5 organisasi	5 organisasi				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah paket kegiatan kerjasama ormas dengan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4 paket	4 paket	4 paket				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
		jumlah topik bahasan dalam upaya menanamkan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai isu globalisasi	10 topik bahasan	10 topik bahasan	10 topik bahasan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdata dan terpantau keberadaan serta aktivitasnya	35 organisasi	35 organisasi	35 organisasi	126.554.259	115.049.326	142.979.235	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan	1.00 Kejadian	1.00 Kejadian	1.00 Kejadian	766.257.405	378.415.823	340.615.823	
8.01.05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>					766.257.405	378.415.823	340.615.823	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta dalam kegiatan Fasilitasi Paguyuban PETAMAS	200 orang	200 orang	80 orang	135.696.277	123.360.252	110.203.753	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal	150 orang	150 orang	70 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah ijin prinsip/ persetujuan pendirian yang diterbitkan berkenaan dengan pendirian rumah ibadah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	280.561.128	255.055.571	230.412.070	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang dilatih sebagai Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan	40 orang	40 orang	40 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mengikuti Dialog Interaktif Kerukunan Umat Beragama	120 orang	120 orang	orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mengikuti Forkonkom tentang P4GN	100 orang	100 orang	100 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mengikuti Workshop P4GN	40 orang	40 orang	40 orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	80.00 %	80.00 %	80.00 %	6.516.643.179	1.810.075.617	1.769.378.000	
8.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>					6.516.643.179	1.810.075.617	1.769.378.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH
			RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	RKPD 2021	APBD INDUK 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta yang mengikuti latihan penanganan konflik sosial	100 orang	100 orang	orang	179.053.348	162.775.771	161.948.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah sosialisasi dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional Bentengi Diri dari COVID-19	48 lokasi	48 lokasi	48 lokasi				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta sosialisasi penguatan pengamanan masyarakat terhadap potensi kerawanan sosial	100 orang	100 orang	100 orang	919.136.492	835.578.629	656.129.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan mengenai bahan pengumpulan dan bahan keterangan tentang potensi kerawanan sosial di masyarakat	100 orang	100 orang	orang				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah rapat koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Semarang	48 kali	48 kali	48 kali				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah wilayah yang mendapatkan sosialisasi mengenai kerawanan sosial	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah dokumen pemantapan kewaspadaan dini masyarakat	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	892.893.339	811.721.217	951.301.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah laporan hasil pemantauan situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang	365 dokumen	365 dokumen	365 dokumen				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah lokasi pantauan dan pendataan terhadap WNA dan Ormas Asing di Kota Semarang	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah pengamanan tertutup yang dijalankan	40 pantuan	40 pantuan	40 pantuan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah tempat hiburan dan keramaian umum yang dipantau	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah wilayah yang dipantau situasi dan kondisi sosial politiknya	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan daerah. Belum berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kondisi yang berpengaruh pada struktur keuangan pada APBD Murni 2021. Adanya penyesuaian pendapatan daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan di tahun 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2021 ini juga disusun sebagai dasar dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang Tahun 2021.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004